



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (KLHS RPJMD) KABUPATEN TANA TIDUNG 2021 - 2026



**KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021**



KLHS RPJMD
Kab. Tana Tidung 2021-2026

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

KLHS- RJPMD KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN 2021-2026

TIM PENYUSUN

**KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (POKJA KLHS RPJMD)
KABUPATEN TANA TIDUNG, TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

KATA PENGANTAR



BUPATI TANA TIDUNG

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga buku Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik. Buku laporan kajian KLHS RPJMD ini disusun sebagai amanah dari pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD.

KLHS RPJMD ini disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dengan demikian, penyusunan buku laporan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan (TPB) telah menjadi dasar dan terintegrasi ke dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dimaksud meliputi 17 TPB yang ditopang 4 pilar pembangunan yaitu (1) peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, (2) keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, (3) kualitas lingkungan hidup, dan (4) pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang baik.

Buku laporan KLHS RPJMD ini merupakan hasil kerjasama seluruh anggota Tim Kelompok Kerja (POKJA) KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung, pemangku kepentingan, dan juga seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam proses uji publik. Oleh Karena itu, Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas kontribusi dan partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Tim Tenaga Ahli dari Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman atas kerjasama dan peran sertanya sehingga dokumen KLHS RPJMD ini bisa tersusun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk bersama-sama memberikan kontribusi yang terbaik bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Tana Tidung.

Tana Tidung,
Bupati Kabupaten Tana Tidung

IBRAHIM ALI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4. Ruang Lingkup	I-8
1.5. Manfaat Hasil Kajian.....	I-9
1.6. Keluaran (Out-put).....	I-9
1.7. Metodologi	I-9
1.7.1. Mekanisme Penyusunan.....	I-10
1.7.2. Tahapan Pelaksanaan Kajian	I-17
1.7.3. Lokasi dan Waktu Kajian.....	I-18
1.7.4. Biaya Pelaksanaan Kajian	I-20
1.8. Daftar Istilah dan Singkatan	I-20
1.9. Sistematika Penulisan Laporan.....	I-21
BAB II DASAR TEORI	II-1
2.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	II-1
2.1.1. Proses Penyusunan KLHS	II-3
2.1.2. Hasil KLHS	II-5
2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	II-6
2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	II-10
2.4. Muatan KLHS	II-14
2.4.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-14
2.4.2. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup.....	II-15
2.4.3. Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem	II-16



2.4.4.	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	II-17
2.4.5.	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	II-18
2.4.6.	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati	II-19
BAB III	GAMBARAN UMUM DAERAH	III-1
3.1.	Kondisi Geografis	III-1
3.1.1.	Batas dan Luas Wilayah	III-1
3.1.2.	Ketinggian Tempat dan Kemiringan Lereng (Topografi)	III-2
3.1.3.	Geologi.....	III-6
3.1.4.	Nama dan Luas Pulau	III-9
3.1.5.	Hidrologi dan Hidrogeologi	III-9
3.1.6.	Jenis Tanah	III-14
3.1.7.	Klimatologi.....	III-16
3.2.	Bencana Alam	III-21
3.3.	Karakteristik Penggunaan Lahan	III-25
3.3.1.	Tipe Penggunaan Lahan	III-25
3.3.2.	Pola Ruang (RTRW).....	III-25
3.3.3.	Kawasan Hutan	III-26
3.3.4.	Tutupan Lahan.....	III-27
3.3.5.	Kawasan Konservasi	III-28
3.4.	Kondisi Kependudukan	III-35
3.4.1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan	III-35
3.4.2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	III-35
3.4.3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kegiatan	III-36
3.4.4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	III-37
3.5.	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	III-38
3.6.	Pertumbuhan Ekonomi	III-42
3.7.	Pendidikan	III-43
3.8.	Kesehatan	III-50



3.9.	Peribadatan.....	III-51
3.10.	Jalan.....	III-52
3.11.	Listrik	III-54
3.12.	Air Minum.....	III-56
3.13.	Sampah	III-56
3.14.	Kondisi Lingkungan Hidup.....	III-57
3.14.1.	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah	III-57
3.14.2.	Kinerja Jasa Ekosistem.....	III-58
3.14.3.	Resiko Lingkungan Hidup.....	III-64
3.14.4.	Potensi Sumber Daya Alam.....	III-65
3.14.5.	Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	III-70
3.14.6.	Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	III-76
3.14.7.	Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	III-78
3.15.	Keuangan Daerah dalam Pencapaian TPB.....	III-79
3.15.1.	Pendapatan dan Belanja Daerah.....	III-79
3.15.2.	Realisasi Anggaran OPD dalam Pencapaian Target TPB	III-88
3.15.3.	Realisasi Anggaran Filantropi dalam Pencapaian TPB	III-91
3.16.	Peran Para Pihak	III-92
BAB IV	ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	IV-1
4.1.	Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan....	IV-1
4.1.1.	Daftar Panjang (<i>Longlist</i>) Isu Pembangunan Berkelanjutan	IV-1
4.1.2.	Penapisan Isu Pembangunan Berkelanjutan.....	IV-21
4.1.3.	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan.....	IV-24
4.2.	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..	IV-24
4.2.1.	Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung pada Pilar Sosial	IV-31



4.2.2.	Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung pada Pilar Ekonomi	IV-33
4.2.3.	Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung pada Pilar Lingkungan Hidup	IV-34
4.2.4.	Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung pada Pilar Hukum dan Tata Kelola	IV-36
4.2.5.	Capaian Indikator TPB Prioritas	IV-37
BAB V	ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	V-1
5.1.	Capaian Indikator TPB Oleh Perangkat Daerah..	V-1
5.2.	Capaian Indikator TPB oleh OPD pada Pilar Sosial.....	V-3
5.3.	Capaian Indikator TPB oleh OPD pada Pilar Ekonomi	V-5
5.4.	Capaian Indikator TPB oleh OPD pada Pilar Lingkungan Hidup	V-7
5.5.	Capaian Indikator TPB oleh OPD pada Pilar Hukum dan Tata Kelola	V-9
5.6.	Keterlibatan Para Pihak untuk Mendukung OPD dalam Pencapaian Target TPB.....	V-11
5.7.	Proporsi Anggaran dalam Pencapaian Target TPB	V-15
BAB VI	ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI	VI-1
6.1.	Alternatif Skenario dan Rekomendasi Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah.....	VI-1
6.1.1.	Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup.....	VI-1
6.1.2.	Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup	VI-17
6.1.3.	Analisis Dampak KRP terhadap Lingkungan Hidup.....	VI-36
6.2.	Alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan yaitu untuk indikator yang belum mencapai target RPJMN 2019 serta indikator yang belum memiliki data	VI-112
6.2.1.	Alternatif Indikator TPB Belum mencapai Target RPJMN 2019.....	VI-112



6.3. Alternatif skenario untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target RPJMN 2019	VI-159
6.4. Pengintegrasian Indikator TPB/SDGs sebagai KRP ke Dalam RPJMD Kab. Tana Tidung Tahun 2021-2026	VI-159
6.4.1. Integrasi Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap KRP	VI-161
6.4.2. Integrasi Indikator TPB dalam dokumen RPJMD yang terkait langsung DDDT-LH .	VI-164
6.4.3. Integrasi Indikator TPB dalam dokumen RPJMD yang tidak terkait langsung DDDT-LH.....	VI-167
BAB VII KESIMPULAN.....	VII-1
7.1. Kesimpulan.....	VII-1
7.2. Rekomendasi	VII-4
DAFTAR PUSTAKA.....	DP-1
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Indikator-Indikator Kewenangan Kabupaten.....	II-12
Tabel 2.2.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Indikator-Indikator Kewenangan Kabupaten Berdasarkan Pilar	II-14
Tabel 3.1.	Jumlah Desa ¹ /Kelurahan, Luas dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2020	III-2
Tabel 3.2.	Kelas Ketinggian Tempat dan Luasnya di Kabupaten Tana Tidung, 2020.....	III-2
Tabel 3.3.	Kelas Kemiringan Lahan (rata-rata) Kabupaten Tana Tidung	III-4
Tabel 3.4.	Litologi Penyusun Geologi Kabupaten Tana Tidung.....	III-7
Tabel 3.5.	Nama dan Luas Pulau di Kabupaten Tana Tidung	III-9
Tabel 3.6.	Nama dan Luas DAS di Kabupaten Tana Tidung ..	III-10
Tabel 3.7.	Jenis Tanah dan Luasannya di Kabupaten Tana Tidung.....	III-14
Tabel 3.8.	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan, 2020	III-17
Tabel 3.9.	Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari, 2016-2020.....	III-18
Tabel 3.10.	Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Tana Tidung, 2017-2020	III-22
Tabel 3.11.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Tidung, 2018.....	III-25
Tabel 3.12.	Pola Ruang di Kabupaten Tana Tidung.....	III-26
Tabel 3.13.	Tutupan Lahan di Kabupaten Tana Tidung	III-28
Tabel 3.14.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tana Tidung, 2020.....	III-35
Tabel 3.15.	Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Kategori Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan (jiwa), 2020.....	III-36



- Tabel 3.16.** Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020..... III-37
- Tabel 3.17.** Jumlah Penduduk di Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Kelompok Umur (jiwa), 2020 III-38
- Tabel 3.18.** PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (Milyar Rupiah), 2016-2020 III-39
- Tabel 3.19.** PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (milyar Rupiah), 2016-2020 III-40
- Tabel 3.20.** Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (%), 2017-2020..... III-41
- Tabel 3.21.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung, 2016 – 2020 III-42
- Tabel 3.22.** Jumlah Sekolah, Guru¹ dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 2019/2020 dan 2020/2021 III-46
- Tabel 3.23.** Jumlah Sekolah, Guru¹ dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 2019/2020 dan 2020/2021 III-46
- Tabel 3.24.** Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 2019/2020 dan 2020/2021 III-47
- Tabel 3.25.** Jumlah Sekolah, Guru¹ dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 2019/2020 dan 2020/2021 III-47
- Tabel 3.26.** Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 2019/2020 dan 2020/2021 III-48
- Tabel 3.27.** Jumlah Sekolah, Guru¹ dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 2019/2020 dan 2020/2021 III-48



Tabel 3.28. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 2019/2020 dan 2020/2021	III-49
Tabel 3.29. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung, 2019 dan 2020	III-50
Tabel 3.30. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2020	III-50
Tabel 3.31. Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018-2020	III-51
Tabel 3.32. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2020.....	III-52
Tabel 3.33. Panjang Jalan ¹ Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung (km), 2018-2020	III-52
Tabel 3.34. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tana Tidung (km), 2018-2020.....	III-53
Tabel 3.35. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tana Tidung (km), 2018-2020.....	III-54
Tabel 3.36. Daya Terpasang dan Produksi Listrik PT. PLN (Persero) di Kabupaten Tana Tidung, 2016- 2020 .	III-55
Tabel 3.37. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2016-2020.....	III-55
Tabel 3.38. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2020	III-56
Tabel 3.39. Volume Timbunan Sampah Per Kecamatan 2017-2020	III-57
Tabel 3.40. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung Berbasis Jasa Ekosistem.....	III-58
Tabel 3.41. Distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Untuk Sektor Unggulan di Kabupaten Tana Tidung, 2016–2020	III-66
Tabel 3.42. Data Izin Lingkungan Kabupaten Tana Tidung, 2018 – 2020.....	III-72



Tabel 3.43.	Data Rekomendasi Kelayakan Lingkungan untuk Dokumen UKL-UPL Kabupaten Tana Tidung, 2020	III-73
Tabel 3.44.	Data SPPL Kabupaten Tana Tidung, 2020	III-74
Tabel 3.45.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Menurut Jenis Pendapatan (Ribuan Rupiah), 2016 – 2020	III-81
Tabel 3.46.	Kontribusi masing-masing Sumber Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung, 2016 – 2020.....	III-82
Tabel 3.47.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Menurut Jenis Belanja (Ribu Rupiah), 2017–2020.....	III-84
Tabel 3.48.	Pertumbuhan Belanja Barang Modal dan Belanja Pegawai Kabupaten Tana Tidung, 2016 – 2020.....	III-85
Tabel 3.49.	Prosentase Belanja Daerah Dibanding Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung, 2016 – 2020.....	III-86
Tabel 3.50.	Realisasi Penggunaan Anggaran oleh OPD dalam Pencapaian TPB Kabupaten Tana Tidung, 2016 – 2020	III-90
Tabel 3.51.	Target dan Realisasi Anggaran oleh Filantropi	III-91
Tabel 4.1.	Daftar Panjang (<i>Long List</i>) Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung	IV-3
Tabel 4.2.	Daftar Pendek (<i>Shortlist</i>) Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung	IV-21
Tabel 4.3.	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Tana Tidung Terhadap Target Nasional.....	IV-28
Tabel 4.4.	Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Sosial	IV-32
Tabel 4.5.	Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Ekonomi	IV-33
Tabel 4.6.	Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Lingkungan.....	IV-35
Tabel 4.7.	Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Hukum Dan Tata Kelola.....	IV-36
Tabel 4.8.	Indikator TPB Kelompok B (Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target) dan Kelompok C	



	(Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target)	IV-39
Tabel 5.1.	Capaian Indikator TPB Oleh OPD Kabupaten Tana Tidung.....	V-2
Tabel 5.2.	Capaian Indikator TPB OPD Pada Pilar Sosial.....	V-4
Tabel 5.3.	Capaian Indikator TPB Oleh OPD Pada Pilar Ekonomi	V-6
Tabel 5.4.	Capaian Indikator TPB Oleh OPD Pada Pilar Lingkungan Hidup.....	V-8
Tabel 5.5.	Capaian Indikator TPB Oleh OPD Pada Pilar Hukum Dan Tata Kelola	V-10
Tabel 5.6.	Peran Para Pihak yang Membantu OPD dalam Pencapaian Target TPB di Kabupaten Tana Tidung	V-12
Tabel 5.7.	Peran Para Pihak dalam Pencapaian Target TPB di Kabupaten Tana Tidung	V-15
Tabel 6.1.	Indikasi Rencana Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung	VI-2
Tabel 6.2.	Kajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) terhadap Kondisi Lingkungan di Kabupaten Tana Tidung	VI-19
Tabel 6.3.	Proyeksi Kebutuhan Beras Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2026	VI-37
Tabel 6.4.	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Kabupaten Tana Tidung, 2020	IV-38
Tabel 6.5.	Perbandingan Luas Lahan Pertanian Lahan Basah (Sawah Sebagai Lahan Penyediaan Pangan dengan Lahan lainnya di Kabupaten Tana Tidung	VI-42
Tabel 6.6.	Luas Sebaran Tingkat Kelayakan Lahan di Kabupaten Tana Tidung	VI-46
Tabel 6.7.	Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang Di Kabupaten Tana Tidung	VI-48
Tabel 6.8.	Predikat dan Kisaran Nilai IKLH Nasional.....	VI-50
Tabel 6.9.	Nilai IKLH Kabupaten Tana Tidung, 2017-2019...	VI-51
Tabel 6.10.	Kriteria dan Luas Wilayah Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Jasa Ekosistem	VI-51
Tabel 6.11.	Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Dirinci Menurut Kecamatan	VI-55



Tabel 6.12.	Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik Menurut Kecamatan.....	VI-58
Tabel 6.13.	Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Menurut Kecamatan	VI-61
Tabel 6.14.	Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Menurut Kecamatan	VI-64
Tabel 6.15.	Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam Menurut Kecamatan	VI-67
Tabel 6.16.	Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Menurut Kecamatan.	VI-70
Tabel 6.17.	Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Menurut Kecamatan.....	VI-73
Tabel 6.18.	Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Menurut Kecamatan.....	VI-76
Tabel 6.19.	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ecotourism Menurut Kecamatan.....	VI-79
Tabel 6.20.	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer Menurut Kecamatan	VI-81
Tabel 6.21.	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Menurut Kecamatan	VI-84
Tabel 6.22.	Bencana Alam di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019	VI-87
Tabel 6.23.	Bencana Alam di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020	VI-88
Tabel 6.24.	Keanekaragaman Hayati Kelompok Dilindungi di Kabupaten Tana Tidung	VI-93
Tabel 6.25.	Keadaan Iklim di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019	VI-104
Tabel 6.26.	Keadaan Iklim di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020	VI-105
Tabel 6.27.	Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2019	VI-110
Tabel 6.28.	Proyeksi Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	VI-113



Tabel 6.29. Proyeksi Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layak Sumber Air Layak dan Berkelanjutan.....	VI-115
Tabel 6.30. Proyeksi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan.....	VI-117
Tabel 6.31. Grafik Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	VI-120
Tabel 6.32. Proyeksi Persentase Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB	VI-122
Tabel 6.33. Proyeksi Persentase Kabupaten 3T yang Terjangkau Layanan Akses Telekomunikasi Universal dan Internet	VI-125
Tabel 6.34. Proyeksi Persentase Sampah Yang Tertangani	VI-127
Tabel 6.35. Proyeksi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Sederajat	VI-130
Tabel 6.36. Proyeksi Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak di Bawah Lima Tahun (Balita)	VI-133
Tabel 6.37. Proyeksi Persentase Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Tingkat Konsumsi Ikan	VI-135
Tabel 6.38. Proyeksi Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.....	VI-137
Tabel 6.39. Proyeksi Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat	VI-139
Tabel 6.40. Proyeksi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak.....	VI-142
Tabel 6.41. Proyeksi Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan.....	VI-144
Tabel 6.42. Proyeksi Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja.....	VI-147
Tabel 6.43. Proyeksi Proporsi Intensitas Energi Primer	VI-149
Tabel 6.44. Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	VI-151
Tabel 6.45. Jumlah Desa Tertinggal	VI-153
Tabel 6.46. Jumlah Desa Mandiri	VI-156
Tabel 6.47. Integrasi Hasil KLHS Terhadap KRP.....	VI-161



- Tabel 6.48.** Indikator TPK yang Terkait DDDTLH yang Akan Dintegrasikan dalam Dokumen RPJMD Kab. Tana Tidung Tahun 2021-2026 VI-165
- Tabel 6.49.** Indikator TPK yang Tidak Terkait DDDTL yang akan Dintegrasikan dalam Dokumen RPJMD Kab. Tana Tidung Tahun 2021-2026 VI-167



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Pembuat KLHS RPJMD	I-11
Gambar 1.2.	Alur Pikir Identifikasi, Pengumpulan, dan Analisis Data Kajian KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung	I-14
Gambar 1.3.	Alur Pikir Pengkajian KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung	I-15
Gambar 1.4.	Diagram Perumusan Skenario Pembangunan Dalam Kajian KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung .	I-16
Gambar 1.5.	Tahapan Kegiatan Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026.....	I-18
Gambar 1.6.	Lokasi Kegiatan Kajian KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026.....	I-19
Gambar 2.1.	Alur Penyusunan KLHS RPJMD dan Integrasinya Dalam RPJMD	II-2
Gambar 2.2.	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	II-8
Gambar 3.1.	Peta Ketinggian Tempat Kabupaten Tana Tidung	III-3
Gambar 3.2.	Peta Kelas Lereng Kabupaten Tana Tidung	III-5
Gambar 3.3.	Peta Litologi penyusun Batuan Di Kabupaten Tana Tidung.....	III-8
Gambar 3.4.	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tana Tidung	III-11
Gambar 3.5.	Peta Geohidrologi Kabupaten Tana Tidung.....	III-12
Gambar 3.6.	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Tana Tidung	III-13
Gambar 3.7.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Tana Tidung.....	III-15
Gambar 3.8.	Trend Perkembangan Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari, 2016-2020	III-19
Gambar 3.9.	Peta Curah Hujan Kabupaten Tana Tidung.....	III-20
Gambar 3.10.	Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Tidung	III-29
Gambar 3.11.	Peta Pola Ruang Kabupaten Tana Tidung.....	III-30



Gambar 3.12.	Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Tana Tidung	III-31
Gambar 3.13.	Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Tana Tidung	III-32
Gambar 3.14.	Peta Kawasan Konservasi di Kabupaten Tana Tidung	III-33
Gambar 3.15.	Peta PIPIB di Kabupaten Tana Tidung.....	III-34
Gambar 3.16.	Diagram Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung, 2016 - 2020.....	III-43
Gambar 3.17.	Peta Sebaran Izin Pertambangan di Kabupaten Tana Tidung.....	III-68
Gambar 3.18.	Peta Sebaran Ijin Perkebunan	III-69
Gambar 3.19.	Peta Kerentanan (SIDIK) Kabupaten Tana Tidung	III-77
Gambar 3.20.	Grafik Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Dirinci Berdasarkan Sumber Pendapatan, 2017 – 2020	III-82
Gambar 3.21.	Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung, 2016 – 2020	III-82
Gambar 3.22.	Grafik Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung, 2016 – 2020	III-84
Gambar 3.23.	Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan PAD + Dana Perimbangan dengan Pertumbuhan Belanja Daerah.....	III-87
Gambar 3.24.	Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Tana Tidung, 2016 – 2020	III-88
Gambar 4.1.	Konsultasi Publik dalam Rangka Identifikasi Isu Pembangunan Perkelanjutan Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung	IV-2
Gambar 4.2.	Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung.....	IV-29
Gambar 4.3.	Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Kategori A (Indikator Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional)	IV-30
Gambar 4.4.	Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Kategori B (Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional)	IV-30
Gambar 4.5.	Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Kategori C (Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional)	IV-31
Gambar 4.6.	Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Kategori D (Indikator Tidak/Belum Ditemukan Data)	IV-31



Gambar 4.7.	Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Sosial.....	IV-33
Gambar 4.8.	Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Ekonomi	IV-34
Gambar 4.9.	Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Lingkungan.....	IV-36
Gambar 4.10.	Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola	IV-37
Gambar 5.1.	Capaian TPB Oleh OPD Kabupaten Kutai Barat	V-3
Gambar 5.2.	Capaian TPB Oleh OPD Kabupaten Tana Tidung pada Pilar Sosial	V-5
Gambar 5.3.	Capaian TPB Oleh OPD Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Ekonomi.....	V-7
Gambar 5.4.	Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Oleh Organisasi Perangkat Daerah pada Pilar Lingkungan.....	V-9
Gambar 5.5.	Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Oleh Organisasi Perangkat Daerah pada Pilar Hukum dan Tata Kelola	V-11
Gambar 6.1.	Peta Sebaran Lahan Pertanian Pangan Basah (Sawah) Berdasarkan Tutupan Lahan di Kabupaten Tana Tidung.....	VI-43
Gambar 6.2.	Luas Sebaran Kawasan Hutan di Kabupaten Tana Tidung.....	VI-45
Gambar 6.3.	Luas Sebaran Kawasan Gambut di Kabupaten Tana Tidung.....	VI-46
Gambar 6.4.	Luas Sebaran Tingkat Kelayakan Lahan di Kabupaten Tana Tidung.....	VI-47
Gambar 6.5.	Hubungan Struktur , Fungsi dan Jasa Ekosistem, serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	VI-54
Gambar 6.6.	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Tana Tidung	VI-56
Gambar 6.7.	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik Kabupaten Tana Tidung.....	VI-59
Gambar 6.8.	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Tana Tidung.....	VI-62



- Gambar 6.9.** Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Tana Tidung..... VI-65
- Gambar 6.10.** Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam Kabupaten Tana Tidung VI-68
- Gambar 6.11.** Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Tana Tidung VI-71
- Gambar 6.12.** Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Tana Tidung..... VI-74
- Gambar 6.13.** Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara Kabupaten Tana Tidung VI-77
- Gambar 6.14.** Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ecotourism Kabupaten Tana Tidung..... VI-80
- Gambar 6.15.** Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer Kabupaten Tana Tidung VI-82
- Gambar 6.16.** Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kabupaten Tana Tidung. VI-85
- Gambar 6.17.** Peta Ancaman Gempa di Kabupaten Tana Tidung VI-89
- Gambar 6.18.** Peta Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tana Tidung..... VI-90
- Gambar 6.19.** Peta Ancaman Bencana Longsor di Kabupaten Tana Tidung..... VI-91
- Gambar 6.20.** Peta Ancaman Bencana Banjir di Kabupaten Tana Tidung..... VI-92
- Gambar 6.21.** Grafik Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin. VI-113
- Gambar 6.22.** Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layak Sumber Air Layak dan Berkelanjutan VI-115



Gambar 6.23.	Proyeksi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	VI-118
Gambar 6.24.	Grafik Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.....	VI-120
Gambar 6.25.	Grafik Persentase Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB.....	VI-123
Gambar 6.26.	Grafik Persentase Kabupaten 3T yang Terjangkau Layanan Akses Telekomunikasi Universal dan Internet	VI-126
Gambar 6.27.	Grafik Persentase Sampah Yang Tertangani.....	VI-128
Gambar 6.28.	Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.....	VI-130
Gambar 6.29.	Grafik Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak di Bawah Lima Tahun (Balita)	VI-133
Gambar 6.30.	Grafik Persentaser Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Tingkat Konsumsi Ikan	VI-136
Gambar 6.31.	Grafik Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Sederajat	VI-138
Gambar 6.32.	Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Sederajat	VI-140
Gambar 6.33.	Grafik Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak.....	VI-142
Gambar 6.34.	Grafik Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan	VI-145
Gambar 6.35.	Grafik Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	VI-148
Gambar 6.36.	Grafik Proporsi Intensitas Energi Primer	VI-150
Gambar 6.37.	Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit....	VI-152
Gambar 6.38.	Jumlah Desa Tertinggal	VI-154
Gambar 6.39.	Grafik Jumlah Desa Mandiri	VI-156



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka masyarakat yang sejahtera, merata dan berkeadilan perlu diwujudkan. Untuk itu perlu upaya percepatan pembangunan disegala bidang secara terencana dan terarah. Secara umum pengertian pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan dilakukan secara terencana. Dengan demikian pembangunan merupakan upaya untuk mencapai keadaan yang lebih maju dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki. Mengingat sumberdaya yang dimiliki umumnya bersifat terbatas maka dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan secara bertahap melalui perencanaan yang baik dan terarah.

Pembangunan dan lingkungan merupakan hal yang sangat erat kaitannya. Pelaksanaan pembangunan disatu sisi perlu dilakukan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, disisi lain lingkungan hidup tetap harus dijaga agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Persoalannya adalah kadang dalam pelaksanaannya kedua hal tersebut tidak sejalan. Hal ini terjadi bila dalam pelaksanaan pembangunan tidak mempertimbangan keadaan lingkungan hidup yang harus dijaga keberadaannya.

Persoalan-persoalan tersebut di atas mendorong munculnya kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu instrumen bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan



pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 juga wajib disusun KLHS-nya. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Sedangkan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan Bupati dan Wakil Bupati sebagai tahapan implementasi RPJPD Kabupaten Tana Tidung yang telah disusun sebelumnya. Dalam hal ini KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Keberadaan KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Keterkaitan KLHS dengan instrumen pencegahan kerusakan lingkungan lainnya bersifat saling

melengkapi dan saling mendukung, sedangkan peran KLHS pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat menguatkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi: a) RTRW beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah dan b). Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

Kabupaten Tana Tidung merupakan satu dari lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, yang disahkan oleh Presiden RI ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 10 Juli 2007. Luas wilayah Kabupaten Tanah Tidung adalah 4.828,58 km² atau sekitar 6,39 % dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Batas-batas wilayah Kabupaten Tana Tidung yaitu Sebelah Utara dengan Kabupaten Nunukan, Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau, Sebelah Timur dengan Selat Sulawesi, Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan. Kabupaten Tana Tidung saat ini terdiri dari lima kecamatan dan 32 desa dengan ibukota di Tideng Pale.

Visi jangka menengah Kabupaten Tana Tidung sesuai RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 – 2021 adalah Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung melalui Harmonisasi dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya

Alam, Ekonomi Pro rakyat, Budaya Lokal, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menuju Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan.

Dalam Rangka keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung maka akan disusun RPJMD Kabupaten Tanah Tidung tahun 2021 – 2026, bersamaan dengan itu untuk memastikan bahwa rencana program/kegiatan yang tertuang dalam RPJMD tersebut sudah memperhatikan/mempertimbangkan serta menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (lingkungan) maka perlu dilakukan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021 – 2026. Fungsi dari KLHS adalah untuk berkontribusi pada proses pembuatan keputusan sehingga keputusan tersebut berorientasi pada lingkungan hidup yang berkelanjutan. KLHS diperlukan untuk memastikan Kebijakan, Rencana dan Program yang diusulkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung seyogyanya disusun sebelum dirumuskannya RPJMD dan difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang dikaji dalam KLHS RPJMD mencakup isu lingkungan hidup pada empat pilar yaitu pilar ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Melalui kegiatan Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung, diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Analisis pembangunan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa terdapat pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari keseluruhan indikator TPB baik kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, indikator kewenangan pemerintah kabupaten yaitu sejumlah 220 indikator. Seluruh indikator ini berkaitan dengan urusan pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh setiap

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kabupaten. Analisis pembangunan berkelanjutan ini diharapkan dapat diterapkan pada seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Tana Tidung. Harapannya KLHS yang dihasilkan dapat digunakan dan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJMD tersebut. Penyusunan KLHS-RPJMD dilakukan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- 2) Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).



- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 8) Peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional..
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).



- 13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
- 14) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah.
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- 16) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 17) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032.
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.



1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 ini adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung.

Adapun tujuan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 ini adalah :

- 1) Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) terhadap kondisi lingkungan.
- 2) Perumusan alternatif penyempurnaan KRP.
- 3) Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 mencakup uraian antara lain :

- 1) Kondisi Umum Daerah

Pada uraian kondisi umum daerah memuat kondisi geografis dan batas administrasi, bencana alam, karakteristik penggunaan lahan, kondisi kependudukan, pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), pendidikan, kesehatan, peribadatan, sektor jalan, listrik, air minum dan sampah.

- 2) Capaian Indikator TPB

Capaian indikator TPB berupa identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan dan analisis kondisi pencapaian TPB pada pembangunan yang sudah terlaksana dan proyeksi lima tahun kedepan dengan berbagai upaya dan skenario.

- 3) Pembagian Peran

Para pihak yang terlibat dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung ini memiliki peran dan kontribusi berbeda-beda. Para pihak yang terlibat antara lain



pemerintah daerah, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

1.5. Manfaat Hasil Kajian

Hasil Kajian berupa Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026 bermanfaat dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Daerah TPB Kabupaten Tana Tidung. Laporan KLHS RPJMD yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tana Tidung terdiri dari : 1) Gambaran umum kondisi daerah; 2) Permasalahan dan isu strategis daerah; 3) Tujuan; dan 4) Sasaran strategis. Sedang Laporan KLHS RPJMD yang dimanfaatkan dalam penyusunan RAD TPB berupa : 1) Usulan program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; 2) Usulan program dan kegiatan Pemerintah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 3) Usulan program dan kegiatan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.6. Keluaran (Out-Put)

Keluaran dalam pekerjaan ini adalah Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 – 2026 yang terdiri dari : 1) Laporan Pendahuluan, dan 2) Laporan Akhir.

1.7. Metodologi

Metodologi dalam penyusunan laporan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 meliputi: Mekanisme penyusunan laporan, tahapan pelaksanaan kajian, lokasi dan waktu kajian, dan penganggaran pelaksanaan kegiatan kajian KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung.

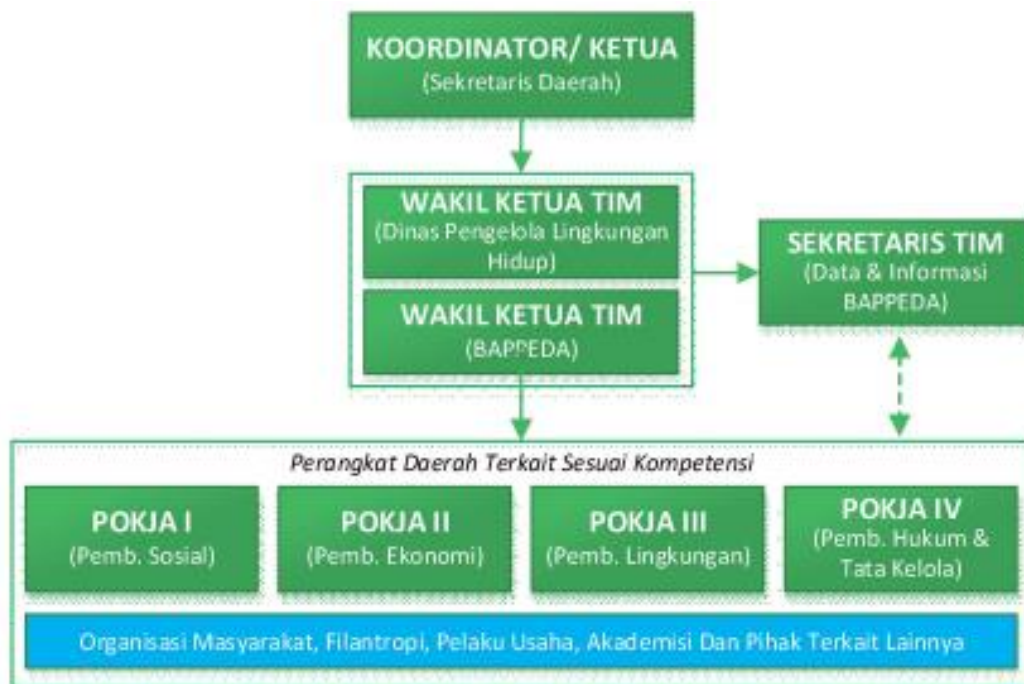
1.7.1. Mekanisme Penyusunan

Mekanisme penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 ini mengacu dari Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah khususnya pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme: 1) Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD; 2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan; 3) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan 4) Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

Secara lebih detail penyusunan KLHS ini mengikuti Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan KLHS RPJMD yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah kementerian Dalam Negeri. Garis-garis besar pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung ini dengan mengacu dari petunjuk pelaksanaan pembuatan KLHS RPJMD yang meliputi : 1) Persiapan, 2). Identifikasi, pengumpulan dan analisis data, 3) Pengkajian, 4) Perumusan scenario dan rekomendasi, 5) Penulisan laporan dan 6) Penjaminan kualitas.

a. Persiapan

Lingkup pekerjaan dalam persiapan ini mencakup pembentukan Tim dan pembekalan Materi. Pembentukan Tim Pembuat (Penyusun) KLHS RPJMD ditetapkan oleh Kepala Daerah yang beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD. Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS RPJMD melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sumber : KepMen LHK, 2018

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pembuat KLHS RPJMD

Penjelasan Struktur Organisasi:

- ☞ Ketua bertindak sekaligus sebagai koordinator tim adalah pejabat yang berwenang mengkoordinasikan program pembangunan daerah dan keuangan daerah yang dilaksanakan dan digunakan oleh perangkat daerah.
- ☞ Wakil ketua tim adalah pejabat berwenang atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan pejabat berwenang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- ☞ Sekretaris Tim pejabat yang berwenang atas penyelenggaraan kesekretariatan perencanaan pembangunan daerah, atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan kesekretariatan tim pembentukan KLHS-RPJMD
- ☞ Empat Anggota Kelompok Kerja:
 - ✓ Pokja I, Pembangunan Sosial; Pokja dengan anggota berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian, ketahanan pangan, sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan atau keluarga berencana.
 - ✓ Pokja II, Pembangunan Ekonomi; Pokja dengan anggota berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan, keuangan daerah, statistik, energi dan sumberdaya mineral, kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata, tenaga kerja, perdagangan,



- perindustrian, Pekerjaan umum, perhubungan, koperasi dan UKM, dan atau komunikasi informatika.
- ✓ Pokja III, Pembangunan Lingkungan; Pokja upaya pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup, dengan anggota berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral, pertanian, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, agraria dan tata ruang, penanggulangan bencana, perindustrian, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.
 - ✓ Pokja IV, Pembangunan Hukum dan Tata Kelola; Pokja penegakan hukum dan azas pemerintahan, dengan anggota berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, sumberdaya manusia, dan kesatuan bangsa/politik, serta dapat berasal dari institusi pusat (vertikal) yang berada di Daerah yaitu kejaksaan, kehakiman, dan/atau kepolisian.

Pembekalan Materi bagi Tim mencakup pemahaman kerangka pikir, konsep dan implementasi tujuan dan indikator pembangunan berkelanjutan, dan keterhubungan dengan pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Materi pembekalan diantaranya mengenai : 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, 4) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Pengkajian KLHS dalam Penyusunan RPJMD.

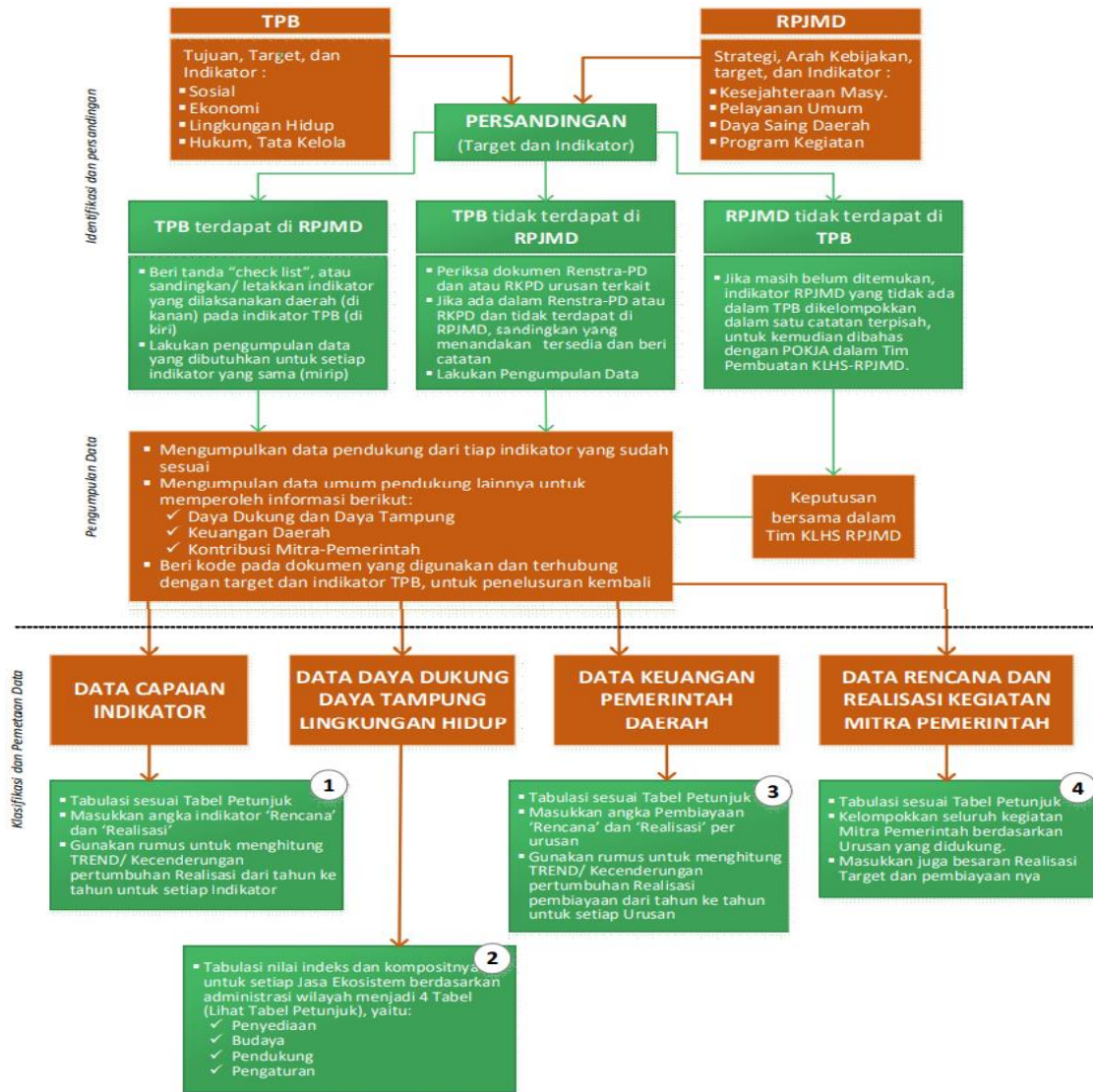
b. Identifikasi, Pengumpulan dan Analisis Data

Identifikasi dilakukan terhadap : (1) Target dan indikator TPB yang relevan dengan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 59

Tahun 2019 dan (2) Target dan indikator Rencana Pembangunan yang diperoleh dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018. Hasil identifikasi tersebut untuk menilai kesesuaian dan relevansi dengan target dan indikator yang terdapat dalam RPJMD. Hal ini penting Karena tidak seluruh daerah memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pelaksanaan indikator TPB. Adanya batasan kewenangan, karakteristik geografis dan demografi daerah menimbulkan kekhususan beberapa indikator untuk dilaksanakan di daerah. Perlunya identifikasi terhadap relevansi indikator TPB bagi masing-masing daerah, dimaksudkan agar program dan kegiatan yang dirumuskan di dalam RPJMD tidak bertentangan dengan kewenangan serta kondisi wilayahnya masing-masing.

Pengumpulan data dari tiap indikator yang sesuai (relevan antara indikator rencana pembangunan daerah dengan TPB). Data yang dikumpulkan sekurang- kurangnya mencakup : 1) RPJMD, 2) RKPD, 3) Laporan Pertanggungjawaban APBD, 4) Daya dukung dan daya tampung dan 5) Data kegiatan Mitra Pemerintah dalam pembangunan. Pengumpulan data tersebut baik dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD)/Konsultasi Publik maupun pengumpulan data secara langsung pada Organisasi Perangkat Daerah.

Analisis data dilakukan dengan melakukan : (1) Pemetaan indikator capaian rencana pembangunan terhadap target TPB, (2) Pemetaan daya dukung dan daya tampung LH terhadap target TPB, (3) Pemetaan keuangan daerah dan (4) Pemetaan Mitra Pemerintah. Adapun alur pikir identifikasi, pengumpulan dan analisa data seperti pada Gambar 1.2.

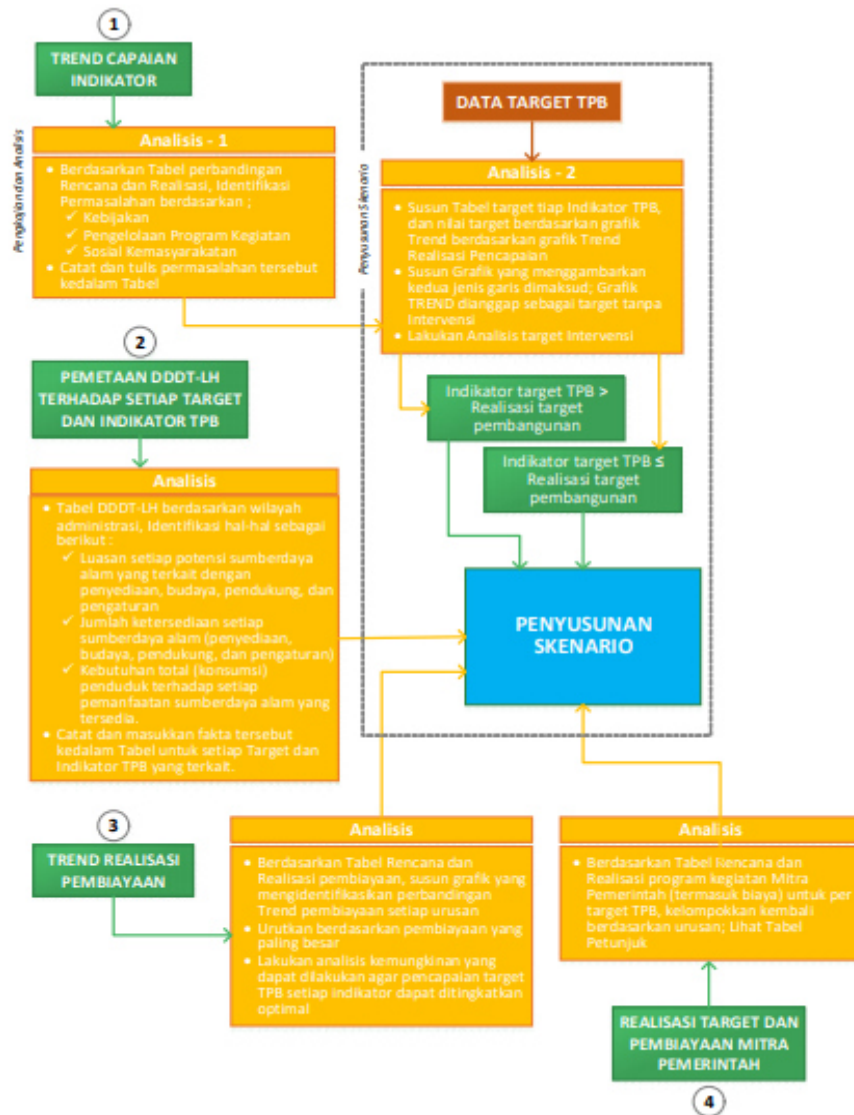


Sumber : Kemen LHK, 2018

Gambar 1.2. Alur Pikir Identifikasi, Pengumpulan, dan Analisis Data Kajian KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung

c. Pengkajian

Pengkajian pembangunan berkelanjutan yang dilakukan meliputi : 1) Kajian rencana pembangunan dengan target TPB, 2) Kajian daya dukung dan daya tampung, 3) Kajian pembiayaan pembangunan daerah dan 4) Kajian program dan kegiatan mitra pemerintah. Pengkajian yang dilakukan menghasilkan gambaran kondisi pencapaian TPB, yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan.



Sumber : KepMen LHK, 2018

Gambar 1.3. Alur Pikir Pengkajian KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung

d. Perumusan Skenario Dan Rekomendasi

Perumusan skenario pembangunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1) Proyeksi kemampuan keuangan, 2) Proyeksi pertumbuhan capaian TPB Daerah, 3) Analisis potensi daerah, 4) Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, 5) Analisis potensi dukungan mitra-pemerintah 6) Membandingkan proyeksi capaian TPB dengan target di RPJMD dan target pencapaian TPB tahun 2030 dan 7) Penentuan Target Berdasarkan Skenario

yang meliputi target skenario tanpa upaya tambahan diambil dari hasil proyeksi capaian TPB dan target skenario dengan upaya tambahan memperhatikan potensi keuangan daerah, dukungan mitra serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan skenario pembangunan tersebut, Tim KLHS RPJMD menentukan skenario yang dapat dijalankan selama tahun 2021–2026. Pilihan skenario tersebut menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan KLHS baik dalam RPJMD maupun untuk dokumen lain seperti Rencana Aksi Daerah TPB.



Sumber : KepMen LHK, 2018

Gambar 1.4. Diagram Perumusan Skenario Pembangunan Dalam Kajian KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung

e. Penulisan Laporan

Laporan KLHS-RPJMD terdiri dari tujuh Bab dan Lampiran, yaitu: Pendahuluan, Dasar Teori, Kondisi Umum Daerah, Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Analisis Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Alternatif, Skenario dan Rekomendasi serta Kesimpulan.

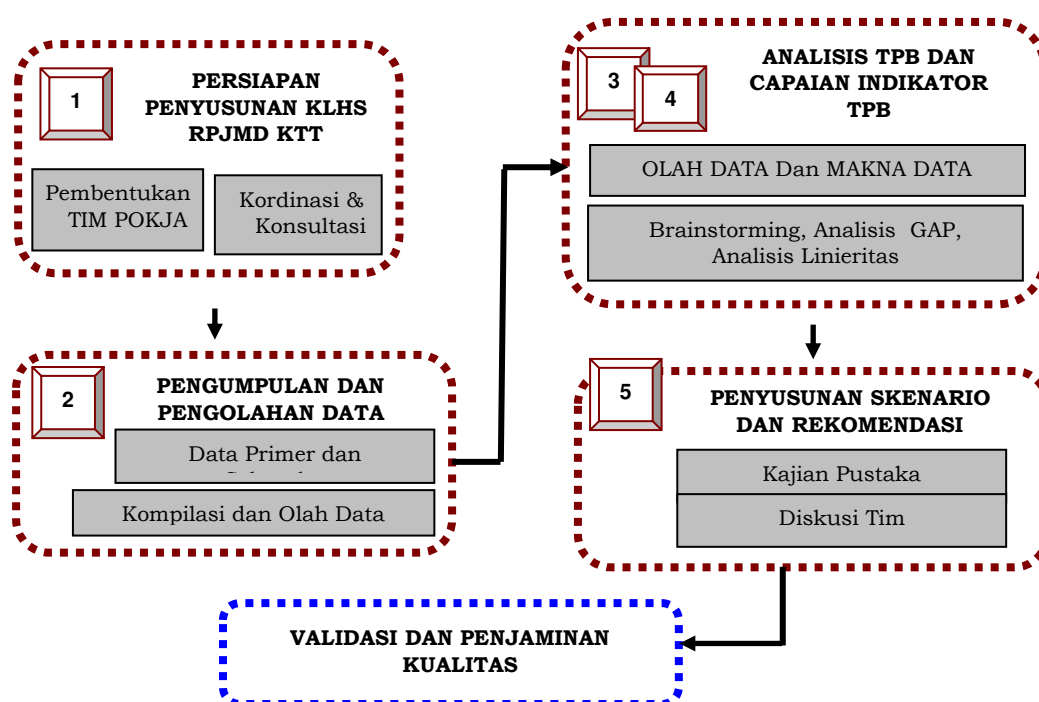
Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung ini terdiri : (1) Laporan Pendahuluan dan (2) Laporan Akhir

f. Penjaminan Kualitas

Kepala Daerah secara mandiri memastikan bahwa seluruh tahapan proses pembuatan telah dilakukan dan kualitas substansi KLHS-RPJMD (isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis) telah mendukung pembangunan berkelanjutan. Kepastian dimaksud dengan didukung oleh bukti-bukti yang telah dilakukan dalam tiap tahapan proses KLHS-RPJMD. Penjaminan ini didokumentasikan dalam bentuk laporan dan kemudian divalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.7.2. Tahapan Pelaksanaan Kajian

Rangkaian tahapan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 melalui proses persiapan, pendataan/identifikasi dan survei, pengolahan data dan analisis, serta penyusunan dokumen, secara rinci seperti pada Gambar 1.5.



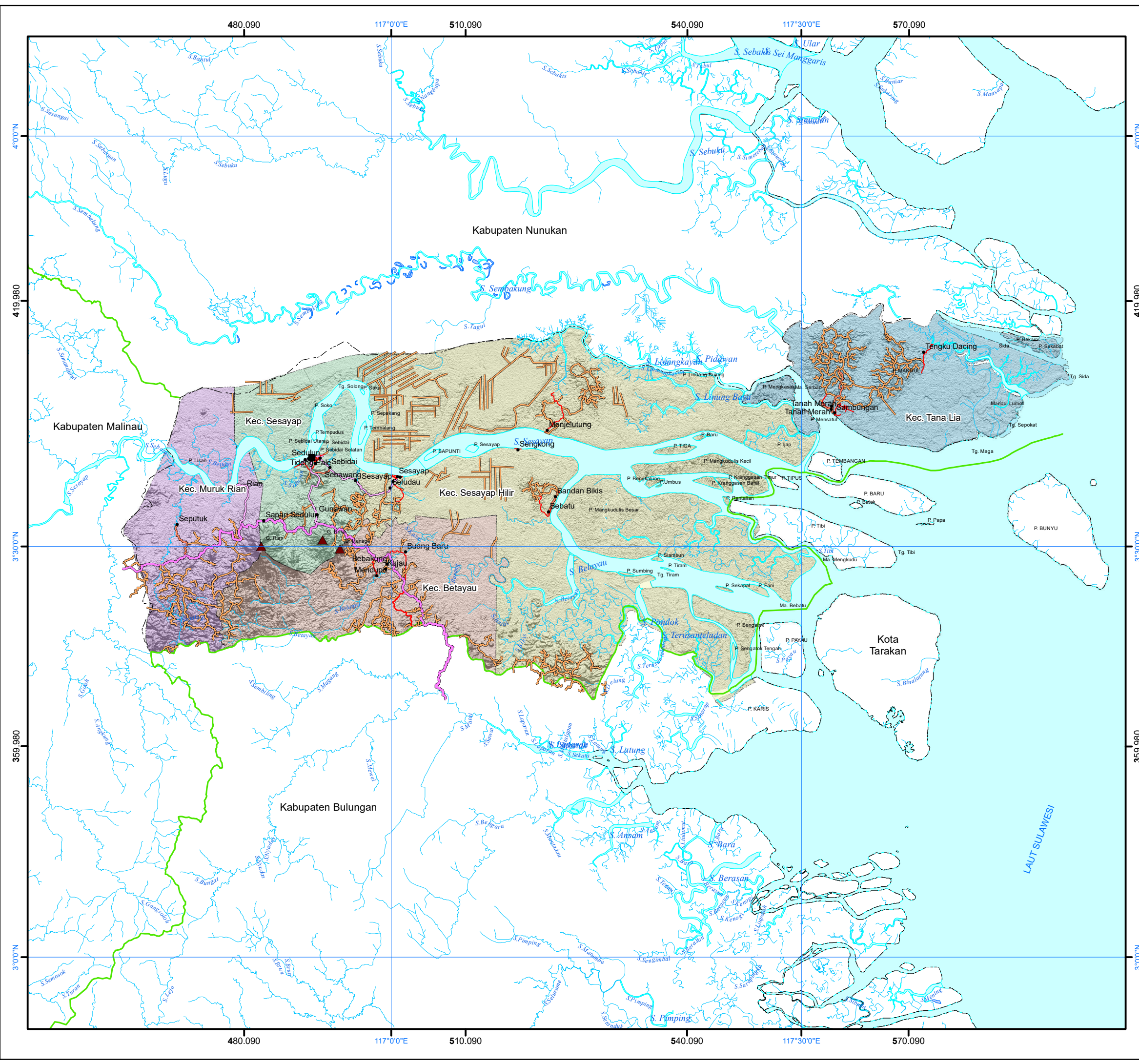
Gambar 1.5. Tahapan Kegiatan Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026

Secara detail tahapan penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 – 2026 terdiri dari 5 (lima) tahap, sebagai berikut :

- 1) Tahap 1, meliputi : 1) Pembentukan tim penyusun (kelompok kerja), 2) Penyusunan TOR/KAK dan 3) Identifikasi stake-holder.
- 2) Tahap 2 (Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan), meliputi : 1) Identifikasi dan pengumpulan data yang terdiri dari identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dan identifikasi materi muatan KRP, 2) Analisis data dan analisis pengaruh dan 3) Konsultasi publik I.
- 3) Tahap 3 (Pengkajian Alternatif Proyeksi), meliputi : 1) Pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap KRP (Pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup), 2) Perumusan scenario pembangunan berkelanjutan (rumusan alternatif) dan (3) Konsultasi publik II.
- 4) Tahap 4, meliputi : 1) Pengintegrasian KLHS RPJMD terhadap KRP dan 2) Penyusunan rekomendasi.
- 5) Tahap 5, meliputi : 1) Penjaminan kualitas, 2) Pendokumentasian 3) Pra validasi dan 4) Validasi.

1.7.3. Lokasi dan Waktu Kajian

Lingkup lokasi kajian adalah Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 4 (empat) bulan kalender. Adapun lokasi penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung meliputi 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Tana Tidung. Peta lokasi atau lingkup wilayah kajian (peta administrasi) dapat dilihat pada Gambar 1.5.



PETA LOKASI KEGIATAN

SKALA 1:500.000

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

KETERANGAN

- Desa
- Ibukota Kabupaten
- ▲ Gunung

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- · - · - Batas Kecamatan
- Batas Definitif

Kecamatan

- Kecamatan Tanalia
- Kecamatan Sesayap Hilir
- Kecamatan Sesayap
- Kecamatan Muruk Rian
- Kecamatan Belayau

Perairan

- Laut
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai
- Wilayah Perairan

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lokal

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
- Peta RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 - 2032, Pengumpulan Data Lapangan KLHS RPJMD KTT, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung, 2021
- Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
- Data DEM SRTM 30m

CATATAN :

- Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
- Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 1.6

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(KLHS RPJMD)

KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN 2021 - 2026



1.7.4. Biaya Pelaksanaan Kajian

Biaya pelaksanaan Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021–2026 ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung tahun 2021.

1.8. Daftar Istilah dan Singkatan

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 2) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 3) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
- 4) Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 5) Isu Pembangunan Berkelanjutan adalah kondisi atau permasalahan lingkungan yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pelaksanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
- 6) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian



analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

- 7) Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
- 8) Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia termasuk rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJPN, RPJPD, RPJMN, dan RPJMD. .
- 9) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.9. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika laporan akhir dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 terdiri dari 7 (tujuh) bab meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, manfaat hasil kajian, keluaran, metodologi, daftar istilah dan singkatan serta sistematika laporan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan



- 1.4. Ruang Lingkup
- 1.5. Manfaat Hasil Kajian
- 1.6. Keluaran (*Out-Put*)
- 1.7. Metodologi
 - 1.7.1. Mekanisme Penyusunan
 - 1.7.2. Tahapan Pelaksanaan Kajian
 - 1.7.3. Lokasi dan Waktu Kajian
 - 1.7.4. Biaya Pelaksanaan Kajian
- 1.8. Daftar Istilah dan Singkatan
- 1.9. Sistematika Penulisan Laporan

Bab II : Dasar Teori

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang digunakan pada laporan KLHS-RPJMD, yaitu : kajian lingkungan hidup strategis, rancangan pembangunan jangka menengah daerah, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan muatan KLHS

- 2.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - 2.1.1. Proses Penyusunan KLHS
 - 2.1.2. Hasil KLHS
- 2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 2.4. Muatan KLHS
 - 2.4.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
 - 2.4.2. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup
 - 2.4.3. Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem
 - 2.4.4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
 - 2.4.5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi
 - 2.4.6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Bab III : Kondisi Umum Daerah

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi umum daerah Kabupaten Tana Tidung diantaranya kondisi



geografis; kondisi demografis; daya dukung dan daya tampung; kondisi keuangan daerah; dan peran pemangku kepentingan dalam mencapai TPB

3.1. Kondisi Geografis

3.1.1. Batas dan Luas Wilayah

3.1.2. Ketinggian Tempat dan Kemiringan Lereng

3.1.3. Geologi

3.1.4. Nama dan Luas Pulau

3.1.5. Hidrologi dan Hidrogeologi

3.1.6. Jenis Tanah

3.1.7. Klimatologi

3.2. Kejadian Bencana

3.3. Karakteristik Penggunaan Lahan

3.3.1. Tipe Penggunaan Lahan

3.3.2. Pola Ruang (RTRW)

3.3.3. Kawasan Hutan

3.3.4. Tutupan Lahan

3.3.5. Kawasan Konservasi

3.4. Kondisi Kependudukan

3.4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

3.4.2. Jumlah Penduduk yang Tergolong Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

3.4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kegiatan

3.4.4. Jumlah Penduduk Berdasar Kelompok Umur

3.5. Produk Domestik Regional Bruto

3.6. Pertumbuhan Ekonomi

3.7. Pendidikan

3.8. Kesehatan

3.9. Peribadatan

3.10. Sektor Jalan

3.11. Listrik

3.12. Air Minum

3.13. Sampah

3.14. Kondisi Lingkungan Hidup

3.14.1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya



- Tampung Daerah
- 3.14.2. Kinerja Jasa Ekosistem
- 3.14.3. Resiko Lingkungan Hidup
- 3.14.4. Potensi Sumber Daya Alam
- 3.14.5. Izin Lingkungan, Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dan SPPL
- 3.14.6. Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim
- 3.15. Keuangan Daerah dalam Pencapaian TPB
 - 3.15.1. Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 3.15.2. Realisasi Anggaran OPD dalam Pencapaian TPB
 - 3.15.3. Peran Filantropi dalam Pencapaian TPB
- 3.16. Peran Para Pihak

Bab IV : Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada bab ini dijelaskan mengenai penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di daerah

- 4.1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan
 - 4.1.1. Daftar Panjang (Longlist) Isu Pembangunan Berkelanjutan
 - 4.1.2. Penapisan Isu Pembangunan Berkelanjutan
 - 4.1.3. Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan
- 4.2. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 - 4.2.1. Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung pada Pilar Sosial
 - 4.2.2. Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung pada Pilar Ekonomi
 - 4.2.3. Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung pada Pilar Lingkungan Hidup
 - 4.2.4. Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung pada Pilar Hukum dan Tata Kelola
 - 4.2.5. Capaian Indikator TPB Prioritas

Bab V : Analisis Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pada bab ini dijelaskan mengenai penilaian dan analisis capaian indikator TPB setiap OPD)

- 5.1. Capaian Indikator TPB oleh Perangkat Daerah
- 5.2. Capaian Indikator TPB oleh OPD pada Pilar Sosial



- 5.3. Capaian Indikator TPB oleh OPD pada Pilar Ekonomi
- 5.4. Capaian Indikator TPB oleh OPD pada Pilar Lingkungan Hidup
- 5.5. Capaian Indikator TPB oleh OPD pada Pilar Hukum dan Tata Kelola
- 5.6. Keterlibatan Para Pihak untuk Mendukung OPD dalam Pencapaian Target TPB

Bab VI : Alternatif Skenario dan Rekomendasi

Pada bab ini dijelaskan mengenai alternatif skenario dan rekomendasi daerah dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan dilihat dari daya dukung dan daya tampung serta ketercapaian terhadap TPB. Pada bab ini terdiri dari:

- 6.1. Alternatif Skenario dan Rekomendasi Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah
 - 6.1.1. Pengkajian Pengaruh KRP Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
 - 6.1.2. Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
 - 6.1.3. Analisis Dampak KRP terhadap Lingkungan Hidup
- 6.2. Alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan yaitu untuk indikator yang belum mencapai target RPJMN 2019 serta indikator yang belum memiliki data
 - 6.2.1. Alternatif Indikator TPB Belum mencapai Target RPJMN 2019
 - 6.2.2. Alternatif Program Dalam Pencapaian TPB Yang Belum Tercapai Sehingga Perlu Upaya Tambahan
 - 6.2.3. Rekomendasi untuk indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Tercapai
 - 6.2.4. Alternatif skenario dan rekomendasi indikator yang belum memiliki data



- 6.3. Alternatif skenario untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target RPJMN 2019
- 6.4. Pengintegrasian Indikator TPB/SDGs sebagai KRP ke Dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026
 - 6.4.1. Integrasi Hasil KLHS terhadap KRP
 - 6.4.2. Integrasi Indikator TPB dalam dokumen RPJMD yang terkait langsung DDDT-LH
 - 6.4.3. Integrasi Indikator TPB dalam dokumen RPJMD yang tidak terkait langsung DDDT-LH

Bab VII : Kesimpulan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari laporan KLHS-RPJMD dengan mengidentifikasi pada hasil analisis daya dukung dan daya tampung daerah, analisis capaian daerah terhadap indikator TPB, analisis capaian OPD terhadap indikator TPB serta simpulan rekomendasi bagi daerah

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

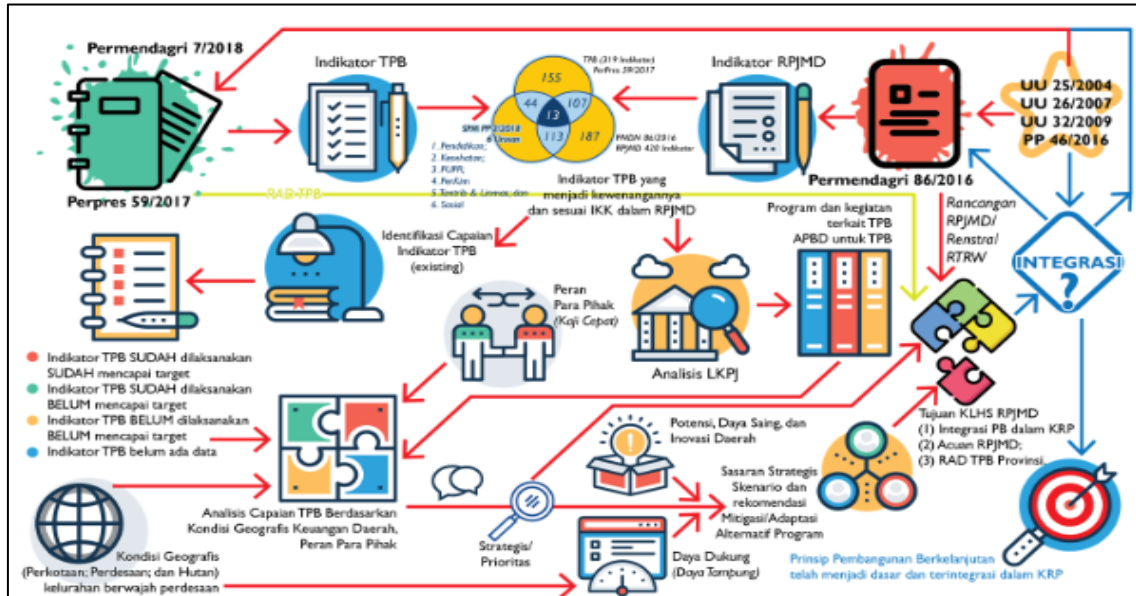
Pada bab ini merupakan kumpulan sumber-sumber tulisan berdasarkan hasil penelitian, tulisan ilmiah, buku dan dasar hukum dalam pembuatan laporan KLHS-RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026.

BAB II

DASAR TEORI

2.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dijelaskan bahwa **Kajian Lingkungan Hidup Strategis** yang selanjutnya disingkat **KLHS** adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib membuat dokumen KLHS dalam penyusunan RTRW beserta rencana rincinya termasuk Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR). Selanjutnya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS diatur tentang penyusunan KLHS dalam rangka memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana dan program. Oleh karena itu, wajib adanya bahwa dokumen KLHS menjadi salah satu dokumen rujukan dalam penyusunan RPJMD guna memastikan bahwa dokumen RPJMD menganut prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada Gambar 2.1. disajikan alur penyusunan KLHS RPJMD dan integrasinya dalam RPJMD.



Gambar 2.1. Alur Penyusunan KLHS RPJMD dan Integrasinya Dalam RPJMD

Penyelenggaraan KLHS khususnya untuk RPJMD Pemerintah Daerah baik Provinsi ataupun Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. KLHS merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen RPJMD. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program pada tingkat nasional, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan KLHS merupakan mandat dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan tata cara penyelenggaraannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tersebut selanjutnya diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016



tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Penyelenggaraan KLHS untuk RPJMD baik untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD.

2.1.1. Proses Penyusunan KLHS

a. Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD

Tahapan persiapan dalam penyelenggaraan KLHS untuk RPJMD adalah Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD yang dilakukan berdasarkan ketetapan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Tidung. Tim pembuat KLHS untuk RPJMD yang selanjutnya disebut Tim Pokja (Kelompok Kerja) KLHS terdiri dari perangkat daerah dengan melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya yang kompeten dan sesuai kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD. Tim Pokja KLHS bertugas untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja, menyelenggarakan KLHS, melaksanakan kajian pembangunan berkelanjutan, dan merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.

b. Pengkajian Muatan Pembangunan berkelanjutan

Pengkajian muatan pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan KLHS untuk RPJMD adalah mengkaji TPB yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, dan juga ketetapan di tingkat Pemerintah Daerah yang mendukung. Pada mekanisme pengkajian ini, dilakukan melalui identifikasi data, pengumpulan data, dan analisa data mencakup: 1) Kondisi umum daerah, 2) Capaian indikator pembangunan berkelanjutan yang relevan dan 3) Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Filantropi, pelaku usaha serta akademisi dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Selain itu hasil pengkajian yang dilakukan memuat analisa yang minimal terdiri dari : 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, 2) Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, 3) Kinerja atau layanan jasa ekosistem, 4) Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

c. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan

Mekanisme selanjutnya dalam penyelenggaraan KLHS adalah merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan atau alternatif program baik yang merupakan perbaikan dari program yang disusun di dalam dokumen RPJMD ataupun yang belum tercantum di dalam dokumen RPJMD akan tetapi penting untuk dilaksanakan. Perumusan skenario dilakukan dengan memberikan alternatif proyeksi kondisi TPB berupa target pencapaian TPB tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Upaya tambahan yang disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pencapaian target tanpa upaya tambahan, 2) Pencapaian target yang ditetapkan secara nasional, 3) Potensi, daya saing dan inovasi daerah, 4) Daya dukung dan daya tampung daerah dan 5) Pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah;

d. Penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS RPJMD

Penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS merupakan mekanisme yang terakhir dalam penyelenggaraan KLHS. Proses penjaminan kualitas dilakukan untuk penyempurnaan KLHS yang dilakukan berdasarkan penilaian mandiri oleh penyusun kebijakan, rencana dan/atau program pada setiap tahapan penyusunan atau sekaligus pada saat terakhir penyusunan.

Proses pendokumentasian KLHS merupakan hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang disampaikan di dalam laporan KLHS. Laporan KLHS merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari

dokumen Kebijakan, Rencana, dan Program yang dijadikan sebagai informasi pendukung sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Proses validasi dalam penyelenggaraan KLHS dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Penjaminan kualitas untuk kebijakan, rencana, dan program tingkat Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Gubernur. Prosedur dalam validasi KLHS untuk kebijakan, rencana, dan program tingkat Kabupaten/ Kota dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan: 1) Rancangan kebijakan, rencana, dan/ atau program, 2) Laporan KLHS dan 3) Bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS

2.1.2. Hasil KLHS

Hasil dari penyelenggaraan KLHS untuk RPJMD adalah Laporan KLHS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD untuk dijadikan sebagai informasi pendukung sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Laporan KLHS yang disusun memuat informasi tentang dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup; metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan

Berkelanjutan; gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; dan hasil penjaminan kualitas KLHS.

2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 digunakan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan daerah yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, strategi, kebijakan, program, dan pagu indikatif dalam kurun waktu lima tahun. RPJMD Kabupaten Tana Tidung disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2021-2026.
- 2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.
- 3) Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025.

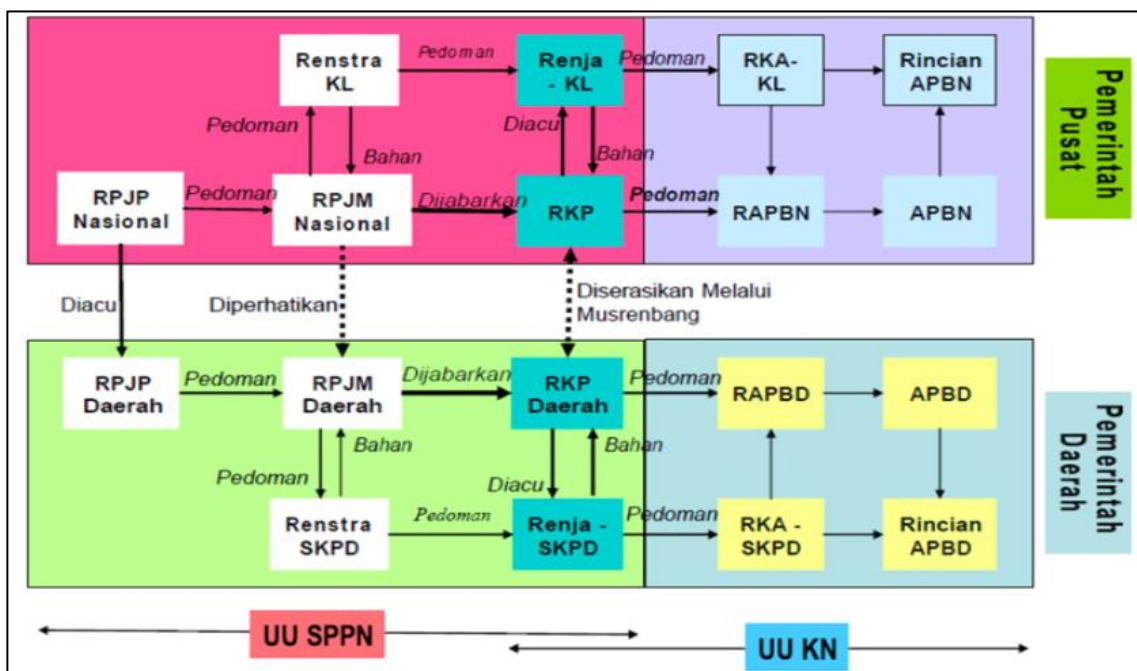


- 4) Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.
- 5) Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2026 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 6) Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan APBD.
- 7) Ditetapkannya dokumen sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah.
- 8) Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung selama 5 (lima) tahun.
- 9) Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara.
- 10) Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dokumen RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Tana Tidung serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka RPJMD kabupaten Tanah Tidung memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lain pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, yaitu: RPJMN 2020-2024 dan RPJMD rovinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Sinergisitas dan hubungan Perubahan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Oleh karena itu, kualitas RPJMD sangat ditentukan bagaimana proses penyusunannya dan seberapa jauh RPJMD dapat



mengemukakan secara sistematis pemikiran strategis tersebut dalam bentuk kebijakan yang nanti akan dilaksanakan pada RKPD dan Renstra OPD. Perencanaan strategis berkaitan erat dengan proses penetapan arah pengembangan daerah dan pencapaiannya dalam lima tahun mendatang, strategi pencapaian, dan tahapan strategis agar tujuan tercapai.

Salah satu dokumen yang harus menjadi salah satu rujukan RPJMD adalah **KLHS RPJMD**. Hal ini guna untuk memastikan bahwa dalam perencanaan pembangunan telah terintegrasi dengan aspek berkelanjutan melalui rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Perencanaan pembangunan daerah termasuk dokumen RPJMD berorientasi pada proses yang menggunakan beberapa pendekatan diantaranya: 1) Teknokratik, 2) Partisipatif, 3) Politis dan 4) Atas-bawah dan bawah-atas

Pendekatan teknokratik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah termasuk RPJMD, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Sementara itu, Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sedangkan Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Selanjutnya pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.



Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan: 1) Holistik-tematik, 2) Integratif dan 3) Spasial.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur /bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Sementara itu, Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan, Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau ***Sustainable Development Goals (SDGs)*** merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau ***Millennium Development Goals (MDGs)***. SDGs/TPB disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB merupakan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian TPB yang terdiri 17 (tujuh belas) Tujuan dan 319 (tiga ratus sembilan belas) indikator, baik indikator global

dan indikator nasional yang menjadi proksi Global. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 memberikan amanah kepada Gubernur untuk bersama-sama dengan Bupati/Walikota menyusun Rencana Aksi Daerah TPB. Walaupun mandat tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi, akan tetapi indikator dan pencapaian dari rencana aksi tersebut merupakan **aggregate** dari indikator dan pencapaian dari Kabupaten/ Kota.

KLHS RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD, yang memuat didalamnya substansi rencana pembangunan didasarkan pada analisis Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan serta mengarahkan TPB. Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem terhadap TPB maka diharapkan sumbangan KLHS RPJMD Kabupaten Tanah Tidung dapat memastikan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam Kebijakan, Rencana dan Program, dan mendukung percepatan pencapaian 17 TPB sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB.

Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. Dalam hal ini, KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB ke dalam Dokumen RPJMD sehingga dengan tuntasnya Dokumen KLHS - RPJMD ini dapat dimanfaatkan dalam mengintegrasikan indikator TPB ke dalam Dokumen RPJMD untuk capaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Berkaitan dengan TPB maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terdiri 17 TPB, 94 indikator global dan 319 indikator nasional. Berdasarkan kewenangan, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pemetaan indikator TPB dengan jumlah 220 Indikator untuk Kabupaten, namun dari 220 indikator yang ada untuk kewenangan kabupaten disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kabupaten di Indonesia.

Dokumen Metadata Indikator TPB Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu:

- 1) Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan ke 1, 2, 3, 4 dan 5.
- 2) Pilar Pembangunan Ekonomi mencakup Tujuan ke 7, 8, 9, 10 dan 17.
- 3) Pilar Pembangunan Lingkungan mencakup Tujuan ke 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
- 4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola mencakup Tujuan ke 16.

Setiap tujuan pembangunan memiliki indikator TPB. Untuk Daerah Kabupaten terdapat 220 indikator yang menjadi kewenangannya, walaupun setiap daerah tidak selalu memiliki jumlah yang sama, tergantung dari karakteristik geografis wilayahnya. Secara rinci masing-masing tujuan dan indikatornya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Indikator-Indikator Kewenangan Kabupaten

No	Tujuan Pembangunan	Jumlah Indikator
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimanapun	24
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif & Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	13



No	Tujuan Pembangunan	Jumlah Indikator
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	14
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	18
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	13
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	11
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	0
15	Melindungi, Merestorasi & Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	4
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	21
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	16
Jumlah		220

Dari 17 TPB dan 220 indikator yang merupakan kewenangan kabupaten, selanjutnya dapat dikelompokkan berdasarkan pilar yang meliputi pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan rincian jumlah indikator per pilar seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Indikator-indikator Kewenangan Kabupaten Berdasarkan Pilar

No	Pilar	Jumlah Indikator
1	Sosial	96
2	Ekonomi	61
3	Lingkungan	42
4	Hukum dan Tata Kelola	21
	Jumlah	220

2.4. Muatan KLHS

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS pasal 13 ayat (1), di dalam KLHS memuat enam aspek meliputi :

- 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
- 2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup.
- 3) Kinerja layanan atau jasa ekosistem.
- 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
- 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
- 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

2.4.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016 telah menyusun dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Ekoregion Kalimantan



berbasis jasa ekosistem. Terdapat 4 (empat) Jasa ekosistem yang disajikan di dalam dokumen tersebut, yaitu Jasa Penyedia/Produksi, Jasa Regulasi/ Pengaturan, Jasa Budaya, dan Jasa Pendukung.

2.4.2. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Perkiraan mengenai dampak dan analisis Risiko Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termuat dalam Pasal 47 ayat (1) yaitu : Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa analisis resiko lingkungan hidup meliputi 3 aspek, yaitu: 1) Pengkajian resiko, 2) Pengelolaan resiko; dan/atau 3) Komunikasi resiko. Tentunya dari kegiatan analisis resiko lingkungan tersebut kita dapat memproyeksikan atau memperkirakan besarnya dampak yang ditimbulkannya dan resiko lingkungan hidup yang akan terjadi bila tidak dilakukan tindakan-tindakan konkrit. Dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- 1) Perubahan iklim.
- 2) Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati.
- 3) Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
- 4) Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam.
- 5) Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan.
- 6) Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau



- 7) Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

2.4.3. Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap komponen lingkungan hidup yang saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Ekosistem bersifat dinamis dan perubahannya disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Ekosistem alami memegang peranan penting dalam mendukung keberlanjutan hidup manusia dan berperan penting, baik langsung maupun tidak langsung dalam menyokong kehidupan ekonomi manusia. Barier (1991) dalam Djajadiningrat, dkk., (2011) mengelompokkan manfaat ekosistem alami secara umum ke dalam kategori nilai guna (*use value*) dan nilai bukan guna (*non use value*). Nilai guna adalah nilai yang timbul dari penggunaan barang dan jasa ekosistem (Contanza dkk., 1998) sedangkan nilai bukan guna diartikan sebagai nilai yang diperoleh dari kesenangan terhadap suatu barang dan tidak berhubungan dengan manfaat lain yang diperoleh atas barang tersebut. Manfaat atau keuntungan yang manusia dapatkan dari suatu ekosistem dan yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia lebih dikenal dengan istilah jasa ekosistem (Woodruff dan Bendor, 2016).

Jasa lingkungan memiliki cakupan yang cukup beragam, namun berdasarkan jasa dan barang yang dihasilkan De Groot (2002) mengelompokkan menjadi empat kategori dasar, yaitu : 1) Jasa pengaturan, 2) Jasa habitat, 3) Jasa produksi dan 4) Jasa informasi. Jasa pengaturan sangat berhubungan dengan kemampuan ekosistem alami dan semi-alami dalam mengatur proses ekologi yang mendukung kehidupan, misalnya yang berhubungan dengan udara, air, dan tanah. Jasa habitat berhubungan dengan perlindungan terhadap tanaman dan hewan. Menurut Constanza *et al.* (1998) suatu ekosistem alami dan semi alami memberikan



setidaknya 17 macam jasa ekosistem, namun kemudian teori tersebut disempurnakan oleh De Groot *et al.* (2002) menjadi 23 jenis jasa ekosistem.

Perubahan ekosistem tidak hanya memberikan dampak bagi penurunan kualitas tetapi juga pada jasa ekosistem didalamnya. Jasa ekosistem adalah segala keuntungan yang didapatkan dari suatu ekosistem, khususnya yang terkait dengan kesejahteraan manusia (Woodruff dan Bendor, 2016). Penilaian terhadap jasa ekosistem sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan publik mengenai pengelolaan sumber daya alam (Djajadiningrat, dkk., 2011) dan kebijakan publik yang bersifat sosial (Fisher dkk., 2009).

2.4.4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, pemanfaatan sumber daya alam tersebut seringkali melewati batas. Terjadi kecenderungan melakukan eksploitasi besar-besaran tanpa memperdulikan dampaknya di masa mendatang. Untuk mengantisipasi kelangkaan sumber daya alam, perlu diterapkan prinsip keefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Konsep keefisiensi Dilansir dari buku Kamus Populer Kesehatan Lingkungan (2002) karya Hadi Siswanto, keefisiensi bertujuan untuk menggunakan sumber daya alam seefektif mungkin, sehingga tidak ada sumber daya alam yang terbuang yang akan berbentuk limbah. Semakin tinggi efisiensi, maka akan semakin sedikit bahan yang dibutuhkan. Sehingga tidak akan terjadi konflik antara aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. Sebaliknya, yang terjadi justru sinergi antara dua aspek tersebut. Untuk menciptakan dua sinergi tersebut, salah satunya melalui pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ditopang oleh kelanjutan ekologis, ekonomis, dan sosial. Prinsip keefisiensi



diperlukan agar sumber daya alam yang ada saat ini bisa digunakan, tidak hanya saat ini, tetapi juga masa yang akan datang untuk generasi berikutnya.

2.4.5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan suatu peristiwa yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh alam, melainkan juga dari campur tangan perbuatan manusia. Dengan adanya perubahan iklim dapat mengakibatkan ancaman terjadinya bencana banjir, kemarau, longsor dan beberapa bencana lainnya. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya dapat merusak kondisi fisik lingkungan melainkan juga memiliki efek yang besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Permasalahan krusial mengenai dampak perubahan iklim akan menyebabkan kerentanan.

Permasalahan lain akibat perubahan iklim dapat dilihat dari segi fisik lainnya misalnya minimnya infrastruktur pendukung seperti pengelolaan persampahan, kerusakan rumah, kerusakan jalan serta kondisi perkampungan yang kumuh. Kondisi permukiman yang rentan terhadap perubahan iklim, seharusnya sebanding dengan kapasitas adaptasi yang kuat agar masyarakat dapat bertahan untuk tetap tinggal di lokasi tersebut. Daze (2009) juga menyatakan bahwa pentingnya kapasitas adaptasi sebagai upaya dalam mengurangi kerentanan yang terjadi di suatu wilayah. Dalam hal ini Smit dan Pilifosova (2003) mendefinisikan kapasitas adaptasi dapat dilihat dari level household, komunitas dan level kota. Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat Clarvis dan Allan (2013) bahwa dalam mekanisme kapasitas adaptasi merupakan respon pemerintah maupun institusi pada level nasional maupun regional yang menyediakan panduan untuk merespon perubahan lingkungan. Kapasitas adaptasi sangat dinamis dipengaruhi oleh sumberdaya ekonomi dan alam, jaringan sosial, pemerintah dan institusi lokal, sumberdaya manusia dan teknologi. Smith dan



Pilifosova dalam Dolan dan Walker (2003) menunjukkan bahwa penilaian kapasitas adaptasi bergantung pada Sumberdaya ekonomi (financial), ketersediaan teknologi dan informasi, kemampuan pelaku adaptasi, pengelolaan, dan kinerja.

2.4.6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati bersifat multidimensi. Hal ini digambarkan oleh beragamnya definisi/pengertian yang telah di kemukakan. Kesamaan di antara berbagai pengertian keanekaragaman hayati adalah tiga komponen prinsip, yaitu ekosistem, jenis, dan gen. Tiga komponen prinsip ini juga diacu di dalam pengertian keanekaragaman hayati menurut konvensi keanekaragaman hayati. Pengertian menurut konvensi ini adalah : Keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem perairan lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam jenis, antar jenis dan ekosistem. Dalam pengertian lain; keanekaragaman hayati merujuk pada keanekaragaman semua jenis tumbuhan, hewan dan jasad renik (mikroorganism), serta proses ekosistem dan ekologis dimana mereka menjadi bagiannya. Keanekaragaman genetik (didalam jenis) mencakup keseluruhan informasi genetik sebagai pembawa sifat keturunan dari semua makhluk hidup yang ada. Keanekaragaman jenis berkaitan dengan keragaman organisme atau jenis yang mempunyai ekspresi genetik tertentu. Sementara itu, keanekaragaman ekosistem merujuk pada keragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Keanekaragaman hayati lebih dari sekedar jumlah jenis-jenis flora dan fauna.



Interaksi Manusia dan Keanekaragaman Hayati tergantung kepada keanekaragaman hayati untuk pangan, energi, papan, obat-obatan, inspirasi dan banyak lagi kebutuhan lain. Keanekaragaman hayati dan manusia telah mempunyai keterkaitan yang erat dan saling mendukung selama puluhan ribu tahun. Sumber daya hayati untuk pemenuhan kebutuhan hidup mempunyai karakter penting yaitu bersifat *renewable*, paling tidak jika dikelola dengan bijaksana.

Cara masyarakat memanfaatkan keanekaragaman hayati menentukan kelestarian sumber daya ini, dan cara masyarakat mengelolanya akan menentukan produktivitas sumber daya yang penting ini dan kelestarian fungsi-fungsi ekologisnya. Kegiatan manusia telah membantu terciptanya keanekaragaman jenis dan plasma nutfah, dan telah meningkatkan komunitas hayati di dalam lingkungan yang tertentu melalui praktik pengelolaan sumber daya dan melalui domestikasi tumbuhan dan satwa. Disisi lain manusia juga telah menyebabkan menurunnya mutu keanekaragaman hayati beserta fungsi-fungsi ekologis yang dihasilkannya. Menurunnya mutu keanekaragaman hayati ini dapat dilihat dari laju kepunahan jenis dan viabilitas jenis-jenis yang masih bertahan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAERAH

3.1. Kondisi Geografis

3.1.1. Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Tana Tidung dengan posisi astronomis terbentang mulai 116^o42'50" sampai dengan 117^o49'50" Bujur Timur dan 3^o12'02" sampai dengan 3^o46'41" Lintang Selatan (RKPD Kab. Tana Tidung, 2020), mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Nunukan
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Bulungan
Sebelah Timur	:	Kabupaten Bulungan, Laut Sulawesi Kota Tarakan
Sebelah Barat	:	Kabupaten Bulungan

Luas wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah 4.828,58 km², yang terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu Muruk Rian, Sesayap, Betayau, Sesayap Hilir dan Tana Lia. Sesayap Hilir merupakan kecamatan terluas yang mencapai 27,29% dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung, sedang kecamatan yang mempunyai wilayah paling sempit yaitu Muruk Rian dengan luasan 60.862 ha atau 12,60% dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung. Terdapat sebanyak 32 desa di Kabupaten Tana Tidung yang tersebar di masing-masing kecamatan dengan jumlah desa di masing-masing kecamatan berkisar dari 5 – 8 desa, terbanyak di kecamatan Sesayap Hilir dan paling sedikit di Kecamatan Tana Lia. Jumlah desa serta luas dan persentase wilayah menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jumlah Desa¹, Luas dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas		
			(km ²)	(ha)	(%)
1	Muruk Rian	6	608,62	60.862	12,60
2	Sesayap	7	1.016,92	101.692	21,06
3	Betayau	6	1.007,65	100.765	20,87
4	Sesayap Hilir	8	1.317,53	131.753	27,29
5	Tana Lia	5	877,86	87.786	18,18
Jumlah		32	4.828,58	482.858	100,00

Keterangan : ¹Termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tana Tidung, 2020

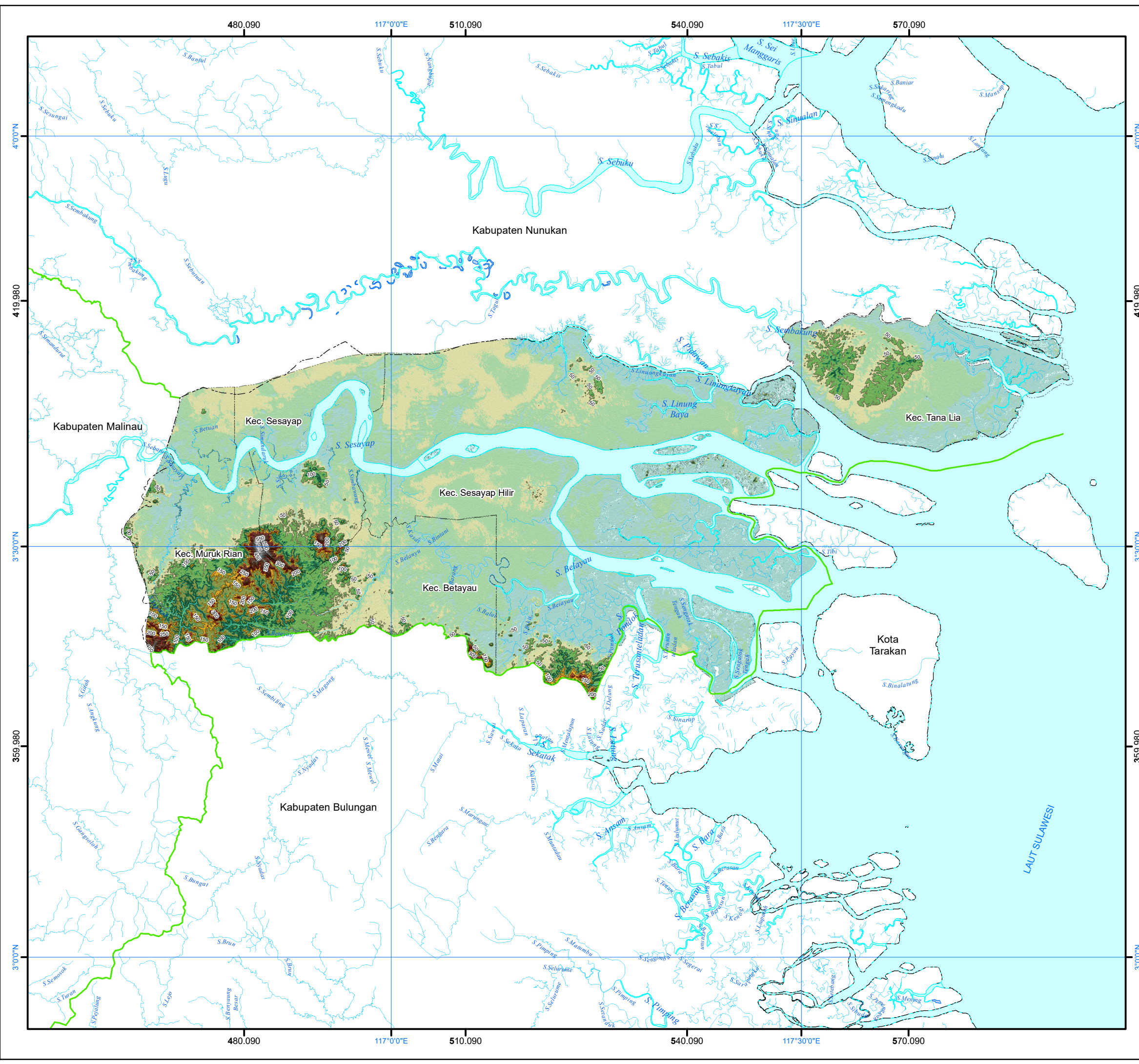
3.1.2. Ketinggian Tempat dan Kemiringan Lereng (Topografi)

Ketinggian wilayah di Kabupaten Tana Tidung berkisar dari 0 hingga 1.000 m dari permukaan laut (m dpl). Ketinggian 7 – 25 m dpl merupakan yang terluas yaitu 246.733 ha atau sekitar 79,80 % dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung. Luas wilayah dan persentase luas wilayah menurut ketinggian tempat di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan sebaran ketinggian tempatnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Tabel 3.2. Kelas Ketinggian Tempat dan Luasnya di Kabupaten Tana Tidung, 2020

No	Ketinggian Tempat (m dpl)	Luas Wilayah (ha)	Persentase Ketinggian (%)
1	0 – 7	11.034	3,57
2	7 – 25	246.733	79,80
3	25 -100	51.029	16,51
4	100 – 500	22	0,01
5	500 - 1.000	302	0,10
6	➤ 1.000	0	0,00

Sumber :Bappeda dan Litbang Kab. Tana Tidung , 2020



PETA KETINGGIAN

SKALA 1:500.000

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

KETERANGAN

<ul style="list-style-type: none"> ▲ Gunung Batas Administrasi --- Batas Provinsi - - - Batas Kabupaten Batas Kecamatan — Batas Definitif Kontur Garis Kontur Ketinggian <ul style="list-style-type: none"> -65 - 12 12 - 27 27 - 51 51 - 81 81 - 113 113 - 146 146 - 182 182 - 224 224 - 271 271 - 322 322 - 379 379 - 444 444 - 522 522 - 599 599 - 695 	<ul style="list-style-type: none"> Perairan Laut Garis Pantai Danau Sungai Wilayah Perairan
---	---

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
2. RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 - 2032, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
3. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
4. Data DEM SRTM 8m, Badan Informasi Geospasial, 2021

CATATAN :

1. Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
2. Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.1

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(KLHS RPJMD)

KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN 2021 - 2026

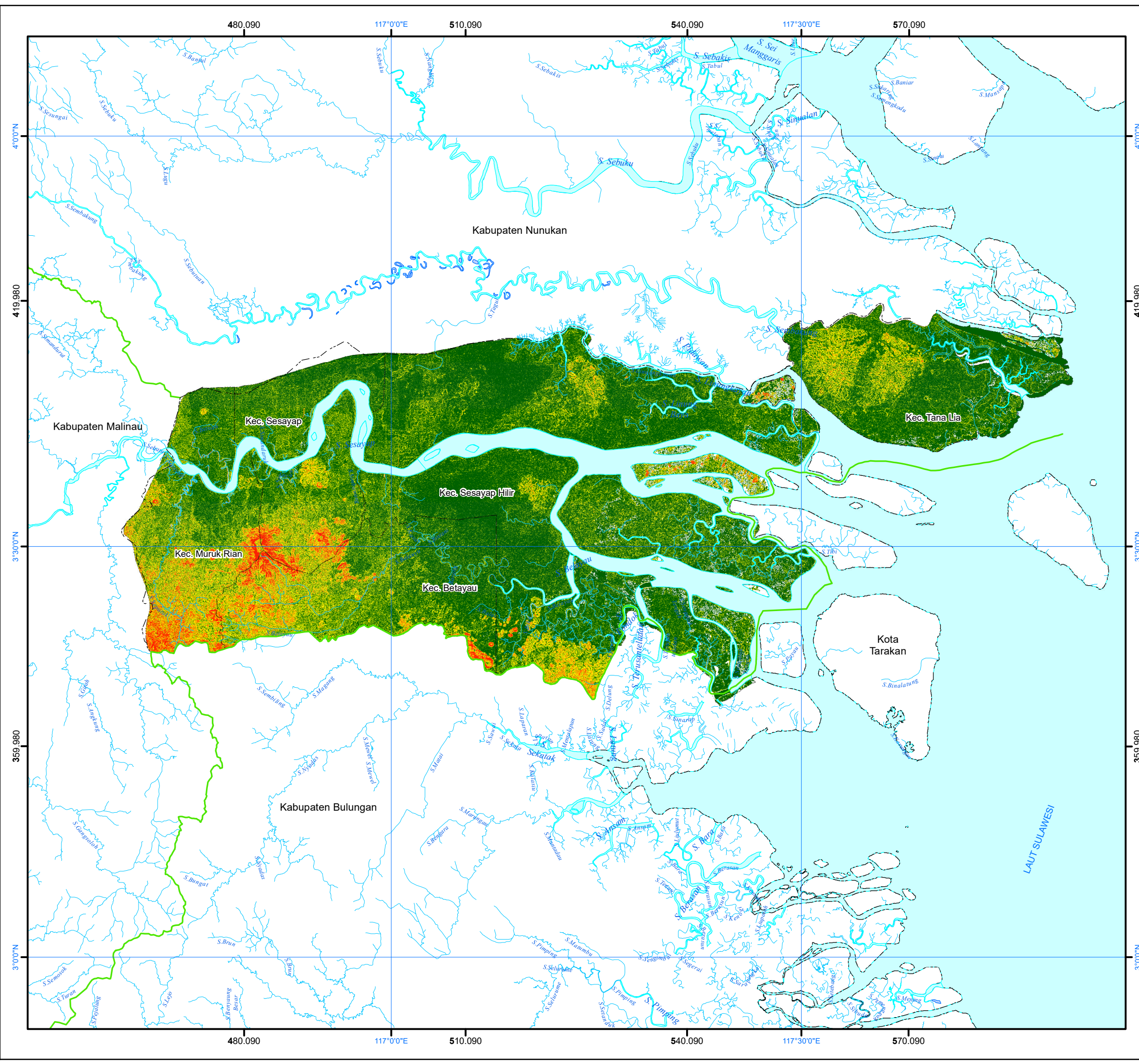
Kemiringan wilayah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan data dari RKPD Kabupaten Tana Tidung (2021) didominasi oleh topografi lahan datar sampai dengan landai dengan luas mencapai 4.426,578 km² atau sekitar 91,69 % dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung. Adapun lahan dengan topografi berombak sekitar 101,395 km² (2,10%), lahan dengan topografi bergelombang sekitar 25,368 km² (0,52%), lahan dengan topografi berbukit sekitar 271.192 km² (5,62%) dan lahan dengan topografi bergunung sekitar 3,467 km² (0,07%). Kelas kemiringan lahan (topografi) lahan Kabupaten Tana Tidung secara rinci disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Kelas Kemiringan Lahan (Rata-Rata) Kabupaten Tana Tidung

No	Kemiringan	Luas (km ²)	Persentase Luas (%)
1	Datar-landai	4.426,578	91,69
2	Berombak	101,395	2,10
3	Bergelombang	25,368	0,52
4	Berbukit	271,192	5,62
5	Bergunung	3,467	0,07
Jumlah		4.828,000	100,00

Sumber :Bappeda dan Litbang Kab. Tana Tidung , 2020

Berdasarkan hasil interpretasi dari Peta (Gambar 3.2.), kelas lereng paling luas di Kabupaten Tana Tidung adalah datar (0 – 8 %) yaitu 195.239,92 ha. Luasan kelas lereng lainnya yaitu : 1) Landai (89.833,77 ha), 2) Agak curam (38.360,61 ha), 3) Curam (17.079,45 ha) dan 4) Sangat curam (4.446,11 ha). Sebaran kelas lereng di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Gambar 3.2.



PETA KELAS LERENG

U
SKALA 1:500.000
 0 1,75 3,5 7 10,5 14 17,5 Km.

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

KETERANGAN

▲ Gunung	Perairan	Garis Pantai
Batas Administrasi	Danau	Sungai
— — — — — Batas Provinsi	Wilayah Perairan	
- - - - - Batas Kabupaten		
..... Batas Kecamatan		
— — — — — Batas Definitif		

Kelas Lereng

- 0 - 8 % (Datar)
- 8 - 15 % (Landai)
- 15 - 25 % (Agak Curam)
- 25 - 45 % (Curam)
- > 45 % (Sangat Curam)

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
- Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
- Data DEM SRTM 8m, Badan Informasi Geospasial, 2021

CATATAN :

- Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
- Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.2
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(KLHS RPJMD)
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021 - 2026

3.1.3. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Tana Tidung terdiri dari satuan batuan yang terdapat dalam beberapa formasi terdiri dari kelompok batuan sedimen, batuan termalihkan dan batuan hasil prodak gunung api ataupun batuan terobosan dari yang berumur tua sampai muda. Struktur geologi yang berkembang di wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah lipatan dan sesar.

Struktur lipatan, berupa antiklin dan sinklin, dengan arah utama sumbu lipatan tenggara–barat laut, serta struktur sesar normal yang dijumpai pada Formasi Sembakung searah dengan sumbu lipatan. Peran struktur geologi sangat signifikan dalam keterdapatan sumber daya mineral. Proses ini dapat terjadi baik dalam keterdapatan logam seperti emas yang akan terangkat melalui celah-celah retakan akibat struktur geologi yang terjadi seperti patahan, kekar dan lipatan. Khusus terhadap akumulasi minyak bumi, peran struktur lipatan dan patahan sangat penting untuk terakumulasinya minyak dan gas bumi.

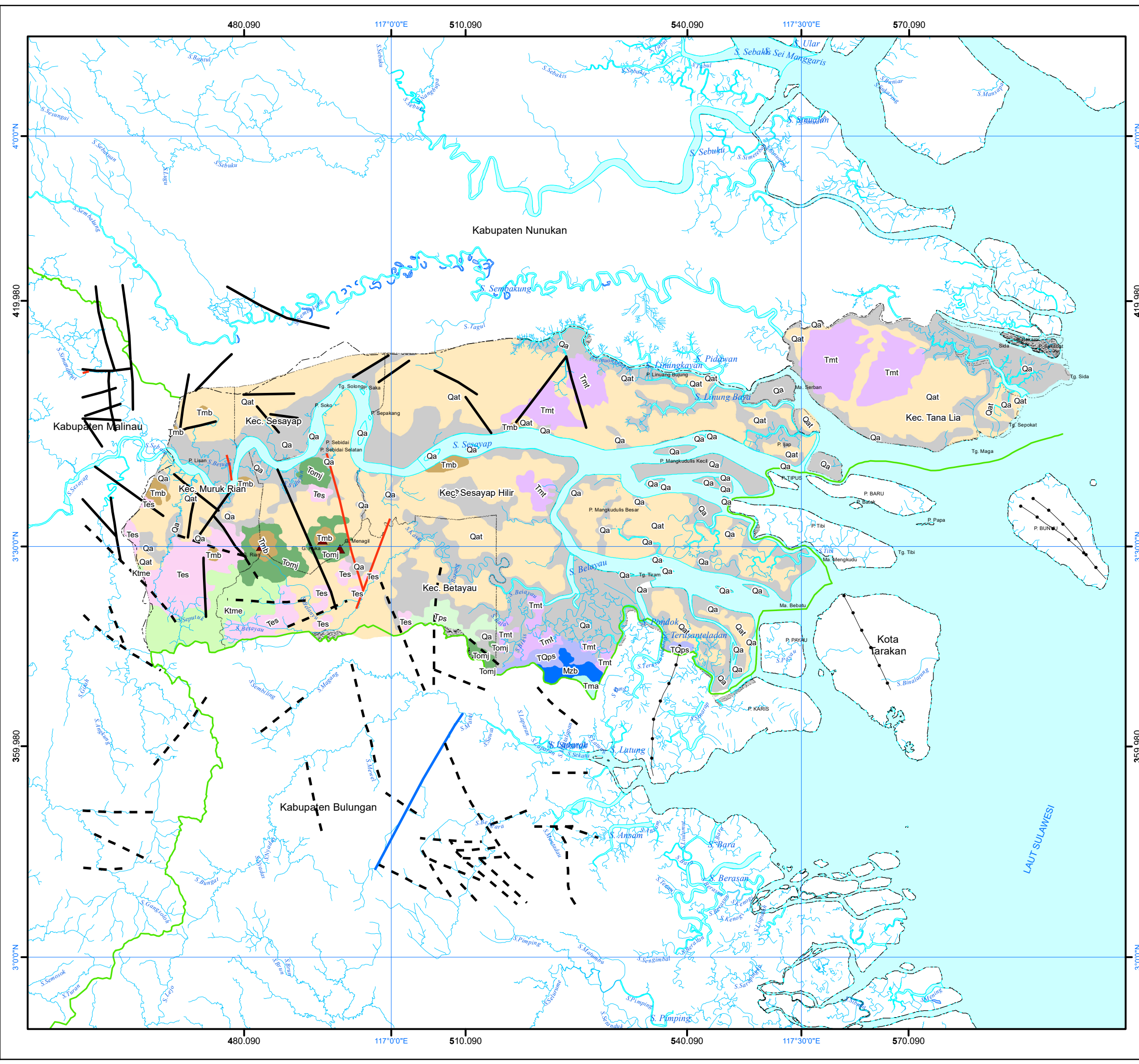
Dengan kondisi tersebut mempunyai potensi adanya indikasi keterdapatan minyak bumi dengan bentuk struktur bawah permukaan pada lapisan sedimen di cekungan Tarakan/Sub Tidung (RKPD Kab. Tana Tidung, 2021).

Geologi Kabupaten Tana Tidung tersusun dari 11 litologi. Sebagian besar geologi tersebut berupa Aluvium yaitu berupa batuan endapan yang merupakan kombinasi dari bahan-bahan Pasir, debu, kerikill, bongkahan lepas dan gambut. Litologi pembentuk geologi beserta luasannya di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 3.4, sedang sebarannya dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Tabel 3.4. Litologi Penyusun Geologi Kabupaten Tana Tidung

No	Litologi	Luas (ha)
1	KTme (Formasi Mentarang K.Embaluh)	10.549,07
2	Mzb (Formasi Bengara)	1.830,63
3	Qa (Aluvium)	110.866,53
4	Qat (Aluvium Terbiku)	155.270,75
5	Tes (Formasi Sembakung)	16.403,63
6	Tma (Formasi Malinau)	526,58
7	Tmb (Formasi Besar)	4.229,02
8	Tmt (Formasi Citarate)	23.385,86
9	Tomj (Batuan Gunung Api Jelai)	8.647,48
10	Tps (Formasi Seurela)	2.541,81
11	TQps (Formasi Sajau)	2.927,85



PETA GEOLOGI (LITOLOGI PENYUSUN BATUAN)

U
SKALA 1:500.000
 0 1,75 3,5 7 10,5 14 17,5 Km.

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

KETERANGAN

▲ Gunung	Perairan	Garis Pantai
Batas Administrasi	Danau	Sungai
--- Batas Provinsi	Wilayah Perairan	
- - - Batas Kabupaten		
..... Batas Kecamatan		
— Batas Definitif		
Struktur	Litologi	
● Antiklin	Ktme	
— Garis Stru	Mzb	
— S. Mendata	Qa	
— Sesar	Qat	
— Struktur	TQps	
	Tes	
	Tma	
	Tmb	
	Tmt	
	Tomj	
	Tps	

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
- Peta Geologi, RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 - 2032, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
- Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
- Data DEM SRTM 30m

CATATAN :

- Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
- Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.3
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(KLHS RPJMD)
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021 - 2026



3.1.4. Nama dan Luas Pulau

Di wilayah Kabupaten Tana Tidung selain terdapat di daratan Pulau Kalimantan juga mempunyai wilayah yang berupa pulau. Terdapat 39 pulau di Kabupaten Tana Tidung. Pulau terbesar adalah Pulau Mandul yang mempunyai luas 35.291,76 ha yang terdapat di Kecamatan Tana Lia. Setelah itu Pulau Mangkudulis Besar dengan luasan 26.127,22 ha yang juga termasuk dalam wilayah administrasi Tana Lia.

Tabel 3.5. Nama dan Luas Pulau di Kabupaten Tana Tidung

No.	Nama Pulau	Luas (ha)	No.	Nama Pulau	Luas (ha)
1.	Baru	92,78	21.	Sebidai Selatan	46,08
2.	Baru Lumot	81,95	22.	Sebidai Utara	18,96
3.	Bekaro	102,80	23.	Sekabat	51,50
4.	Bengkalung	184,65	24.	Sekapal	84,46
5.	Fani	264,02	25.	Sengato	3.484,85
6.	Ijap	2.883,18	26.	Sengato Tengah	88,47
7.	Iting-iting	972,08	27.	Sepakang	13,61
8.	Kranggasan Barat	355,40	28.	Sesayap	119,83
9.	Kranggasan Timur	331,24	29.	Siambun	74,53
10.	Linuang Bujung	1.908,88	30.	Sida	4.598,80
11.	Lisan	17,72	31.	Singa	78,19
12.	Mandul	35.291,76	32.	Sumbing	76,83
13.	Mandul Lumot	3.397,90	33.	Tembalang	220,58
14.	Mangkudulis Besar	26.127,22	34.	Tembangan	1.150,86
15.	Mangkudulis Kecil	3.942,14	35.	Tempodus	48,91
16.	Mengkasak	1.696,90	36.	Tengku Dacing	1.760,39
17.	Mensatul	851,90	37.	Tiga	516,86
18.	Saka	19,50	38.	Tiram	29,84
19.	Sapunti	147,88	39.	Umbus	38,2
20.	Sebidai	173,16			

Sumber :Bappeda dan Litbang Kab. Tana Tidung , 2020

3.1.5. Hidrologi dan Hidrogeologi

Kabupaten Tana Tidung didasarkan dari hidrologinya terdiri dari 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu : 1) Betayau, 2) Linuang Kayam, 3) Payau, 4) Sembakung, 5) Sesayap dan 6) Simbawang.

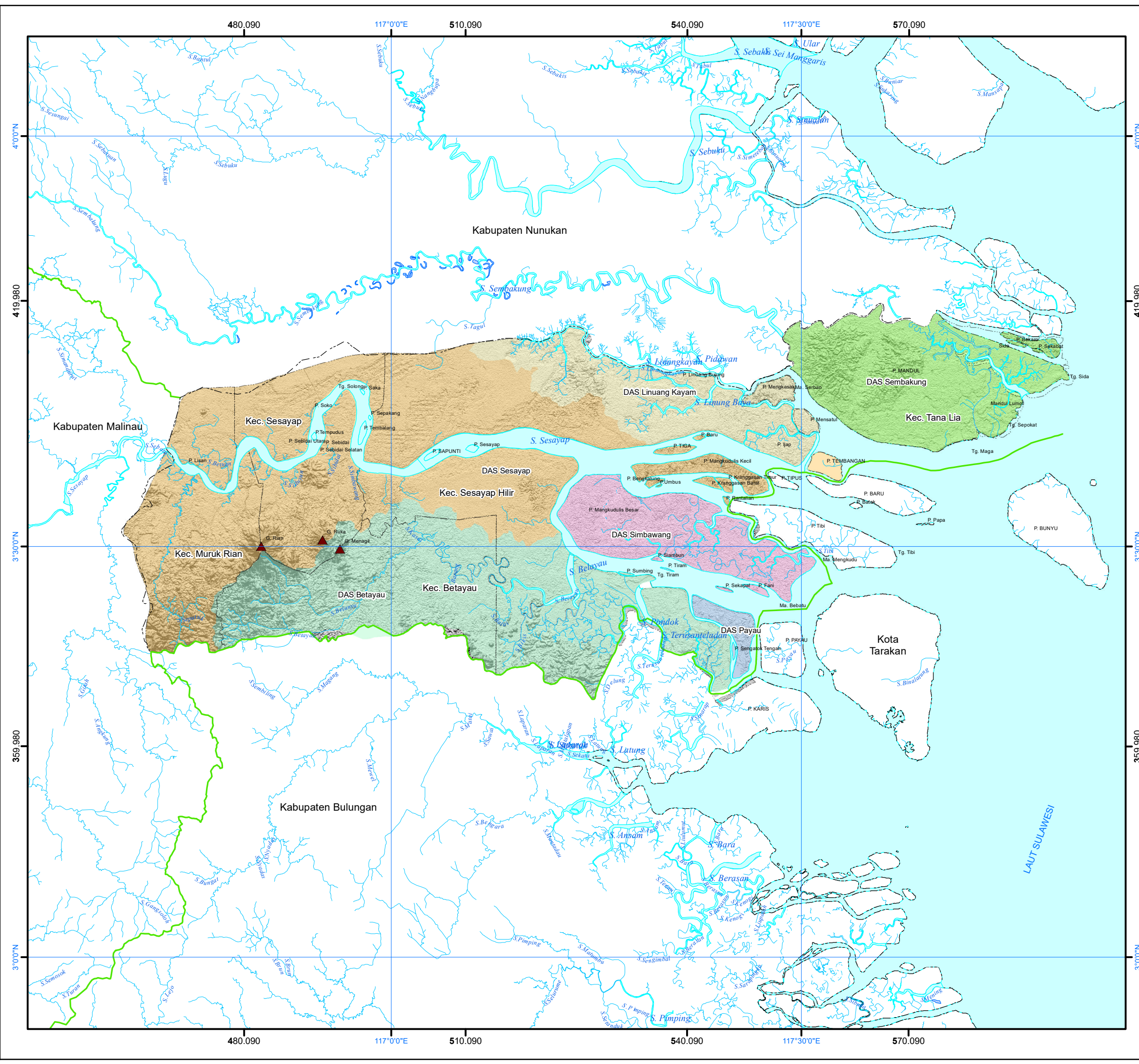
Berdasarkan luasannya maka DAS Sesayap merupakan yang terluas yaitu 145.510,24 ha. DAS ini menempati lokasi disekitar Sungai Sesayap, yaitu sungai yang terpanjang di Kabupaten Tana Tidung dengan panjang sekitar 270 km (Termasuk Wilayah Kabupaten Malinau). Luasan masing-masing DAS di Kabupaten Tana Tidung berdasarkan dari interpretasi Peta DAS yang bersumber dari peta RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 – 2032 dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Tabel 3.6. Nama dan Luas DAS di Kabupaten Tana Tidung

No	Nama DAS	Luas (ha)
1	Betayau	86.809,24
2	Linuang Kayam	34.410,04
3	Payau	3.601,69
4	Sembakung	46.370,33
5	SesayapS	145.510,24
6	Simbawang	27.566,48

Berdasarkan geohidrologi, Kabupaten Tana Tidung dibedakan menjadi tiga yaitu : 1) Daerah air tanah langka/tidak berarti seluas 20.948,20 ha, 2) Produktivitas akuifer rendah dengan luas 37.363,51 ha dan 3) Setempat aquifer produktif seluas 295.505,40 ha. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Tana Tidung mempunyai aquifer produktif yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan. Peta geohidrologi Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Berdasarkan peta cekungan air tanah, Kabupaten Tana Tidung seluruhnya tergolong dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Tanjung Selor seluas 288.020,77 ha. Peta Cat Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Gambar 3.6.



PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

U
SKALA 1:500.000
 0 1,75 3,5 7 10,5 14 17,5 Km.

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

KETERANGAN

▲ Gunung	Perairan	Garis Pantai
Batas Administrasi	Danau	Sungai
— — — — — Batas Provinsi	Wilayah Perairan	
— · — · — · — Batas Kabupaten		
— · — · — · — Batas Kecamatan		
— — — — — Batas Definitif		
NAMA DAS		
DAS Betayau		
DAS Linuang Kayam		
DAS Payau		
DAS Sembakung		
DAS Sesayap		
DAS Simbawang		

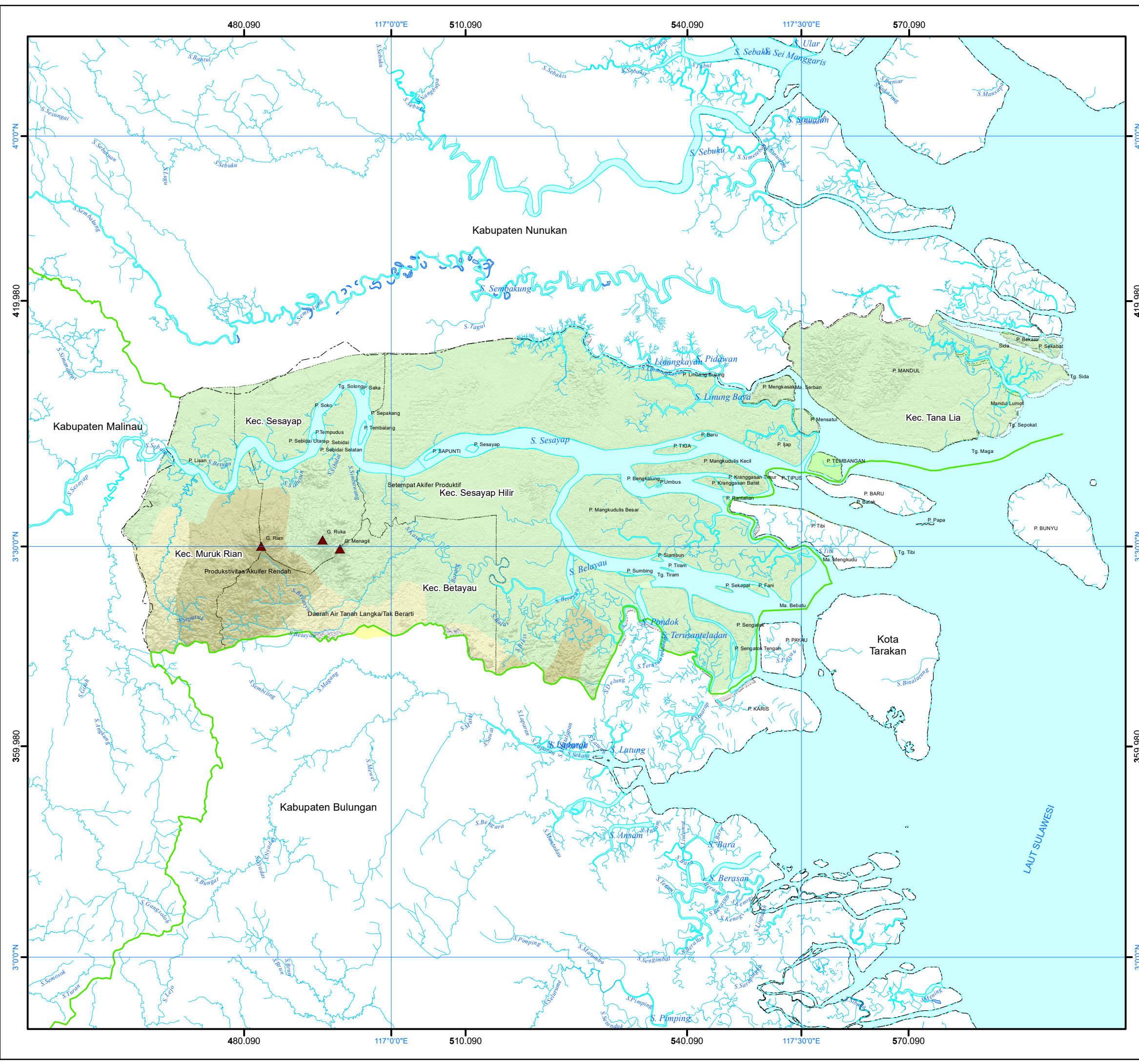
SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
2. Peta DAS, RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 - 2032, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
3. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
4. Data DEM SRTM 30m

CATATAN :

1. Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
2. Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.4
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(KLHS RPJMD)
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021 - 2026



PETA GEOHIDROLOGI

SKALA 1:500.000

0 1,75 3,5 7 10,5 14 17,5 Km.

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

Skala 1:7.500.000

KETERANGAN

<p>Gunung</p> <p>▲</p> <p>Batas Administrasi</p> <p>--- Batas Provinsi</p> <p>- - - Batas Kabupaten</p> <p>..... Batas Kecamatan</p> <p>— Batas Definitif</p> <p>Geohidrologi</p> <p>Daerah Air Tanah Langka/Tak Berarti</p> <p>Produktivitas Akuifer Rendah</p> <p>Setempat Akifer Produktif</p>	<p>Perairan</p> <p>— Laut</p> <p>— Danau</p> <p>— Sungai</p> <p>— Wilayah Perairan</p>
--	---

SUMBER DATA :

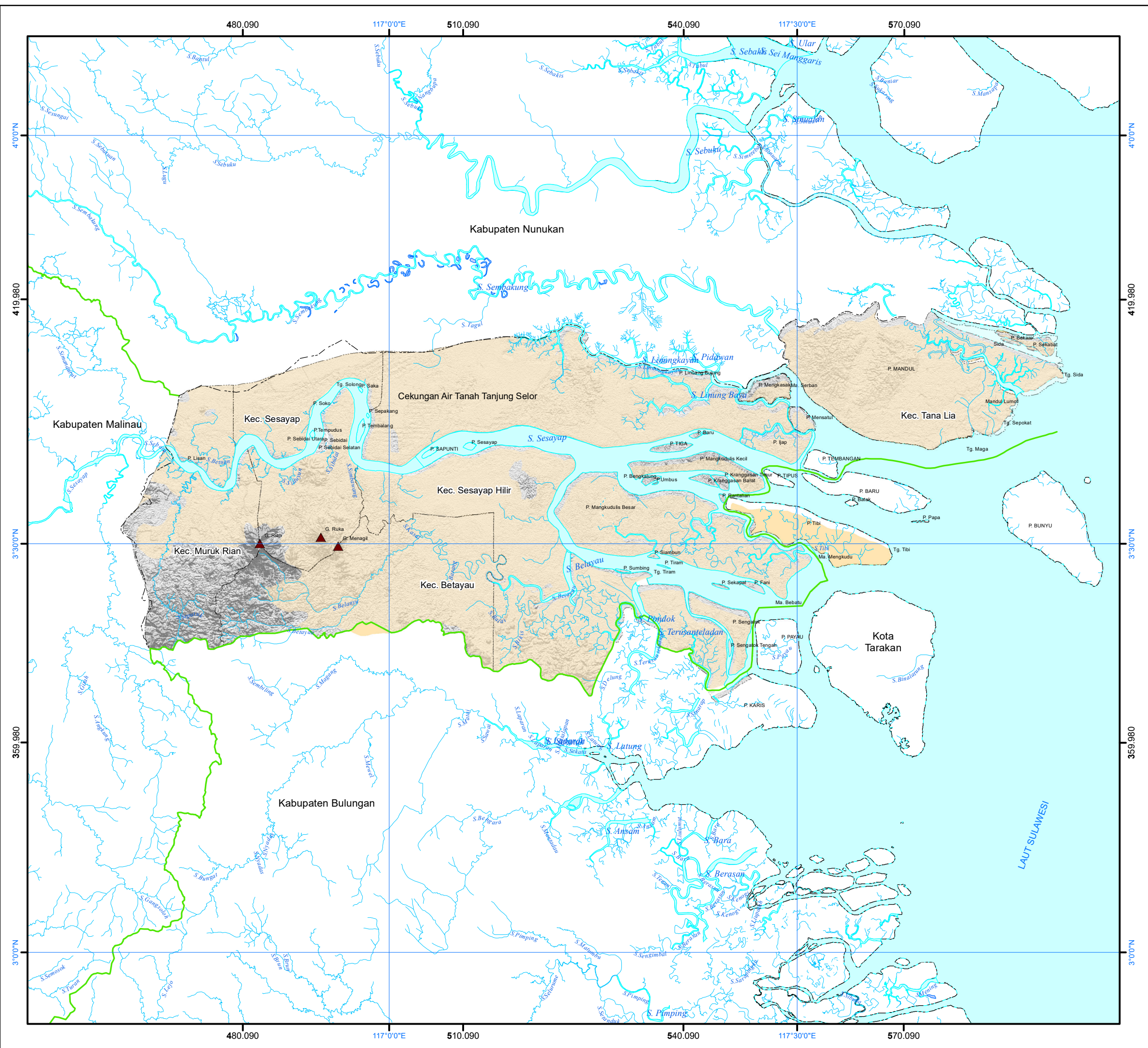
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
- Peta Geohidrologi, RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 - 2032, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
- Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
- Data DEM SRTM 30m

CATATAN :

- Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
- Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.5

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(KLHS RPJMD)
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021 - 2026



PETA CEKUNGAN AIR TANAH

U

SKALA 1:500.000

0 1,75 3,5 7 10,5 14 17,5 Km.

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

KETERANGAN

Gunung	Perairan
Batas Administrasi	Laut
Batas Provinsi	Danau
Batas Kabupaten	Sungai
Batas Kecamatan	Wilayah Perairan
Batas Definitif	

Cekungan Air Tanah (CAT)

CAT Tanjung Selor

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
2. Peta Cekungan Air Tanah, RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 - 2032, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
3. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
4. Data DEM SRTM 30m

CATATAN :

1. Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
2. Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.6
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(KLHS RPJMD)
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021 - 2026

3.1.6. Jenis Tanah

Di Kabupaten Tana Tidung, terdapat lima ordo tanah menurut sistem klasifikasi tanah USDA, yaitu : 1) Inseptisol, 2) Vertisol, 3) Entisol, 4) Ultisol dan 5) Histosol yang terbagi dalam sembilan great group.

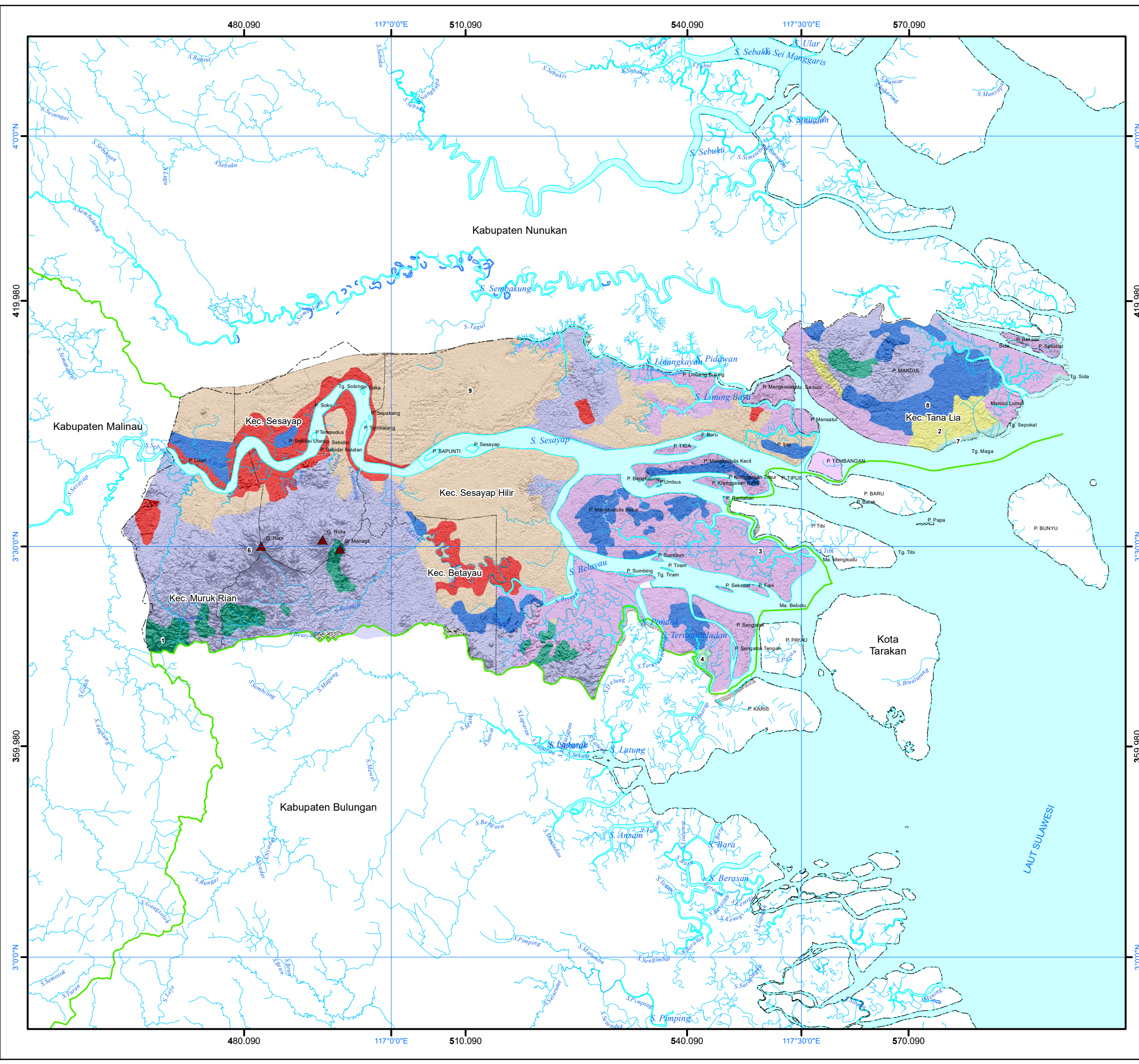
Ultisol merupakan jenis tanah terluas di Tana Tidung yaitu 119.305,13 ha yang terbagi dalam dua great group yaitu Tropaquults dan Tropodults. Jenis tanah lain yang sebarannya sangat luas adalah Entisol dan Vertisol, masing-masing dengan luas 103.499,44 ha dan Vertisol dengan luas 71.702,64. Bila dilihat dari great group maka jenis tanah yang paling luas yaitu Tropodults yaitu 98.940,77 ha, yang diikuti oleh Ultipsamments yaitu 96.019,79 ha.

Luasan jenis tanah di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 3.7, sedang sebarannya dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Tabel 3.7. Jenis Tanah dan Luasannya di Kabupaten Tana Tidung

No	Ordo Tanah	Great Group	Luas (ha)
1	Inseptisol	Dystropepts	9.619,33
		Tropaquepts	378,22
	Sub Jumlah		9.997,55
2	Vertisol	Hydraquerts	71.702,64
		Sub Jumlah	
3	Ultisol	Tropaquults	20.364,36
		Tropodults	98.940,77
	Sub Jumlah		119.305,13
4	Entisol	Tropopsamments	1.140,95
		Ultipsamments	96.910,79
		Fluvaquents	5.447,70
	Sub Jumlah		103.499,44
5	Histosol	Troposapristis	29.024,62
		Sub Jumlah	

Sumber : Hasil Perhitungan dari Peta Jenis Tanah Kab. Tana Tidung



PETA JENIS TANAH

SKALA 1:500.000

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

Skala 1:7.500.000

KETERANGAN

<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — — — — — Batas Provinsi - - - - - Batas Kabupaten Batas Kecamatan — Batas Definitif <p>Jenis Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Dystropepts 2 Fluvaquents 3 Hydraquerts 4 Tropaquerts 5 Tropaquits 6 Tropodults 7 Tropopsamments 8 Troposaprists 9 Ustipsamments 	<p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Laut Danau Sungai Wilayah Perairan
---	--

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
2. Peta Jenis Tanah, RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 - 2032, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
3. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
4. Data DEM SRTM 30m

CATATAN :

1. Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
2. Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.7

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(KLHS RPJMD)

KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN 2021 - 2026



3.1.7. Klimatologi

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan tahun 2020 yang dikutip dalam Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2021 (BPS Kab. Tana Tidung, 2021), diperoleh kondisi unsur-unsur iklim sebagai berikut :

- Suhu udara berkisar dari yang terendah pada bulan Januari yaitu 22,80 °C dan tertinggi pada bulan Mei dan Juni yaitu 35,5 °C. Suhu rata-rata terendah yaitu 27,06 °C pada bulan Juli dan tertinggi yaitu 28,17 pada bulan Mei.
- Kelembaban udara paling rendah yaitu 44,00 % pada bulan Mei dan tertinggi yaitu 100,00 % pada bulan Juli, Agustus dan November. Kelembaban rata – rata terendah pada bulan April yaitu 83,47% dan tertinggi pada bulan Juli yaitu 87,00%.
- Kecepatan angin maksimum paling rendah pada bulan Agustus yaitu 7,72 knot dan tertinggi pada bulan Maret yaitu 20,58 knot.
- Tekanan udara paling rendah pada bulan Mei dan November yaitu 1.003,2 mb dan tertinggi pada bulan Februari yaitu 1.015,3 mb.
- Jumlah curah hujan tahun 2020 adalah 2.779,6 mm sehingga curah hujan rata-rata bulanan 231,63 mm. Curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Juni yaitu 131,1 mm dan tertinggi pada bulan Desember yaitu 492,1 mm.
- Jumlah hari hujan tahun 2020 sebanyak 247 hari dengan hari hujan paling rendah pada bulan April yaitu 16 hari dan tertinggi pada bulan Oktober yaitu 23 hari.
- Rata-rata harian penyinaran matahari berkisar dari yang paling rendah yaitu 57,54% pada bulan September dan 86,94% pada bulan April



Tabel 3.8. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan, 2020

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)			Kecepatan Angin (knot)			Tekanan Udara (mb)			Jumlah Curah Hujan (mm ³)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (%)
	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks			
Januari	22,80	27,11	34,80	53,00	86,58	99,00	-	1,27	12,35	1.005,2	1.010,08	1.015,0	257,3	21	59,45
Februari	23,00	27,34	35,10	51,00	83,98	98,00	-	1,64	8,23	1.006,2	1.011,06	1.015,3	229,7	22	62,81
Maret	23,60	27,42	34,00	46,00	85,90	99,00	-	1,62	20,58	1.006,0	1.010,23	1.014,5	246,7	20	69,49
April	23,80	28,03	34,30	52,00	83,47	98,00	-	1,67	8,23	1.005,3	1.010,04	1.014,2	156,2	16	86,94
Mei	23,90	28,17	35,50	44,00	85,56	99,00	-	1,28	10,80	1.003,2	1.009,05	1.014,6	171,1	19	67,58
Juni	23,60	27,37	35,50	52,00	86,93	99,00	-	1,25	8,75	1.005,1	1.009,07	1.012,4	131,1	20	55,10
Juli	23,00	27,06	34,20	57,00	87,00	100,00	-	1,14	8,75	1.004,3	1.008,37	1.012,1	235,2	22	69,21
Agustus	23,00	27,89	35,30	53,00	83,73	100,00	-	1,14	7,72	1.004,1	1.008,74	1.013,1	180,0	21	84,17
September	23,20	27,29	34,60	53,00	86,27	99,00	-	1,41	13,38	1.003,5	1.008,79	1.012,7	135,3	21	57,54
Oktober	23,00	27,34	35,40	51,00	86,53	98,00	-	1,44	14,40	1.003,2	1.008,01	1.014,0	381,6	23	63,71
November	23,20	27,63	34,20	56,00	85,16	100,00	-	1,30	8,23	1.004,2	1.008,65	1.013,2	163,3	21	69,09
Desember	22,70	27,14	34,80	51,00	86,95	99,00	-	1,07	12,35	1.003,0	1.007,79	1.011,5	492,1	21	55,19

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung. 2021)



Kondisi unsur-unsur iklim di Kabupaten Tana Tidung berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan dari tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

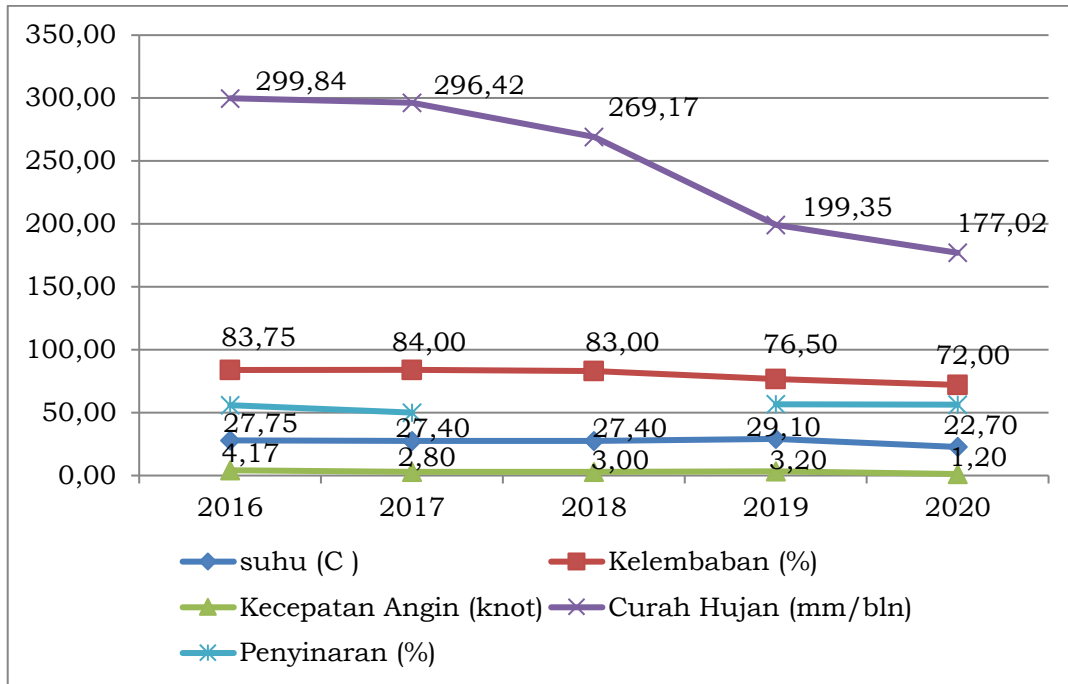
Tabel 3.9. Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari, 2016-2020

Uraian	Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Suhu (°C)					
– Maksimum	34,00	32,4	32,4	34,3	35,5
– Minimum	23,70	24,1	24,0	23,8	22,7
– Rata-rata	27,75	27,4	27,4	29,1	29,1
Kelembaban Udara (%)					
– Maksimum	86,00	86,0	95,0	97,0	100,0
– Minimum	81,00	82,0	67,0	56,0	44,0
– Rata-rata	83,75	84,0	83,0	76,5	72
Tekanan Udara (mb)	1.009,83	1.009,4	1.009,4	1.010,0	1.009,2
Kecepatan Angin (knot)	4,17	2,8	3,0	3,2	1,2
Curah Hujan (mm³)	3.598,10	3.557,0	3.230,0	2.392,2	2.124,2
Penyinaran Matahari (%)	55,75	50,0	-	56,6	56,3

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung., 2017 - 2021

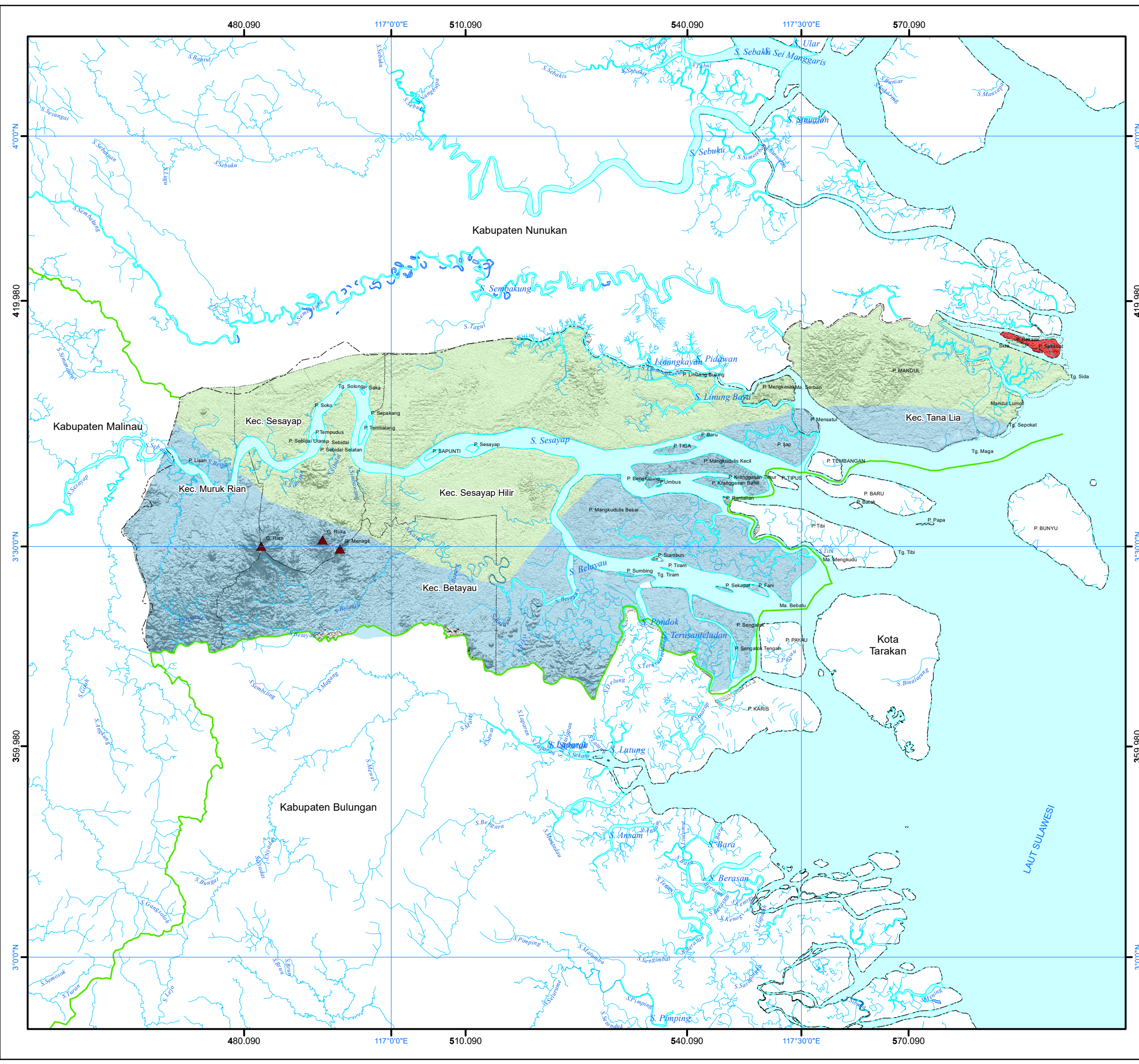
Berdasarkan data perkembangan rata-rata iklim sebagaimana tabel di atas, memperlihatkan bahwa perkembangan curah hujan selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 curah hujan rata-rata di Kabupaten Tana Tidung sebesar 299,84 mm/bulan dan pada tahun 2020 hanya sebesar 177,02 mm/bulan. Demikian pula dengan kelembaban, kecepatan angin, curah hujan dan penyinaran matahari.

Kelembaban udara pada tahun 2016 sebesar 83,75 % dan pada tahun 2020 turun menjadi 72,00 %. Kecepatan angin pada tahun 2016 sebesar 4,17 knot dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,2 knot. Adapun penyinaran matahari pada tahun 2016 sebesar 55,75 % dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 65,30 %. Trend perkembangan rata-rata iklim di Kabupaten Tana Tidung secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8. Trend Perkembangan Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari, 2016-2020

Berdasarkan peta curah hujan dari RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 – 2032 maka ada tiga zonasi curah hujan di Kabupaten Tana Tidung yaitu : 1) Curah hujan 2.500 – 2.700 mm/tahun seluas 1.023,57 yang terjadi di Pulau Sekabat Kecamatan Tana Lia, 2) Curah hujan 2.800 – 3.100 mm/tahun seluas 167.036,92 ha dan 3) Curah hujan 3.100 – 3.400 mm/tahun seluas 164.257,98 ha. Berdasarkan data curah hujan tersebut maka curah hujan di Kabupaten Tana Tidung sangat tinggi dalam satu tahunnya yaitu minimal 2.700 mm, bahkan curah hujan yang dominan adalah lebih dari 2.800 mm/tahun. Sebaran curah hujan Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Gambar 3.9.



PETA KLIMATOLOGI (CURAH HUJAN)

U

SKALA 1:500.000

0 1,75 3,5 7 10,5 14 17,5 Km.

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

KETERANGAN

<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — — — — — Batas Provinsi - - - - - Batas Kabupaten Batas Kecamatan — Batas Definitif <p>Curah Hujan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2500 - 2700 mm/th ■ 2800 - 3100 mm/th ■ 3100 - 3400 mm/th 	<p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Laut — Danau — Sungai — Wilayah Perairan
--	--

Gunung ▲

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
2. Peta Curah Hujan, RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 - 2032, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
3. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
4. Data DEM SRTM 30m

CATATAN :

1. Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
2. Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.9

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(KLHS RPJMD)
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021 - 2026



3.2. Kejadian Bencana

Selama periode 2017 – 2020 tercatat bencana alam di Kabupaten Tana Tidung sebanyak 57 kejadian dengan beragam jenis bencana dan lokasi kejadian yang tersebar di berbagai lokasi di Kabupaten Tana Tidung. Kejadian bencana tersebut menyebabkan kerusakan rumah dan/atau lahan dari ringan hingga berat. Kejadian bencana yang paling banyak pada kurun waktu tersebut adalah kebakaran baik kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran pemukiman/bengkel. Terkait kejadian bencana tersebut telah dilakukan tindakan/ penanganan memberi bantuan sandang dan pangan, evakuasi korban, pemadaman, pencarian korban dan lain-lain. Kejadian bencana yang menyebabkan korban jiwa adalah kecelakaan speedboat yang pada tahun 2018 menyebabkan tiga orang meninggal dunia. Selain itu kejadian tenggelam di sungai menyebabkan dua orang meninggal dunia pada lokasi yang terpisah. Secara lebih lengkap, kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Tana Tidung, 2017-2020

No	Desa/Kecamatan	Tgl Kejadian	Jenis Bencana	Korban	Rusak Ringan	Rusak Berat	Tindakan/Penanganan	Keterangan
1	Tana Merah	19 April 2017	Kebakaran pemukiman	3 KK	2 Unit	1 Unit	Memberi bantuan sandang & pangan	Konselting Listrik
2	Boang Baru	25 Juni 2017	Kebakaran pemukiman	3 KK	1 Unit	2 Unit	Memberi bantuan sandang & pangan	Kompas
3	Bebatu	30 Juni 2017	Kebakaran pemukiman	1 KK	-	1 Unit	Memberi bantuan sandang & pangan	Konselting Listrik
4	Limbu Sedulun	07 Desember 2017	Kebakaran Kantor Desa	-	-	1 Unit	-	Konselting Listrik
5	Tideng Pale	14 Juli 2017	Kebakaran Bengkel	-	1 Unit	-	-	Api Las dan bensin
6	Sepala Dalung	27 Agustus 2017	Kecelakaan Speedboat	17 dewasa. 2 balita	-	1 Unit	Evakuasi korban	Korban Selamat
7	Tdg Pale Timur	23 Oktober 2017	Kebakaran pemukiman	1 KK	-	1 Unit	memberi bantuan sandang dan pangan	zensit
8	Tdg Pale Timur	31 Oktober 2017	Puting beliung	3 KK	-	4 Unit	Memberi bantuan sandang & pangan	Korban Selamat
9	Sesayap	20 Nopember 2017	Puting beliung	1 KK	-	1 Unit	Memberi bantuan sandang & pangan	Korban Selamat
10	Seputuk	4 Januari 2018	Kebakaran pemukiman	5 KK	1 Unit	4 Unit	Memberi bantuan sandang & pangan	Konselting Listrik
11	Kapuak-Seputuk	29 Januari 2018	pencarian korban hilang air	3 orang	-	-	Ikut serta dalam proses pencarian	Berhasil diketemukan
12	Tideng Pale	10 Juli 2018	Puting Beliung	1 KK	1 Unit	-	Memberi bantuan sandang & pangan	Korban Selamat
13	Bebatu-Sengkong	13 Juli 2018	Kecelakaan Speedboat	21 dewasa, 3 balita	-	1 Unit	Evakuasi korban	3 meninggal yang lain selamat
14	Gunawan	21 Juli 2018	Banjir	7 KK	7 unit	-	Memberi bantuan sandang & pangan	Korban Selamat
15	Seputuk	15 Oktober 2018	pencarian korban hilang air	1 orang	-	-	Ikut serta dalam proses pencarian	meninggal dunia
16	Bebatu/Mangkudulis	2 Januari 2019	Kecelakaan Speedboat	21 orang	1 Unit	-	Evakuasi korban	Korban Selamat
17	Sepala Dalung/PT.TUM	28 Februari 2019	Kebakaran hutan & lahan	-	0,5 ha	-	Pemadaman dilakukan PT.TUM	Berhasil dipadamkan
18	Tideng Pale	4 Maret 2019	Kebakaran hutan & lahan	-	0,5 ha	-	Pemadaman dilakukan PMK	Berhasil dipadamkan

No	Desa/Kecamatan	Tgl Kejadian	Jenis Bencana	Korban	Rusak Ringan	Rusak Berat	Tindakan/Penanganan	Keterangan
19	Sengkong	5 Maret 2019	Kebakaran hutan & lahan	_	0,5 ha	_	Swadaya Masyarakat	Berhasil dipadamkan
20	Tana Merah	5 Maret 2019	Kebakaran hutan & lahan	_	5,0 ha	_	Swadaya Masyarakat	Berhasil dipadamkan
21	Tideng Pale	6 Maret 2019	Kebakaran hutan & lahan	_	3,0 ha	_	Swadaya Masyarakat	Berhasil dipadamkan
22	Sebidai	10 Maret 2019	Kebakaran hutan & lahan	_	0,5 ha	_	Pemadaman dilakukan PMK	Berhasil dipadamkan
23	Sepala Dalung	13 Maret 2019	Kebakaran hutan & lahan	_	1,5 ha	_	Swadaya Masyarakat	Berhasil dipadamkan
24	Sepala Dalung	14 Maret 2019	Kebakaran hutan & lahan	_	1,5 ha	_	Pemantauan Lokasi Kebakaran	Berhasil dipadamkan
25	Tideng Pale	16 Maret 2019	Kebakaran hutan & lahan	_	1,0 ha	_	Pemadaman dilakukan PMK	Berhasil dipadamkan
26	Tideng Pale	16 Maret 2019	Kebakaran hutan & lahan	_	0,25 ha	_	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
27	Selor	18 Maret 2019	Kebakaran hutan & lahan	_	4,0 ha	_	Pemadaman Satgas & Masyarakat	Berhasil dipadamkan
28	Tideng Pale	19 Maret 2019	Kebakaran hutan & lahan	_	0,5 ha	_	Pemadaman PMK & Masyarakat	Berhasil dipadamkan
29	Sepala Dalung	8 Maret 2019	Korban Tenggelam	1 Orang (Anak 8 Tahun)	-	-	Evakuasi korban	Meninggal dunia
30	Sesayap Selor	10 April 2019	Kebakaran hutan & lahan	_	0,5 ha	_	Pemadaman PMK & Masyarakat	Berhasil dipadamkan
31	Desa Bebakung	6 Juli 2019	Kebakaran pemukiman	_	1 Unit	_	Memberi bantuan sandang & pangan	Memberi bantuan sandang dan pangan
32	Limbu Sedulun	7 Juli 2019	Longsor	_	1 Unit	_	Swadaya Masyarakat	Korban Selamat
33	Sebawang	14 Juli 2019	Jembatan Amblas	_	-	-	Pemantauan Lokasi Jembatan Amblas	Perlu koordinasi dengan pihak Kantor PU
34	Rian	23 juli 2019	Kebakaran hutan & lahan	_	1 ha	_	Pemadaman dilakukan PMK	Berhasil dipadamkan
35	Tideng Pale	12 Agustus 2019	Kebakaran hutan & lahan	_	0,25 ha	_	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
36	Tideng Pale	28 Agustus 2019	Kebakaran pemukiman	_	8X16 m	_	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
37	Sapari	10 September 2019	Pengecekan titik hostpot	_	-	-	Mengecek lokasi	Tidak terjadi kebakaran
38	Seputuk	11 September 2019	Kebakaran Lahan	_	1,0 ha	_	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
39	Belayan Ari	12 September 2019	Pengecekan titik hostpot	_	-	-	Mengecek lokasi	Tidak terjadi

No	Desa/Kecamatan	Tgl Kejadian	Jenis Bencana	Korban	Rusak Ringan	Rusak Berat	Tindakan/Penanganan	Keterangan
								kebakaran
40	Sebidai	21 September 2019	Kebakaran Lahan	-	2,0 ha	-	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
41	Kapuak	23 September 2019	Kebakaran Lahan	-	2,0 ha	-	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
42	Sebidai	24 September 2019	Kebakaran Lahan	-	0,5 ha	-	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
43	Seludau	24 September 2019	Kebakaran Lahan	-	3,0 ha	-	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
44	Mendupo	25 September 2019	Kebakaran Lahan	-	2,0 ha	-	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
45	Sebawang	26 September 2019	Kebakaran Lahan	-	1,0 ha	-	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
46	Kapuak	28 September 2019	Kebakaran Lahan	-	7,0 ha	-	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
47	Sedulun	9 Oktober 2019	Kebakaran Lahan	-	0,5 ha	-	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
48	Kapuak	9 Oktober 2019	Kebakaran Lahan	-	2,0 ha	-	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
49	Bandan Bikis	29 Oktober 2019	Kebakaran Lahan	-	10 ha	-	Pemantauan	Perlu peninjauan lebih lanjut
50	Tideng Pale	27 Nopember 2019	Kebakaran Lahan	-	2,0 ha	-	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
51	Tideng Pale	12 Januari 2019	Korban Tenggelam	1 Orang	-	-	Melakukan Pencarian dan Evakuasi Korban	Meninggal Dunia
52	Bebakung	12 Juni 2019	Kebakaran Pemukiman	-	1 Unit	-	Pemantauan dan Pemadaman	Berhasil dipadamkan
53	Sesayap	13 Januari 2020	Kebakaran Pemukiman	-	-	3 Unit	Memberi bantuan sandang & pangan	Kompas Meledak
54	Tideng Pale	7 Februari 2020	Kecelakaan Speedboat (Non Reguler SB Antasena)	13 Orang	-	-	Evakuasi korban	Korban Selamat
55	Rian	25 Juli 2020	Kebakaran Pemukiman	6 Orang	-	1 Unit (6X8 m)	Memberi bantuan sandang & pangan	Korban Selamat
56	Sedulun	04 September 2020	Kebakaran Pemukiman	2 Orang	-	1 Unit (6X8 m)	Memberi bantuan sandang & pangan	Korban Selamat
57	Tideng Pale	26 September 2020	Kebakaran Pemukiman	4 Orang	1 Unit	-	Memberi bantuan sandang & pangan	Korban Selamat

Sumber : BPBD Kab. Tana Tidung, 2021

3.3. Karakteristik Penggunaan Lahan

3.3.1. Tipe Penggunaan Lahan

Hutan rawa sekunder merupakan penggunaan lahan yang paling luas di Kabupaten Tana Tidung, yang mencapai 505,05 km² atau 24,09% dari luas lahan di Kabupaten Tana Tidung. Penggunaan lahan lain yang cukup luas berupa semak belukar rawa dan hutan lahan kering sekunder. Dalam hal penggunaan lahan yang berupa aktivitas ekonomi maka tambak merupakan yang paling luas. Penggunaan lahan di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 3.11 dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 3.10.

Tabel 3.11. Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Tidung, 2018

Tutupan Lahan		Luas (km ²)	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lahan Kering Primer	158,95	15.895	3,29
2	Hutan Lahan K. Sekunder	897,66	89.766	18,59
3	Hutan Mangrove Primer	9,76	976	0,20
4	Hutan Mangrove Sekunder	102,40	10.240	2,12
5	Hutan Rawa Primer	122,49	12.249	254
6	Hutan Rawa Sekunder	505,00	50.500	1046
7	Hutan Tanaman	5,24	524	0.11
8	Lahan Terbuka/Kosong	23,33	2.333	0,48
9	Pemukiman	24,78	2.478	0,51
10	Perkebunan	812,76	81.276	16,83
11	Pertambangan	59,86	5.986	1,24
12	Pertanian L.K. Campur Semak	68,18	6.818	1,41
13	Semak Belukar	470,16	47.016	9,74
14	Semak Belukar Rawa	840,61	84.061	17,41
15	Tambak	727,40	72.740	15,06
Jumlah		4.828,58	482.858	100,00

Sumber :Bappeda dan Litbang Kab. Tana Tidung , 2020

3.3.2. Pola Ruang (RTRW)

Terdapat 16 pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Tana Tidung 2012 – 2032, namun tiga yang dominan yaitu : 1) Perkebunan (81.446,49 ha), 2) Hutan Produksi tetap (65.229,35 ha) dan 3) Tambak (62.018,81 ha). Bila lebih spesifik maka kegiatan

perkebunan lebih didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Pola ruang di Kabupaten Tanah Tidung secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.12 dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 3.11.

Tabel 3.12. Pola Ruang di Kabupaten Tana Tidung

No	Pola Ruang	Luas (ha)
1	Hutan Produksi Tetap (HP)	165.229,35
2	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	9.421,21
3	Hortikultura (HR)	3.702,63
4	Perkebunan (KBN)	81.446,49
5	Kawasan Industri Skala Sedang (KI)	211,33
6	Kawasan Kantor Pemerintahan (KP)	15.743,46
7	Pertanian Lahan Basah (LB)	25.409,70
8	Pertanian Lahan Kering (LK)	12.545,05
9	Pariwisata Buatan (PB)	329,32
10	Kawasan Permukiman Perdesaan (PD)	9.257,92
11	Kawasan Permukiman Perkotaan (PK)	8.169,58
12	Tambak (TAM)	62.018,81
13	TPI	22,75
14	Peternakan (TR)	260,55
15	Kawasan Lindung	20.352,09
16	Kawasan Peruntukan Lainnya	240,28

3.3.3. Kawasan Hutan

Berdasarkan status kawasan hutan, wilayah Kabupaten terbagi menjadi : 1) Hutan Produksi Tetap (HP), 2) Hutan Produksi Terbatas (HPT), 3) Areal Penggunaan Lain (APL)/Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dan 4) Tubuh Air. Hutan Produksi Tetap mencakup seluruh wilayah Kecamatan Muruk Rian, sebagian besar wilayah Kecamatan Betayau dan sebagian wilayah Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir. Hutan Produksi Terbatas terdapat di Kecamatan Tana Lia khususnya di bagian tengah Pulau Mandul. Untuk APL/KBNK terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Sesayap,



Sesayap Hilir dan Tana Lia serta sebagian kecil wilayah Kecamatan Betayau. Sebaran kawasan hutan dapat dilihat pada Gambar 3.12.

3.3.4. Tutupan Lahan

Tutupan lahan paling luas di Kabupaten Tana Tidung adalah hutan lahan kering sekunder yaitu 82.970,26 ha. Hutan lahan kering sekunder merupakan lahan kering yang berupa hutan muda yang umumnya ditumbuhi vegetasi pohon yang berukuran kecil. Mengingat bahwa hutan sekunder terbentuk Karena adanya aktivitas pada hutan primer yang diantaranya disebabkan adanya kegiatan/aktivitas ekonomi seperti pembukaan lahan untuk pertanian, pertambangan dan lain-lain. Tutupan lahan lain yang cukup luas adalah berupa sungai karena memang wilayah Kabupaten Tana Tidung terdapat beberapa sungai, yang terbesar dan terpanjang adalah Sungai Sesayap. Maraknya kegiatan perkebunan juga nampak dari tutupan lahan yang mencapai 66.875,52 ha utamanya adalah perkebunan kelapa sawit yang dominannya berupa PBS dan sebagian adalah kebun masyarakat. Tutupan lahan lain yang cukup luas adalah hutan rawa sekunder yaitu 58.734,44 ha yang terdapat dilahan basah dengan ekosistem gambut yang mendapat tekanan kuat sehubungan dengan aktivitas manusia yang bermotif ekonomi. Padahal lahan gambut bersifat fragil atau mudah rusak. Luas tutupan lahan di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 3.13, dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 3.13.



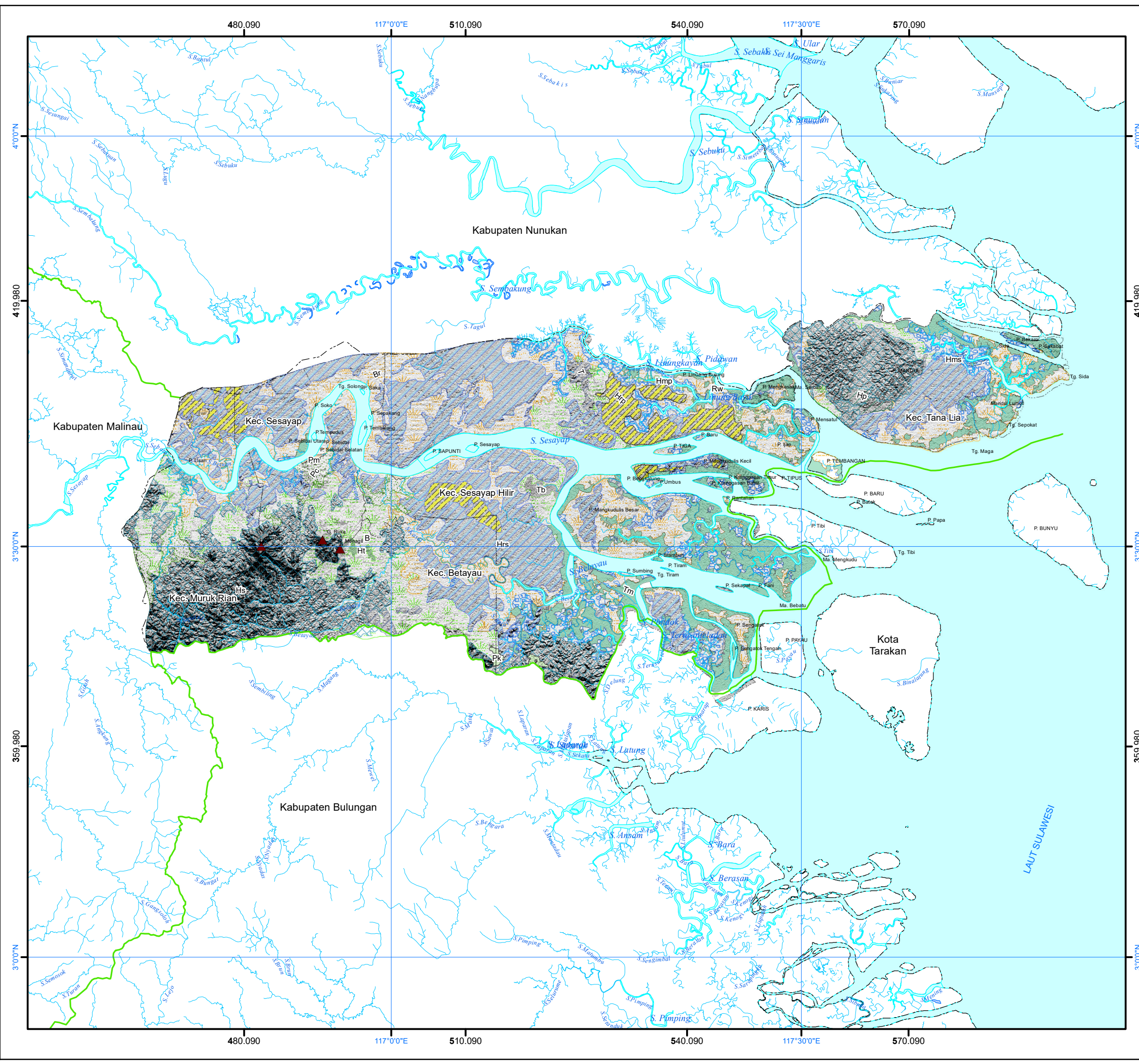
Tabel 3.13. Tutupan Lahan di Kabupaten Tana Tidung

No	Tutupan Lahan	Luas (ha)
1	Danau/Situ	215,63
2	Gardu Induk	1,87
3	Hutan Lahan Kering Primer	5.587,15
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	82.970,26
5	Hutan Mangrove Primer	13.461,17
6	Hutan Mangrove Sekunder	140,48
7	Hutan Rawa Primer	18.962,22
8	Hutan Rawa Sekunder	58.734,44
9	Hutan Tanaman	7.111,83
10	Perkebunan/Kebun	66.875,52
11	Permukiman dan Tempat Kegiatan	989,49
12	Sawah	153,69
13	Semak Belukar	20.856,04
14	Sungai	72.549,04
15	Tambak	42.866,98
16	Tambang	4.490,77
17	Tanah Kosong/Gundul	263,89
18	Tegalan/Ladang	805,04

3.3.5. Kawasan Konservasi

Luas kawasan konservasi di Kabupaten Tana Tidung sekitar 1.142,48 ha yang sebagian besar berlokasi 10 pulau pulau di Kabupaten Tana Tidung. Areal konservasi tersebut antara lain terdapat di P. Sebidai (247,95 ha), P. Tembalang (220,46 ha), P. Tanjung Urong (203,21 ha) dan P. Sesayap (119,81 ha). Sebaran kawasan konservasi dapat dilihat pada Gambar 3.14.

Selain kawasan konservasi, sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 851/MENLHK-PKTI/IPSDH/PLA.1/2/2020 Tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB), terdapat 20.151,02 ha wilayah Kabupaten Tana Tidung yang masuk dalam areal Indikatif Pemberian Izin Baru yang terdiri dari 17.707,40 ha lahan gambut dan 2.443,62 ha hutan alam primer. Lokasi PIPIB di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat Pada Gambar 3.15



PETA PENGGUNAAN LAHAN (LANDUSE)

U

SKALA 1:500.000

0 1,75 3,5 7 10,5 14 17,5 Km.

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

KETERANGAN

Gunung	Perairan
Batas Administrasi	Laut
Batas Provinsi	Danau
Batas Kabupaten	Sungai
Batas Kecamatan	Wilayah Perairan
Batas Definitif	

Penggunaan Lahan (landuse)

	Hp - Hutan Lahan Kering Primer
	Hs - Hutan Lahan Kering Sekunder
	Hmp - Hutan Mangrove Primer
	Hms - Hutan Mangrove Sekunder
	Hrp - Hutan Rawa Primer
	Hrs - Hutan Rawa Sekunder
	Ht - Hutan Tanaman
	T - Lahan Terbuka/Kosong
	Pm - Pemukiman
	Pk - Perkebunan
	Tb - Pertambangan
	Pc - Pertanian Lahan Kering Campur Semak
	Rw - Rawa
	B - Semak Belukar
	Br - Semak Belukar Rawa
	Tm - Tambak

SUMBER DATA :

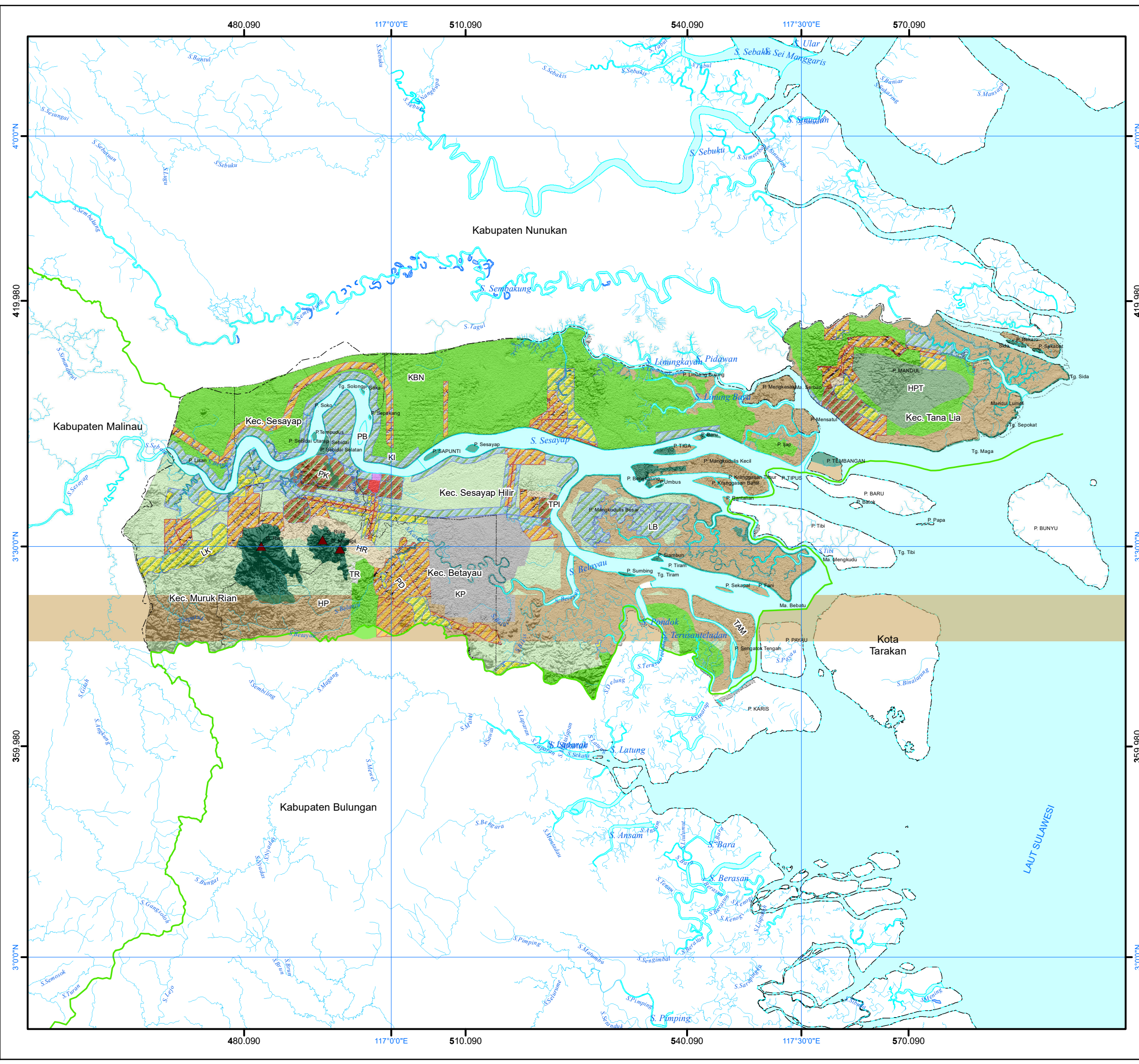
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
2. Peta Landuse Eksisting, RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 - 2032, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
3. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
4. Data DEM SRTM 30m

CATATAN :

1. Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
2. Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.10

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(KLHS RPJMD)
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021 - 2026**



PETA POLA RUANG

U
SKALA 1:500.000
 0 1,75 3,5 7 10,5 14 17,5 Km.

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

KETERANGAN

▲ Gunung	Perairan	Garis Pantai
Batas Administrasi	Danau	Sungai
— — — — — Batas Provinsi	Wilayah Perairan	
- - - - - Batas Kabupaten		
..... Batas Kecamatan		
— — — — — Batas Definitif		

Pola Ruang

- Hutan Produksi Tetap (HP)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Horticoltura (HR)
- Perkebunan (KBN)
- Kawasan Industri Skala Sedang (KI)
- Kawasan Kantor Pemerintahan (KP)
- Pertanian Lahan Basah (LB)
- Pertanian Lahan Kering (LK)
- Pariwisata Buatan (PB)
- Kawasan Pemukiman Perdesaan (PD)
- Kawasan Pemukiman Perkotaan (PK)
- Tambak (TAM)
- TPI (TPI)
- Peternakan (TR)
- Kawasan Lindung
- Kawasan Peruntukkan Lainnya

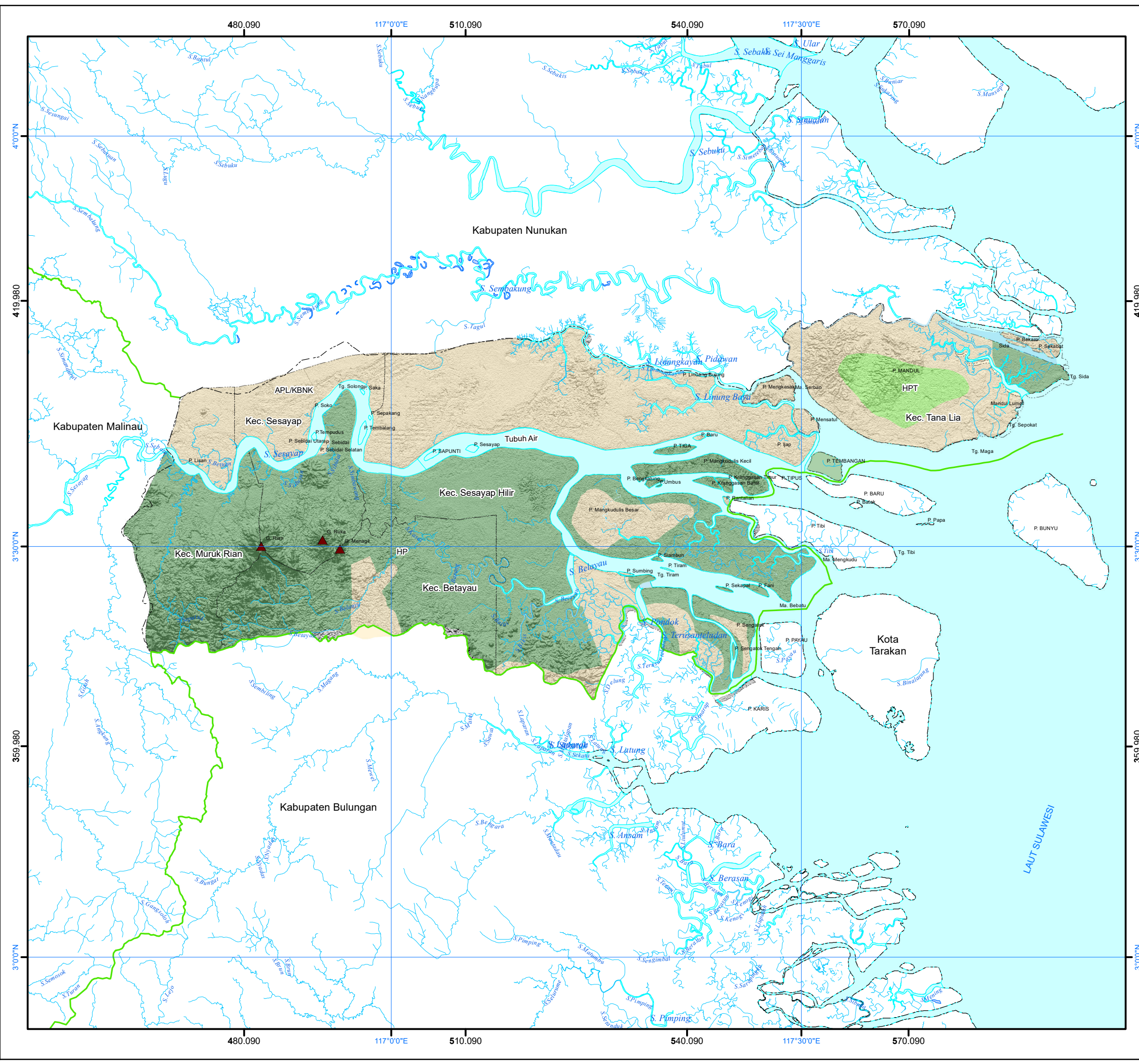
SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
2. Peta Pola Ruang, RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 - 2032, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
3. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
4. Data DEM SRTM 30m

CATATAN :

1. Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
2. Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.11
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(KLHS RPJMD)
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021 - 2026



PETA KAWASAN HUTAN

SKALA 1:500.000

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

KETERANGAN

<ul style="list-style-type: none"> ▲ Gunung Batas Administrasi --- Batas Provinsi - - - Batas Kabupaten Batas Kecamatan — Batas Definitif Status Kawasan Hutan ■ Areal Penggunaan Lain/Kawasan Budidaya Non Kehutanan (APL/KBNK) ■ Hutan Produksi (HP) ■ Hutan Produksi Terbatas (HPT) ■ Tubuh Air 	Perairan <ul style="list-style-type: none"> Laut Danau Sungai Wilayah Perairan Garis Pantai Danau Sungai Wilayah Perairan
--	--

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
- Peta Status Kawasan Hutan, RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 - 2032, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
- Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
- Data DEM SRTM 30m

CATATAN :

- Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
- Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.12

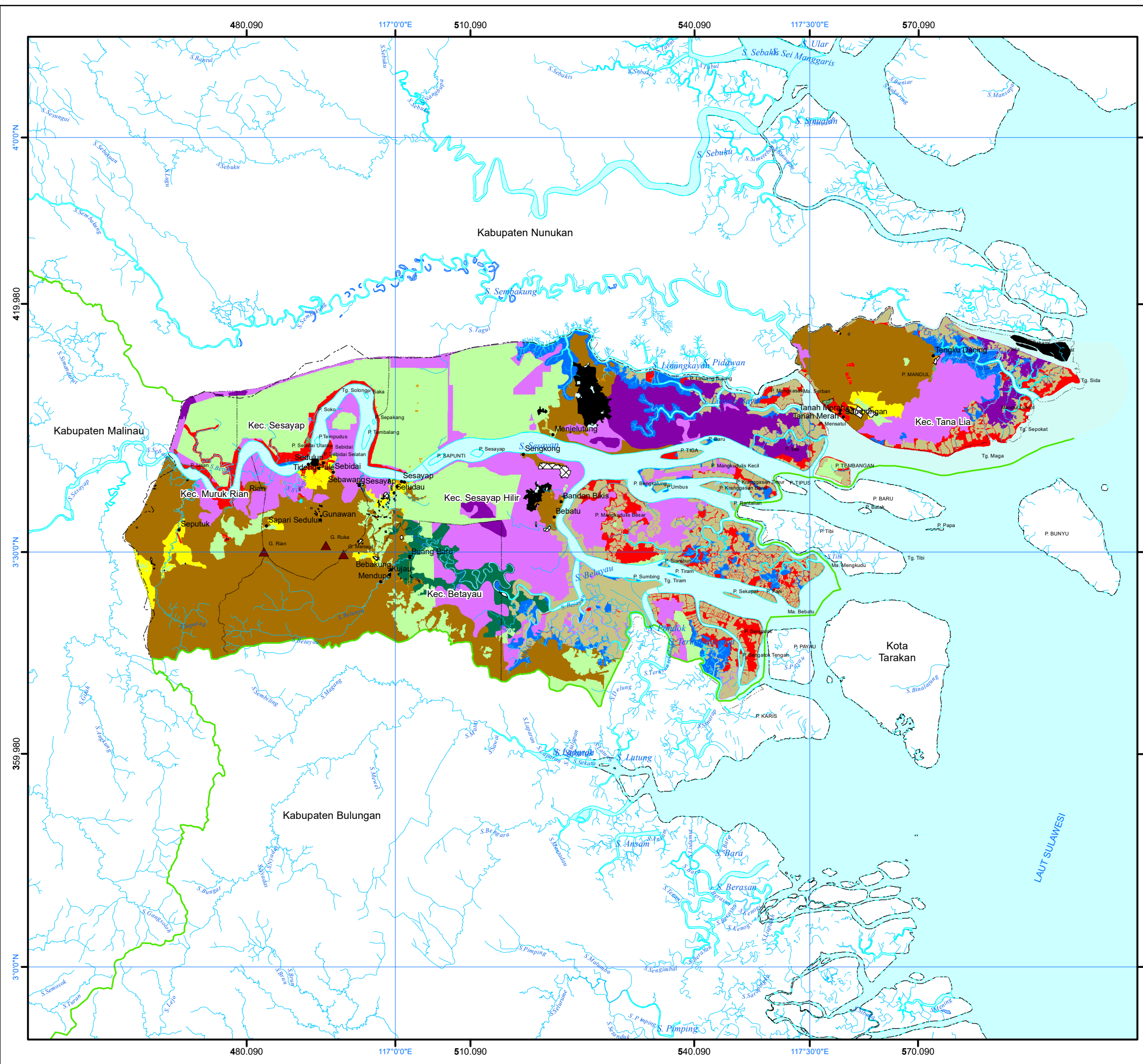
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(KLHS RPJMD)

KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN 2021 - 2026



PETA TUTUPAN LAHAN

SKALA 1:500.000

0 1,75 3,5 7 10,5 14 17,5 Km.

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

Skala 1:7.500.000

KETERANGAN

● Desa	Perairan	Garis Pantai
■ Ibukota Kabupaten	Danau	Sungai
▲ Gunung	Wilayah Perairan	

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Definitif

Jenis Tutupan Lahan

- Gardu Induk
- Hutan Lahan Kering Primer
- Hutan Lahan Kering Sekunder
- Hutan Mangrove Primer
- Hutan Mangrove Sekunder
- Hutan Rawa Primer
- Hutan Rawa Sekunder
- Hutan Tanaman
- Perkebunan/Kebun
- Permukiman dan Tempat Kegiatan
- Sawah
- Semak Belukar
- Tambak
- Tambang
- Tanah Kosong/Gundul
- Tegalan/Ladang
- Tubuh Air

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
- Peta Tutupan Lahan, RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 - 2032, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
- Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
- Data DEM SRTM 30m
- Peta PIPPIB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung, 2021

CATATAN :

- Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
- Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.13

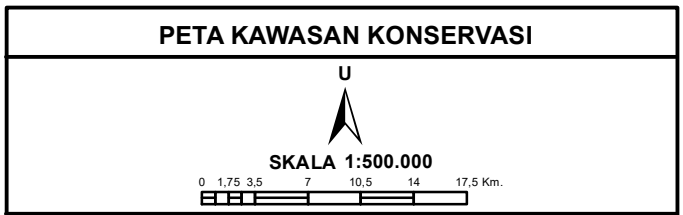
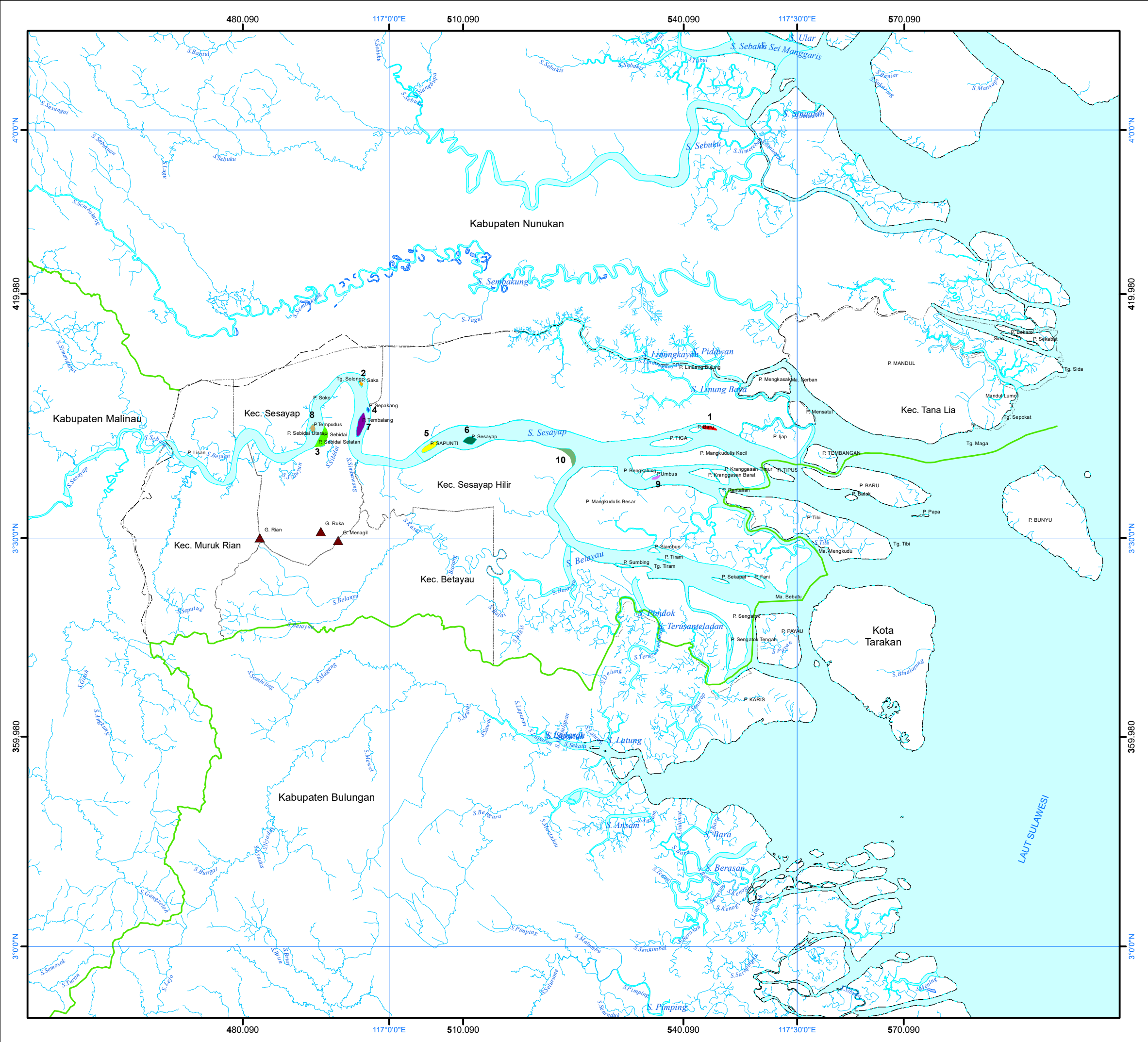
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

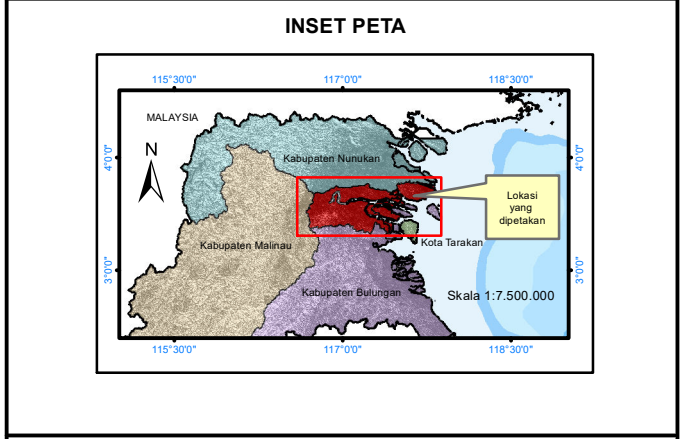
(KLHS RPJMD)

KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN 2021 - 2026



Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N



- KETERANGAN**
- Gunung
 - Perairan
 - Laut
 - Danau
 - Sungai
 - Wilayah Perairan
 - Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Definitif

- Kawasan Konservasi**
- 1 P. Baru Lumot
 - 2 P. Saka
 - 3 P. Sebidai
 - 4 P. Sepakang
 - 5 P. Sepunti
 - 6 P. Sesayap
 - 7 P. Tembalang
 - 8 P. Tempodus
 - 9 P. Umbus
 - 10 Tanjung Urong

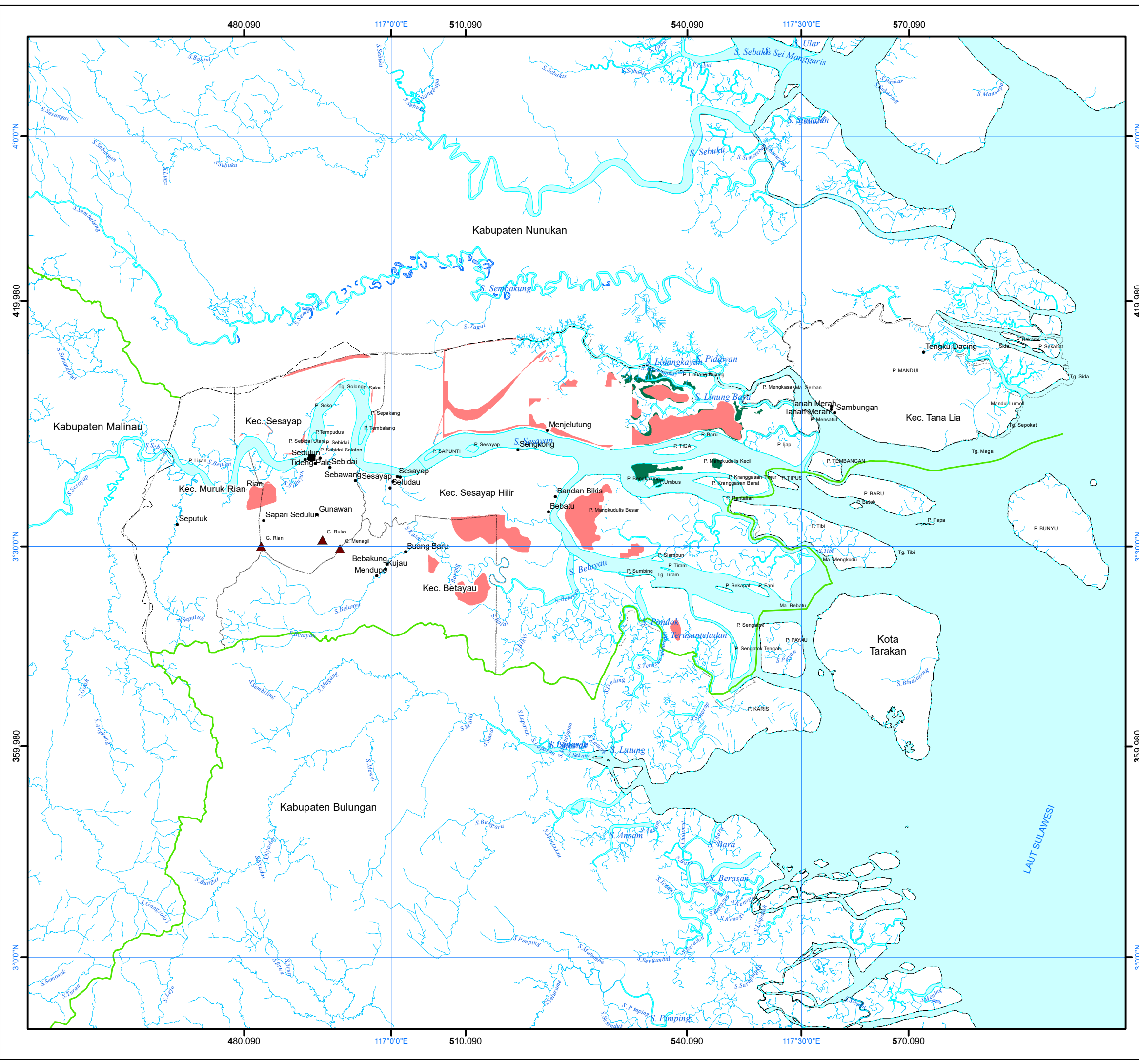
SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
2. Peta Kawasan Konservasi Kabupaten Tana Tidung, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
3. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
4. Data DEM SRTM 30m

CATATAN :

1. Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
2. Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.14
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 (KLHS RPJMD)
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021 - 2026



PETA INDIKATIF PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BERUSAHA (PIPIB)

SKALA 1:500.000

0 1.75 3.5 7 10.5 14 17.5 Km.

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

Skala 1:7.500.000

KETERANGAN

● Desa	Perairan
■ Ibukota Kabupaten	Garis Pantai
▲ Gunung	Danau
Batas Administrasi	Sungai
--- Batas Provinsi	Wilayah Perairan
- - - Batas Kabupaten	
..... Batas Kecamatan	
— Batas Definitif	

Lokasi Penundaan Izin

- Lahan Gambut
- Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL); Hutan Konservasi dan Hutan Lindung

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
2. Peta RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 - 2032, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
3. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
4. Data DEM SRTM 30m
5. Peta PIPB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung, 2021

CATATAN :

1. Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
2. Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.15

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(KLHS RPJMD)

KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN 2021 - 2026

3.4. Kondisi Kependudukan

3.4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Kabupaten tahun 2020 sebanyak 25.884 jiwa, dengan kepadatan penduduk 6,30 jiwa/km². Sesayap merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu 10.489 jiwa yang mempunyai kepadatan penduduk 26,63 jiwa/km². Sebaliknya kecamatan Muruk Rian mempunyai penduduk paling sedikit yaitu 1.483 jiwa, dengan kepadatan penduduk 3,37 jiwa/km².

Tabel 3.14. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tana Tidung, 2020

Kecamatan		Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Muruk Rian	1.483	5,80	3,70
2	Sesayap	10.489	41,00	26,63
3	Betayau	2.834	11,08	4,90
4	Sesayap Hilir	7.441	29,08	3,96
5	Tana Lia	3.337	13,04	4,35
Jumlah		25.884	100,00	6,30

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung. 2021

3.4.2. Jumlah Penduduk yang Tergolong Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung yang tergolong angkatan kerja dibedakan menurut tingkat pendidikannya yaitu : 1) Setingkat Sekolah Dasar (SD), 2) Setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 3) Setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 4) Setingkat Perguruan Tinggi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja didominasi oleh penduduk berpendidikan setingkat SMA yaitu mencapai sekitar 4.629 jiwa yang terdiri atas penduduk yang bekerja sebanyak 4.359 jiwa dan pengangguran 270 jiwa. Jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja dengan pendidikan SMA sederajat ke bawah adalah 11.311 jiwa atau 79,76% dari total angkatan kerja di Kabupaten Tana Tidung. Bila dirinci lebih lanjut maka dari 11.311

jiwa angkatan kerja tersebut maka 10.701 jiwa atau 94,61% bekerja dan 610 jiwa atau 5,39% menganggur.

Secara keseluruhan dari penduduk usia angkatan kerja, terdapat 5,08% masih menganggur. Artinya satu dari 20 orang angkatan kerja menganggur. Pengangguran itu terjadi pada seluruh tingkatan pendidikan dan kedepan harus dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran. Misalnya melalui pengembangan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja baru atau pembinaan dan pemberdayaan wirausaha masyarakat sehingga terjadi peningkatan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya mengurangi pengangguran.

Sebaran penduduk Kabupaten Tana Tidung yang masuk kategori angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan seperti pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Kategori Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan (jiwa), 2020

Tingkat Pendidikan		Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Pengangguran	
1	SD/Sederajat	4.254	258	4.512
2	SMP/Sederajat	2.088	82	2.170
3	SMA/Sederajat	4.359	270	4.629
4	Perguruan Tinggi	2.795	75	2.870
Jumlah		13.496	685	14.181

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

3.4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kegiatan

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 20.914 jiwa, terdiri dari 14.181 jiwa merupakan angkatan kerja dan 6.733 jiwa adalah bukan angkatan kerja. Sebagian besar dari penduduk yang tergolong angkatan kerja merupakan penduduk yang bekerja dan sebagian lainnya merupakan pengangguran. Sedang untuk penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, sebagian besar mengurus rumah tangga.

Tabel 3.16. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jumlah (jiwa)	%
Angkatan Kerja (AK)	14.181	67,81
➤ Bekerja	13.496	64,53
➤ Pengangguran	685	3,28
Bukan Angkatan Kerja (BAK)	6.733	32,19
➤ Sekolah	1.134	5,42
➤ Mengurus Rumah Tangga	4.781	22,86
➤ Lainnya	818	3,91
Jumlah	20.914	100,00

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

3.4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan kelompok umur tahun 2020, memperlihatkan bahwa penduduk Kabupaten Tana Tidung didominasi usia produktif (15 s/d 59 Tahun) yaitu mencapai 17.070 jiwa atau sekitar 67% dari penduduk Kabupaten Tana Tidung. Sedangkan penduduk yang masuk usia tidak produktif karena sudah tua (lansia) sekitar 1.478 jiwa atau sekitar 5,8 %. Adapun kelompok umur yang masih tergolong usia balita dan anak-anak sekitar 7.036 jiwa atau sekitar 28,0%.

Cukup banyaknya penduduk yang berusia 15 – 19 tahun dan 20 – 24 tahun patut mendapat perhatian terutama menyangkut ketersediaan lapangan kerja/usaha untuk mengakomodasi kebutuhan misal saat mereka lulus SLTA atau perguruan tinggi. Bila tidak diperhatikan diantisipasi maka kemungkinan bisa terjadi peningkatan pengangguran.

Adapun sebaran penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan kelompok umur pada tahun 2020 seperti pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17. Jumlah Penduduk di Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Kelompok Umur (jiwa), 2020

Kelompok Umur		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 – 4	1.282	1.195	2.477
2	5 – 9	1.159	1.159	2.318
3	10 – 14	1.153	1.088	2.241
4	15 – 19	1.181	1.041	2.222
5	20 – 24	1.123	989	2.112
6	25 – 29	1.114	1.062	2.176
7	30 – 34	1.206	1.226	2.432
8	35 – 39	1.236	1.023	2.259
9	40 – 44	1.159	858	2.017
10	45 – 49	923	744	1.667
11	50 – 54	744	539	1.283
12	55 – 59	529	373	902
13	60 – 64	346	254	600
14	65 – 69	211	152	363
15	70 – 74	166	112	278
16	> 75	124	113	237
Jumlah		13.656	11.928	25.584

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

3.5. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Tidung atas dasar harga berlaku dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten ini tahun 2020 mencapai Rp. 5.750,83 Milyar meningkat 2,55 % dibanding tahun 2019 dan 26,80 % dibanding tahun 2016. Bila dilihat dari masing-masing lapangan usaha maka tiga lapangan usaha yaitu : 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian dan 3) Konstruksi merupakan lapangan usaha yang paling dominan di Kabupaten Tana Tidung. Peran ketiga lapangan usaha tersebut dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tana Tidung atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 78,35 % (Tabel 3.18).

Tabel 3.18. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (Milyar Rupiah), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.524,29	1.537,86	1.624,61	1.733,86	1.788,45
B. Pertambangan dan Penggalian	1.061,30	1.428,69	1.568,20	1.744,21	1.693,89
C. Industri Pengolahan	100,76	108,94	114,08	121,68	124,01
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,64	0,72	0,78	0,86	1,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,57	0,63	0,68	0,73	0,82
F. Konstruksi	698,74	767,35	858,52	934,75	1.023,27
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	199,27	228,72	250,84	276,30	291,99
H. Transportasi dan Pergudangan	32,14	35,57	39,00	42,59	43,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,01	10,13	11,19	12,20	12,42
J. Informasi dan Komunikasi	1,50	1,62	1,72	1,93	2,21
K. Jasa Keuangan	4,30	4,71	5,20	5,46	5,66
L. Real Estate	27,69	29,92	32,81	35,63	37,22
M.N. Jasa Perusahaan	0,77	0,81	0,85	0,89	0,90
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	463,35	506,90	538,35	584,26	606,30
P. Jasa Pendidikan	64,76	69,33	75,81	83,46	92,03
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,86	3,02	3,23	3,49	4,05
R.S.T.U. Jasa Lainnya	17,78	18,84	19,72	21,35	23,38
Jumlah	4.209,73	4.753,74	5.145,59	5.603,65	5.750,83

*Angka sementara. **Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2017 - 2021

Nilai PDRB Kabupaten Tana Tidung atas dasar harga konstan 2010 tahun 2020 adalah Rp 3.648 Milyar meningkat dibanding tahun 2016 s/d 2018 namun sedikit menurun dibanding tahun 2019. Seperti halnya PDRB atas dasar harga berlaku, maka PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Tana Tidung pada 2016 s/d 2020 juga didominasi oleh tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian dan konstruksi. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2020 mencapai 78,31 % (Tabel 3.19).

Tabel 3.19. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (milyar Rupiah), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.061,72	1.062,62	1.093,61	1.121,51	1.125,00
B. Pertambangan dan Penggalian	1.055,45	1.127,66	1.159,32	1.223,96	1.162,33
C. Industri Pengolahan	77,62	79,85	80,84	83,01	80,66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,53	0,57	0,61	0,63	0,71
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,51	0,53	0,55	0,56	0,59
F. Konstruksi	474,98	499,24	528,77	553,30	570,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	145,46	154,56	160,13	172,00	177,29
H. Transportasi dan Pergudangan	24,47	26,05	27,42	28,43	28,10
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,39	6,83	7,24	7,54	7,51
J. Informasi dan Komunikasi	1,27	1,31	1,34	1,39	1,48
K. Jasa Keuangan	3,47	3,57	3,80	3,92	4,02
L. Real Estate	20,81	21,46	22,52	23,30	23,69
M.N. Jasa Perusahaan	0,60	0,60	0,61	0,62	0,62
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	334,80	349,21	365,01	381,40	389,66
P. Jasa Pendidikan	48,67	50,98	53,90	56,17	57,95
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,34	2,42	2,54	2,63	2,85
R.S.T.U. Jasa Lainnya	13,66	14,38	15,00	15,53	16,22
Jumlah	3.272,72	3.401,83	3.523,21	3.675,91	3.648,68

*Angka sementara. **Angka sangat sementara
 Sumber : BPS, Kab. Tana Tidung, 2017 - 2021

Secara umum, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanah Tidung berdasarkan harga konstan 2010 sangat berfluktuatif. Beberapa lapangan usaha terus tumbuh positif walau dengan angka yang fluktuatif dan cenderung menurun khususnya pada tahun 2020. Lapangan usaha tersebut antara lain : 1) Pertanian, kehutanan dan perikanan, 2) Konstruksi, 3) Jasa keuangan, 4) Real estate dan 5) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Bahkan ada beberapa lapangan usaha yang sejak tahun 2016 s/d 2019 tumbuh positif pada tahun 2020 menjadi pertumbuhannya negatif, contohnya : 1) Pertambangan dan penggalian, 2) Industri

pengolahan, 3) Transportasi dan pergudangan, 4) Penyediaan akomodasi dan makan minum dan 5) Jasa perusahaan. Sebaliknya ada beberapa lapangan usaha yang tumbuh signifikan pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya khususnya tahun 2019, yaitu : 1) Pengadaan listrik dan gas, 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 3) Informasi dan komunikasi, 4) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan 5) Jasa lainnya.

Perkembangan PDRB khususnya atas dasar harga konstan diantaranya sangat dipengaruhi kondisi adanya pandemi covid 19 yang melanda dunia termasuk di Kabupaten Tana Tidung. Beberapa lapangan usaha yang terkait langsung dengan daya beli masyarakat seperti lapangan usaha industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan contoh lapangan usaha yang mendapat pengaruh negatif karena adanya pandemic covid 19. Kondisi sebaliknya terjadi pada lapangan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mengalami peningkatan cukup besar sehubungan dengan banyaknya aktifitas dalam bidang kesehatan disaat kondisi pandemi covid 19. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung (%), 2017–2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,77	0,09	2,92	2,55	0,31
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,83	6,84	2,81	5,58	-5,3
C. Industri Pengolahan	5,67	2,88	1,25	2,68	-2,84
D. Pengadaan Listrik dan Gas	25,62	6,03	7,47	4,12	12,47
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,50	3,68	3,88	2,89	5,75
F. Konstruksi	9,40	5,11	5,92	4,64	3,02
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,29	6,29	3,60	7,41	3,08
H. Transportasi dan Pergudangan	1,54	6,48	5,24	3,69	-1,15
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,31	6,93	6,02	4,17	-0,37
J. Informasi dan Komunikasi	1,67	3,22	2,53	3,99	6,52
K. Jasa Keuangan	5,03	2,84	6,37	3,12	2,64



Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
L. Real Estate	2,46	3,14	4,95	3,45	1,67
M.N. Jasa Perusahaan	1,27	1,39	1,28	1,51	-0,74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,18	4,31	3,52	4,49	2,16
P. Jasa Pendidikan	4,28	4,75	5,74	4,22	3,16
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,50	3,28	5,22	3,30	8,48
R.S.T.U. Jasa Lainnya	5,76	5,28	4,29	3,53	4,44
Jumlah	1,10	3,94	3,57	4,33	-0,74

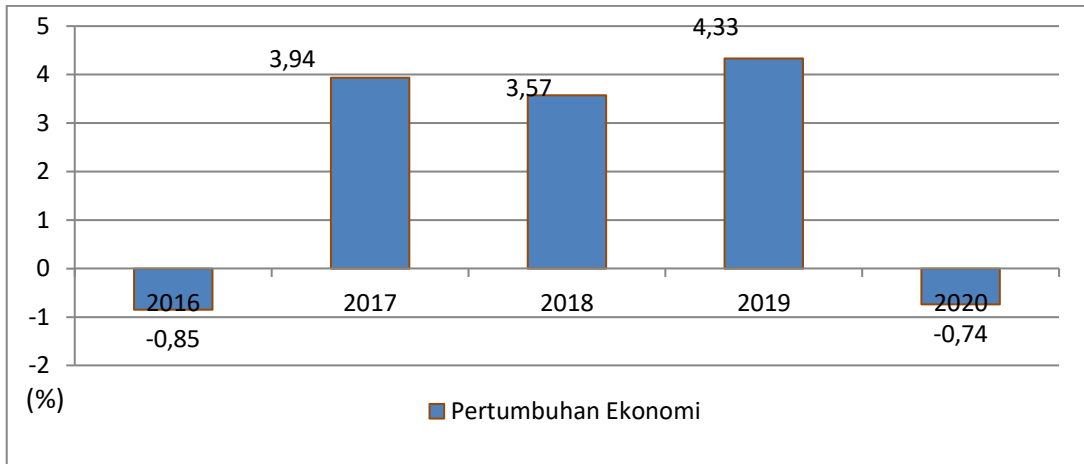
*Angka sementara. **Angka sangat sementara
Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2017 – 2021

3.6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2016 - 2020 rata-rata tumbuh 2,05 %. Bila dicermati secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 hingga 2019 tumbuh sekitar 3,57 - 4,33 %, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 0,74%. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 3.21

Tabel 3.21. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung, 2016 - 2020

Tahun	PDRB Atas Harga Konstan (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016	3.272,72	-0,85
2017	3.401,83	3,94
2018	3.523.21	3,57
2019	3.675,91	4,33
2020	3.648,68	-0,74
Rata – Rata		2,05



Gambar 3.16. Diagram Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung, 2016 - 2020

3.7. Pendidikan

Kegiatan pendidikan di Kabupaten Tana Tidung selain dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dilakukan Kementerian Agama. Data terkait jumlah sekolah, guru dan murid dari sekolah dibawah kendali kedua kementerian tersebut di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019/2020 dan 2020/2021 dapat dilihat pada Tabel 3.22 s/d 3.28.

Jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung 2020/2021 sebanyak 10 sekolah, terdiri dari dua sekolah negeri dan delapan sekolah swasta. Sekolah TK tersebut hanya terdapat pada tiga kecamatan yaitu Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia. Jumlah guru dan murid dari sekolah TK tersebut sebanyak 44 guru dan 315 murid. Untuk jumlah sekolah TK tidak terjadi perubahan antara 2020/2021 dengan 2019/2019, namun untuk jumlah guru dan murid terjadi penurunan jumlah guru dari semula 51 orang menjadi 44 orang, begitu juga untuk murid terjadi penurunan dari 327 menjadi 315 siswa (Tabel 3.22)

Terdapat sebanyak 29 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari 27 SD negeri dan dua SD swasta. Untuk

SD negeri tersebar pada seluruh kecamatan sedang untuk SD swasta hanya terdapat di Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir. Jumlah guru SD pada 2020/2021 sebanyak 341 orang bertambah satu orang dibanding tahun 2019/2021. Sedang untuk murid pada 2020/2021 sebanyak 3.229 orang meningkat cukup banyak dibanding 2019/2020 yang sebanyak 3.070 orang (Tabel 3.23).

Sekolah Madrasah Ibtidayah di bawah Kementerian Agama yang setingkat SD di Kabupaten Tana Tidung hanya dua sekolah swasta yang terdapat di Kecamatan Sesayap dengan jumlah guru pada 2020/2021 sebanyak 17 orang dan murid sebanyak 154 siswa (Tabel 3.24).

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tana Tidung pada 2020/2021 sebanyak 10 sekolah meningkat satu sekolah dibanding 2019/2020. terdiri dari 9 SMP negeri yang tersebar pada seluruh kecamatan dan satu SMP swasta yang terdapat di Kecamatan Sesayap. Jumlah guru SMP tersebut pada 2020/2021 sebanyak 181 orang meningkat 10 guru dibanding 2019/2020, yang bila dirinci terdiri dari 175 guru SMP negeri dan enam guru SMP swasta. Murid yang bersekolah pada SMP pada 2020/2021 sebanyak 1.284 siswa meningkat sebanyak 107 orang dibanding 2019/2020. Sebagian besar dari murid SMP tersebut bersekolah di SMP negeri (Tabel 3.25).

Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setingkat SMP di Kabupaten Tana Tidung hanya terdapat satu sekolah yang terdapat di Kecamatan Sesayap dengan status sekolah swasta. Jumlah guru di MTs tersebut sebanyak 8 orang pada 2020/2021 berkurang satu orang dibanding 2019/2020. Siswa yang menimba ilmu di MTs itu pada 2020/2021 sebanyak 16 orang menurun dibanding 2019/2020 yang sebanyak 20 orang (Tabel 3.26).

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tana Tidung pada 2020/2021 hanya sebanyak tiga sekolah yang seluruhnya

berstatus negeri tersebar pada tiga kecamatan yaitu Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia. Jumlah guru yang pada SMA tersebut pada 2020/2021 sebanyak 80 orang meningkat 3 orang dibanding 2019/2020. Jumlah murid di tiga SMA tersebut sebanyak 928 siswa pada 2020/2021 meningkat sebanyak 20 siswa dibanding 2019/2020. Sebagian besar dari siswa tersebut bersekolah di SMA yang terdapat di Kecamatan Sesayap (Tabel 3.27).

Hanya terdapat satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tana Tidung pada 2020/2021 dengan status sekolah negeri yang terdapat di Kecamatan Tana Lia. Sebanyak 16 orang guru yang membina dan mengajar serta 57 siswa di SMK tersebut. Jumlah siswa ini meningkat sangat signifikan dibanding 2019/2020 yang hanya sebanyak 27 siswa (Tabel 3.28).

Tabel 3.22. Jumlah Sekolah, Guru¹ dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah						Guru ¹						Murid						
	Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah		
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	
1. Muruk Rian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sesayap	1	1	4	4	5	5	8	7	20	19	28	26	63	63	126	119	189	182	
3. Betayau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Sesayap Hilir	-	-	3	3	3	3	-	-	15	11	15	11	-	-	91	93	91	93	
5. Tana Lia	1	1	1	1	2	2	8	7	-	-	8	7	47	40			47	40	
Jumlah	2	2	8	8	10	10	16	14	35	30	51	44	110	103	217	212	327	315	

¹Jumlah Guru Termasuk Kepala Sekolah dan Guru. Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

Tabel 3.23. Jumlah Sekolah, Guru¹ dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah						Guru ¹						Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
1. Muruk Rian	4	4	-	-	4	4	37	37	-	-	37	36	181	182	-	-	181	182
2. Sesayap	6	6	1	1	7	7	86	86	8	8	94	98	1.123	1.106	126	171	1.249	1.277
3. Betayau	5	5	-	-	5	5	51	51	-	-	51	52	407	424	-	-	407	424
4. Sesayap Hilir	9	9	1	1	10	10	113	113	6	7	119	127	774	849	95	101	869	950
5. Tana Lia	3	3	-	-	3	3	39	39	-	-	39	38	364	396	-	-	364	396
Jumlah	27	27	2	2	29	29	326	326	14	15	340	341	2.849	2.957	221	272	3.070	3.229

¹Jumlah Guru Termasuk Kepala Sekolah dan Guru. Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

Tabel 3.24. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah						Guru						Murid						
	Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah		
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	
1. Muruk Rian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sesayap	-	-	1	1	1	1	-	-	10	17	10	17	-	-	138	154	138	154	
3. Betayau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Sesayap Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Tana Lia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	-	-	1	1	1	1	-	-	10	17	10	17	-	-	138	154	138	154	

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

Tabel 3.25. Jumlah Sekolah, Guru¹ dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah						Guru ¹						Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
1. Muruk Rian	2	2	-	-	2	2	35	38	-	-	35	38	202	404	-	-	202	404
2. Sesayap	1	1	1	1	1	1	33	32	6	6	39	38	331	234	45	72	376	306
3. Betayau	1	1	-	-	-1	1	20	22	-	-	20	22	115	121	-	-	115	121
4. Sesayap Hilir	2	3	-	-	2	3	46	53	-	-	46	53	299	285	-	-	299	285
5. Tana Lia	2	2	-	-	2	2	31	30	-	-	31	30	185	168	-	-	185	168
Jumlah	8	9	1	1	9	10	165	175	6	6	171	181	1.132	1.212	45	72	1.177	1.284

¹Jumlah Guru Termasuk Kepala Sekolah dan Guru. Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

Tabel 3.26. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah						Guru						Murid						
	Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah		
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	
1. Muruk Rian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sesayap	-	-	1	1	1	1	-	-	9	8	9	8	-	-	20	16	20	16	
3. Betayau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Sesayap Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Tana Lia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	-	-	1	1	1	1	-	-	9	8	9	8	-	-	20	16	20	16	

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

Tabel 3.27. Jumlah Sekolah, Guru¹ dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah						Guru ¹						Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
1. Muruk Rian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sesayap	1	1	-	-	1	1	36	37	-	-	36	37	481	506	-	-	481	506
3. Betayau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Sesayap Hilir	1	1	-	-	1	1	21	22	-	-	21	22	245	238	-	-	245	238
5. Tana Lia	1	1	-	-	1	1	20	21	-	-	20	21	182	184	-	-	182	184
Jumlah	3	3	-	-	3	3	77	80	-	-	77	80	908	928	-	-	908	928

¹Jumlah Guru Termasuk Kepala Sekolah dan Guru. Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

Tabel 3.28. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah						Guru ¹						Murid						
	Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah		
	2019/ 2020	2020/ 2021	2019/ 2020	2020/ 2021	2019/ 2020	2020/ 2021	2019/ 2020	2020/ 2021	2019/ 2020	2020/ 2021	2019/ 2020	2020/ 2021	2019/ 2020	2020/ 2021	2019/ 2020	2020/ 2021	2019/ 2020	2020/ 2021	
1. Muruk Rian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sesayap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Betayau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Sesayap Hilir	-	-	-	-	-	-	16	16	-	-	16	16	27	57	-	-	27	57	
5. Tana Lia	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	1	-	-	1	1	16	16	-	-	16	16	27	57	-	-	27	57	

¹Jumlah Guru Termasuk Kepala Sekolah dan Guru. Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 202

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 pada semua jenjang pendidikan meningkat dibanding tahun 2019. Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) hanya SD/MI/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat yang meningkat sedang untuk SMP/MTs/Sederajat mengalami penurunan (Tabel 3.29).

Tabel 3.29. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung, 2019 dan 2020

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2019	2020	2019	2020
SD/MI/Sederajat	85,24	86,66	97,30	104,18
SMP/MTs/Sederajat	62,58	77,93	93,95	88,85
SMA/SMK/MA/Sederajat	44,82	44,87	66,35	83,92

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

3.8. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2020 yaitu satu Rumah Sakit yang terdapat di Kecamatan Sesayap, lima Puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan, 17 Puskesmas Pembantu, 36 Posyandu dan tiga Apotik. Jika data fasilitas kesehatan tersebut dibandingkan dengan tahun 2019 maka terjadi peningkatan satu Posyandu dan satu Apotik, namun terjadi pengurangan jumlah Poliklinik (Tabel 3.30).

Tabel 3.30. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung, 2016-2020

Jenis Fasilitas Kesehatan		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rumah Sakit	-	1	1	1	1
2.	Rumah Sakit Bersalin	-	-	-	-	-
3.	Puskesmas	5	5	5	5	5
4.	Puskesmas Pembantu	15	16	16	17	17
5.	Posyandu	34	34	34	35	36
6.	Poliklinik	-	-	-	2	-
7.	Apotik	-	-	2	2	3

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2017 - 2021

Selain keberadaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima. Secara umum ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Tana Tidung masih sangat terbatas dan dari data yang tersedia bahkan terjadi penurunan tenaga kesehatan Pada tahun 2020 dibanding tahun 2019 pada seluruh jenis tenaga kesehatan. Contoh dokter yang pada tahun 2019 sebanyak 15 orang menjadi tujuh orang pada tahun 2020 (Tabel 3.31).

Tabel 3.31. Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung, 2018-2020

Tenaga Kesehatan		2018	2019	2020
1.	Dokter	10	15	7
2.	Perawat	92	144	87
3.	Bidan	52	73	52
4.	Farmasi	5	10	4
5.	Ahli Gizi	3	8	6

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

3.9. Peribadatan

Keberadaan fasilitas peribadatan di Kabupaten Tana Tidung dapat memberikan gambaran mengenai keberagaman agama yang dianut oleh penduduknya. Masjid dan Mushola yang merupakan tempat peribadatan umat Islam pada tahun 2020 terdapat sebanyak 62 buah. terdiri dari 28 Masjid dan 34 Mushola. Sebagian besar tempat peribadatan itu terdapat di Kecamatan Sesayap Hilir, Sesayap dan Tana Lia. Sedang untuk peribadatan umat Kristen terdapat sebanyak 35 buah yang terdiri dari 28 buah Gereja Protestan dan tujuh Gereja Katolik. Sebagian besar Gereja tersebut berada di Kecamatan Sesayap, Muruk Rian dan Betayau. Tempat peribadatan lainnya yaitu Pura yang merupakan tempat peribadatan umat Hindu hanya terdapat satu buah yang berada di Kecamatan

Sesayap. Sedang Vihara yang merupakan tempat peribadatan umat Budha hingga saat ini belum ada di Kabupaten Tana Tidung (Tabel 3.32).

Tabel 3.32. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung. 2020

Kecamatan		Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1.	Muruk Rian	1	1	8	2	-	-
2.	Sesayap	7	11	12	3	1	-
3.	Betayau	3	4	6	2	-	-
4.	Sesayap Hilir	11	12	1	-	-	-
5.	Tana Lia	6	6	1	-	-	-
Jumlah		28	34	28	7	1	-

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

3.10. Jalan

Keberadaan jalan sangat penting dalam rangka mobilitas orang dan barang sehingga sangat berperan dalam mendukung sektor-sektor lainnya termasuk diantaranya sektor perekonomian. Sampai tahun 2020, Kabupaten Tana Tidung mempunyai jalan sepanjang 324.37 km. Panjang jalan tersebut sama dengan panjang jalan tahun 2018 dan 2019, yang berarti selama tiga tahun terakhir tidak ada penambahan panjang jalan (Tabel 3.33).

Tabel 3.33. Panjang Jalan¹ Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung (km). 2018-2020

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2018	2019	2020
Negara	-	-	-
Provinsi	-	-	-
Kabupaten/Kota	324,37	324,37	324,37
Jumlah	324,37	324,37	324,37

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.248/KPTS/M/2015

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

Walaupun tidak terjadi penambahan panjang jalan di Kabupaten Tana Tidung sejak tahun 2018, namun dari sisi jenis permukaan jalannya terjadi peningkatan jalan kerikil sebaliknya panjang jalan yang mempunyai permukaan tanah mengalami penurunan. Hal ini berarti terjadi perubahan jalan yang semula mempunyai permukaan tanah menjadi jalan berkerikil. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, maka terjadi peningkatan jalan kerikil sebesar 23,64 % (Tabel 3.34)

Tabel 3.34. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tana Tidung (km), 2018-2020

Jenis Permukaan Jalan	2018	2019	2020
Aspal	166,17	166,17	166,17
Kerikil	59,48	73,54	73,54
Tanah	97,21	83,16	83,16
Lainnya	1,50	1,50	1,50
Jumlah	324,37	324,37	324,37

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

Kondisi jalan di Kabupaten Tana Tidung masih banyak memerlukan perhatian khususnya dalam hal kualitas jalannya. Hal ini tercermin dari masih banyaknya jalan yang tergolong rusak berat. Sebagai contoh tahun 2020, terdapat jalan sepanjang 103,00 km yang tergolong rusak berat yang berarti sekitar 31,75% dari panjang jalan yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung dalam kondisi rusak berat. Bila ditambah dengan kondisi jalan yang rusak maka hampir separo jalan di Kabupaten Tana Tidung dalam kondidi rusak berat dan berat (Tabel 3.35).

Tabel 3.35. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tana Tidung (km), 2018-2020

Kondisi Jalan	2018	2019	2020
Baik	151,58	149,87	149,87
Sedang	19,90	22,70	22,70
Rusak	31,56	48,80	48,80
Rusak Berat	121,34	103,00	103,00
Jumlah	324,37	324,37	324,37

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung. 2021

3.11. Listrik

Daya terpasang dan produksi listrik PLN di Kabupaten Tana Tidung sejak tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan. Daya terpasang listrik di Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 sebesar 7.019 KW, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 28,93% dibanding tahun 2019 dan 113,15 % dibanding tahun 2016. Sedang untuk produksi listrik selama tahun 2020 dihasilkan 13.279.110 KWh meningkat sebesar 9,60% dibanding tahun 2019 dan 25,55% dibanding tahun 2016 (Tabel 3.36).

Ketersediaan listrik sangat diperlukan dalam mendukung berbagai sektor pembangunan, dan juga sering menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi. Disaat sekarang ini berbagai aktivitas manusia sangat memerlukan dan tergantung pada keberadaan listrik seperti kegiatan bisnis, industri, administrasi pemerintahan dan lain-lain. Peningkatan ketersediaan listrik harus terus dilakukan untuk memastikan kecukupan dan stabilitas pasokan listrik yang menjangkau sampai ke wilayah pedesaan.

Tabel 3.36. Daya Terpasang dan Produksi Listrik PT. PLN (Persero) di Kabupaten Tana Tidung, 2016- 2020

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)
2016	3.293	10.576.752
2017	3.848	10.860.270
2018	3.901	12.275.272
2019	5.444	12.115.877
2020	7.019	13.279.110

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2017 - 2021

Secara umum, seluruh kecamatan di Kabupaten Tana Tidung sudah mendapat pelayanan listrik. Selain itu terus terjadi peningkatan jumlah pelanggan listrik sejak tahun 2016 hingga 2020. Sampai dengan tahun 2019, penyediaan listrik bagi masyarakat Kabupaten Tana Tidung baru mencapai 61,58 %. Bila dilihat sebaran/distribusi pelanggan listrik tersebut maka sebagian besar pelanggan listrik terdapat di Kecamatan Sesayap dan juga Sesayap Hilir. Sedang untuk kecamatan lainnya pelanggan listriknya masih sangat terbatas, kemungkinan karena terbatasnya pasokan listrik dan ketiadaan jaringannya (Tabel 3.37). Selain itu bila dilihat dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Tana Tidung diperkirakan masih banyak rumah tangga yang belum mendapat pelayanan listrik sehingga perlu upaya kedepannya agar seluruh masyarakat Kabupaten Tana Tidung mendapat pelayanan listrik

Tabel 3.37. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2016-2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Muruk Rian	30	47	191	348	378
2. Sesayap	2.341	2.669	2.329	2.688	2.871
3. Betayau	217	281	316	556	619
4. Sesayap Hilir	526	736	950	1.184	1.248
5. Tana Lia	410	486	526	718	764
Jumlah	3.524	4.219	4.312	5.494	5.880

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2017 - 2021

3.12. Air Minum

Ketersediaan air minum di Kabupaten Tana Tidung hingga tahun 2020 masih sangat terbatas dan baru bisa melayani kebutuhan di Kecamatan Sesayap. Jumlah pelanggan air minum sebanyak 1.093 pelanggan, jumlah air yang disalurkan sebanyak 126.329 m³ dan nilai Rp. 589.231.754 (Tabel 3.38).

Tabel 3.38. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 2020

	Kecamatan	Pelanggan	Air Yang Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
1.	Muruk Rian	-	-	-
2.	Sesayap	1.093	126.329	589.231.754
3.	Betayau	-	-	-
4.	Sesayap Hilir	-	-	-
5.	Tana Lia	-	-	-
	Jumlah	1.093	126.329	589.231.754

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

3.13. Sampah

Timbulan sampah di Kabupaten Tidung tahun 2020 sebanyak 5.553,25 ton yang sebagian besar dihasilkan dari Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir. Volume timbulan sampah tersebut tidak banyak mengalami perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan timbunan sampah sangat terkait erat dengan jumlah penduduk. Setiap peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh pada peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Jumlah timbunan sampah yang dihasilkan Kabupaten Tana Tidung dalam beberapa tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan karena peningkatan jumlah penduduknya tidak banyak. Sebagai gambaran jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 berdasarkan data pada Tabel 3.39 hanya sedikit meningkat dibandingkan tahun 2018 dan 2019, bahkan bila dibanding tahun 2017 mengalami penurunan.

Tabel 3.39. Volume Timbunan Sampah Per Kecamatan, 2017-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Volume Sampah (SNI = 0.625)	Volume Sampah	Volume Sampah
			kg/hari	ton/hari	ton/tahun
1	Sesayap	10.258	6.411,25	6,411	2.340,106
2	Sesayap Hilir	6.648	4.155,00	4,155	1.516,575
3	Tana Lia	3.192	1.995,00	1,995	728,175
4	Betayau	2.746	1.716,25	1,716	626,431
5	Muruk Rian	1.499	936,88	0,937	341,959
Jumlah 2020		24.343	15.214,38	15,214	5.553,247
Jumlah 2019		24.095	15.059,38	15,059	5.496,672
Jumlah 2018		24.190	15.118,75	15,119	5.518,344
Jumlah 2017		24.471	15.294,38	15,294	5.582,447

Sumber : DLH Kab. Tana Tidung, 2021a

3.14. Kondisi Lingkungan Hidup

3.14.1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimandatkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi ataupun Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang salah satu muatannya adalah Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2017 telah menyusun dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem. Terdapat empat Jasa ekosistem yang disajikan di dalam dokumen tersebut, yaitu Jasa Penyedia/ Produksi, Jasa Regulasi/ Pengaturan, Jasa Budaya. dan Jasa Pendukung. Adapun empat jasa ekosistem dimaksud seperti tercantum dalam Tabel 3.40.

Tabel 3.40. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung Berbasis Jasa Ekosistem

No.	Kelompok DDDT-LH	Jenis Jasa Ekosistem
1.	Penyedia Produksi	Pangan
		Air
		Energi
		Serat
2.	Pengaturan/Regulasi	Pengaturan iklim
		Pengaturan tata aliran air dan banjir
		Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam
		Pemurnian air
		Pengolahan dan pemurnian limbah
		Pemeliharaan kualitas udara
		Pengaturan penyerbukan alami
		Pengendalian hama dan penyakit
3.	Budaya	Tempat tinggal dan ruang hidup
		Rekreasi dan ekoturism
		Estetika (Alam)
4.	Pendukung	Pembentukan lapisan tanah dan kesuburan
		Siklus hara
		Produksi primer
		Perlindungan plasma nutfah

Adapun kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Tana Tidung berbasis Jasa Ekosistem diuraikan pada bagian Kinerja Jasa Ekosistem.

3.14.2. Kinerja Jasa Ekosistem

a. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

Kabupaten Tana Tidung dapat dibagi menjadi beberapa ekoregion sesuai dengan ciri-ciri dan kenampakan alamiah lahannya. Masing-masing ekoregion memiliki ciri khas yang berbeda termasuk dalam penyediaan pangan bagi manusia. Secara umum di Kabupaten Tana Tidung yang mampu menyediakan bahan pangan dibagi menjadi lahan berpotensi tinggi, sedang dan rendah.



Lahan yang berpotensi tinggi menyediakan bahan pangan memiliki luas 153.457,88 ha atau sekitar 66,54 % dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Tana Tidung. Lahan yang berpotensi sedang dalam penyediaan bahan pangan memiliki luas 69.650,50 ha atau 30,20 % dan yang memiliki potensi rendah dalam penyediaan bahan pangan seluas 7.512,86 ha atau sekitar 3,26 % dari seluruh luas Kabupaten Tana Tidung (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017).

b. Jasa Ekosistem Penyediaan Air bersih

Lahan yang berpotensi tinggi dalam penyediaan air bersih memiliki luasan 145.718,44 ha atau sekitar 44,21 % dari total luas Kabupaten Tana Tidung. Lahan yang berpotensi sedang dan rendah seluas 115175,51 ha (36,52%) dan 54.475,43 ha (17,27%) dari total luas Kabupaten Tana Tidung (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017).

c. Jasa Ekosistem Penyediaan Serat

Lahan yang berpotensi tinggi dalam penyediaan serat (fiber) di Kabupaten Tana Tidung memiliki luas 97.234,81 ha atau 31.51 % dari total luas Kabupaten Tana Tidung. Luas Lahan yang berpotensi sedang dan rendah dalam penyediaan serat (fiber) masing-masing 88.339,72 ha (28,63%) dan 122.994,88 ha (39,86%) dari total luas Kabupaten Tana Tidung (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017).

d. Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar

Lahan yang berpotensi tinggi seluas 130.700, 32 ha atau 48,54% dari total luasan Kabupaten Tana Tidung. Lahan yang memiliki potensi sedang dalam penyediaan bahan bahan bakar (*fuel*), kayu dan fosil memiliki luasan 65.196,85 ha atau 24,21%. Sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah sebesar 73.390,75 ha atau 27,25% dari total luas Kabupaten Tana Tidung (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017).

e. Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik

Lahan yang berpotensi tinggi menyediakan sumberdaya genetik memiliki luasan 62.504,56 ha atau 20,56 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung. Lahan yang berpotensi



sedang dalam penyediaan sumberdaya genetik memiliki luas 179.548, 41 ha (59,05 %). Sedangkan lahan yang berpotensi rendah terhadap penyediaan sumberdaya genetik memiliki luas 61.994,46 ha atau 28,96 % (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017)

f. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Lahan yang berpotensi tinggi memberikan manfaat bagi pengaturan iklim memiliki luasan 166.109,15 ha atau 50,27 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung. Lahan yang berpotensi sedang memberikan manfaat bagi pengaturan iklim memiliki luas 145.276,21 ha (43,97 %). Sedangkan lahan yang berpotensi rendah terhadap pengaturan iklim memiliki luas 19.046,83 ha atau 5,76 % (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017).

g. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Lahan yang berpotensi tinggi memberikan manfaat bagi pengaturan tata aliran air dan banjir memiliki luasan 146.217,33 ha atau 40,88 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung. Lahan yang berpotensi sedang memberikan manfaat bagi pengaturan tata aliran air dan banjir adalah 70.004,05 ha atau 19,57 %. Sedangkan lahan yang berpotensi rendah terhadap pengaturan tata aliran air dan banjir adalah 141.486,45 ha atau 39,55 % (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017)

h. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam

Lahan yang berpotensi tinggi memberikan manfaat bagi pencegahan dan perlindungan dari bencana alam memiliki luasan 174.014,45 ha atau 48,80 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung. Lahan yang berpotensi sedang memberikan manfaat bagi pencegahan dan perlindungan dari bencana alam memiliki luas 54.540,92 ha atau 15,30 %. Sedangkan lahan yang berpotensi rendah terhadap pencegahan dan perlindungan dari bencana alam memiliki luas 128.011,68 ha atau 35,90 % (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017)



i. Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air

Lahan yang berpotensi tinggi memberikan manfaat bagi pemurnian air memiliki luasan 56.849,57 ha atau 15.01% dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung. Lahan yang berpotensi sedang memberikan manfaat bagi pemurnian air memiliki luas 126.582,94 ha atau 33,42 %. Sedangkan lahan yang berpotensi rendah terhadap pemurnian air memiliki luas 195.321,82 ha atau 51,57 % (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017).

j. Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah

Lahan yang berpotensi tinggi memberikan manfaat bagi pengolahan dan penguraian limbah memiliki luasan 167.228,61 ha atau 44,99 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung. Lahan yang berpotensi sedang memberikan manfaat bagi pengolahan dan penguraian limbah memiliki luas 90.968,97 ha atau 24,47 %. Sedangkan lahan yang berpotensi rendah terhadap pengolahan dan penguraian limbah memiliki luas 113.499,28 ha atau 30,54 % (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017).

k. Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

Total luas lahan yang memiliki potensi tinggi untuk pemeliharaan kualitas udara adalah 234.379,06 ha atau 71,18%. lahan yang berpotensi sedang luasnya 78.984,21 ha atau 23,99% dan luas lahan yang berpotensi rendah adalah 15.928,66 ha atau 4,84% dari keseluruhan luas lahan di Kabupaten Tana Tidung. Adanya tutupan lahan berupa hutan yang ada di setiap ekoregion membuat kualitas udara di Kabupaten Tana Tidung baik (rendah polutan) dengan syarat keberadaan hutan harus dijaga dengan baik. Total luas lahan yang memiliki potensi tinggi untuk pemeliharaan kualitas udara adalah 234.379,06 ha atau 71,18%. lahan yang berpotensi sedang luasnya 78.984,21 ha atau 23,99% dan luas lahan yang berpotensi rendah sebesar 15.928,66 ha atau 4,84% dari keseluruhan luas lahan di Kabupaten Tana Tidung. Adanya tutupan



lahan berupa hutan yang ada di setiap ekoregion membuat kualitas udara di Kabupaten Tana Tidung dalam kategori baik (rendah polutan) dengan syarat keberadaan hutan harus dijaga dengan baik (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017).

l. Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami (*pollination*)

Secara umum luas lahan yang memiliki potensi tinggi untuk penyerbukan alami adalah 169.326,3 ha atau 51,42%. sedangkan lahan yang berpotensi sedang luasnya 59.468,15 ha atau 18,06% dan luas lahan yang berpotensi rendah 100.497,48 ha atau 30,52% dari keseluruhan lahan yang ada. Pada ekoregion Pegunungan Struktural Kompleks Meratus dan Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam tutupan lahan yang mendominasi berupa hutan. Di dalam hutan, keseimbangan ekosistem masih terjaga sehingga proses timbal balik antara organisme termasuk penyerbukan alami berjalan dengan baik (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017).

m. Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit

Luas lahan yang memiliki potensi tinggi untuk pengaturan pengendalian hama dan penyakit adalah 84.621,09 ha atau 25,70%, sedangkan lahan yang berpotensi sedang seluas 108.763,27 ha atau 33,03% dan lahan yang berpotensi rendah luasnya 135.907,57 ha atau 41,27% dari total luas lahan di KTT (DLHP Kab. Tana Tidung, 2018).

n. Jasa Ekosistem Budaya (*Cultural*) Tempat tinggal dan Ruang Hidup (*sense of place*)

Lahan yang berpotensi tinggi sebagai tempat tinggal dan ruang hidup memiliki luasan 133.225,43 ha atau sekitar 40,46% dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Tana Tidung. Lahan berpotensi sedang memiliki luasan 108.669,93 ha atau 33,00 %, sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah luasnya 87.396,57 ha atau 26,54% dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Tana

Tidung. Hal ini mengindikasikan peluang untuk mengembangkan pemukiman masih sangat besar (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017).

o. Jasa Ekosistem Budaya (*Cultural*) Rekreasi dan *Ecotourism*

Luas lahan ekoregion Dataran Pantai Kalimantan yang berpotensi tinggi untuk rekreasi dan ekotourism sebesar 65.612,29 ha. Tutupan lahan yang dominan pada ekoregion ini berupa Perikanan tambak dan Hutan Mangrove. Luas lahan ekoregion Pegunungan Struktural Kompleks Meratus sebesar 6.295,52 ha dengan tutupan lahan yang mendominasi adalah Hutan Lindung. Pada ekoregion Perbukitan Kompleks Meratus terdapat tutupan lahan berupa Hutan Tanaman Produksi, Hutan Wisata, Perkebunan, Pertanian Lahan Basah dan Pertanian Lahan Kering. Pada tutupan lahan yang berupa hutan, didalamnya terdapat keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga cocok untuk dimanfaatkan sebagai daerah wisata. Ekoregion yang memiliki potensi rendah sebagai tempat rekreasi dan ekotourism adalah Fluvial Kalimantan (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017).

p. Jasa Ekosistem Budaya (*Cultural*) Estetika (Alam)

Lahan yang berpotensi tinggi untuk jasa budaya estetika/keindahan alam luasnya 193.863,65 ha atau 58,87% dari keseluruhan luas lahan yang ada di Kabupaten Tana Tidung. sedangkan lahan yang berpotensi sedang luasnya 49.949,33 ha dan yang berpotensi rendah luasnya 85.478,95 ha (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017).

q. Jasa Ekosistem Pendukung (*Supporting*) Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan

Lahan yang memiliki potensi tinggi untuk pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan luasnya 124.989,31 ha atau 37,96%, yang berpotensi sedang memiliki seluas 132.389,08 ha atau 40,20% dan yang memiliki potensi rendah luasnya 71.913,54 ha atau 21,84% dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Tana Tidung (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017).



r. Jasa Ekosistem Pendukung (*Supporting*) Siklus Hara (*nutrient cycle*)

Lahan yang berpotensi tinggi dalam mendukung siklus hara memiliki luasan 147.363,29 ha atau 44,75%. lahan yang berpotensi sedang luasnya 110.877,47 ha atau 33,67% dan yang berpotensi rendah seluas 71.051,17 ha atau 21,58% dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Tana Tidung (DLHP Kab. Tana Tidung, 2017).

s. Jasa Ekosistem Pendukung (*Supporting*) Produksi Primer

Luasan lahan yang berpotensi tinggi untuk mendukung produksi primer adalah 184.573,02 ha atau 56,05%, yang berpotensi sedang luasnya 74.712,39 ha atau 22,69%, dan lahan yang berpotensi rendah seluas 70.006,52 ha atau 21,26% dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Tana Tidung (DLHP Kab. Tana Tidung, 2018).

t. Jasa Ekosistem Pendukung (*Supporting*) Biodiversitas (*Perlindungan Plasma Nutfah*)

Lahan yang berpotensi tinggi untuk mendukung biodiversitas seluas 182.011,94 ha atau 55,27%, luas lahan yang berpotensi sedang adalah 70.224,48 ha atau 21,33% dan lahan yang berpotensi rendah seluas 77.055,51 ha atau 23,40 % dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Tana Tidung. Sebagian besar lahan yang memiliki potensi tinggi dalam mendukung biodiversitas terletak pada ekoregion Perbukitan Struktural Kompleks Meratus dan Dataran Pantai Kalimantan. Pada ekoregion Pegunungan Struktural Kompleks Meratus, tutupan lahan yang mendominasi adalah Hutan Lindung. Lahan yang memiliki potensi rendah dalam mendukung biodiversitas terdapat pada ekoregion Fluvial Kalimantan (DLHP Kab.Tana Tidung, 2017)

3.14.3. Resiko Lingkungan Hidup

Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa potensi bencana alam diantaranya kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA), angin puting beliung, banjir, longsor dan

kecelakaan speedboat. Daerah rawan bencana kebakaran permukiman adalah wilayah Tanah Merah, Boang Baru, Bebatu, Tideng Pale Timur, Sepatuk, Tideng Pale, Bebakung, Sesayap, Rian dan Sedulung. Daerah rawan banjir adalah daerah sempadan sungai dan pantai terutama di Gunawan. Daerah rawan angin puting beliung adalah Tideng Pale Timur dan Sesayap. Daerah rawan Kebakaran hutan dan lahan meliputi Tideng Pale, Sengkong, Tanah Merah, Sebidae, Sepala Dalung dan Selor. Sedangkan daerah rawan kecelakaan speedboat menyebar di seluruh desa yang berada di sekitar sungai dan pantai. Adapun kejadian kerawanan bencana di Kabupaten Tana Tidung selama empat tahun terakhir (tahun 2017 s/d 2020) telah disajikan sebelumnya pada Tabel 3.10.

Wilayah Kabupaten Tana Tidung secara keseluruhan mempunyai kerentanan terhadap bencana dalam kategori sedang yang mencakup areal seluas 376.475,21 ha atau 98,47% dari wilayah Kabupaten Tana Tidung. Kerentanan terhadap bencana kategori sedang ini mencakup seluruh wilayah empat kecamatan yaitu Sesayap Hilir, Betayau, Muruk Rian dan Tana Lia serta sebagian wilayah Kecamatan Sesayap. Sedang kerentanan dalam kategori seluas 5.831,23 ha (1,53%) terdapat di sebagian Kecamatan Sesayap yaitu disekitar P. Sebidal dan P. Sebidal Selatan.

3.14.4. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat dari sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Tana Tidung. Selama lima tahun terakhir, sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dan penggalian merupakan dua sektor pembangunan yang memberi sumbangan terbesar terhadap Pendapatan Regional Kabupaten Tana Tidung. Adapun distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Tidung, 2016–2020 dari dua sektor unggulan disajikan seperti pada Tabel 3.41.



Tabel 3.41. Distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Untuk Sektor Unggulan di Kabupaten Tana Tidung, 2016–2020

No.	Sektor Unggulan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,21	32,35	31,57	30,94	31,10
2	Pertambangan dan Penggalian	25,21	30,05	30,48	31,13	29,45

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021

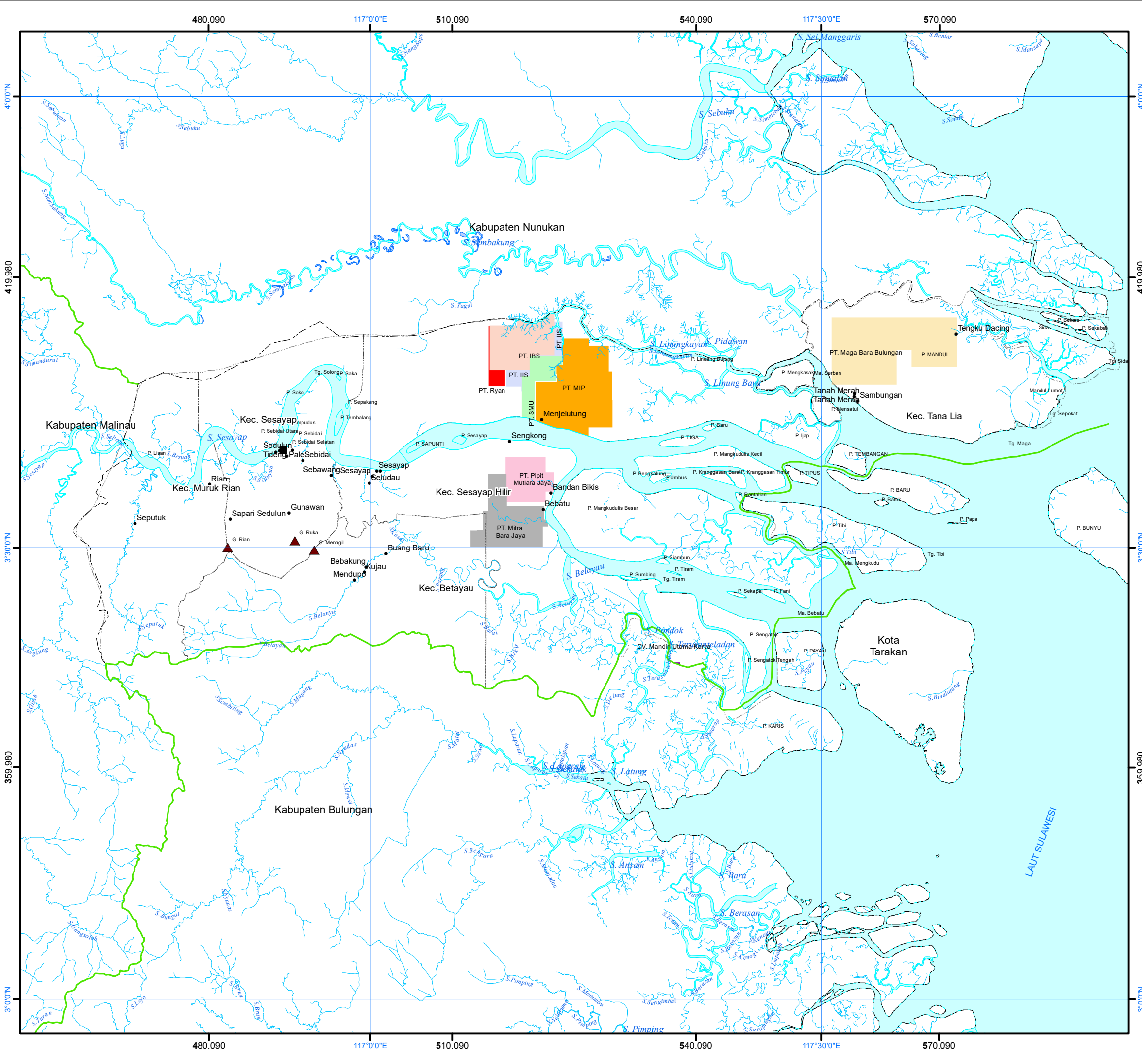
Pada tabel di atas terlihat bahwa distribusi sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan peternakan Kabupaten Tana Tidung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2019). Sedangkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Tana Tidung memperlihatkan pertumbuhan yang semakin meningkat sampai dengan tahun 2019 dan pada tahun 2020 cenderung mengalami penurunan.

Kabupaten Tana Tidung sangat kaya akan hasil tambang diantaranya adalah batubara. Sampai saat ini terdapat berdasarkan informasi dari DLH Kab. Tana Tidung (2021) terdapat tujuh perusahaan pertambangan yang mengeksploitasi batubara di Kabupaten Tana Tidung yaitu : 1) PT. Pipit Mutiara Jaya (PMJ) 2) PT. Sarana Mandiri Utama (SMU), 3) PT. Sarana Mandiri Resources (SMR) 4) Mitra Bara jaya (MBJ) dan 5) PT. Mandiri Inti Perkasa. Lima perusahaan Pertambangan tersebut, pengawasan dan pembinaannya dilakukan oleh DLH Kabupaten Tana Tidung (2021). Lokasi dua dari lima perusahaan tersebut yaitu PMJ dan SMU dapat dilihat pada Gambar 3.17. Sementara beberapa perusahaan pertambangan lainnya yang terdapat di dalam peta pada Gambar 3.16 tersebut yaitu: 1) PT. Inti Buana Selaras (IBS), 2). Intibuana Indah Selaras (IIS), 3) PT. Mega Bara Bulungan, 4) CV. Mandiri

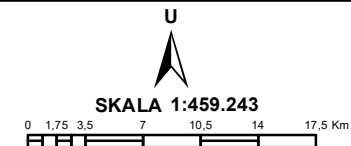


Utama Karya dan 5) PT. Ryan, berdasarkan informasi dari DLH Kabupaten Tana Tidung (2021) sudah tidak beroperasi lagi.

Selain batubara, Kabupaten Tana Tidung juga banyak mengembangkan tanaman perkebunan khususnya kelapa sawit. Penanaman kelapa sawit dilakukan Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan masyarakat. Untuk PBS, di Kabupaten Tana Tidung telah beroperasi 10 perusahaan yaitu : 1) Teknik Utama Mandiri (TUM), 2) PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera (AKSS), 3) PT. Bulungan Surya Mas Pratama (BSMP), 4) PT. Persada Kencana Prima (PKP), 5) PT. Usaha Kaltim Mandiri (UKM), 6) PT. Sanjung Makmur dan 7) PT. Pipit Mutiara Indah, 8) PT. Pipit Citra Perdana (PCP), 9) PT. Karunia Sembada Makmur (KSM) dan 10) PT. Mulia Agro Utama (MAU). Lokasi penambangan perusahaan nomor 1 s/d 7 dapat dilihat pada Gambar 3.18. Sedang empat perusahaan yang terdapat pada Gambar 3.17 yaitu : 1) PT. Bais Nusantara, 2) PT. Bina Sawit Alam Makmur, 3) PT. Cipta Karya Sesayap Lestari dan 4) PT. Gunung Agung Perkasa, menurut informasi DLH Kabupaten Tana Tidung (2021) sudah tidak beroperasi lagi.

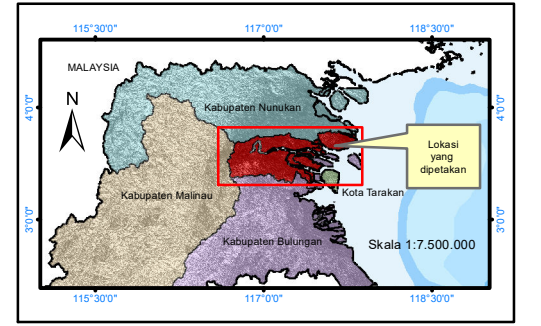


PETA SEBARAN IJIN PERTAMBANGAN



Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA



KETERANGAN

- Desa
- Ibukota Kabupaten
- ▲ Gunung
- Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten
 - · · Batas Kecamatan
 - Batas Definitif
- Perairan**
 - Laut
 - Garis Pantai
 - Danau
 - Sungai
 - Wilayah Perairan

Nama Perusahaan Tambang

- PT. Inti Buana Selaras (PT. IBS)
- PT. Intibuana Indah Selaras (PT. IIS)
- PT. Maga Bara Bulungan
- CV. Mandiri Utama Karya
- PT. Pipit Mutiara Jaya
- PT. Ryan
- PT. Sarana Mandiri Utama (PT. SMU)
- PT. Mandiri Inti Perkasa (MIP)
- PT. Mitra Bara Jaya (MBJ)

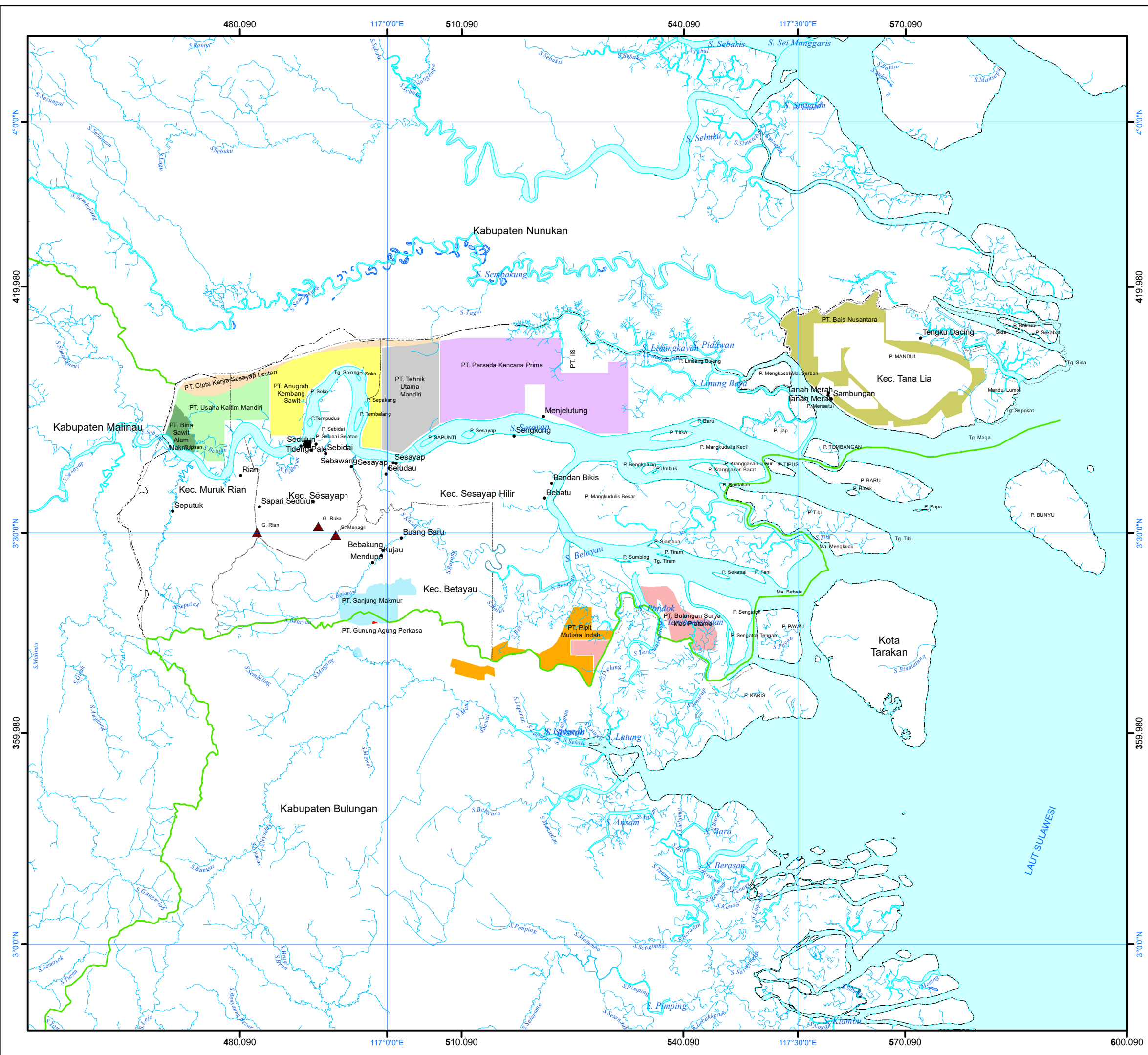
SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
2. Peta Ijin Pertambangan Kabupaten Tana Tidung, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
3. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
4. Data DEM SRTM 30m
5. Peta Ijin Pertambangan Batubara, geoportal.esdm.go.id/minerba, 2021

CATATAN :

1. Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
2. Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.17
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(KLHS RPJMD)
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021 - 2026



PETA SEBARAN IJIN PERKEBUNAN

U

SKALA 1:500.000

0 1,75 3,5 7 10,5 14 17,5 Km.

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

MALAYSIA
Kabupaten Nunukan
Kabupaten Malinau
Kabupaten Bulungan
Kota Tarakan
Lokasi yang dipetakan
Skala 1:7.500.000

KETERANGAN

● Desa	Perairan	— Garis Pantai
■ Ibukota Kabupaten	— Danau	— Sungai
▲ Gunung	— Wilayah Perairan	

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Definitif

Nama Perusahaan Perkebunan

- PT. Anugrah Kembang Sawit
- PT. Bais Nusantara
- PT. Bina Sawit Alam Mamur
- PT. Bulungan Surya Mas Pratama
- PT. Cipta Karya Sesayap Lestari
- PT. Gunung Agung Perkasa
- PT. Pipit Mutiara Indah
- PT. Sanjung Makmur
- PT. Tehnik Utama Mandiri
- PT. Usaha Kaltim Mandiri

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
- Peta Ijin Perkebunan Sawit Kabupaten Tana Tidung, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung, 2021
- Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
- Data DEM SRTM 30m
- Peta PIPPIB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung, 2021

CATATAN :

- Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
- Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.18
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(KLHS RPJMD)
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021 - 2026



3.14.5. Izin Lingkungan, Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dan SPPL

Berkaitan dengan lingkungan telah diterbitkan Izin Lingkungan untuk AMDAL, rekomendasi kelayakan lingkungan dan SPPL. Untuk izin lingkungan, selama kurun waktu 2018 – 2020 telah diterbitkan sebanyak 5 (lima) izin lingkungan untuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Pemrakarsa kegiatan sebagian besar adalah DPUPRPKP Kabupaten Tana Tidung yaitu sebanyak 4 (empat) izin lingkungan masing-masing untuk kegiatan yaitu : 1) Pembangunan Pelabuhan Speed Boad Bebatu Kecamatan Sesayap Hilir , 2) Pembangunan terusan Tanjung Sebidai kecamatan Sesayap, 3) Pembangunan TPA Sampah Kecamatan Sesayap dan 4) Pembangunan Embung di Kecamatan Tana Lia. Izin lingkungan untuk AMDAL lainnya dengan pemrakarsa BWS untuk kegiatan jaringan tata air tambak di Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia. Data izin lingkungan AMDAL lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.42.

Pada tahun 2020 telah diterbitkan rekomendasi kelayakan lingkungan untuk UKL-UPL terhadap 10 kegiatan, sebagian besar dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung khususnya DPUPRPKP yaitu 8 (delapan) UKL-UPL yang umumnya berupa pembangunan irigasi (5 UKL-UPL) dan pelabuhan (3 UKL-UPL). Sedang dari perusahaan swasta adalah dari : 1) PT. Kayan LNG Nusantara untuk pembangunan Kilang LNG dengan Kapasitas Produksi 22-25 MMSCFD dengan Luasan Dermaga 15000 M² beserta fasilitas penunjang dan pembangunan terminal khusus dengan luas dermaga 15.000 m² dan 2) PT. Intraca Hutani Lestari berupa Pembangunan dan Operasional Terminal Khusus Untuk Bongkar/Muat Kayu Gelondongan/Log. Data rekomendasi kelayakan lingkungan Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.43.

Selain izin lingkungan untuk AMDAL dan rekomendasi kelayakan lingkungan, juga ada Surat Pernyataan Kesanggupan



Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Pada tahun 2020 diterbitkan sebanyak 21 SPPL baik untuk instansi pemerintah maupun swasta. Untuk instansi pemerintah, SPPL itu untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dalam rangka pembangunan Balai Penyuluh KB di tiga tempat yaitu Sebawang, Muruk Rian dan Sambungan Selatan. Sedang untuk swasta, SPPL tersebut untuk berbagai kegiatan tetapi yang paling banyak adalah untuk bengkel. Kegiatan lainnya adalah tempat kegiatan usaha, penjualan BBM, usaha tempat praktek dokter, bangunan tempat usaha kuliner dan jasa kurir, kontruksi dan perdagangan umum, pembangunan perumahan, pembuatan bata ringan dan pengambilan air tanah. Data SPPL Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.44.



3.42. Data Izin Lingkungan Kabupaten Tana Tidung, 2018 - 2020

No	Pemrakarsa	Nomor Izin	Luas Area (ha)	Jenis Usaha & Lokasi	Keterangan
1	Dinas PUPRPKP	660/297/K-XI/2018	5 ha	Pembangunan Pelabuhan Speed Boad Bebatu	AMDAL
2	Dinas PUPRPKP	660/080/K-II/2019 (4-2-2019)	Panjang ± 6,3 km, Lebar : 200 m dan Kedalaman : 24 m	Pembangunan Terusan Tanjung Sebidai Kec. Sesayap	AMDAL
3	Dinas PUPRPKP	660/074/K-II/2019 (4-2-2019)	Luas Lahan : 20 ha	Pembangunan TPA Sampah Kec. Sesayap	AMDAL
4	Dinas PUPRPKP	660/076/K-II/2019 (4-2-2019)	Tinggi : 9,5 m dan Luas genangan : 28,6 ha	Embung Tana Lia	AMDAL
5	BWS	660/078/K-II/2019 (4-2-2019)	Luas : ± 3000 ha	Jaringan Tata Air Tambak Tanah Merah	AMDAL

Sumber : DLH Kab. Tana Tidung, 2021

Tabel 3.43. Data Rekomendasi Kelayakan Lingkungan untuk Dokumen UKL-UPL Kabupaten Tana Tidung, 2020

No	Pemrakarsa	Nomor Rekomendasi Kelayakan Lingkungan	Tanggal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan	Lokasi Kegiatan	Jenis Usaha	Keterangan
1	PT. Kayan LNG Nusantara	660/104/BUP/IV/2020	27 April 2020	Desa Tanah Merah Barat Kec. Tana Lia	Pembangunan Kilang LNG Dengan Kapasitas Produksi 22-25 MMSCFD Beserta Fasilitas Penunjang dan Pembangunan Terminal Khusus dengan Luasan Dermaga 15.000 m ²	UKL-UPL
2	Dinas PUPRPKP	660/108/BUP/IV/2020	1 April 2020	Desa Tideng Pale Kec. Sesayap	Pembangunan Irigasi	UKL-UPL
3	Dinas PUPRPKP	660/106/BUP/IV/2020	1 April 2020	Kec. Tana Lia	Pembangunan Irigasi	UKL-UPL
4	Dinas PUPRPKP	660/107/BUP/IV/2020	1 April 2020	Desa Kapuak Kec. Muruk Rian	Pembangunan Irigasi	UKL-UPL
5	Dinas PUPRPKP	660/126/BUP/IV/2020	2 April 2020	Desa Kujau Kec. Betayau	Pembangunan Irigasi	UKL-UPL
6	Dinas PUPRPKP	660/105/BUP/IV/2020	1 April 2020	Desa Sesayap Selor Kec. Sesayap Hilir	Pembangunan Irigasi	UKL-UPL
7	PT. Intraca Hutani Lestari	660/112/BUP/V/2020	19 Mei 2020	Desa Rian Kec. Muruk Rian	Pembangunan dan Operasional Terminal Khusus Untuk Bongkar/Muat Kayu Gelondongan/Log	UKL-UPL
8	Dinas PUPRPKP	660/134/BUP/VIII/2020	26 Agustus 2020	Kec. Sesayap Hilir	Pembangunan Pelabuhan Nusantara	UKL-UPL
9	Dinas PUPRPKP	660/135/BUP/VIII/2020	26 Agustus 2020	Desa Sebang Kecamatan Sesayap	Pembangunan Pelabuhan Sebang	UKL-UPL
10	Dinas PUPRPKP	660/136/BUP/VIII/2020	26 Agustus 2020	Desa Bebatu Kecamatan Sesayap Hilir	Pelabuhan Feri	UKL-UPL

Sumber : DLH Kab. Tana Tidung, 2021

Tabel 3.44. Data SPPL Kabupaten Tana Tidung, 2020

No	Nama Pemilik	Nama Perusahaan/ Instansi	Nomor SPPL	Tanggal SPPL	Luas Area	Luas Bangunan	Jenis Usaha dan Lokasi	Keterangan
1	Yance Padang	Perseorangan	666/001/DLHP-KTT/I/2020	15 Januari 2020	30 m x 27 m	3 m x 12 m	Penampungan dan Penjualan BBM	SPPL
2	Adnan Nanang	Perseorangan	660/002/DLHP-KTT/I/2020	27 Januari 2020	10 m x 12 m	8 m x 12 m	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Mobil	SPPL
3	Rahmawani	Perseorangan	660/003/DLHP-KTT/II/2020	7 Februari 2020	4 m x 8 m	96 m ²	Sarang Burung Walet	SPPL
4	H. Syachril, SE., M.AP	Dinas Kesehatan	660/004/DLHP-KTT/II/2020	24 Februari 2020	450 m ²	60 m ²	Balai Penyuluh KB Desa Sebawang	SPPL
5	H. Syachril, SE., M.AP	Dinas Kesehatan	660/005/DLHP-KTT/II/2020	24 Februari 2020	300 m ²	67,5 m ²	Balai Penyuluh KB Kec. Muruk Rian	SPPL
6	H. Syachril, SE., M.AP	Dinas Kesehatan	660/006/DLHP-KTT/II/2020	24 Februari 2020	300 m ²	67,5 m ²	Balai Penyuluh KB Desa Sambungan Selatan	SPPL
7	Edi Yarta	Wajo Motor	666/007/DLHP-KTT/II/2020	25 Februari 2020	10 m x 20 m	10 m x 12 m	Bengkel	SPPL
8	Muhamad Harun	ABM Motor	666/008/DLHP-KTT/II/2020	25 Februari 2020	6 m x 10 m	6m x 10m	Bengkel	SPPL
9	Slamet Harianto	Slamet Motor	666/009/DLHP-KTT/II/2020	25 Februari 2020	-	6 m x 4 m	Bengkel	SPPL
10	Lie Henry Darmawan	Mitra Ban	666/010/DLHP-KTT/II/2020	25 Februari 2020	± 1.200 m ²	± 120 m ²	Bengkel	SPPL
11	Rusmansyah	Dafi Motor	666/011/DLHP-KTT/II/2020	25 Februari 2020	14 m x 28 m	6 m x 24 m	Bengkel	SPPL
12	Muhamad Ramli	Hana Berkah	666/012/DLHP-KTT/II/2020	25 Februari 2020	30 m x 200 m	8 m x 8 m	Bengkel	SPPL
13	Andi Rais Matta	Langit Motor	666/013/DLHP-KTT/II/2020	25 Februari 2020	-	4 m x 6 m	Bengkel	SPPL
14	Zuliansyah	CV. Karya Mandiri Pratama	666/014/DLHP-KTT/III/2020	30 Maret 2020	15 m x 30 m	6 m x 10 m	Bangunan Tempat Usaha Jasa Konstruksi	SPPL
15	Marzuki	CV. Persada Nusantara	666/015/DLHP-KTT/IV/2020	27 April 2020	15 m x 10 m	7 m x 8 m	Bangunan Tempat Usaha Jasa Pemborong dan Perdagangan	SPPL



No	Nama Pemilik	Nama Perusahaan/ Instansi	Nomor SPPL	Tanggal SPPL	Luas Area	Luas Bangunan	Jenis Usaha dan Lokasi	Keterangan
16	Retno Cony Nurlita	Perseorangan	666/016/DLHP-KTT/IV/2020	28 April 2020	-	-	Bangunan Tempat Usaha Kuliner dan Jasa Kurir	SPPL
17	Wisnu Satrio Wibowo	Perseorangan	666/017/DLHP-KTT/VI/2020	23 Juni 2020	250 m ²	6m x 9m	Usaha Tempat Praktek Dokter	SPPL
18	Mohamad Sadli	CV. Apriel Jaya Mandiri	666/018/DLHP-KTT/VII/2020	3 Juli 2020	8 m x 12 m	6m x 9m	Konstruksi dan Perdagangan Umum	SPPL
19	Syamsudin	PT. Mendurian	660/019/DLHP-KTT/XI/2020	22 September 2020	6 ha	39 m ² /unit	Pembangunan Perumahan Desa Sesayap Selor	SPPL
20	Amirudin	Perseorangan	660/020/DLHP-KTT/X/2020	6 Oktober 2020	1,2 ha	30 m x 40 m	Pembuatan Bata Ringan	SPPL
21	Edi Dodiyanto	PT. Mulia Agro Utama	666/021/DLHP-KTT/X/2020	14 Oktober 2020	1 sumur	0,67 l/dtk	Pengambilan Air Tanah	SPPL

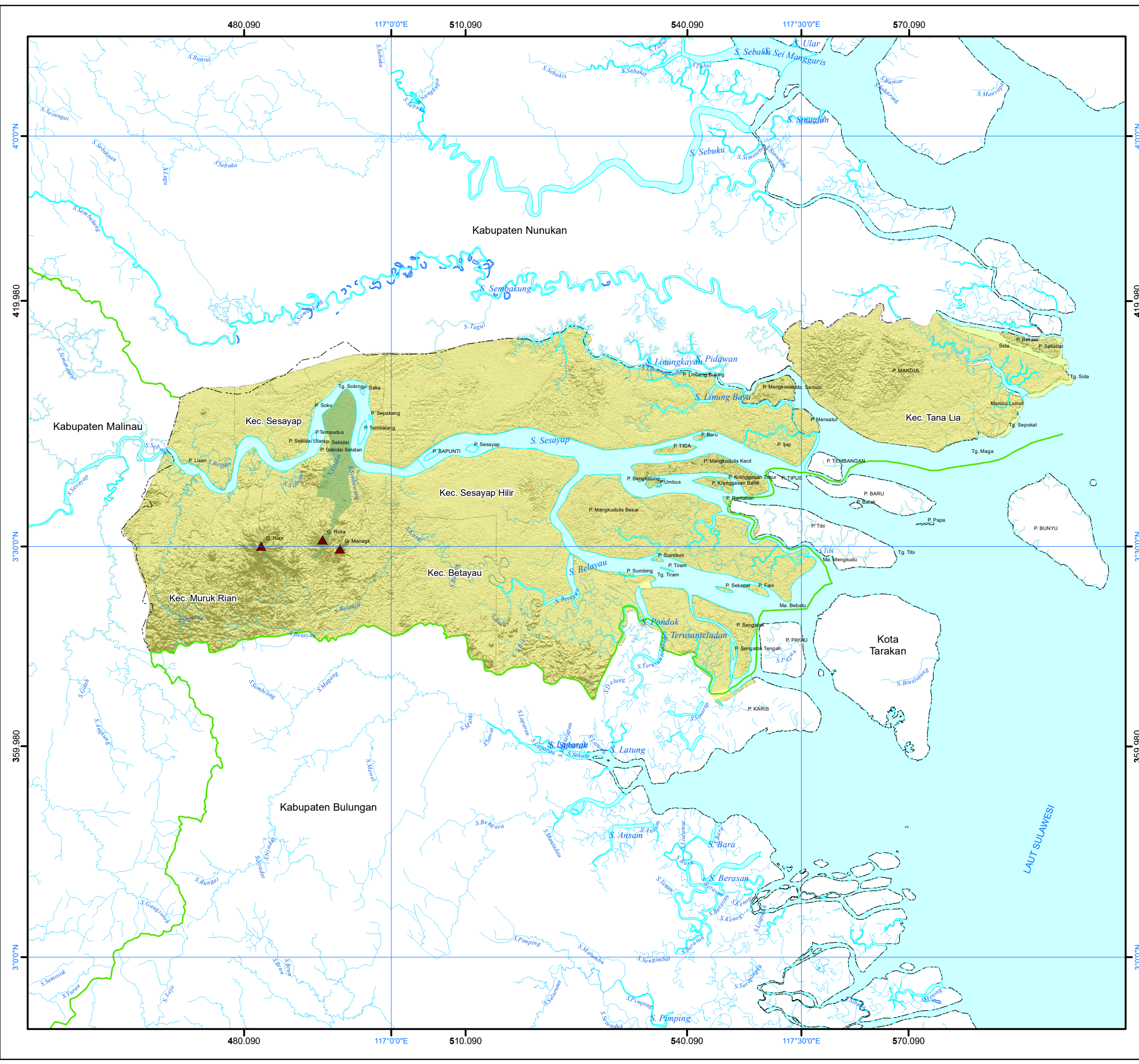
Sumber : DLH Kab. Tana Tidung, 2021

3.14.6. Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pencemaran udara, meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah yang belum optimal sehingga praktek pengelolaan sampah dengan membakar oleh masyarakat akan meningkatkan pelepasan karbon ke udara. Selain itu ancaman kebakaran hutan dan lahan yang masih tinggi, sehingga meningkatkan pelepasan karbon di udara yang selain mempengaruhi kualitas udara juga berdampak pada meningkatkan resiko perubahan iklim di Kabupaten Tana Tidung.

Wilayah Kabupaten Tana Tidung secara keseluruhan mempunyai kerentanan terhadap perubahan iklim dalam kategori sedang yang mencakup areal seluas 376.475,21 ha atau 98,47% dari wilayah Kabupaten Tana Tidung. Kerentanan terhadap perubahan iklim kategori sedang ini mencakup seluruh wilayah empat kecamatan yaitu Sesayap Hilir, Betayau, Muruk Rian dan Tana Lia serta sebagian wilayah Kecamatan Sesayap. Sedang kerentanan dalam kategori sangat rendah seluas 5.831,23 ha (1,53%) terdapat di sebagian Kecamatan Sesayap yaitu disekitar P. Sebidal dan P. Sebidal Selatan. Peta kerentanan atau Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Gambar 3.19.

Kerentanan menggambarkan derajat atau tingkat kemudahan terkena atau ketidakmampuan suatu sistem untuk menghadapi dampak dampak buruk dari perubahan iklim termasuk keragaman iklim dan iklim ekstrim.



PETA KERENTANAN (SIDIK)

U

SKALA 1:500.000

0 1,75 3,5 7 10,5 14 17,5 Km.

Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 50N

INSET PETA

MALAYSIA
 Kabupaten Nunukan
 Kabupaten Malinau
 Kabupaten Bulungan
 Kota Tarakan
 Lokasi yang dipetakan
 Skala 1:7.500.000

KETERANGAN

▲ Gunung	Perairan	Garis Pantai
Batas Administrasi	Danau	Sungai
— — — — — Batas Provinsi	Wilayah Perairan	
— · — · — · — Batas Kabupaten		
— · — · — · — Batas Kecamatan		
— — — — — Batas Definitif		
Kerentanan		
Sangat Rendah		
Sedang		

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial, 2014
2. Peta Kerentanan Wilayah Kabupaten Tana Tidung, Peta Kerentanan Nasional, Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan, sidik.menhk.go.id, 2021
3. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara, Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Utara, 2017
4. Data DEM SRTM 30m

CATATAN :

1. Peta dicetak diatas kertas ukuran A3
2. Batas Administrasi yang tergambar di peta bisa berbeda dengan batas administrasi di lapangan

Gambar 3.19
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(KLHS RPJMD)
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2021 - 2026



3.14.7. Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Sumberdaya hayati memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Sumberdaya hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Terkait dengan daya dukungnya maka perlu diketahui status dari flora dan fauna khusus yang perlu dilindungi dari kepunahan.

Kabupaten Tana Tidung memiliki status kawasan hutan yaitu mencapai \pm 170.340,64 ha, yang terdiri dari kawasan hutan dengan fungsi produksi sekitar 151.185,63 ha, hutan produksi terbatas sekitar 9.084,28 ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi sekitar 9.601,66 ha, merupakan kawasan hutan yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang besar dengan tingkat keberagaman yang besar. Potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Tana Tidung berjumlah sekitar 174 Spesies dan dari 174 spesies tersebut, terdapat sekitar 24 Spesies yang terkategori dilindungi. Spesies yang dilindungi tersebut terdiri atas vegetasi terrestrial (daratan) sebanyak empat spesies, kelompok mamalia sebanyak delapan spesies, kelompok aves sebanyak 11 spesies dan kelompok herpetofauna sebanyak satu spesies.

Jika dilihat dari tutupan lahan, Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh hutan lahan kering sekunder yaitu mencapai luasan 89.766 ha (18,59%) disusul oleh lahan dengan tutupan lahan berupa semak belukar rawa seluas 84.061 ha (17,41%), perkebunan seluas 81.276 ha (16,83%), tambak seluas 72.740 ha (15,06%) dan hutan rawa sekunder seluas 50.500 ha (10,46%). Adapun tutupan lahan lainnya rata-rata berada pada luasan kurang dari 10 %.

3.15. Keuangan Daerah dalam Pencapaian TPB

3.15.1. Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 sebesar Rp. 725.321.032.000,- yang berasal dari : 1) Pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 13.088.205.000; 2) Dana perimbangan Rp. 657.376.952.000; dan 3) Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 54.855.874.000 (BPS Kab. Tana Tidung, 2021). Pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung dalam jangka waktu lima tahun (2016 – 2020) cenderung menurun. Sebagai gambaran, pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 yaitu RP. 725.321.032.000,- menurun 2,84% dibanding tahun 2016 dan menurun 0,36% dibanding tahun 2019. Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung 2017 – 2020, rata – rata -1,74 %. Dalam kurun waktu itu hanya tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan positif yaitu 15,68 % dibanding tahun 2018, tahun-tahun lainnya pertumbuhannya negatif, artinya menurun dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 3.45.

Bila dirinci menurut sumber pendapatannya maka kontribusi terbesar bersumber dari dana perimbangan. Pada tahun 2020, kontribusi dana perimbangan pada pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar 90,59%. Sedang rata-rata kontribusi Dana Perimbangan tersebut dalam lima tahun terakhir (2016 – 2020) adalah 88,97%. Pertumbuhan dana perimbangan Kabupaten Tana Tidung 2017 s/d 2020, rata-rata meningkat 0,52 %, artinya peningkatan itu sangat kecil. Bila dicermati untuk tiap tahunnya pertumbuhannya sangat fluktuatif, misalnya dana perimbangan tahun 2017 menurun 19,95% dibanding tahun 2016, tahun 2018 sedikit meningkat dibanding tahun 2017, tahun 2019 meningkat cukup besar yaitu 20,79% dibanding tahun 2018, tetapi pada tahun 2020 sedikit menurun dibanding tahun 2019.



Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2020 berkontribusi sebesar 7,56 % terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung. Dalam kurun waktu lima tahun (2016 – 2020), lain-lain pendapatan yang sah secara rata-rata dalam jangka waktu tersebut berkontribusi sebesar 8,09 % terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung. Pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Tana Tidung secara rata-rata dalam jangka waktu 2017 – 2020 meningkat 4,96%, merupakan peningkatan pertumbuhan terbesar dibanding sumber pendapatan daerah lainnya.

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah PAD, yang kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung sangat kecil dan cenderung menurun. Kontribusi PAD dalam pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 sebesar 2,81 %, sedang secara rata-rata dalam lima tahun terakhir (2016 – 2020) kontribusi PAD adalah 2,93%.

Nilai PAD Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 adalah Rp. 13.088.205.000,- menurun 40,24 % dibanding PAD tahun 2016 dan menurun 35,55% dibanding PAD tahun 2019. Secara rata-rata dalam jangka waktu lima tahun (2016 – 2020) PAD menghasilkan pertumbuhan – 9,10% suatu penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini sangat mengkuatirkan mengingat PAD mencerminkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menggali pendapatannya. Akan lebih mengkuatirkan lagi ketika dirinci dari komponen PAD, yaitu kontribusi dari pajak dan retribusi terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung relatif kecil. Sebagai contoh pada tahun 2020, pajak dan retribusi hanya menghasilkan Rp. 4.354.766.000,- atau 33,27 % dari PAD atau 0,56 % dari pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung. Untuk itu upaya menggali PAD perlu dilakukan agar pendapatan daerah dari PAD bisa ditingkatkan. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.46, sedang gambaran



mengenai nilai dan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung secara keseluruhan dan berdasarkan masing-masing sumber pendapatannya dapat dilihat pada Gambar 3.20 dan 3.21.

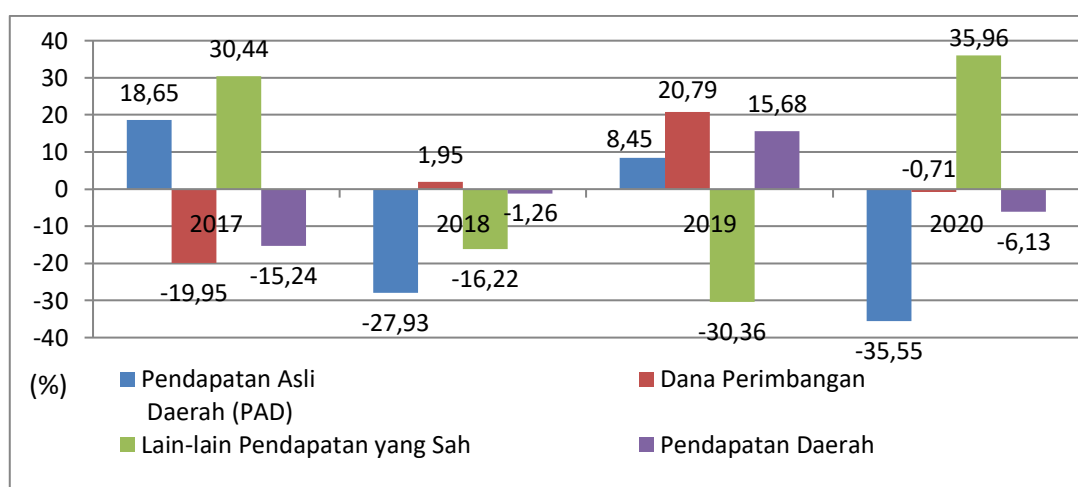
Tabel 3.45. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Menurut Jenis Pendapatan (Ribuan Rupiah), 2016 - 2020

Jenis Pendapatan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pendapatan Asli Daerah	21.900.202	25.983851	18.727.016	20.308.596	13.088.205
1.1 Pajak Daerah	2.228.144	6.230.005	2.770.234	.618.913	3.382.401
1.2 Retribusi Daerah	272.166	488.015	519.386	503.244	972.365
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.376.331	8 362 321	7.520.159	7.087.059	4.029.893
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	13.023.560	10.903.510	7.917.236	9.099.310	4.703.545
2. Dana Perimbangan	671.580.900	537.625.621	548.108.271	662.052.696	657.376.952
2.1 Bagi Hasil Pajak	-	19.359.835	18.452.250	20.141.064	-
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	123.679.932	94.618.095	135.717.946	-
2.3 Dana Alokasi Umum	-	350.962.437	394.725.005	417.103.576	412.379.208
2.4 Dana Alokasi Khusus	-	43.623.417	40.312.921	48.712.800	69.181.367
2.5 Dana Alokasi Desa	-	-	-	40.377.310	42.109.006
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	53.017.946	69.154.138	57.939.581	40.348.120	54.855.874
3.1 Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
3.2 Dana Darurat	-	-	-	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.061.682	14.523.149	12.114.814	17.540.810	18.884.969
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	26.930.160	-	37.042.652	3.397.812	30.384.047
3.5 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	26.930.160	-	37.042.652	3.397.812	30.384.047
3.6 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.589.000	31.478.990	3.562.000	3.277.500	4.303.661
3.7 Lainnya	437.104	23.152.000	5.220.115	16.131.997	1.283.197
Jumlah	746.499.047	632.763.610	624.774.868	722.709.412	725.321.032

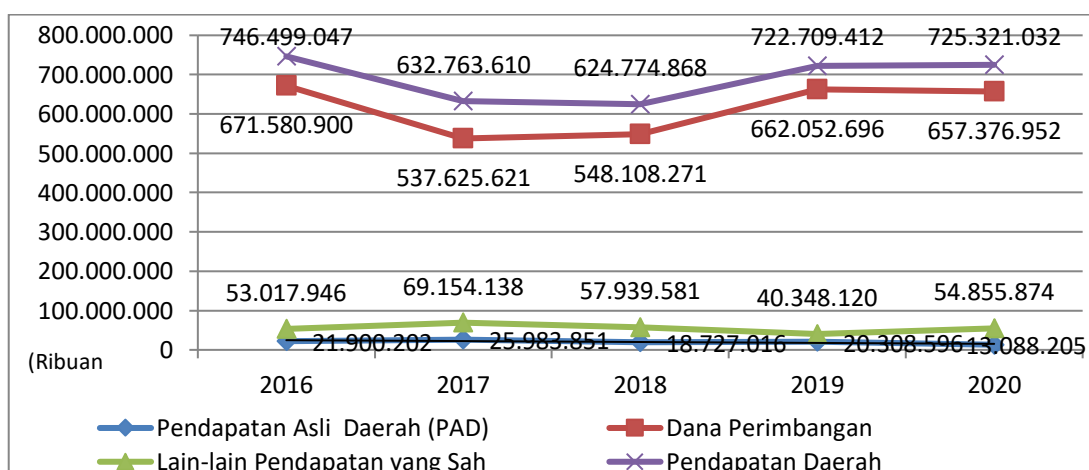
Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2020 & 2021

Tabel 3.46. Kontribusi masing-masing Sumber Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung, 2016 - 2020

Tahun	Kontribusi PAD	Kontribusi Dana Perimbangan	Kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah
2016	2,93	89,96	7,10
2017	4,11	84,96	10,93
2018	3,00	87,73	9,27
2019	2,81	91,61	5,58
2020	1,80	90,59	7,56
Rata-Rata	2,93	88,97	8,09



Gambar 3.20. Grafik Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Dirinci Berdasarkan Sumber Pendapatan, 2017 - 2020



Gambar 3.21. Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung, 2016 - 2020



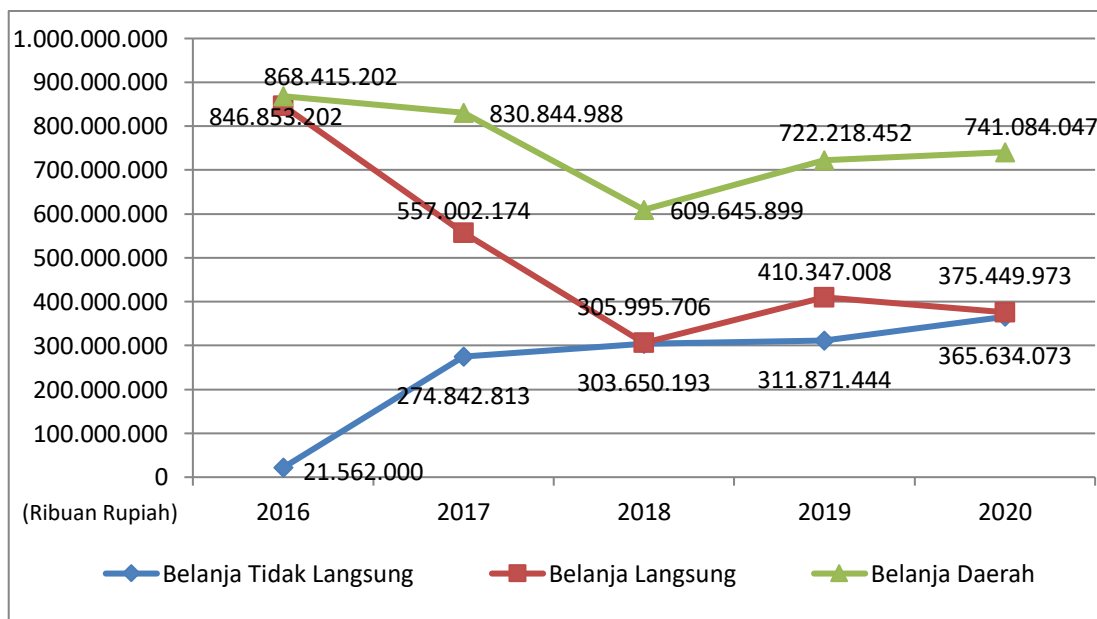
Belanja daerah Kabupaten Tana Tidung bersifat fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2020, belanja daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 741.084.047.000,- menurun 14,66% dibanding tahun 2016 dan sedikit meningkat yaitu 2,61% dibanding tahun 2019. Secara keseluruhan pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu empat tahun (2017 – 2020) rata-rata -2,47 %. Belanja tidak langsung sejak tahun 2017 (format yang sama) hingga tahun 2020 terus meningkat. Pada tahun 2020, belanja tidak langsung sebesar Rp. 365.634.073.000,- meningkat 17,24 % dibanding tahun 2019 dan meningkat 33,03 %. Sedang belanja langsung, data tahun 2017 -2020 menunjukkan sifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Belanja langsung paling besar tahun 2017 menurun signifikan dalam tiga tahun setelahnya. Belanja daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.47, sedang gambaran perkembangan belanja daerah tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.22.

Hal yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dalam anggaran belanja daerah Kabupaten Tana Tidung adalah kecenderungan makin kecilnya belanja barang modal dan sebaliknya cenderung meningkatnya belanja pegawai (belanja tidak langsung dan belanja langsung). Data pada Tabel 3.48 menunjukkan walaupun secara rata-rata jumlah belanja barang modal dalam kurun waktu 2017 s/d 2020 lebih besar dari belanja pegawai namun pertumbuhan belanja modal rata-rata turun – 11,72 %, sebaliknya pada waktu yang sama pertumbuhan belanja pegawai rata-rata meningkat 5,60 %.

Tabel 3.47. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Menurut Jenis Belanja (Ribuan Rupiah), 2017–2020

Jenis Belanja	2016	2017	2018	2019	2020
1. Belanja Tidak Langsung	21.562.000	274.842.813	303.650.193	311.871.444	365.634.073
1.1 Belanja Pegawai	-	197.101.869	213.240.968	193.533.476	237.692.671
1.2 Belanja Bunga	-	-	-	-	-
1.3 Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
1.4 Belanja Hibah	19.768.000	14.221.900	7.736.700	15.247.450	31.021.402
1.5 Belanja Bantuan Sosial	1.794.000	1.682.835	1.277.922	1.284.661	1.297.663
1.6 Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
1.7 Belanja Bantuan Keuangan	-	60.836.210	81.394.602	101.805.857	95.622.336
1.8 Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
2. Belanja Langsung	846.853.202	557.002.174	305.995.706	410.347.008	375.449.973
2.1 Belanja Pegawai	209.394.772	29.240.441	23.203.520	25.216.100	20.876.498
2.2 Belanja Barang dan Jasa	218.810.165	152.392.918	130.521.635	184.448.698	171.881.385
2.3 Belanja Modal	418.657.319	375.368.815	152.270.551	200.682.210	182.692.089
Jumlah	868.415.202	830.844.988	609.645.899	722.218.452	741.084.047

Sumber : BPS Kab. Tana Tidung, 2021



Gambar 3.22. Grafik Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung, 2016 – 2020

Tabel 3.48. Pertumbuhan Belanja Barang Modal dan Belanja Pegawai Kabupaten Tana Tidung, 2016 - 2020

No	Tahun	Belanja Barang Modal		Belanja Pegawai	
		Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1	2016	418.657.319	-	209.304.772	-
2	2017	375.368.815	-10,34	226.342.310	8,14
3	2018	152.270.551	-59,43	236.444.488	4,46
4	2019	200.682.210	31,79	228.749.516	-3,25
5	2020	182.692.089	- 8,96	258.569.169	13,04
Rata-Rata		265.934.197	-11,72	231.882.051	5,60

Jika dibandingkan realisasi belanja dengan pendapatan daerah sejak 2016 s/d 2020, secara rata-rata belanja daerah adalah 109,46%. Artinya dalam kurun waktu lima tahun tersebut rata-rata terjadi defisit 9,46%. Defisit terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 31,30% dibandingkan pendapatan daerah.

Belanja daerah sedikit lebih kecil dari pendapatan daerah terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Sedang tahun lainnya belanja dari lebih besar dibanding pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi defisit anggaran pada tiga tahun tersebut yaitu tahun 2016, 2017 dan 2020. Sebagai contoh, pada tahun 2020 jika dibandingkan realisasi Pendapatan dengan realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung maka terjadi lebih banyak Belanja dibandingkan pendapatan. Bila dihitung, terjadi defisit sebesar Rp. 15,763.015.000,- Prosentase belanja daerah dibanding pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.49.

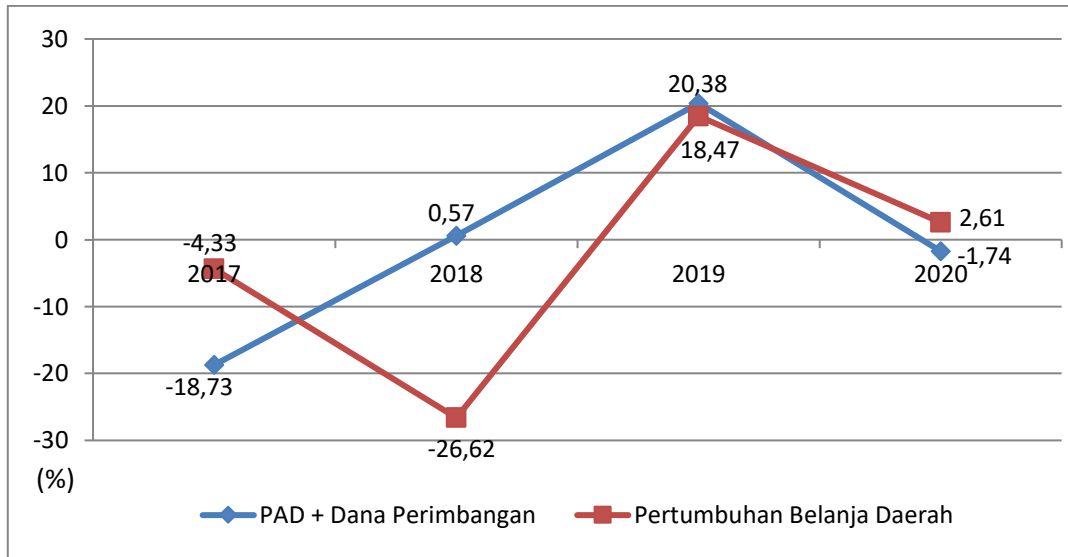
Tabel 3.49. Prosentase Belanja Daerah Dibanding Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung, 2016 - 2020

Tahun	Pendapatan Daerah (Milyar Rupiah)	Belanja Daerah (Milyar Rupiah)	% Belanja terhadap Pendapatan Daerah
2016	746.499.047	868.415.202	116,33
2017	632.763.610	830.844.988	131,30
2018	624.774.868	609.645.899	97,58
2019	722.709.412	722.218.452	99,93
2020	725,321.032	741.084.047	102,17

Bila dihitung pertumbuhan PAD + Dana Perimbangan, selama tahun 2017 – 2020 terjadi pertumbuhan yang sangat kecil dari dua sumber pendapatan tersebut yaitu 0,48%. Pertumbuhan negatif terbesar terjadi tahun 2017 yaitu – 18,73 % , sedang pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2019 sebesar 20,38%.

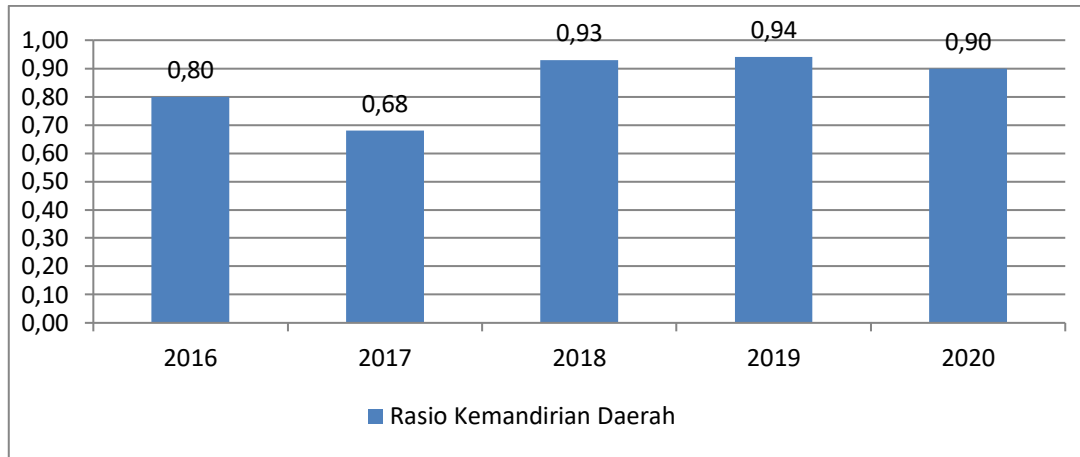
Untuk pertumbuhan belanja daerah dalam kurun waktu 2017 – 2020 rata-rata – 2,47 %, berarti secara rata-rata belanja daerah sedikit mengalami penurunan. Peningkatan belanja daerah paling besar terjadi pada tahun 2019 yaitu 18,47% sedang penurunan belanja daerah terbesar terjadi tahun 2018 yaitu -26,62 %.

Berkaitan dengan data PAD + Dana Perimbangan yang sedikit meningkat dan sebaliknya belanja daerah sedikit menurun merupakan kondisi yang cukup baik dalam rangka mengurangi defisit keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung. Perkembangan Pertumbuhan PAD + Dana Perimbangan dengan pertumbuhan belanja daerah dapat dilihat pada Gambar 3.23.



Gambar 3.23. Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan PAD + Dana Perimbangan dengan Pertumbuhan Belanja Daerah

Rasio kemandirian daerah merupakan perbandingan antara PAD dan Dana Perimbangan dibagi dengan belanja daerah. Berdasarkan data tahun 2016 – 2020, maka diperoleh 0,85, yang berarti pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan hanya mampu membiayai daerah rata-rata 85 %. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2016 – 2020, tidak ada rasio kemandirian yang bernilai 1 atau lebih, yang berarti dalam lima tahun terakhir pendapatan dari PAD dan Dana Perimbangan belum pernah mampu sepenuhnya membiayai belanja daerah Kabupaten Tana Tidung. Rasio Kemandirian paling tinggi dicapai pada tahun 2019 yaitu 0,94. Rasio kemandirian Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Gambar 3.24.



Gambar 3.24. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Tana Tidung, 2016 – 2020

3.15.2. Realisasi Anggaran OPD dalam Pencapaian Target TPB

Realisasi anggaran pada 11 OPD di Kabupaten Tana Tidung tahun 2016 s/d 2020 dalam pencapaian TPB sebesar Rp 1.951.816.923.933,55 atau rata-rata per tahun adalah Rp. 390.363.384.786,11. Namun bila dilihat masing-masing tahun anggaran, maka realisasi anggaran tersebut cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata -3,21%. Realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 360.110.003.542,03 meningkat 7,64 % dibanding tahun 2019 namun menurun 28,38 % dibanding tahun 2016.

Terdapat tiga OPD di Kabupaten Tana Tidung yang realisasi anggarannya dari tahun 2016 s/d 2020 sangat besar yaitu : 1) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2) Dinas Pendidikan dan 3) Dinas Kesehatan. Proporsi masing-masing realisasi anggran OPD tersebut pada lima tahun tersebut dibanding realisasi anggran total dari 11 OPD masing-masing sebesar 41,53 %, 26,62 % dan 17,87 %. Artinya realisasi anggaran untuk ketiga OPD tersebut adalah 86,02%. Hal ini menunjukkan kegiatan pembangunan insfrastruktur, pendidikan dan kesehatan merupakan sektor yang mendapat prioritas tinggi dalam pembangunan Kabupaten Tana Tidung. Namun bila lebih

dicermati maka anggaran untuk dua OPD terbesar pengguna anggaran yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pendidikan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Realisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020 sebesar Rp. 98.743.785.164,00 menurun 9,28 % dibanding 2019 dan menurun 65,22 % dibanding 2016. Realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan juga mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, realisasi anggarannya adalah Rp 66.619.560.288,00 menurun 30,18 % dibanding 2019 dan menurun 54,06 % dibanding 2016. Sedang pada Dinas Kesehatan terjadi fluktuasi realisasi anggaran namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020, OPD ini memperoleh anggaran Rp 96.336.829.988,07 meningkat 31,17 % dibanding tahun 2019 dan meningkat 167,33 % dibanding tahun 2016, namun menurun 1,69 dibanding tahun 2017.

Beberapa OPD contohnya Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan khususnya pada tahun 2020 realisasi anggarannya meningkat sangat pesat. Pada tahun 2020 realisasi anggaran OPD ini mencapai Rp. 44.321.635.574,00 meningkat 404,97% dibanding tahun 2019 dan 249,60 % dibanding tahun 2016. Selain itu peningkatan realisasi anggaran sangat signifikan juga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu dari Rp 2.259.778.064,00 pada tahun 2019 meningkat menjadi 23.126.462.713,00 atau meningkat 923,40 % pada tahun 2020.

Adapun realisasi penggunaan anggaran dalam pencapaian TPB di Kabupaten Tana Tidung oleh masing-masing OPD disajikan pada Tabel 3.50.

Tabel 3.50. Realisasi Penggunaan Anggaran oleh OPD dalam Pencapaian TPB Kabupaten Tana Tidung, 2017 - 2020

No	Organisasi Perangkat Daerah	Tahun Anggaran (Rp)					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dinas Pendidikan	145.027.079.373	135.932.141.457,00	76.571.736.946,00	95.416.785.342,00	66.619.560.288,00	519.567.303.406,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	-	7.043.343.537,00	11.891.427.500,00	14.169.000.000,00	6.685.161.247,96	39.788.932.284,96
3	Dinas Kesehatan	39.036.240.000,00	97.993.835.000,00	42.017.342.848,00	73.442.447.483,00	96.336.829.988,07	348.826.695.319,07
4	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	8.713.513.856,00	2.480.742.922,00	2.219.466.766,00	8.564.715.500,00	4.323.125.998,00	26.301.565.042,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	12.677.901.928,00	8.694.950.093,00	9.262.458.600,00	8.777.124.396,00	44.321.635.574,00	83.734.070.591,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.501.742.449,00	1.565.817.511,00	1.208.647.451,00	1.596.195.800,00	2.479.297.940,00	8.351.701.151,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1.488.294.849,00	1.016.686.900,00	2.259.778.064,00	23.126.462.713,00	27.891.222.526,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	283.884.502.727,00	215.301.356.956,00	103.825.718.712,31	108.848.425.296,21	98.743.785.164,00	810.603.788.855,52
9	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	11.997.998.205,00	9.943.020.959,00	6.689.754.242,00	5.669.916.813,00	7.816.881.441,00	42.117.571.660,00
10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	-	9.902.140.619,00	5.082.767.041,00	9.497.952.464,00	4.264.904.488,00	28.747.764.612,00
11	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	3.898.120.600,00	293.289.986,00	6.302.539.200,00	5.392.358.700,00	15.886.308.486,00
Jumlah		502.838.978.538,00	494.243.764.503,00	260.079.296.992,31	334.544.880.358,21	360.110.003.542,03	1.951.816.923.933,55

Sumber : DLH Kab. Tana Tidung, 2021

3.15.3. Realisasi Anggaran Filantropi dalam Pencapaian TPB

Pada tahun 2020, pemerintah Kabupaten Tana Tidung juga mendapatkan tambahan anggaran dalam pencapaian TPB dari lembaga Non Pemerintah (Filantropi) sebesar Rp 4.546.075.160,00 dari target Rp 6.756.000.000,00. Tambahan alokasi anggaran tersebut berasal dari PT. PLN sebesar Rp 100.000.000,00. PT. Intraca Hutani Lestari sebesar Rp 800.000.000,00 dan PT. PT. Pipit Mutiara Jaya sebesar Rp 3.646.075.160,00. Adanya kontribusi dari lembaga non pemerintah tentu sangat membantu pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam mendukung program pembangunan daerah terutama pada saat pandemi covid 19 sekarang ini. Selain itu adanya peran serta swasta dalam pembiayaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat juga merupakan realisasi komitmen perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai perwujudan pelaksanaan peraturan perundang-undang yang berlaku dalam menjalankan usahanya. Target dan realisasi anggaran filantropi dalam pencapaian TPB Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 3.51.

Tabel 3.51. Target dan Realisasi Anggaran oleh Filantropi

No	Filantropi	Target (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	PT. PLN	-	100.000.000,00
2	PT. Intraca Hutani Lestari	1.464.000.000,00	800.000.000,00
3	PT. Pipit Mutiara Jaya	5.292.000.000,00	3.646.075.160,00
Jumlah		6.756.000000,00	4.546.075.160,00

Sumber : DLH Kab. Tana Tidung, 2021



3.16. Peran Para Pihak

Dalam pencapaian TPB pada setiap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung perlu pelibatan para pihak atau pemangku kepentingan yang terkait. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung yang berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung dibagi atas beberapa kelompok, antara lain :

- 1) Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang meliputi Kepala Daerah, Legislatif dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tana Tidung. Para pihak ini berperan dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah serta mengkoordinasikan kebutuhan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- 2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, meliputi Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Utara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat baik melalui UPT yang ada di Kabupaten Tana Tidung ataupun Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat yang langsung berkontribusi di Kabupaten Tana Tidung.
- 3) Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam hal ini Pengusaha Kehutanan, Pengusaha Pertambangan, Pengusaha Perkebunan, Jasa Konsultasi dan Konstruksi dan UMKM, serta pengusaha lainnya yang turut berperan serta dalam pencapaian TPB. Peran yang telah dilakukan antara lain membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian baik makro dan mikro di daerah serta peran serta dalam percepatan pelaksanaan pembangunan melalui bantuan penganggaran.
- 4) Akademisi baik yang ada di Kabupaten Tana Tidung maupun atas permintaan/kebutuhan yang berasal dari luar



Kabupaten Tana Tidung. Peran akademisi dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung yaitu dalam kegiatan dibidang Pendidikan khususnya mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui peran tenaga ahli dan tenaga konsultasi. Selain itu aktifitas penelitian dan pengabdian masyarakat turut berkontribusi dalam pembangunan di daerah.

- 5) Philantrophy, dalam hal ini adalah Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM), *Project* ataupun penyelenggara kegiatan oleh Lembaga non pemerintah yang berkontribusi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung.

Peran para pihak dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung ini dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pengawasan, evaluasi dan penyebarluasan Informasi. Peran para pihak ini akan dianalisis lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

BAB IV

ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Bab ini mengkaji KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 yang meliputi; 1) Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung, 2) Penapisan isu pembangunan berkelanjutan dan 3) Pengkajian dan analisis dampak/risiko lingkungan. Isu pembangunan berkelanjutan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung dihasilkan melalui proses konsultasi publik dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan khusus untuk itu. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung ini merupakan sintesis dari berbagai data dan informasi yang tersebar di berbagai sumber data (pemerintah daerah, LSM, media massa, hasil kajian, website, dan lain sebagainya) yang dikumpulkan oleh POKJA KLHS RPJMD. Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan selanjutnya dilakukan penapisan isu menjadi isu pendek yang pada tahap berikutnya akan dipakai sebagai dasar kajian pengaruh pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung terhadap lingkungan hidup. Kemudian dilakukan pengkajian dan analisis dampak dan risiko lingkungan.

4.1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

4.1.1. Daftar Panjang (*Longlist*) Isu Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung menggunakan metode FGD atau curah pendapat dan dilakukan oleh POKJA KLHS RPJMD bersama Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung serta tokoh masyarakat sehingga menghasilkan daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan.



Gambar 4.1. Konsultasi Publik dalam Rangka Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung

Jumlah isu pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan adalah sebanyak 190 isu sebagai daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan dari 34 kategori seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Daftar Panjang (*Long List*) Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung

Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait		Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata
			Lintas Wilayah	Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif		
			1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6		
-	-		20%	10%	20%	30%	20%	-	-
1	Pendidikan	1	Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA	2	4	6	6	5	4,8
		2	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah	5	2	4	6	6	5
		3	Masih rendahnya keterjangkauan pelayanan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah	2	2	2	3	3	2,5
		4	Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	2	4	5	5	3,7
		5	Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan	2	2	5	5	5	4,1
2	Kesehatan	1	Masih kurangnya optimalnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi	4	5	5	5	5	4,8
		2	Masih tingginya penyakit menular dan non menular dikarenakan faktor perilaku kurang sehat	4	5	5	6	5	5,1
		3	Masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana , prasarana maupun SDM	3	3	5	5	5	4,4
		4	Masih ditemukan kasus gizi buruk pada balita	1	5	4	4	4	3,5
		5	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat rasional	2	4	4	6	5	4,4



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait		Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata								
			Lintas Wilayah		Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang			Dampak Kumulatif							
			1	2	3	4	5			6	1	2	3	4	5	6	1
-	-		20%					10%	20%	30%	20%	-	-				
		6	Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	2	5	5	3	4	3,6								
3	Pekerjaan Umum	1	Masih belum memadainya pelayanan jaringan transportasi	5	4	2	4	4	3,8								
		2	Belum terintergrasinya sistem informasi dalam perencanaan pembangunan jalan/jembatan dan pemanfaatan ruang kota	2	2	4	4	4	3,4								
		3	Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk	2	3	4	5	5	4								
		4	Belum optimalnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	4	3	3	5	5	4,2								
		5	Belum optimalnya kualitas pengelolaan TPA	1	2	3	6	5	3,8								
		6	Kurangnya sarana dan prasarana persampahan di beberapa kecamatan	2	2	2	6	6	4								
		7	Belum optimalnya pengelolaan air permukaan pada waduk maupun embung	3	4	4	4	4	3,8								
		8	Kurang sempurnanya kondisi jaringan irigasi untuk pemenuhan kebutuhan pengairan sawah	1	2	3	4	4	3								
		9	Penyediaan dan pengelolaan air baku belum sesuai harapan	4	4	3	5	5	4,3								
		10	Belum optimalnya pemanfaatan air tanah	1	3	4	5	5	3,8								
		11	PDAM masih terbatas dalam mengidentifikasi sumber daya air	1	1	2	2	2	1,7								



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait	Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata	
		Lintas Wilayah	Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif			
		1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6			
-	-	20%	10%	20%	30%	20%	-	-	
			yang tersedia						
		12	Meningkatnya volume air limbah cair dari industri cukup besar	2	3	4	5	4	3,8
		13	Sistem sanitasi yang masih belum terpadu	1	1	3	4	4	2,9
		16	Belum optimalnya drainase untuk mengatasi bencana banjir	4	4	5	4	4	4,2
		17	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara saluran drainase	4	4	4	4	4	4
		18	Persebaran drainase masih terbatas	2	2	3	4	4	3,2
		19	Belum terwujudnya pembangunan jalan poros desa yang memadai	5	3	3	4	4	3,9
		20	Penataan pembangunan lingkungan permukiman penduduk belum sesuai harapan	2	2	3	4	4	3,2
		21	Kurang terpadunya sistem perekonomian antara desa dan kota	1	2	2	2	3	2
4	Perumahan	1	Masih adanya kualitas rumah yang kurang layak huni	1	1	2	2	2	1,7
		2	Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas permukiman	1	1	2	2	2	1,7
		3	Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman	1	1	2	2	2	1,7
		4	Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dan gedung	3	4	4	3	3	3,3
		5	Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni	1	1	2	2	2	1,7
		6	Masih banyak rumah yang belum	3	3	4	4	4	3,7



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait	Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata									
		Lintas Wilayah							Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif					
		1	2	3	4	5			6	1	2	3	4	5	6	1	2
-	-	20%					10%	20%	30%	20%	-	-					
			dapat fasilitas air bersih dari PDAM														
		7	Belum seimbang pertumbuhan pertumbuhan rumah tangga dengan pertumbuhan pengadaaan rumah					4	3	5	5	4	4,4				
		8	Kurang adanya dorongan dari pemerintah kepada investor di bidang perumahan					2	2	4	4	4	3,4				
5	Penataan Ruang	1	Belum sinergisnya rencana tata ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya					1	1	2	2	2	1,7				
		2	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya					4	4	5	6	4	4,8				
6	Perencanaan Pembangunan	1	Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan daerah					2	2	3	2	2	2,2				
		2	Belum optimalnya perkembangan wilayah kecamatan yang bersifat strategis dan wilayah cepat tumbuh					4	4	3	3	3	3,3				
		3	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan wilayah perkotaan					1	1	2	2	2	1,7				
		4	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi					1	1	2	2	2	1,7				
		5	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah					1	1	1	1	1	1				



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait		Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata								
			Lintas Wilayah							Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif				
			1	2	3	4	5			6	1	2	3	4	5	6	1
-	-		20%					10%	20%	30%	20%	-	-				
		6	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya					1	1	2	2	2	1,7				
		7	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana & SDA					1	1	2	2	2	1,7				
		8	Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana					4	3	5	5	5	4,6				
		9	Belum optimalnya kerjasama yang bersifat sinergis antar pemerintah Kabupaten					2	2	2	2	2	2				
		10	Masih terdapat kesenjangan perkembangan dan pertumbuhan desa desa di wilayah perbatasan					4	4	4	5	5	4,5				
		11	Masih rendahnya kapasitas SDM dalam perencanaan					3	3	4	4	4	3,7				
7	Perhubungan	1	Belum meratanya pengelolaan kualitas pelayanan sarana dan prasarana angkutan darat					4	3	5	5	4	4,4				
		2	Masih kurangnya fasilitas lalu lintas dan jaringan jalan					4	3	3	4	3	3,5				
		3	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kelayakan jalan kendaraan bermotor					2	2	2	2	2	2				
		4	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas					4	4	4	4	4	4				
8	Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya kuantitas sampah					4	4	5	5	5	4,7				
		2	Menurunnya kuantitas sumber daya air					4	4	5	6	4	4,8				



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait		Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata								
			Lintas Wilayah		Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang			Dampak Kumulatif							
			1	2	3	4	5			6	1	2	3	4	5	6	1
-	-		20%					10%	20%	30%	20%	-	-				
		3	Masih tingginya luasan lahan kritis	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
		4	Meningkatnya pencemaran tanah	4	4	4	5	5	5	5	5	4,7					
		5	Meningkatnya intensitas global warming	4	4	4	5	5	5	5	5	4,7					
		6	Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup	3	4	4	5	5	5	5	5	4,5					
		7	Konservasi kawasan karst kendeng utara	4	5	5	5	5	5	5	5	4,8					
9	Pertanahan	1	Belum terwujudnya pembangunan sistem informasi pendaftaran tanah	2	2	2	3	2	2	2	2	2,2					
		2	Masih dijumpainya konflik konflik sengketa tanah	4	4	4	5	4	4	4	4	4,2					
10	Catatan Sipil	1	SIAK belum optimal sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan	5	5	5	4	5	5	5	5	4,8					
		2	Kerjasama dan koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil belum berjalan sesuai harapan	5	6	6	5	5	5	5	5	5,1					
		3	Pelayanan catatan sipil belum sesuai harapan	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
		4	keterbatasan kemampuan SDM di bidang teknologi terbatas	5	3	3	3	4	4	4	4	3,9					
		5	Kesadaran masyarakat dalam hak dan kewajiban terhadap tertib administrasi kependudukan rendah	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
11	Pemberdayaan	1	Masih kurangnya kesetaraan gender	5	5	5	5	5	5	5	5	5					



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait	Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata									
		Lintas Wilayah							Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif					
		1	2	3	4	5			6	1	2	3	4	5	6	1	2
-	-	20%					10%	20%	30%	20%	-	-					
	Perempuan dan Perlindungan Anak	2	Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					5	5	5	5	5	5				
		3	Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan					5	5	5	5	5	5				
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1	Masih rendahnya partisipasi program KB					2	3	2	2	2	2,1				
		2	Masih kurangnya tenaga penyuluh KB					2	2	2	2	2	2				
		3	Masih tingginya keluarga pra sejahtera					3	4	4	5	5	4,3				
13	Sosial	1	Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan social					4	4	4	4	4	4				
		2	Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social					5	5	5	5	5	5				
		3	Masih tingginya penduduk miskin					3	4	4	5	5	4,3				
		4	Tingginya kerentanan penyandang penyakit social					5	3	5	5	5	4,8				
		5	Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha					5	5	5	5	5	5				
14	Ketenagakerjaan	1	Rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja					4	4	4	5	5	4,5				
		2	Rendahnya peluang kesempatan kerja					5	5	5	5	5	5				
		3	Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja					5	5	5	5	5	5				
		4	Kurang informasi lowongan bagi					2	3	3	3	3	2,8				



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait	Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata									
		Lintas Wilayah							Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif					
		1	2	3	4	5			6	1	2	3	4	5	6	1	2
-	-	20%					10%	20%	30%	20%	-	-					
			pencari kerja														
15	Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	1	Masih adanya usaha mikro belum berbadan hukum					5	5	5	5	5	5				
		2	Masih rendahnya penciptaan wirau-saha baru dan daya saing UMKM					3	4	4	3	3	3,3				
		3	Masih rendahnya kapasitas para pengelola koperasi dan UMKM					4	5	4	4	4	4,1				
		4	Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif					4	5	5	5	5	4,8				
16	Penanaman Modal	1	Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar instansi dalam rangka menarik investasi					5	5	5	5	5	5				
		2	Belum optimalnya pelayanan perijinan usaha					4	5	5	5	5	4,8				
17	Kebudayaan	1	Masih rendahnya pelestarian adat istiadat dan nilai nilai daerah					5	5	5	5	5	5				
		2	Belum optimalnya upaya pelestarian benda purbakala dan peninggalan sejarah					5	5	5	6	5	5,3				
		3	Masih rendahnya inovasi dalam pengembanganseni & budaya daerah					5	5	5	5	5	5				
		4	Belum kuatnya kerjasama dan jalinan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat					4	4	4	4	4	4				
18	Pemuda dan Olah Raga	1	Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap penggunaan narkoba dan pergaulan bebas					4	5	5	6	5	5,1				
		2	Belum optimalnya peran pemuda					3	3	3	4	3	3,3				



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait	Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata					
		Lintas Wilayah							Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif	
		1	2	3	4	5			6	1	2	3	4
-	-	20%					10%	20%	30%	20%	-	-	
			dalam pembangunan										
		3	Belum optimalnya upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda					5	5	5	5	5	5
		4	Belum optimalnya prestasi dan permasyarakatan olah raga					5	5	5	5	5	5
		5	Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Olah Raga					5	5	5	5	5	5
19	Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat					5	5	5	5	5	5
		2	Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa dalam masyarakat					5	5	5	5	5	5
		3	Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa					4	4	4	4	4	4
		4	Masih adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum					3	3	3	3	3	3
		5	Belum optimalnya fungsi Linmas					3	3	3	3	3	3
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan	1	Belum optimalnya fungsi DPRD					3	4	3	4	4	3,6
		2	Belum optimalnya pemenuhan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah Daerah					4	4	5	4	4	4,2
		3	Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah					5	5	4	5	5	4,8



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait		Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata
			Lintas Wilayah	Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif		
			1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6		
-	-		20%	10%	20%	30%	20%	-	-
	Persandian	4	Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengawasan internal	4	3	4	5	4	4,2
		5	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi di satuan daerah dan perangkat desa	3	4	4	5	4	4,1
		6	Belum optimalnya kerjasama dalam dan antar daerah dalam rangka peningkatan modal, pelayanan publik, dan pengelolaan SDA	5	5	5	5	5	5
		7	Kurangnya responsifnya penyusunan perda dalam menyikapi dinamika peraturan perundang undangan lebih tinggi	3	5	5	5	5	4,6
		8	Masih rendahnya tingkat profesionalisme dan kapasitas aparatur pemda	3	5	5	5	5	4,6
21	Ketahanan Pangan	1	Pertumbuhan Penduduk yang tidak diimbangi dengan kebutuhan pangan	4	4	4	5	4	4,3
		2	Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga	5	4	5	5	5	4,9
		3	Belum adanya data base potensi produk pangan	5	4	4	5	5	4,7
		4	Masih banyaknya angka kemiskinan yang berpotensi terjadinya kerawanan pangan	4	4	4	5	4	4,3
		5	Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan gizi belum berkembang	4	4	5	5	5	4,7



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait		Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata								
			Lintas Wilayah		Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang			Dampak Kumulatif							
			1	2	3	4	5			6	1	2	3	4	5	6	1
-	-		20%					10%	20%	30%	20%	-	-				
		6	Belum optimalnya produktifitas dan mutu produk pangan	4	4	5	4	4	4,2								
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Lemahnya kapasitas masyarakat desa/kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya dalam pengembangan usaha ekonomi produktif	3	5	5	5	5	4,6								
		2	Belum optimalnya partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam mendukung pembangunan di perdesaan	3	4	4	4	4	3,8								
		3	Belum optimalnya fungsi kelembagaan & sistem informasi masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat	2	3	3	3	3	2,8								
		4	Masih rendahnya peran perempuan pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan	2	3	3	3	3	2,8								
		5	Kurangnya diversifikasi produk pangan di tingkat hulu	4	5	5	5	4	4,6								
23	Statistik	1	Belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan	4	4	4	4	4	4								
		2	Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat	4	4	4	4	4	4								
24	Kearsipan	1	Belum terbangunnya sistem administrasi kearsipan yang	4	5	4	3	3	3,6								



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait	Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata
		Lintas Wilayah	Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif		
		1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6		
-	-	20%	10%	20%	30%	20%	-	-
			informatif dan handal					
		2	Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	5	5	5	5	5
		3	Kurang optimalnyaeliharaan terhadap dokumen/arsip daerah dan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip daerah	5	5	5	5	5
25	Komunikasi dan Informatika	1	Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan media masa bagi masyarakat	3	3	4	4	3
		2	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi manajemen pemda untuk penyebaran informasi pembangunan daerah	4	5	5	5	4
		3	Kurang memadainya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informatika	4	4	4	4	4
		1	Masih rendahnya minat baca masyarakat	5	5	5	5	5
26	Perpustakaan	2	Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan	5	5	5	5	4
		3	Belum terjangkauannya pelayanan perpustakaan di wilayah-wilayah tertentu	5	5	5	5	5
		1	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani	4	4	5	4	4
27	Pertanian	2	Masih rendahnya kualitas SDM, pertanian, perkebunan, dan	4	4	5	5	3



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait	Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata	
		Lintas Wilayah	Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif			
		1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6			
-	-	20%	10%	20%	30%	20%	-	-	
			kehutanan						
		3	Belum optimalnya peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani	3	3	4	3	3	3,2
		4	Belum optimalnya diversifikasi dan interaksi serta pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan hortikultura, buah-buahan, dan sayuran	3	3	4	4	3	3,5
		5	Lemahnya permodalan usaha pertanian	4	4	5	5	5	4,7
		6	Tidak stabilnya stok pupuk, obat, serta tingginya harga saprodi pertanian	4	4	5	4	4	4,2
		7	Tidak stabilnya harga produksi pertanian dan rendahnya nilai tukar produk pertanian	4	4	5	4	4	4,2
		8	Belum optimalnya pembinaan kepada peternak	3	3	4	3	3	3,2
		9	Masih rendahnya pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit ternak	2	2	2	2	2	2
		10	Masih rendahnya produksi hasil ternak	4	4	5	4	4	4,2
		11	Masih belum optimalnya pemasaran hasil produk peternakan	2	2	3	2	2	2,2
		12	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak	3	2	3	2	2	2,4
		13	Adanya impor sapi yang merugikan peternak lokal	2	2	3	2	2	2,2



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait	Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata									
		Lintas Wilayah							Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif					
		1	2	3	4	5			6	1	2	3	4	5	6	1	2
-	-	20%					10%	20%	30%	20%	-	-					
		14	Belum optimalnya pengelolaan hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan					3	3	4	4	3	3,5				
		15	Belum optimalnya pelayanan inseminasi buatan					2	2	2	1	1	1,5				
		16	Belum optimalnya kualitas bibit ternak terutama induk betina					2	2	2	2	2	2				
		17	Belum optimalnya penyebaran informasi pertanian					1	1	2	2	2	1,7				
		18	Belum optimalnya penyajian data statistik pertanian					1	1	2	2	2	1,7				
		19	Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan pertanian					3	3	4	5	4	4				
28	Kehutanan	1	Belum optimalnya peran penyuluh kehutanan dan masyarakat sekitar hutan dalam pelestarian sumber daya hutan					3	3	5	6	4	4,5				
		2	Belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan produksi					3	3	4	5	4	4				
		3	Tingginya tingkat kejahatan dibidang kehutanan					3	3	5	6	4	4,5				
		4	Masih rendahnya hasil produksi hutan hutan kayu					5	4	6	4	3	4,4				
		5	Belum optimalnya pelayanan data dan informasi kehutanan bagi masyarakat					3	3	4	3	3	3,2				
		6	Masih banyaknya lahan yang berpotensi kritis					5	4	5	6	6	5,4				



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait	Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata									
		Lintas Wilayah							Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif					
		1	2	3	4	5			6	1	2	3	4	5	6	1	2
-	-	20%					10%	20%	30%	20%	-	-					
		7	Belum sinergisnya regulasi mengenai industri hasil hutan					3	4	4	5	3	3,9				
		8	Rendahnya infrastruktur pada kawasan sekitar hutan					3	3	4	4	4	3,7				
29	Energi dan Sumberdaya Mineral	1	Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya mineral terkait pertambangan					2	3	3	4	4	3,3				
		2	Masih terdapatnya upaya pertambangan yang bersifat eksploitatif (PETI) dan merusak kelestarian lingkungan dan sumber mata air alami					3	4	4	5	5	4,3				
		3	Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang energi sumber daya dan mineral khususnya pertambangan					1	1	3	2	2	1,9				
		4	Masih terdapat sejumlah dusun dan rumah tangga yang belum terayani listrik					1	1	1	1	1	1				
		5	Belum akuratnya data potensi geologi dan belum adanya data mitigasi bencana geologi, sarana dan prasarana, dan pengawasan mitigasi bencana geologi					2	3	4	4	4	3,5				
		6	Belum optimalnya pengelolaan potensi mineral (tambang dan migas) oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Grobogan					3	3	3	3	3	3				
30	Pariwisata	1	Masih rendahnya jumlah kunjungan					5	5	5	5	5	5				



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait	Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata				
		Lintas Wilayah							Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif
		1	2	3	4	5			6	1	2	3
-	-	20%					10%	20%	30%	20%	-	-
		2					5	5	5	5	5	5
		3					5	5	5	5	5	5
31	Perikanan	1					4	4	5	5	4	4,5
		2					3	3	4	4	3	3,5
		3					4	3	4	4	4	3,9
32	Perdagangan	1					3	4	4	5	3	3,9
		2					4	5	5	5	5	4,8
		3					4	4	3	4	4	3,8
		4					5	4	5	5	5	4,9
		5					5	5	5	5	4	4,8



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait	Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata	
		Lintas Wilayah	Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif			
		1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6			
-	-	20%	10%	20%	30%	20%	-	-	
		6	Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya infrastruktur penunjang yang telah menyebabkan turunnya daya saing produk	3	4	4	4	3	3,6
		7	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan	4	4	4	4	3	3,8
		8	Berlakunya AFTA 2010 yang mempengaruhi persaingan produk-produk perdagangan	5	5	5	5	5	5
33	Industri	1	Masih rendahnya kapasitas iptek sistem produksi	3	3	5	4	3	3,7
		2	Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum mempunyai izin usaha	3	3	4	4	3	3,5
		3	Terbatasnya akses industri kecil dan menengah terhadap permodalan	3	3	5	4	4	3,9
		4	Masih rendahnya daya saing produk industri lokal	3	3	4	3	3	3,2
		5	Belum optimalnya industri penunjang bagi industri kecil dan menengah	3	3	4	3	3	3,2
		6	Kurang berkembangnya sentra-sentra industri daerah	3	3	4	4	3	3,5
		7	Rendahnya kualitas SDM terkait dengan perindustrian	4	3	5	4	4	4,1
34	Ketransmigrasian	1	Masih rendahnya pemberangkatan transmigran dari Kabupaten Grobogan ke lokasi penempatan transmigrasi	3	3	3	2	2	2,5



Tema Isu Pembangunan (Sektor)	Isu/Permasalahan Terkait		Kriteria Strategis					Jumlah	Rata-Rata
			Lintas Wilayah	Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif		
			1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6		
-	-		20%	10%	20%	30%	20%	-	-
		2	Semakin menurunnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi ke luar Pulau Jawa	4	3	4	4	3	3,7



4.1.2. Penapisan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana Tabel 4.1. di atas, selanjutnya POKJA KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung melakukan pemusatan isu pembangunan berkelanjutan untuk mendapatkan daftar pendek (*Shortlist*). Pemusatan isu pembangunan berkelanjutan menggunakan kriteria strategis (berdampak jangka panjang, dampak kumulatif, lintas wilayah, lintas sektor, lintas pemangku kepentingan) sebagaimana dalam Permendagri 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Teknik analisis menggunakan tabel matriks silang antar isu pembangunan berkelanjutan terhadap kriteria strategis dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui konsultasi publik. Hasil penapisan dari 34 kategori dengan 190 isu pembangunan berkelanjutan diperoleh hasil sebanyak 67 isu seperti pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Daftar Pendek (*Shortlist*) Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung

No	Daftar Pendek
1	Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA.
2	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3	Masih kurangnya optimalnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi.
4	Masih tingginya penyakit menular dan non menular dikarenakan faktor perilaku kurang sehat.
5	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.
6	Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
7	Masih terdapat kesenjangan perkembangan dan pertumbuhan desa desa di wilayah perbatasan.
8	Meningkatnya kuantitas sampah.
9	Menurunnya kuantitas sumber daya air.
10	Meningkatnya pencemaran tanah.
11	Meningkatnya intensitas global warming.



12	Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup.
13	Konservasi kawasan karst kendeng utara.
14	SIAK belum optimal sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.
15	Kerjasama dan koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil belum berjalan sesuai harapan.
16	Pelayanan catatan sipil belum sesuai harapan.
17	Kesadaran masyarakat dalam hak dan kewajiban terhadap tertib administrasi kependudukan rendah.
18	Masih kurangnya kesetaraan gender.
19	Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
20	Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan.
21	Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan social.
22	Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social.
23	Tingginya kerentanan penyandang penyakit social.
24	Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha.
25	Rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
26	Rendahnya peluang kesempatan kerja.
27	Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja.
28	Masih adanya usaha mikro belum berbadan hukum.
29	Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif.
30	Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar instansi dalam rangka menarik investasi.
31	Belum optimalnya pelayanan perijinan usaha.
32	Masih rendahnya pelestarian adat istiadat dan nilai nilai daerah.
33	Belum optimalnya upaya pelestarian benda purbakala dan peninggalan sejarah.
34	Masih rendahnya inovasi dalam pengembanganseni & budaya daerah
35	Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap penggunaan narkoba dan pergaulan bebas.
36	Belum optimalnya upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda.
37	Belum optimalnya prestasi dan permasyarakatan olah raga.
38	Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Olah Raga.
39	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat.
40	Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa dalam masyarakat.



41	Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
42	Belum optimalnya kerjasama dalam dan antar daerah dalam rangka peningkatan modal, pelayanan publik, dan pengelolaan SDA.
43	Kurangnya responsifnya penyusunan perda dalam menyikapi dinamika peraturan perundang undangan lebih tinggi.
44	Masih rendahnya tingkat profesionalisme & kapasitas aparatur pemda
45	Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
46	Belum adanya data base potensi produk pangan.
47	Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan gizi belum berkembang.
48	Lemahnya kapasitas masyarakat desa/kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.
49	Kurangnya diversifikasi produk pangan di tingkat hulu
50	Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
51	Kurang optimalnyaeliharaan terhadap dokumen/arsip daerah dan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip daerah.
52	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi manajemen pemda untuk penyebaran informasi pembangunan daerah.
53	Masih rendahnya minat baca masyarakat.
54	Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan.
55	Belum terjangkau pelayan perpustakaan di wilayah tertentu.
56	Lemahnya permodalan usaha pertanian.
57	Belum optimalnya peran penyuluh kehutanan dan masyarakat sekitar hutan dalam pelestarian sumber daya hutan.
58	Tingginya tingkat kejahatan dibidang kehutanan.
59	Masih banyaknya lahan yang berpotensi kritis.
60	Masih rendahnya jumlah kunjungan wisata dan pendapatan daerah dari objek wisata.
61	Masih rendahnya daya saing destinasi pariwisata
62	Belum kuatnya jalinan kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
63	Masih terbatasnya kapasitas produksi perikanan budidaya & benih ikan.
64	Masih terbatasnya volume dan nilai realisasi ekspor.
65	Meningkatnya jumlah PKL dan asongan yang mengganggu ketertiban di jalan raya.
66	Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari banyaknya pasar



	swalayan/modern.
67	Berlakunya AFTA 2010 yang mempengaruhi persaingan produk-produk perdagangan.

Hasil penapisan daftar panjang (*Longlist*) isu pembangunan berkelanjutan tersebut di atas menjadi daftar pendek isu (*Shortlist*) pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya menjadi isu prioritas pada masing-masing indikator dari TPB khususnya pada kategori B yaitu telah dilaksanakan namun belum mencapai target berdasarkan hasil pengkategorian TPB.

4.1.3. Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan

Adapun isu prioritas pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :

- 1) Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang)
 - Kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang
 - Pemanfaatan kawasan hutan.
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- 3) Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Percepatan pembangunan desa tertinggal menuju kemandirian desa.
- 5) Pengembangan perekonomian kreatif dan berkelanjutan.
- 6) Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar (sarana air bersih, listrik dan telekomunikasi).
- 7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup

4.2. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, menegaskan bahwa Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 tujuan TPB dan meliputi empat pilar pembangunan. Keempat pilar pembangunan tersebut adalah :



- 1) Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 TPB yaitu meliputi TPB 1, 2, 3, 4 dan 5.
- 2) Pilar Pembanguna Ekonomi terdiri dari 5 TPB yaitu meliputi TPB 7, 8, 9, 10, dan 17.
- 3) Pilar Pembangunan Lingkungan terdiri dari 6 TPB yaitu meliputi TPB 6, 11, 12, 13, 14, dan 15.
- 4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola terdiri dari 1 TPB yaitu pada TPB 16.

Upaya pencapaian 319 indikator tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil analisis wewenang indikator TPB berdasarkan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa, dari 319 indikator TPB, Pemerintah Pusat memiliki wewenang sebanyak 303 indikator. Adapun pemerintah Kabupaten memiliki wewenang pencapaian indikator TPB masing-masing sebanyak 220. Dari 220 indikator tersebut, tidak semua pemerintah Kabupaten memiliki 220 indikator karena tergantung karakteristik masing-masing daerahnya.

Kategori yang dipakai dalam menilai capaian TPB Kabupaten Tana Tidung secara garis besar terbagi atas 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (Kategori **A**).
- 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (Kategori **B**).
- 3) Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (Kategori **C**).
- 4) Indikator TPB yang tidak / belum ada datanya (Kategori **D**)

Kategori indikator yang sudah dilaksanakan memiliki arti bahwa indikator TPB tersebut telah termuat dalam dokumen RPJMD pada periode sebelumnya yang tercantum dalam Rencana Kerja



Pembangunan Daerah. Adapun kategori indikator yang belum dilaksanakan memiliki arti bahwa indikator tersebut termuat dalam RPJMD tetapi belum dilaksanakan dan/atau memang belum termuat dalam program pembangunan daerah pada RPJMD periode sebelumnya sehingga perlu mendapat perhatian khususnya untuk indikator yang belum mencapai target nasional.

Untuk Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan hasil penapisan indikator TPB yang menjadi kewenangannya terdiri dari 213 indikator, dalam hal ini terdapat tujuh indikator yang tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung yaitu indikator panjang jalan tol, panjang rel kereta api, jumlah pelabuhan strategis menunjang tol laut, dan kota serta permukiman metropolitan dengan nomor indikator meliputi nomor 9.1.1.(b), 9.1.1.(c), 9.1.2.(c), 11.1.1(b), 11.3.1.(b), 11.4.1.(a), dan 11.6.1.(b).

Dari 213 indikator di Kabupaten Tana Tidung tersebut hanya 16 tujuan TPB berdasarkan kewenangannya yaitu TPB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, dan 16, serta TPB 17. Adapun TPB 14 tentang “Konservasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim” bukan merupakan kewenangan Kabupaten.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Tana Tidung yang telah dilaksanakan baik mencapai target nasional maupun yang belum mencapai target secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (Kategori **A**) sebanyak 34,74 % (74 indikator). TPB yang sudah mencapai target ini perlu dipertahankan. Indikator paling banyak pada Kategori **A** ini adalah TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) yaitu 15 indikator.



- 2) TPB yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum mencapai target nasional (Kategori **B**) sebanyak 11,74% (25 indikator). TPB ini harus menjadi pemikiran bersama dan dengan berbagai upaya pada rencana pembangunan jangka menengah lima tahun mendatang pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu melakukan upaya tambahan sedemikian rupa sehingga pada akhir periode RPJMD (akhir tahun 2026) mendatang diharapkan dapat mencapai target nasional. Tentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Indikator paling banyak pada Kategori **B** adalah TPB 1 (Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun) yaitu 5 indikator.
- 3) TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (Kategori **C**) sebanyak 2,35 % atau 5 indikator. Indikator ini pada RPJMD berikutnya perlu diupayakan untuk dilaksanakan. Indikator yang paling banyak pada Kategori **C** ini adalah TPB 6 (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih & sanitasi yang berkelanjutan) yaitu 4 indikator.
- 4) Kategori **D** adalah TPB yang belum ada data sebanyak 51,17 % terdiri dari 109 indikator. TPB yang indikatornya paling banyak dalam Kategori **D** ini adalah TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) yaitu 18 indikator

Adapun capaian indikator TPB Kabupaten Tana Tidung terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam Tabel 4.3.



Tabel 4.3. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Tana Tidung Terhadap Target Nasional

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	A	B	C	D
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	24	6	5	0	13
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	11	3	2	0	6
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	34	15	1	0	18
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	13	5	3	0	5
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	14	2	0	0	12
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih & sanitasi yang berkelanjutan	18	8	4	4	2
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	2	0	1	0	1
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif & berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif & menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	19	9	2	0	8
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif & berkelanjutan, serta mendorong inovasi	14-3	4	0	1	6
10	Mengurangi kesenjangan intradan antar Negara	11	4	2	0	5
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	13-4	3	1	0	5
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	5	0	1	0	4
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	2	2	0	0	0
14	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	0	0	0	0	0
15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	4	1	3	0	0
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif	21	11	0	0	10

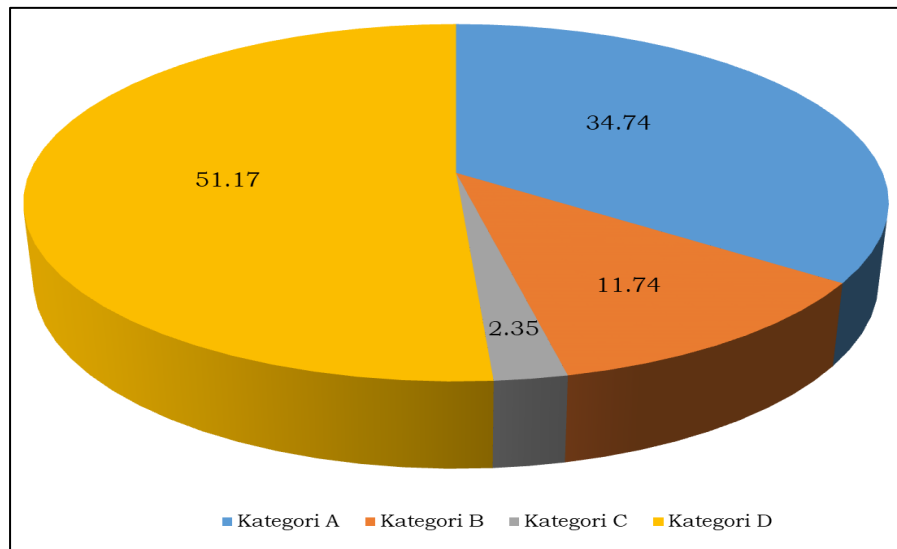


	dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan					
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	16	1	1	0	14
Jumlah		213	74	25	5	109
		100%	34,74	11,74	2,35	51,17

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kab Tana Tidung , 2021

Keterangan :

- A = Dilaksanakan dan sudah mencapai target
- B = Sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target
- C = Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
- D = Tidak ada data

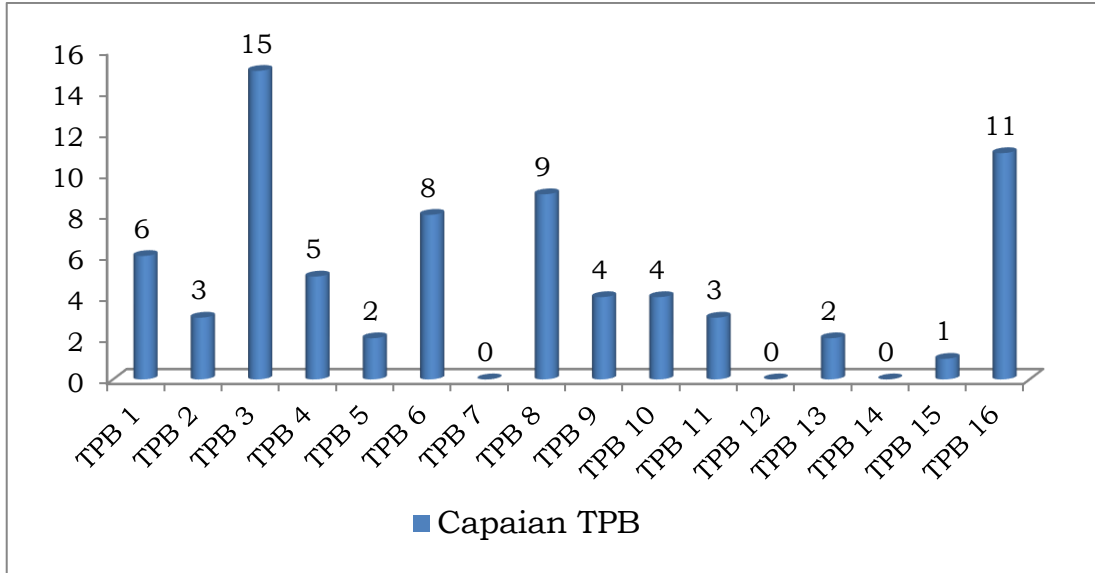


Gambar 4.2. Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung

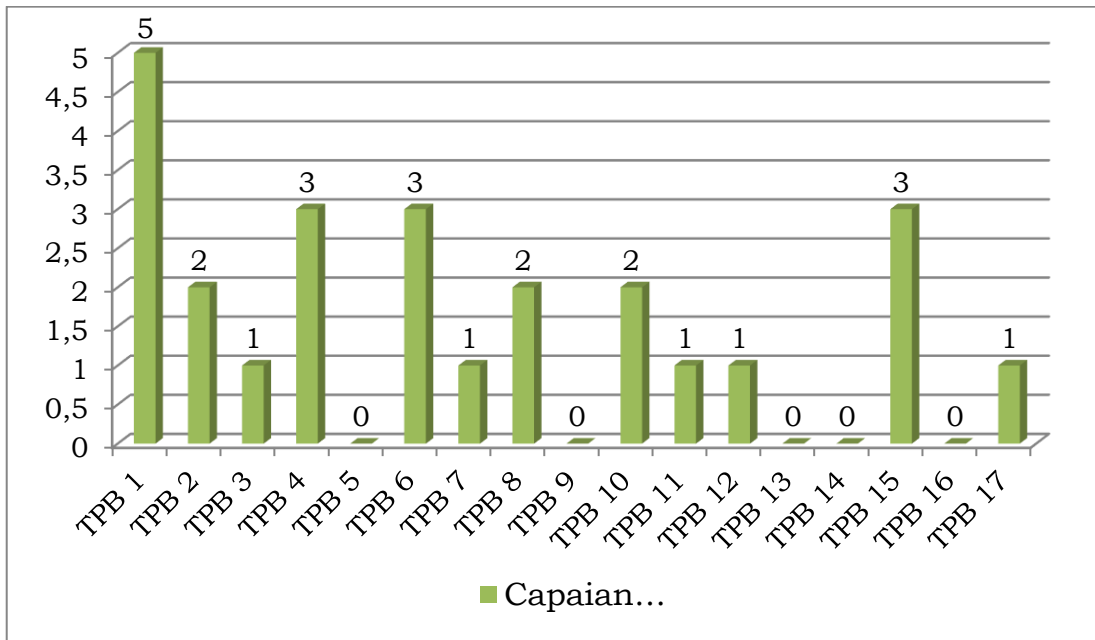
Pengkategorian hasil capaian tersebut di atas bertujuan untuk memetakan isu strategis pembangunan berkelanjutan apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung pada periode RPJMD yang telah ditentukan yaitu 2021-2026. Isu strategis yang perlu diprioritaskan yaitu target-target TPB yang memiliki indikator sudah dilaksanakan di daerah tetapi belum tercapai (B) dan indikator yang belum dilaksanakan di daerah dan belum tercapai (C). Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional (A) juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut.



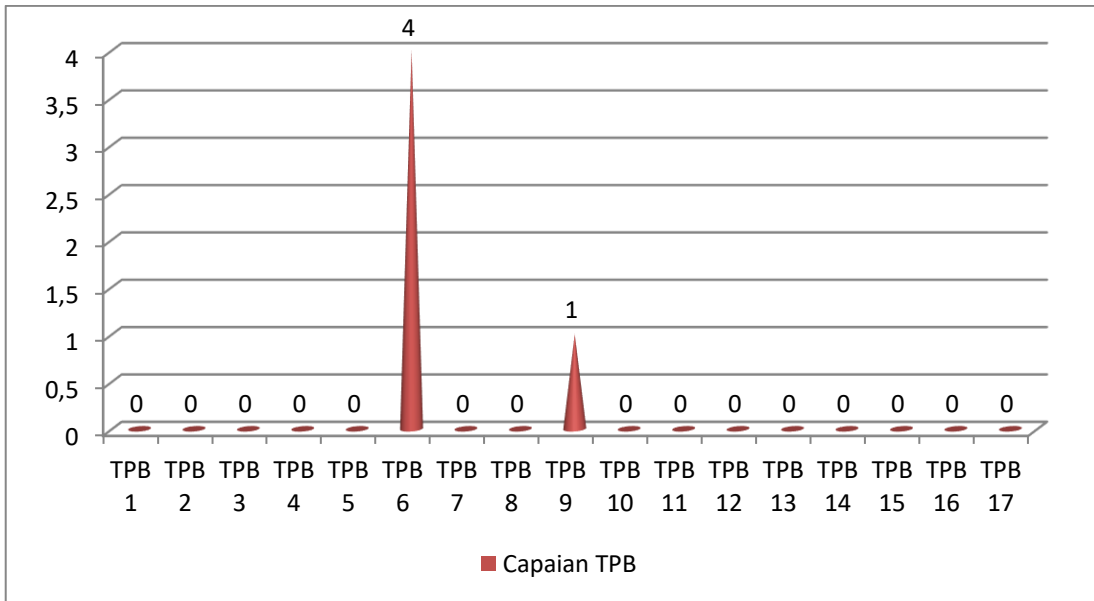
Grafik capaian TPB Kabupaten Tana Tidung pada setiap kategori dapat dilihat pada Gambar 4.3 s/d 4.6.



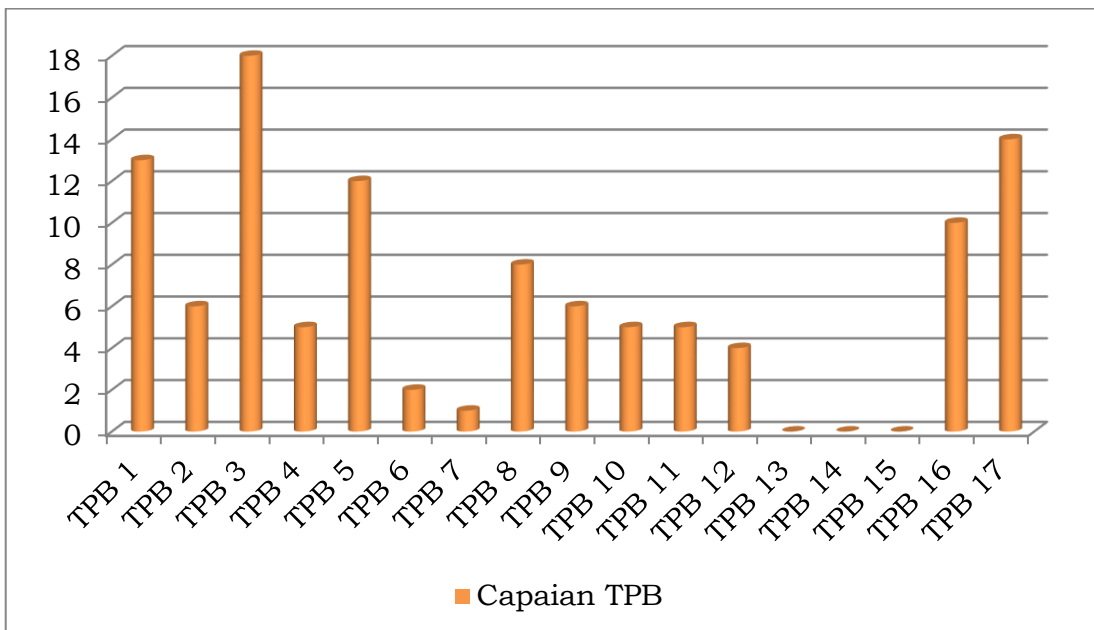
Gambar 4.3. Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Kategori A (Indikator Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional)



Gambar 4.4. Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Kategori B (Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional)



Gambar 4.5. Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Kategori C (Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional)



Gambar 4.6. Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Kategori D (Indikator Tidak/Belum Ditemukan Data)

4.2.1. Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung pada Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total

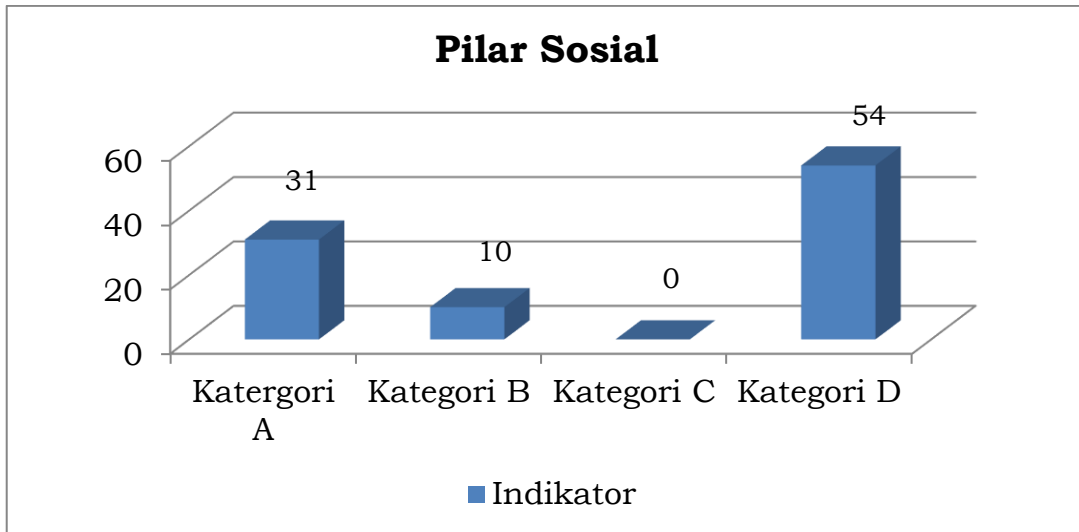
indikator pada pilar sosial adalah sebanyak 95 indikator. Dari 5 tujuan dalam pilar sosial, tujuan 3 yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera merupakan tujuan yang memiliki target indikator TPB paling banyak pada pilar sosial yaitu sebanyak 34 indikator, diikuti oleh tujuan 1 sebanyak 24 indikator. Capaian indikator TPB pilar sosial berdasarkan masing-masing TPB disajikan pada Tabel 4.4 dan Gambar 4.7.

Tabel 4.4. Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Sosial

No TPB	Sudah dilaksanakan & Tercapai (A)	Sudah dilaksanakan Tetapi Belum Tercapai (B)	Belum Dilaksanakan dan Tidak Tercapai (C)	Tidak ada data (D)	Total
1	6	5	0	13	24
2	3	2	0	6	11
3	15	1	0	18	34
4	5	3	0	5	13
5	2	0	0	12	14
Total	31	10	0	54	95
	32,63 %	10,53 %	0,00 %	56,84 %	

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kab Tana Tidung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dari total 95 indikator pilar sosial, terdapat 31 indikator atau 32,63% yang mencapai target nasional dan dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung. Sebanyak 10 indikator (10.53%) telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional. Sementara itu masih terdapat 54 indikator atau sekitar 56,84% yang tidak memiliki data sehingga belum bisa dilakukan analisa. Sedang indikator yang belum dilaksanakan dan/tidak mencapai target tidak ada.



Gambar 4.7. Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Sosial

4.2.2. Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung pada Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi pada pembangunan berkelanjutan diakomodasi oleh lima tujuan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar ekonomi sebanyak 59 indikator. Dari berbagai indikator yang telah ditetapkan, terdapat indikator yang masih belum tercapai maupun belum dapat diukur terutama karena tidak tersedianya data. Berikut merupakan indikator-indikator lingkup ekonomi Kabupaten Tana Tidung terhadap target-target TPB. Capaian indikator TPB pilar ekonomi berdasarkan masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan disajikan pada Tabel 4.5 serta Gambar 4.8. dan 4.9.

Tabel 4.5. Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Ekonomi

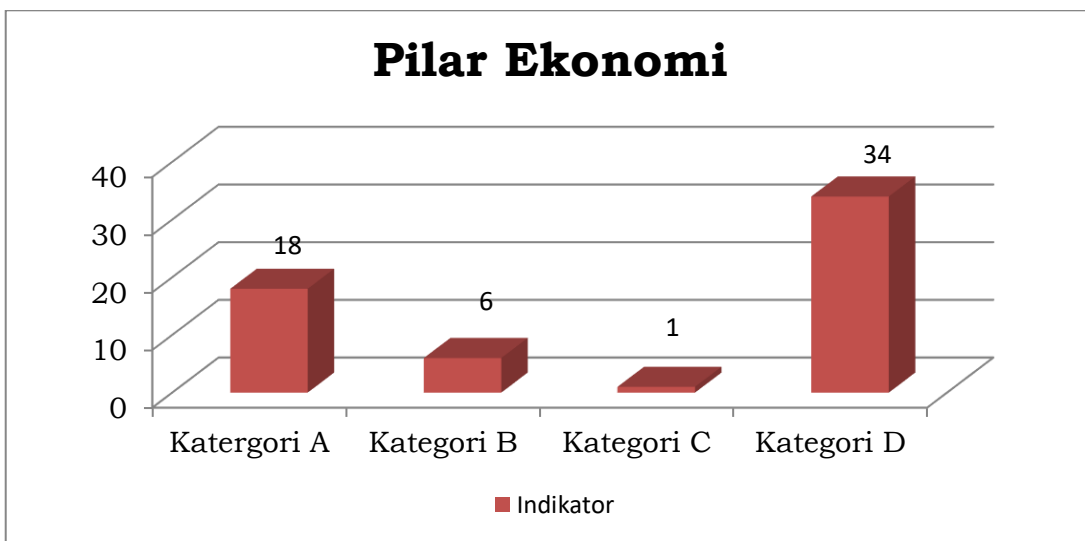
TPB	Sudah dilaksanakan & Tercapai (A)	Sudah dilaksanakan Tetapi Belum Tercapai (B)	Belum Dilaksanakan dan Tidak Tercapai (C)	Tidak ada data (D)	Jumlah
7	0	1	0	1	2
8	9	2	0	8	19
9	4	0	1	6	14-3
10	4	2	0	5	11
17	1	1	0	14	16



Jumlah	18	6	1	34	59
	30,51%	10,17%	1,69%	57,63%	100%

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kab Tana Tidung, 2021

Dari total 59 indikator pada pilar ekonomi, terdapat 18 indikator yang sudah dilaksanakan atau 30,51% yang mencapai target nasional (A), sedangkan enam indikator (10,17%) belum mencapai target nasional (B) dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung, serta terdapat 1 indikator yang belum dilaksanakan di daerah, sedangkan 34 indikator atau sekitar 57,63% belum ada data.



Gambar 4.8. Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Ekonomi

4.2.3. Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung pada Pilar Lingkungan Hidup

Pada bagian pilar lingkungan, TPB yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Tana Tidung terdiri atas: Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, dan Tujuan 15. Kelima TPB tersebut merupakan tujuan pada pembangunan berkelanjutan yang termasuk ke dalam pilar lingkungan di Kabupaten Tana Tidung dengan total sebanyak 18 indikator. Dari lima tujuan dalam pilar lingkungan, tujuan enam yaitu menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak merupakan tujuan yang memiliki target indikator TPB paling banyak pada pilar lingkungan yaitu sebanyak 18 indikator,

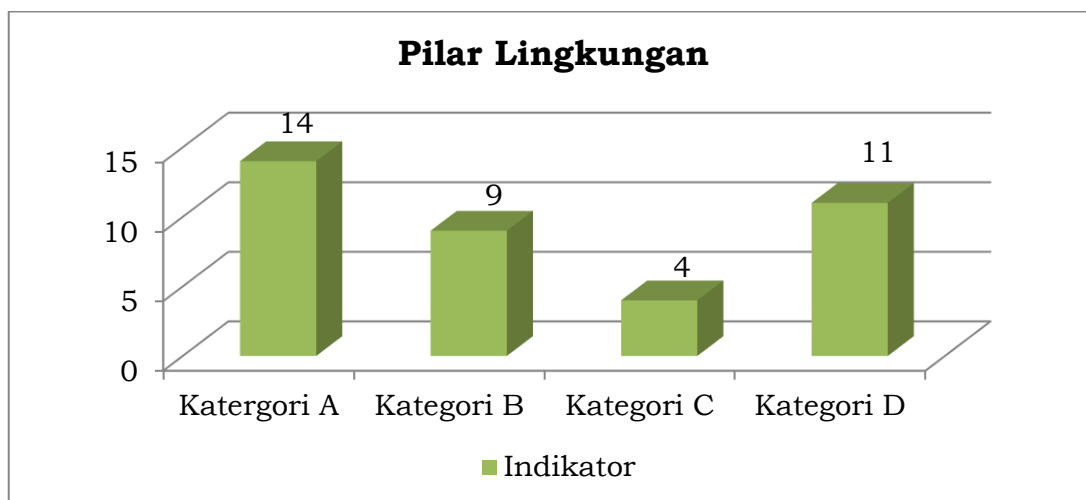
dan diikuti oleh TPB 11 sebanyak 13 indikator. Capaian indikator-indikator lingkungan Kabupaten Tana Tidung terhadap target-target tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional disajikan pada Tabel 4.6 dan Gambar 4.7.

Tabel 4.6. Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Lingkungan

TPB	Sudah dilaksanakan & Tercapai (A)	Sudah dilaksanakan Tetapi Belum Tercapai (B)	Belum Dilaksanakan dan Tidak Tercapai (C)	Tidak ada data (D)	Jumlah
6	8	4	4	2	18
11	3	1	0	5	13-4
12	0	1	0	4	5
13	2	0	0	0	2
15	1	3	0	0	4
Jumlah	14	9	4	11	38
	36,84 %	23,68 %	10,53 %	28,95 %	100 %

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kab Tana Tidung, 2021

Berdasarkan 38 indikator pada pilar lingkungan, indikator yang telah mencapai target nasional dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung kategori (A) sebanyak 14 indikator atau 36,84% dari keseluruhan indikator. Kemudian terdapat sembilan indikator atau 23,68% yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (B), indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target TPB (C) terdapat 11 indikator atau 28,95 %. Sementara seluruh indikator pada pilar lingkungan telah memiliki data. Selanjutnya pada pilar lingkungan terdapat empat indikator yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung yaitu indikator nomor 11.1.1(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP), 11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil, dan 11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* di kawasan perkotaan metropolitan.



Gambar 4.9. Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Lingkungan

4.2.4. Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung pada Pilar Hukum dan Tata Kelola.

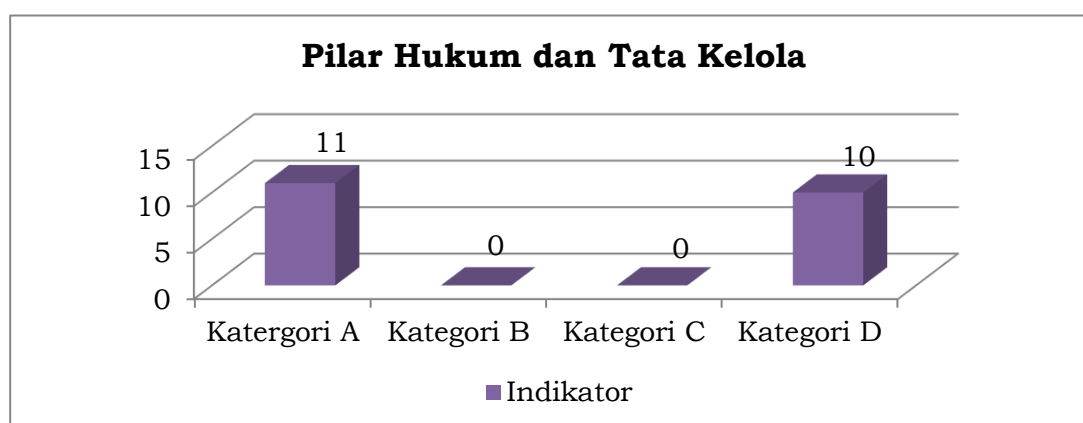
Hukum dan tata kelola kelembagaan pada isu pembangunan berkelanjutan dimuat secara khusus pada pada Tujuan 16. Terdapat total indikator sebanyak 21 indikator pada pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. Berikut merupakan indikator pada lingkup hukum dan tata kelola kelembagaan di Kabupaten Tana Tidung terhadap target-target TPB secara nasional. Capaian indikator TPB pilar ekonomi berdasarkan masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan disajikan pada Tabel 4.7 dan Gambar 4.8.

Tabel 4.7. Capaian Indikator TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Hukum Dan Tata Kelola

TPB	Sudah dilaksanakan & Tercapai (A)	Sudah dilaksanakan Tetapi Belum Tercapai (B)	Belum Dilaksanakan dan Tidak Tercapai (C)	Tidak ada data (D)	Jumlah
16	11	0	0	10	21
Jumlah	11 52,38%	0 0,00%	0 0,00%	10 47,62%	21 100 %

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kab Tana Tidung, 2021

Dari total 21 indikator pada pilar hukum dan tata kelola, terdapat 11 indikator atau 52,38% yang mencapai target nasional dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung (A). Tidak ada indikator (00,00 %) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (B). Selanjutnya, indikator yang tidak termuat dalam RPJMD dan tidak mencapai target nasional tidak ada, dan indikator yang tidak ada datanya meliputi 6 indikator atau 28,57 %.



Gambar 4.10. Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

4.2.5. Capaian Indikator TPB Prioritas

Capaian Indikator TPB yang merupakan indikator prioritas yang dimaksud adalah indikator TPB yang masuk kategori kelompok B dan Kelompok C. Indikator TPB kategori B adalah indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target yang telah dilaksanakan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017. Demikian pula dengan indikator TPB kategori C adalah indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2019 tersebut.

Indikator TPB kategori B dan C tersebut perlu mendapatkan perhatian utama dalam perencanaan pembangunan yang sedang disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tana Tidung agar ke depannya indikator ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun indikator kategori B dan C secara detail disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Indikator TPB Kelompok B (Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target) dan Kelompok C (Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target)

No	No. Indikator	Indikator	Keterangan	OPD Leading Sektor
1	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	Dinas Kesehatan
2	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak & berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Kesehatan
4	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	Dinas Pendidikan
5	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	Dinas Pendidikan
6	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	Dinas Kesehatan
7	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
8	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	Dinas Kesehatan
9	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	Dinas Pendidikan



No	No. Indikator	Indikator	Keterangan	OPD Leading Sektor
10	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	Dinas Pendidikan
11	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	6.2.1.(e)	Jumlah Kabupaten/Kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 Kabupaten/Kota.	Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	6.3.1.(a)	Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan & dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum, Penatan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Meningkat	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
19	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Menurun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan



No	No. Indikator	Indikator	Keterangan	OPD Leading Sektor
20	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
21	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	% (Meningkat)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
22	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
23	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang 5000 (Nasional)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
24	10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri.	Berkurang 2000 (Skala Nasional)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
25	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
26	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
27	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5.5. juta Skala Nasional	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
28	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Tersedia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
29	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Belum tersedia	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
30	17.8.1.(a)	Persentase Kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100%	Dinas Komunikasi dan Informasi

BAB V

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Hasil analisis indikator TPB di Kabupaten Tana Tidung diperoleh sekitar 213 indikator dari 220 indikator untuk tingkat kabupaten. Indikator TPB tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori pencapaian yakni indikator yang sudah dilaksanakan telah mencapai target nasional (A) sebanyak 74 indikator, indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (B) sebanyak 25 indikator, indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target TPB (C) sebanyak 5 indikator dan indikator yang tidak atau belum ada datanya (D) sebanyak 109 indikator. Sedangkan untuk indikator yang tidak sesuai dengan karakteristik Kabupaten Tana Tidung yaitu sebanyak tujuh indikator.

5.1. Capaian Indikator TPB Oleh Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi capaian indikator TPB oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, teridentifikasi sebanyak 13 perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian TPB tersebut meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga; Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; dan Badan Pusat Statistik. Adapun perangkat daerah dimaksud seperti disajikan pada Tabel 5.1. dan Gambar 5.1.



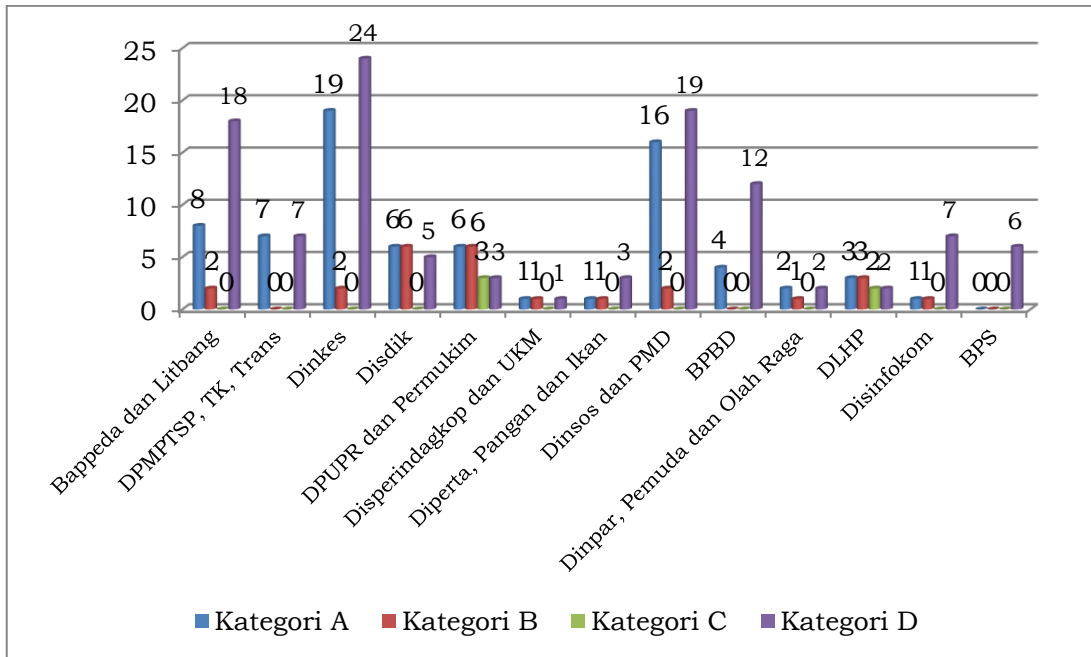
Tabel 5.1. Capaian Indikator TPB Oleh OPD Kabupaten Tana Tidung

No	Organisasi Perangkat Daerah	Kategori*				Jumlah
		A	B	C	D	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	8	2	-	18	28
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	-	-	7	14
3	Dinas Kesehatan	19	2	-	24	45
4	Dinas Pendidikan	6	6	-	5	17
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6	6	3	3	18
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1	1	-	1	3
7	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	1	1	-	3	5
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16	2	-	19	38
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	-	-	12	16
10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2	1	-	2	5
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	3	3	2	2	10
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	-	7	9
13	Badan Pusat Statistik	-	-	-	6	6
Jumlah:		74	25	5	109	213

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kab Tana Tidung, 2021

Keterangan * :

- Kategori A : Dilaksanakan dan mencapai target
- Kategori B : Dilaksanakan tapi belum mencapai target
- Kategori C : Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
- Kategori D : Tidak ada data



Gambar 5.1. Capaian TPB Oleh OPD Kabupaten Tana Tidung

5.2. Capaian Indikator TPB oleh OPD pada Pilar Sosial

Pilar sosial capaian indikator TPB mencakup (5) lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1 (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun), Tujuan 2 (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan), Tujuan 3 (Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia), Tujuan 4 (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua) dan Tujuan 5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan). Total indikator untuk pilar sosial adalah sebanyak 94 indikator. Capaian indikator TPB pilar sosial berdasarkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disajikan pada Tabel 5.2 dan Gambar 5.2.



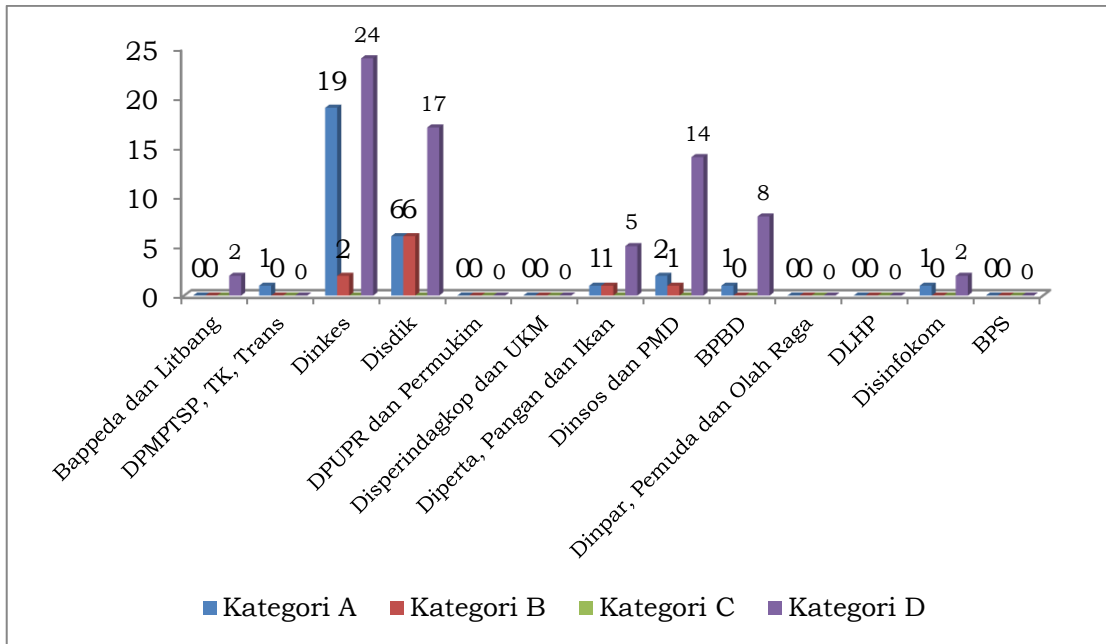
Tabel 5.2. Capaian Indikator TPB Oleh OPD Pada Pilar Sosial

No	Organisasi Perangkat Daerah	Kategori*				Jumlah
		A	B	C	D	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	-	-	-	2	2
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	-	-	-	1
3	Dinas Kesehatan	19	2	-	24	45
4	Dinas Pendidikan	6	6	-	5	17
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	-	-	0
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	-	-	-	-	0
7	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	1	1	-	3	5
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	1	-	11	14
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	-	-	7	8
10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	0
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-	-	-	-	0
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	-	-	1	2
13	Badan Pusat Statistik	-	-	-	-	0
Jumlah:		31	10	0	53	94

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kab Tana Tidung, 2021

Keterangan * :

- Kategori A : Dilaksanakan dan mencapai target
- Kategori B : Dilaksanakan tapi belum mencapai target
- Kategori C : Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
- Kategori D : Tidak ada data



Gambar 5.2. Capaian TPB Oleh OPD Kabupaten Tana Tidung pada Pilar Sosial

5.3. Capaian Indikator TPB oleh OPD pada Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7 (Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua), Tujuan 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua), Tujuan 9 (Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi), Tujuan 10 (Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara) dan Tujuan 17 (Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan). Total TPB di Kabupaten Tana Tidung yang masuk dalam pilar ekonomi adalah sebanyak 60 indikator. Capaian indikator TPB pilar ekonomi berdasarkan masing-masing OPD disajikan pada Tabel 5.3 dan Gambar 5.3.



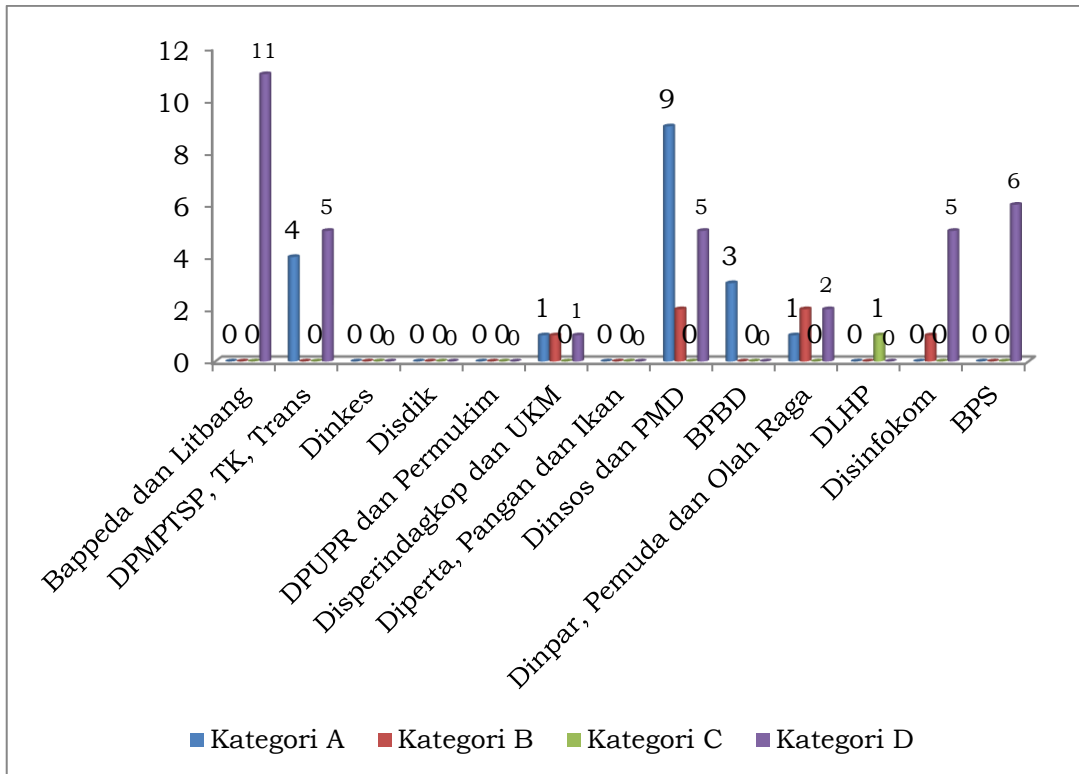
Tabel 5.3. Capaian Indikator TPB Oleh OPD Pada Pilar Ekonomi

No	Organisasi Perangkat Daerah	Kategori*				Jumlah
		A	B	C	D	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	-	-	-	11	11
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	-	-	5	9
3	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	0
4	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	0
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	-	-	0
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1	1	-	1	3
7	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	-	-	-	-	0
8	Dinas Sosial dan Pember-dayaan Masyarakat Desa	9	2	-	5	16
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	-	-	-	3
10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1	2	-	2	5
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-	-	1	-	1
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	1	-	5	6
13	Badan Pusat Statistik	-	-	-	6	6
Jumlah:		18	6	1	35	60

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kab Tana Tidung, 2021

Keterangan* :

- Kategori A : Dilaksanakan dan mencapai target
- Kategori B : Dilaksanakan tapi belum mencapai target
- Kategori C : Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
- Kategori D : Tidak ada data



Gambar 5.3. Capaian TPB Oleh OPD Kabupaten Tana Tidung Pada Pilar Ekonomi

5.4. Capaian Indikator TPB oleh OPD pada Pilar Lingkungan Hidup

Pilar pembangunan lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6 (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan), Tujuan 11 (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan), Tujuan 12 (Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan), Tujuan 13 (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya), Tujuan 14 (Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan) dan Tujuan 15 (Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan. serta Menghentikan

Kehilangan Keanekaragaman Hayati). Namun berdasarkan kewenangan Kabupaten/Kota, Tujuan 14 bukan merupakan kewenangan Kabupaten Tana Tidung. Total TPB di Kabupaten Tana Tidung yang masuk dalam pilar lingkungan adalah sebanyak 38 indikator. Capaian indikator TPB pilar lingkungan berdasarkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disajikan pada Tabel 5.4 dan Gambar 5.4.

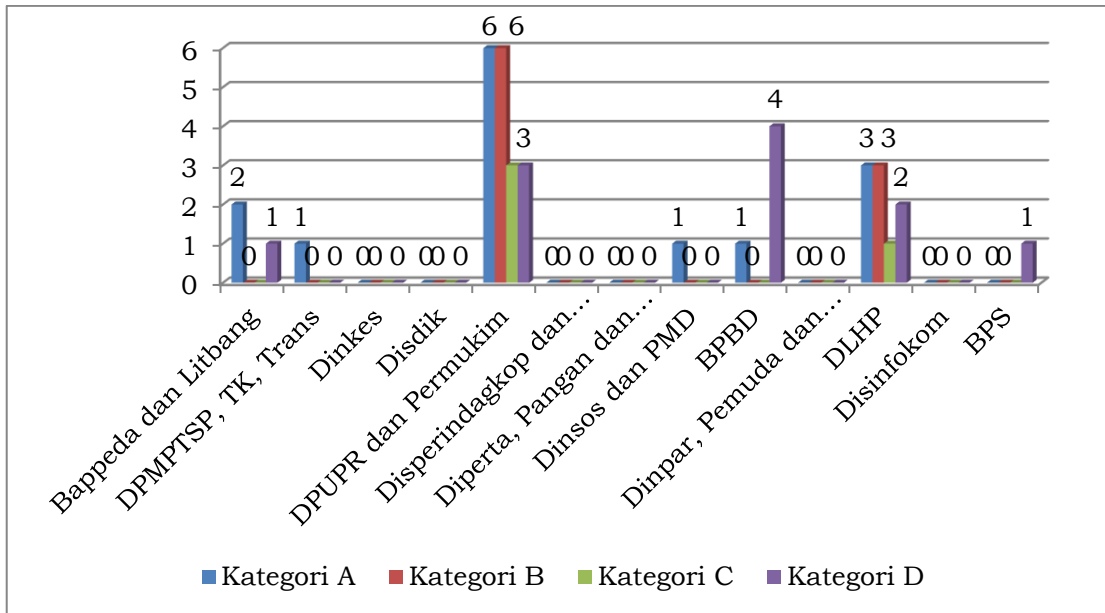
Tabel 5.4. Capaian Indikator TPB Oleh OPD Pada Pilar Lingkungan Hidup

No	Organisasi Perangkat Daerah	Kategori *				Jumlah
		A	B	C	D	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	2	-	-	1	3
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	-	-	-	1
3	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	0
4	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	0
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6	6	3	3	18
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	-	-	-	-	0
7	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	-	-	-	-	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	-	-	-	1
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	-	-	4	5
10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	0
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	3	3	1	2	9
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	0
13	Badan Pusat Statistik	-	-	-	1	1
Jumlah:		14	9	4	11	38

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kab Tana Tidung, 2021

Keterangan* :

- Kategori A : Dilaksanakan dan mencapai target
- Kategori B : Dilaksanakan tapi belum mencapai target
- Kategori C : Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
- Kategori D : Tidak ada data



Gambar 5.4. Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Oleh Organisasi Perangkat Daerah pada Pilar Lingkungan

5.5. Capaian Indikator TPB oleh OPD pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Total indikator TPB di Kabupaten Tana Tidung yang termasuk dalam pilar hukum dan tata kelola adalah sebanyak 21 indikator. Capaian indikator TPB pilar hukum dan tata kelola berdasarkan masing-masing OPD disajikan pada Tabel 5.5 dan Gambar 5.5.

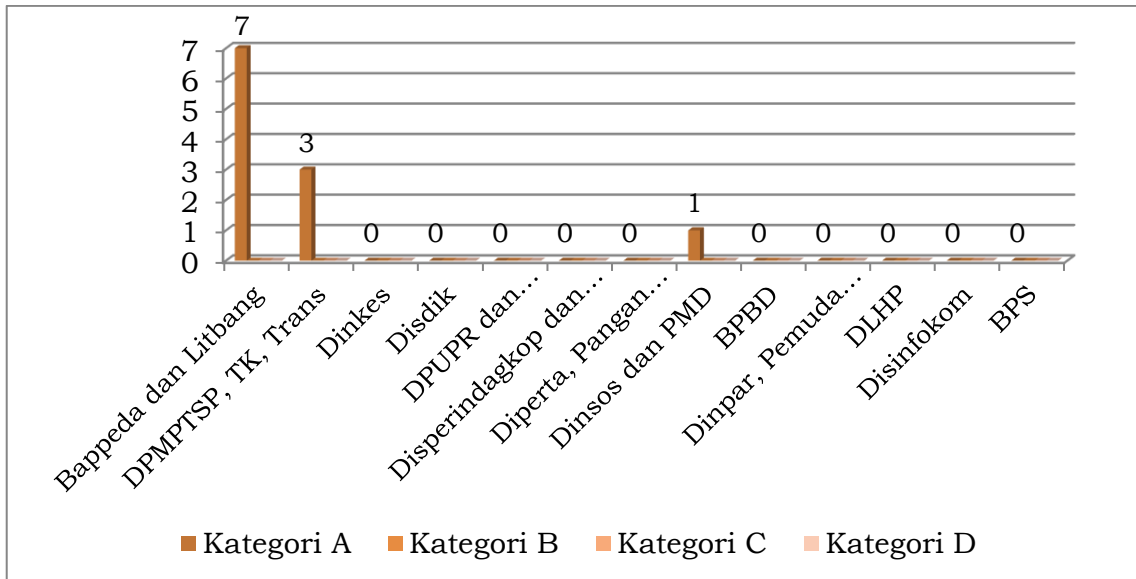


Tabel 5.5. Capaian Indikator TPB Oleh OPD Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

No	Organisasi Perangkat Daerah	Kategori *				Jumlah
		A	B	C	D	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	7	-	-	5	12
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	-	-	-	3
3	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	0
4	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	0
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	-	-	0
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	-	-	-	-	0
7	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	-	-	-	-	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	-	-	5	6
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	0
10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	0
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-	-	-	-	0
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	0
13	Badan Pusat Statistik	-	-	-	-	0
Jumlah:		11	0	0	10	21

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kab Tana Tidung, 2021
Keterangan*:

- Kategori A : Dilaksanakan dan mencapai target
- Kategori B : Dilaksanakan tapi belum mencapai target
- Kategori C : Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
- Kategori D : Tidak ada data



Gambar 5.5. Capaian TPB Kabupaten Tana Tidung Oleh Organisasi Perangkat Daerah pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

5.6. Keterlibatan Para Pihak untuk Mendukung OPD dalam Pencapaian Target TPB

Dalam rangka pencapaian target TPB dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung oleh OPD yang ada, maka perlu dibantu oleh para pihak yang terkait. Peran para pihak tersebut meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Pelaku Usaha (Dunia Usaha dan Dunia Industri), Akademisi dan Philantrophy. Peran para pihak dalam pencapaian TPB di Kabupaten Tana Tidung dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Pendanaan, 4) Pengawasan, 5) Evaluasi dan 6) Penyebarluasan Informasi

Adapun peran para pihak dalam pencapaian TPB Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung seperti pada Tabel 5.6.



Tabel 5.6. Peran Para Pihak yang Membantu OPD dalam Pencapaian Target TPB di Kabupaten Tana Tidung

No	TPB	Pemkab KTT	Pemprov dan Pusat	Pelaku Usaha	Akademisi	Philantrophy
1	Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	1,2,3	1,2,3,4	1,2,4
2	Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	1,2,3	1,2,3,4,5	1,2,4
3	Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	3	4,5	1,2,4
4	Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	3	1,2,3,4,5	4,5,6
5	Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	0	1,2,3,4,5	1,2,4,5
6	Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	3	1,2,3,4,5	1,2,4
7	Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi Terjangkau, Andal, Berkelanjutan & Modern untuk Semua	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	0	4,5,6	0
8	Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif & Menyeluruh, Serta	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	1,2,3	4,5,6	0



No	TPB	Pemkab KTT	Pemprov dan Pusat	Pelaku Usaha	Akademisi	Philan-Trophy
	Pekerjaan yang Layak Untuk Semua					
9	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif & Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	0	4,5	4
10	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar-negara	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	0	1,3,4,5	0
11	Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	1,2,3	0	5,6
12	Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi & Konsumsi yang Berkelanjutan	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	1,2,3	2,4,5	1,2,6
13	Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim & Dampaknya	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	1,2,3	1,2,4,5	1,2,6
14	Bukan Kewenangan	0	0	0	0	0
15	Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	1,2,3	2,4,5	1,2,4,5
16	Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	1,2,3	1,2,4,5	1,2,4,5



No	TPB	Pemkab KTT	Pemprov dan Pusat	Pelaku Usaha	Akademisi	Philan-Trophy
	Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan					
17	Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	0	1,2,3,4	1,2,4,5,6

Keterangan :

0 = Tidak ada peran para pihak

Para Pihak :

- ☞ Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang meliputi Kepala Daerah, Legislatif dan seluruh OPD yang berperan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- ☞ Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang meliputi Kepala Daerah dan seluruh OPD Provinsi Kalimantan Utara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat baik melalui UPT yang ada di Kabupaten Tana Tidung ataupun Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat yang langsung berkontribusi di Kabupaten Tana Tidung
- ☞ Pelaku Usaha dalam hal ini Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Jasa Konsultasi dan Konstruksi dan Usaha Menengah dan Kecil Masyarakat (UMKM) yang memiliki peran dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung. Peran yang telah dilakukan antara lain membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian baik makro dan mikro di daerah serta peran serta dalam percepatan pelaksanaan pembangunan.
- ☞ Akademisi, berdasarkan data diatas memiliki peran dalam pembangunan berkelanjutan dengan kegiatan dibidang Pendidikan khususnya mencerdaskan kehidupan masyarakat. Selain itu aktifitas penelitian dan pengabdian masyarakat turut berkontribusi dalam pembangunan di daerah.



- ☞ Philantrophy, dalam hal ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Project ataupun penyelenggara kegiatan oleh Lembaga non pemerintah yang berkontribusi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan data yang ada, selama tahun 2020, terdapat tiga lembaga non pemerintah (Filantropi) yang berperan serta dalam pencapaian TPB di Kabupaten Tana Tidung yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN), PT. Intraca Hutani Lestari dan PT. Pipit Mutiara Jaya. Adapun peran pihak lembaga non pemerintah tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7. Peran Para Pihak dalam Pencapaian Target TPB di Kabupaten Tana Tidung

No	Filantropi	Peran
1	PT. PLN	Membantu Pemerintah Daerah dalam pembangunan Vihara Dharma Phala
2	PT. Intraca Hutani Lestari	Membantu Pemerintah Daerah dalam penghijauan dan reboisasi kawasan hutan
3	PT. Pipit Mutiara Jaya	Membantu Pemerintah Daerah dalam penghijauan dan reboisasi kawasan hutan



BAB VI

ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

6.1. Alternatif Skenario dan Rekomendasi Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah

6.1.1. Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Kegiatan yang paling awal dilakukan dalam kajian KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 adalah mengidentifikasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk dikaji dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup. Hal ini dilakukan sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada pasal 15 untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan suatu wilayah. Untuk mengkaji KRP dimaksud tentunya ditelusuri 213 indikator TPB yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang nantinya program pembangunan yang akan dirumuskan dokumen RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021 – 2026.

Program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah.

Program pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tana Tidung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Program harus disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, yaitu harus memperhitungkan bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- 2) Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja program, dalam penyusunan program harus melibatkan Perangkat Daerah berkenaan.
- 3) Penamaan program dengan kalimat sederhana, ringkas mudah dimengerti sehingga dapat dijabarkan kedalam kegiatan.
- 4) Program harus didefinisikan sebagai cara untuk mencapai target kinerja sasaran melalui strategi dan arah kebijakan.

Disisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa program pembangunan daerah harus terintegrasi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka perumusan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 yang dijabarkan berbasis Misi Pembangunan daerah, berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan indikasi program seperti pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Indikasi Rencana Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung

No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
		1.3.1.(a)	2. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
		1.3.1.(b)	3. Proporsi peserta Program



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
			Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
		1.3.1.(c)	4. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
		1.3.1.(d)	5. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
		1.4.1.(j)	6. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
		1.4.1.(k)	7. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
		1.4.1.(a)	8. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
		1.4.1.(b)	9. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
		1.4.1.(c)	10. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
		1.4.1.(d)	11. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
		1.4.1.(e)	12. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
		1.4.1.(g)	13. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.
		1.4.1.(h)	14. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.
		1.5.1*	15. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
		1.5.1.(a)	16. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
		1.5.1.(e)	17. Indeks risiko bencana pada



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
			pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
		1.5.2.(a)	18. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
		1.5.3*	19. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
		1.5.1.(b)	20. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
		1.5.1.(c)	21. Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
		1.5.1.(d)	22. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
		1.a.1*	23. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
		1.a.2*	24. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1.(a)	25. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
		2.1.1*	26. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
		2.1.2*	27. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
		2.1.2.(a)	28. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
		2.2.1*	29. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
		2.2.1.(a)	30. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
		2.2.2*	31. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
		2.2.2.(a)	32. Prevalensi anemia pada ibu hamil.
		2.2.2.(b)	33. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
		2.2.2.(c)	34. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
		2.3.1*	35. Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.1*	36. Angka Kematian Ibu (AKI).
		3.1.2*	37. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
		3.1.2.(a)	38. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
		3.2.1*	39. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
		3.2.2*	40. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
		3.2.2.(a)	41. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
		3.2.2.(b)	42. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
		3.3.1.(a)	43. Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
		3.3.2.(a)	44. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
		3.3.3*	45. Kejadian Malaria per 1000 orang.
		3.3.3.(a)	46. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
		3.3.4.(a)	47. Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.
		3.3.5*	48. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis)



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
			dan Kusta).
		3.3.5.(a)	49. Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.
		3.3.5.(b)	50. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).
		3.4.1.(a)	51. Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.
		3.4.1.(b)	52. Prevalensi tekanan darah tinggi.
		3.4.1.(c)	53. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.
		3.4.2*	54. Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
		3.4.2.(a)	55. Jumlah kabupaten/kota yang me-miliki puskesmas yang menye-lenggarakan upaya kesehatan jiwa.
		3.5.1.(e)	56. Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
		3.5.2*	57. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
		3.7.1*	58. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
		3.7.1.(a)	59. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
		3.7.1.(b)	60. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
		3.7.2*	61. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
		3.7.2.(a)	62. Total Fertility Rate (TFR).
		3.8.1.(a)	63. Unmet need pelayanan kesehatan.



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
		3.8.2*	64. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
		3.8.2.(a)	65. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
		3.9.3.(a)	66. Proporsi kematian akibat keracunan.
		3.a.1*	67. Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.
		3.b.1.(a)	68. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
		3.c.1*	69. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1*	70. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
		4.1.1.(a)	71. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
		4.1.1.(b)	72. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
		4.1.1.(d)	73. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
		4.1.1.(e)	74. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
		4.1.1.(g)	75. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.
		4.2.2.(a)	76. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
		4.4.1*	77. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
		4.5.1*	78. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
		4.6.1.(a)	79. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
		4.6.1.(b)	80. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
		4.a.1*	81. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).
		4.c.1*	82. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang bersertifikat pendidik.
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1.1*	83. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
		5.2.1*	84. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
		5.2.1.(a)	85. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
		5.2.2*	86. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
		5.2.2.(a)	87. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
		5.3.1*	88. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
		5.3.1.(a)	89. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
		5.3.1.(b)	90. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
			(Age Specific Fertility Rate/ASFR).
		5.5.1*	91. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
		5.5.2*	92. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
		5.6.1.(a)	93. Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
		5.6.1.(b)	94. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
		5.6.1*	95. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
		5.b.1*	96. Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	97. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
		6.1.1.(b)	98. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
		6.1.1.(c)	99. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
		6.2.1.(a)	100. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
		6.2.1.(b)	101. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
		6.2.1.(c)	102. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
		6.2.1.(d)	103. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
		6.2.1.(e)	104. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan &komunal.
		6.2.1.(f)	105. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
		6.3.2.(a)	106. Kualitas air danau.
		6.3.2.(b)	107. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
		6.3.1.(a)	108. Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
		6.3.1.(b)	109. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
		6.4.1.(b)	110. Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
		6.5.1.(a)	111. Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
		6.5.1.(c)	112. Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
		6.5.1.(g)	113. Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
6.5.1.(f)	114. Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.		
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7.2.1*	115. Bauran energi terbarukan.
		7.3.1*	116. Intensitas energi primer.
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang	8.10.1.(b)	117. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
		8.10.1*	118. Jumlah kantor bank dan ATM



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
	Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua		per 100.000 penduduk dewasa
		8.10.1.(a)	119. Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
		8.1.1*	120. Laju pertumbuhan PDB per kapita.
		8.1.1.(a)	121. PDB per kapita.
		8.2.1*	122. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
		8.3.1.(c)	123. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
		8.3.1*	124. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
		8.3.1.(a)	125. Persentase tenaga kerja formal.
		8.3.1.(b)	126. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
		8.5.1*	127. Upah rata-rata per jam pekerja.
		8.5.2*	128. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
		8.5.2.(a)	129. Tingkat setengah pengangguran.
		8.6.1*	130. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
		8.9.1*	131. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
		8.9.1.(a)	132. Jumlah wisatawan mancanegara.
		8.9.1.(b)	133. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
		8.9.1.(c)	134. Jumlah devisa sektor pariwisata.
	8.9.2*	135. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan	9.1.2.(b)	136. Jumlah dermaga penyeberangan.
		9.2.1*	137. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
	Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi		PDB dan per kapita.
		9.2.1.(a)	138. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
		9.2.2*	139. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
		9.3.1*	140. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
		9.3.2*	141. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
		9.5.1*	142. Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.
		9.c.1*	143. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.
		9.c.1.(a)	144. Proporsi individu yang menguasai /memiliki telepon genggam
		9.c.1.(b)	145. Proporsi individu yang menggunakan internet
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1.(b)	146. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.
		10.1.1.(c)	147. Jumlah desa tertinggal.
		10.1.1.(d)	148. Jumlah Desa Mandiri.
		10.1.1.(e)	149. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
		10.1.1*	150. Koefisien Gini.
		10.1.1.(a)	151. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
		10.1.1.(f)	152. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
		10.2.1*	153. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin & penyandang difabilitas.
		10.3.1.(d)	154. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
		10.3.1.(a)	155. Indeks Kebebasan Sipil.
	10.4.1.(b)	156. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang	



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
			Ketenagakerjaan.
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1.1.(a)	157. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
		11.3.2.(b)	158. Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
		11.5.1*	159. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
		11.5.1.(a)	160. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
		11.5.1.(c)	161. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
		11.5.2.(a)	162. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
		11.6.1.(a)	163. Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
		11.7.1.(a)	164. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
		11.b.2*	165. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4.2.(a)	166. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
		12.5.1.(a)	167. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
		12.6.1.(a)	168. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
		12.7.1.(a)	169. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
		12.8.1.(a)	170. Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.1*	171. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
		13.1.2*	172. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
			bencana per 100.000 orang.
14	Melindungi, Merestorasi & Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1.1.(a)	173. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
		15.3.1.(a)	174. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
		15.6.1*	175. Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
		15.9.1.(a)	176. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
15	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.1.(a)	177. Jumlah kasus kejahatan pembu-nuhan pada satu tahun terakhir.
		16.1.2.(a)	178. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
		16.1.3.(a)	179. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
		16.1.4*	180. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
		16.10.2.(c)	181. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
		16.2.1.(a)	182. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
		16.2.1.(b)	183. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki & anak perempuan.
		16.2.3.(a)	184. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
			tahun.
		16.5.1.(a)	185. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
		16.6.2.(a)	186. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
		16.6.1*	187. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
		16.6.1.(a)	188. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
		16.6.1.(b)	189. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
		16.6.1.(c)	190. Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.
		16.6.1.(d)	191. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
		16.7.1.(a)	192. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
		16.7.1.(b)	193. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
		16.9.1*	194. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
		16.9.1.(a)	195. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40%



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
			berpendapatan bawah.
		16.9.1.(b)	196. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
		16.b.1.(a)	197. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
16	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Mervitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1*	198. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
		17.1.1.(a)	199. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
		17.1.2*	200. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
		17.17.1.(a)	201. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
		17.17.1.(b)	202. Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
		17.18.1.(d)	203. Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
		17.18.1.(a)	204. Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.
		17.18.1.(b)	205. Persentase konsumen yang menjadikan data & informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.
		17.18.1.(c)	206. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).
		17.19.2.(b)	207. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
		17.19.2.(c)	208. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan



No.	Program Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator
			informasi statistik melalui website.
		17.19.2.(d)	209. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).
		17.6.2.(b)	210. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
		17.6.2.(c)	211. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
		17.8.1*	212. Proporsi individu yang menggunakan internet.
		17.8.1.(a)	213. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.

6.1.2. Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Kajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dilakukan dalam rangka untuk mengetahui adanya pengaruh KRP yang dilaksanakan dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan jangka menengah daerah yang berdampak terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dampak tersebut terdiri atas dampak positif dan dampak negatif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, kajian dampak/resiko lingkungan dari pelaksanaan KRP RPJMD didasarkan pada kriteria:

- 1) Penurunan atau terlampaunya daya dukung dan daya tampung (DDDT) lingkungan hidup untuk pembangunan.
- 2) Peningkatan resiko terhadap lingkungan hidup (RL).
- 3) Penurunan kinerja layanan jasa ekosistem (JE).
- 4) Penurunan mutu dan ketersediaan sumber daya alam (SDA).
- 5) Peningkatan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim (PI).



6) Penurunan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
(KEHATI)

Adapun kajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan disajikan seperti pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Kajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) terhadap Kondisi Lingkungan di Kabupaten Tana Tidung

No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
A	Visi	Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
B	Misi								
	Misi 1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
	Misi 2	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar yang terpadu tata ruang	-	-	+	+	+	-	Perlu dikaji
	Misi 3	Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berkerakyatan berbasis Sumber Daya Alam	-	-	+	-	+	-	Perlu dikaji
	Misi 4	Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
	Misi 5	Meningkatkan Kemandirian Desa	-	+	+	-	+	+	Perlu dikaji
	Misi 6	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
	Misi 7	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban wilayah	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
C	Tujuan								
	Tujuan 1	Mewujudkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing	-	+	-	-	+	+	Perlu dikaji
	Tujuan 2	Menyediakan infrastruktur pembangunan yang berkualitas	-	-	+	+	+	-	Perlu dikaji
	Tujuan 3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	-	-	+	-	+	-	Perlu dikaji
	Tujuan 4	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	-	+	+	-	+	+	Perlu dikaji
	Tujuan 5	Meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh desa	-	-	-	-	+	-	Perlu dikaji
	Tujuan 6	Mempertahankan kualitas lingkungan hidup	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
	Tujuan 7	Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
	Tujuan 8	Meningkatkan kondusivitas pembangunan wilayah	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
D	Sasaran								
	Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator: Indeks Pendidikan	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
Sasaran 2		Terwujudnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah, dengan indikator: Indeks Pembangunan Gender (IPG)	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
Sasaran 3		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator: Indeks Kesehatan	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
Sasaran 4		Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat, dengan indikator: Rasio rumah layak huni	-	-	-	+	+	+	Perlu dikaji
Sasaran 5		Meningkatnya kelancaran aksesibilitas perhubungan dan komunikasi, dengan indikator Indeks Konektivitas Wilayah	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
Sasaran 6		Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah, dengan indikator: LPE Kategori Pertanian	-	-	-	-	+	+	Perlu dikaji
Sasaran 7		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan, dengan indikator: LPE Kategori Industri Pengolahan	+	-	-	+	+	+	Perlu dikaji
Sasaran 8		Meningkatnya potensi dan daya tarik pariwisata, dengan indikator LPE Sektor Pariwisata	-	-	-	+	+	+	Perlu dikaji
Sasaran 9		Meningkatnya pemerataan kapasitas perekonomian masyarakat, dengan indikator: Indeks Gini	-	+	-	-	+	+	Perlu dikaji
Sasaran 10		Meningkatnya produktivitas angkatan kerja, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
Sasaran 11		Menurunnya emisi GRK, dengan indikator: Emisi GRK	-	-	-	-	-	+	Perlu dikaji
Sasaran 12		Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa, dengan indikator: Jumlah Status Desa Mandiri	-	-	-	-	+	+	Perlu dikaji
Sasaran 13		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
Sasaran 14		Meningkatnya kualitas layanan publik, dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
Sasaran 15		Meningkatnya perlindungan masyarakat, dengan indikator: Angka Kriminalitas	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
	Sasaran 16	Meningkatnya kualitas penanganan bencana daerah, dengan indikator: Indeks Resiko Bencana	-	-	-	-	-	-	Perlu dikaji
E	Strategi								
	Strategi 1	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
	Strategi 2	Peningkatan kualitas pendidikan perempuan	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
	Strategi 3	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan secara merata	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
	Strategi 4	Perwujudan rumah layak huni bagi masyarakat	-	-	+	-	+	-	Perlu dikaji
	Strategi 5	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah	-	-	-	-	+	+	Perlu dikaji
	Strategi 6	Penerapan Teknologi Tepat Guna pada sektor pertanian	-	-	-	-	+	-	Perlu dikaji
	Strategi 7	Pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi kerakyatan	-	+	+	-	+	+	Perlu dikaji
	Strategi 8	Pengembangan budaya dan pariwisata berbasis kearifan local	-	-	-	-	+	-	Perlu dikaji
	Strategi 9	Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi social	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
	Strategi 10	Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup	-	-	-	-	-	-	Perlu dikaji
	Strategi 11	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
	Strategi 12	Implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh di setiap urusan pembangunan daerah	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
Strategi 13	Meningkatnya kualitas penanganan bencana daerah	-	-	-	-	-	-	Perlu dikaji	
F	Arah Kebijakan								
	Arah Kebijakan 1	Percepatan Pemulihan Kualitas Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	-	-	-	-	-	-	Perlu dikaji
	Arah Kebijakan 2	Peningkatan Kualitas Perekonomian Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Di Tahun 2023 Fokus Pembangunan Adalah Membangun Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-	-	-	-	+	+	Perlu dikaji
	Arah Kebijakan 3	Peningkatan Kemandirian Desa Didukung Oleh Kualitas Sdm Dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	-	+	+	Perlu dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
	Kebijakan 4	Terwujudnya Produktivitas Dan Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat Tana Tidung	-	-	-	-	-	-	Perlu dikaji
	Kebijakan 5	Terwujudnya Tana Tidung Bermanfaat, Sejahtera, Indah, Dan Humanis (Bersih)	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
G	Indikasi Program								
1	TPB 1	1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		2. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		3. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		4. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		5. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		6. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		7. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		8. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		9. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		10. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		11. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	-	+	-	-	+	+	Perlu dikaji
		12. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	-	+	-	-	+	+	Perlu dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
		13. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		14. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		15. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	-	-	-	-	+	-	Perlu dikaji
		16. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	-	-	-	-	+	-	Perlu dikaji
		17. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	-	-	-	-	+	-	Perlu dikaji
		18. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	-	-	-	-	-	-	Perlu dikaji
		19. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		20. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	-	+	-	-	+	+	Tidak perlu dikaji
		21. Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		22. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		23. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	-	+	+	-	+	+	Perlu dikaji
		24. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	-	-	-	-	+	+	Perlu dikaji
2	TPB 2	25. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	+	+	+	-	+	+	Perlu dikaji
		26. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	+	+	+	-	+	+	Perlu dikaji
		27. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	+	+	+	-	+	+	Perlu dikaji
		28. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	+	+	+	-	+	+	Perlu dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
		29. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	+	+	+	-	+	+	Perlu dikaji
		30. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	+	+	+	-	+	+	Perlu dikaji
		31. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	+	+	+	-	+	+	Perlu dikaji
		32. Prevalensi anemia pada ibu hamil.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		33. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		34. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	-	+	+	-	+	+	Perlu dikaji
		35. Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	-	+	-	-	+	+	Perlu dikaji
3	TPB 3	36. Angka Kematian Ibu (AKI).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		37. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		38. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		39. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		40. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		41. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		42. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		43. Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		44. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		45. Kejadian Malaria per 1000 orang.	-	-	-	-	-	+	Perlu dikaji
		46. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	-	-	-	-	-	+	Perlu dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
		47. Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		48. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		49. Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		50. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		51. Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		52. Prevalensi tekanan darah tinggi.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		53. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		54. Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		55. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		56. Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		57. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		58. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		59. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		60. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		61. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		62. Total Fertility Rate (TFR).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
		63. Unmet need pelayanan kesehatan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		64. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		65. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		66. Proporsi kematian akibat keracunan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		67. Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		68. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		69. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
4	TPB 4	70. Proporsi anak-anak & remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		71. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		72. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		73. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		74. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		75. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		76. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		77. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		78. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		79. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		80. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
		81. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	+	+	+	-	+	+	Perlu dikaji
		82. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang bersertifikat pendidik.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
5	TPB 5	83. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		84. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		85. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		86. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		87. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		88. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		89. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		90. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		91. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		92. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
		93. Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		94. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		95. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		96. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
6	TPB 6	97. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	-	-	-	-	+	+	Perlu Dikaji
		98. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	-	-	-	-	+	+	Perlu Dikaji
		99. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	-	-	-	-	+	+	Perlu Dikaji
		100. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	-	-	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		101. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	-	-	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		102. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).							
		103. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	-	-	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		104. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	-	-	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		105. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	-	-	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		106. Kualitas air danau.	-	-	+	-	+	+	Perlu Dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
		107. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	-	-	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		108. Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	-	-	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		109. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	-	-	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		110. Insentif penghematan air pertanian/perkebunan & industri.	-	-	+	-	-	+	Perlu Dikaji
		111. Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	-	-	-	-	-	-	Perlu Dikaji
		112. Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		113. Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		114. Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	-	-	+	-	+	+	Perlu Dikaji
7	TPB 7	115. Bauran energi terbarukan.	-	-	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		116. Intensitas energi primer.	-	-	+	-	+	+	Perlu Dikaji
8	TPB 8	117. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		118. Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		119. Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		120. Laju pertumbuhan PDB per kapita.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		121. PDB per kapita.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		122. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		123. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		124. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian,	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
		berdasarkan jenis kelamin.							
		125. Persentase tenaga kerja formal.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		126. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		127. Upah rata-rata per jam pekerja.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		128. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		129. Tingkat setengah pengangguran.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		130. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		131. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		132. Jumlah wisatawan mancanegara.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		133. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		134. Jumlah devisa sektor pariwisata.	+	+	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		135. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
9	TPB 9	136. Jumlah dermaga penyeberangan.	-	-	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		137. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		138. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		139. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		140. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		141. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		142. Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		143. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		144. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
		145. Proporsi individu yang menggunakan internet	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
10	TPB 10	146. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		147. Jumlah desa tertinggal.	-	-	+	-	-	-	Perlu Dikaji
		148. Jumlah Desa Mandiri.	-	-	+	-	-	-	Perlu Dikaji
		149. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	-	-	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		150. Koefisien Gini.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		151. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	-	+	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		152. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	-	+	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		153. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	-	+	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		154. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		155. Indeks Kebebasan Sipil.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		156. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
11	TPB 11	157. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		158. Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	+	+	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		159. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	-	-	-	-	+	+	Perlu Dikaji
		160. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	-	-	-	-	+	+	Perlu Dikaji
		161. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		162. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	-	-	-	-	+	+	Perlu Dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
		163. Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	-	-	-	-	+	+	Perlu Dikaji
		164. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	-	-	-	-	-	-	Perlu Dikaji
		165. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
12	TPB 12	166. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	-	-	-	-	+	+	Perlu Dikaji
		167. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	-	-	-	-	+	+	Perlu Dikaji
		168. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	-	-	-	-	+	+	Perlu Dikaji
		169. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	-	-	-	-	-	-	Perlu Dikaji
		170. Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
13	TPB 13	171. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	-	-	-	-	+	+	Perlu Dikaji
		172. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	-	-	-	-	+	+	Perlu Dikaji
15	TPB 15	173. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	-	-	-	-	-	-	Perlu Dikaji
		174. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	-	-	-	-	-	-	Perlu Dikaji
		175. Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		176. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	-	-	+	-	+	-	Perlu Dikaji
16	TPB 16	177. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan satu tahun terakhir.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		178. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		179. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
		180. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		181. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		182. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		183. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		184. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		185. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		186. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		187. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		188. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		189. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		190. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		191. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
		192. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		193. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		194. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		195. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		196. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		197. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
17	TPB 17	198. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		199. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		200. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		201. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		202. Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		203. Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		204. Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		205. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		206. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		207. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji



No	KRP	Muatan KRP	Kriteria Lingkungan Hidup						Keterangan
			a	b	c	d	e	f	
		208. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		209. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		210. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		211. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu dikaji
		212. Proporsi individu yang menggunakan internet.	+	+	+	-	+	+	Perlu Dikaji
		213. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	+	+	+	-	+	+	Perlu Dikaji

Keterangan :

- a. Penurunan atau terlampaunya daya dukung dan daya tampung (DDDT) lingkungan hidup untuk pembangunan.
- b. Peningkatan resiko terhadap lingkungan hidup (RL).
- c. Penurunan kinerja layanan jasa ekosistem (JE).
- d. Penurunan mutu dan ketersediaan sumber daya alam (SDA).
- e. Peningkatan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim (PI).
- f. Penurunan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (KEHATI)

+ = Berdampak Positif, - = Berdampak Megatif



6.1.3. Analisis Dampak KRP terhadap Lingkungan Hidup

a. Dampak KRP terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

1. Dampak KRP terhadap Daya Dukung Lingkungan

Pengkajian dampak KRP terhadap daya dukung lingkungan dilakukan dengan menghitung daya dukung lingkungan (air, pangan, lahan). Daya dukung lahan yang akan dibahas disini adalah daya dukung lahan pertanian terkait dengan pemenuhan ketersediaan pangan akan komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok penduduk Kabupaten Tana Tidung. Penentuan daya dukung lahan tersebut dilakukan dengan membandingkan komponen ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) akan beras.

a) Daya Dukung Pangan (Beras)

Kebutuhan akan pangan di Kabupaten Tana Tidung dapat dihitung berdasarkan konsumsi beras penduduk perkapita pertahun. Dengan mengacu pada konsumsi beras perkapita pertahun secara nasional, maka masyarakat Kabupaten Tana Tidung mengkonsumsi beras sekitar 98 kg/kapita/tahun. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sekitar 25.584 jiwa (BPS Kab. Tana Tidung, 2021), menunjukkan bahwa kebutuhan beras di Kabupaten Tana Tidung mencapai 2.507,23 ton. Dengan pertumbuhan penduduk mencapai 5,17 % maka pada tahun 2026 kebutuhan beras diperkirakan mencapai 3.284,98 ton dengan perkiraan jumlah penduduk sekitar 32.198 jiwa. Adapun proyeksi kebutuhan pangan (beras) bagi penduduk Kabupaten Tana Tidung disajikan seperti pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Proyeksi Kebutuhan Beras Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2026

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Beras	
			kg/kapita/tahun	KTT (ton)
1	2020	25.584	98	2.507,23
2	2021	26.907		2.636,86
3	2022	28.229		2.766,48
4	2023	29.552		2.896,10
5	2024	30.875		3.025,73
6	2025	32.198		3.155,35
7	2026	33.520		3.284,98

Sumber : Data diolah tahun 2021

Keterangan : Pertumbuhan penduduk = 5,17 %

Daya dukung pangan (beras) di Kabupaten Tana Tidung dihitung dari ketercukupan kebutuhan beras bagi masyarakat Kabupaten Tana Tidung. Apabila ketersediaan beras berada pada posisi surplus maka dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Tana Tidung memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Sebaliknya jika berada pada posisi minus maka wilayah Kabupaten Tana Tidung tidak mampu menyediakan kebutuhan beras sehingga perlu mendatangkan dari daerah sekitar.

Untuk menghidung daya dukung pangan (beras) di Kabupaten Tana Tidung menggunakan persamaan (Muta'ali, 2015) :

$$DDPb = \frac{(PrL \times LLtp \times \mu)}{JP \times Stdb}$$

Keterangan :

- DDPb = Daya Dukung pangan beras
 PrL = Produktifitas padi sawah (kg/ha)
 LLtp = Luas lahan yang ditanami padi (ha)
 μ = Indeks konversi dari padi menjadi beras (62,74 %)
 JP = Jumlah Penduduk
 Stdb = Standar kebutuhan beras (kg) yaitu sebesar 98 kg/kapita/tahun

Dimana :

- ✓ DDPb > 1, wilayah mampu menyediakan pangan beras untuk kebutuhan penduduknya secara mandiri



- ✓ DDPb < 1, wilayah tidak mampu menyediakan pangan beras untuk kebutuhan penduduknya secara mandiri

Terkait ketersediaan beras di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2020, dapat dilihat dari data Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung tahun 2020. Luas panen padi sawah pada tahun 2020 mencapai 294,3 ha dengan produksi sekitar 1.118,34 ton dan produktivitas sekitar 3,8 ton/ha. Sedangkan luas panen padi ladang pada tahun 2020 sekitar 271,8 ha dengan produksi mencapai 571,98 ton dan produktivitas sekitar 2,1 ton/ha. Apabila ditambahkan padi sawah dengan padi ladang, maka luas panen padi di Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 sekitar 567,10 ha dengan produksi mencapai 1.691,22 ton.

Tabel 6.4. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Kabupaten Tana Tidung, 2020

No.	Komoditi	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Padi Sawah	294,30	1.118,34	3,8
2	Padi Ladang	272,80	572,88	2,1
	Jumlah	567,10	1.691,22	

Sumber : DPPP Kab. Tana Tidung, 2021

Berdasarkan data Tabel 6.4, maka daya dukung pangan (beras) di Kabupaten Tana Tidung adalah :

- ☞ Padi Sawah

$$DDPb = \frac{(PrL \times LLtp \times \mu)}{JP \times Stdb}$$

$$DDPb = \frac{(3,8 \text{ ton/ha} \times 294,30 \text{ ton} \times 62,74 \%)}{25.584 \text{ jiwa} \times 98 \text{ kg/kapita/tahun}}$$

$$DDPb = \frac{701,65}{2.507,23}$$

$$DDPb = 0,28$$

- ☞ Padi Ladang

$$DDPb = \frac{(PrL \times LLtp \times \mu)}{JP \times Stdb}$$



$$\text{DDPb} = \frac{(2,1 \text{ ton/ha} \times 272,80 \text{ ton} \times 62,74 \%)}{25.584 \text{ jiwa} \times 98 \text{ kg/kapita/tahun}}$$

$$\text{DDPb} = \frac{359,42}{2.507,23}$$

$$\text{DDPb} = 0,14$$

Berdasarkan hasil perhitungan Daya Dukung penyediaan pangan yaitu beras, Kabupaten Tana Tidung berada pada nilai < 1 yang berarti Kabupaten Tana Tidung belum dapat mendukung ketersediaan beras di wilayah tersebut.

Untuk meningkatkan daya dukung penyediaan pangan khususnya besar di Kabupaten Tana Tidung, maka berbagai upaya perlu dilakukan. Upaya tersebut dapat berupa (1) Pemanfaatan hasil produksi pangan dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten/Kota sekitarnya dan (2) Kerjasama/import dengan provinsi sekitar wilayah Kalimantan Utara

Strategi yang dapat dilakukan melalui pemanfaatan hasil produksi pangan dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung dan kabupaten/kota sekitar antara lain :

- 1) Pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- 2) Intensifikasi pertanian dengan peningkatan produktivitas hasil dan indeks pertanaman.
- 3) Peningkatan luas areal tanam (Ekstensifikasi).
- 4) Peningkatan kapasitas SDM petani melalui motivasi petani milenial.
- 5) Penganekaragaman pangan

Saat ini pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengupayakan terjadinya alih fungsi atau perubahan status lahan dari KBK menjadi KBNK atau APL melalui Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apabila usulan ini mendapatkan persetujuan, maka kawasan budidaya untuk pertanian



menjadi lebih luas. Tentunya didahului dengan perubahan pola ruang Kabupaten Tana Tidung yang saat ini telah disusun dan dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021 – 2026.

Selain pemanfaatan hasil produksi sendiri, pemenuhan kebutuhan pangan beras bisa di pasok dari Kabupaten Bulungan yg saat ini gencar mengembangkan *food estate*, sehingga kekosongan produksi beras di Kabupaten Tana Tidung diharapkan bisa di isi oleh Bulungan dan demikian juga sebaliknya.

Terkait upaya peningkatan daya dukung pangan beras di Kabupaten Tana Tidung melalui kerjasama/import dengan provinsi sekitar wilayah Kalimantan Utara, perlu dimaklumi bahwa walaupun Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara dengan penduduk yang banyak juga bermata pencaharian di bidang pertanian, namun karena kondisi wilayah yang tidak terlalu mendukung untuk pengembangan pertanian khususnya pertanian tanaman pangan apalagi sebagian besar wilayahnya berstatus sebagai kawasan hutan, membuat daerah ini tidak bisa terlepas dari adanya mendatangkan bahan pangan terutama mendatangkan beras dari provinsi lain sebagai penghasil beras seperti dari Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Bahkan saat ini pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai kawasan cadangan pangan nasional.

b) Daya Dukung Lahan

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas relief atau topografi, iklim, tanah dan air dan biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia.

Dalam kaitannya dengan penyediaan pangan beras, lahan memiliki posisi penting mendukung ketersediaan pangan di



Kabupaten Tana Tidung. Sebaran lahan untuk pangan di Kabupaten Tana Tidung pada dasarnya tersebar dilima kecamatan yaitu Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Muruk Rian, Betayau dan Tana Lia. Kecamatan yang memiliki luas lahan pertanian lahan basah (sawah) paling besar adalah Kecamatan Sesayap Hilir yaitu mencapai 25.544,64 ha, sedangkan kecamatan yang luasannya paling kecil adalah Kecamatan Betayau yang hanya sekitar 179,93 ha. Secara terperinci data perbandingan luas lahan pertanian lahan basah (sawah) dengan areal penggunaan lainnya di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tana Tidung disajikan pada Tabel 6.5.

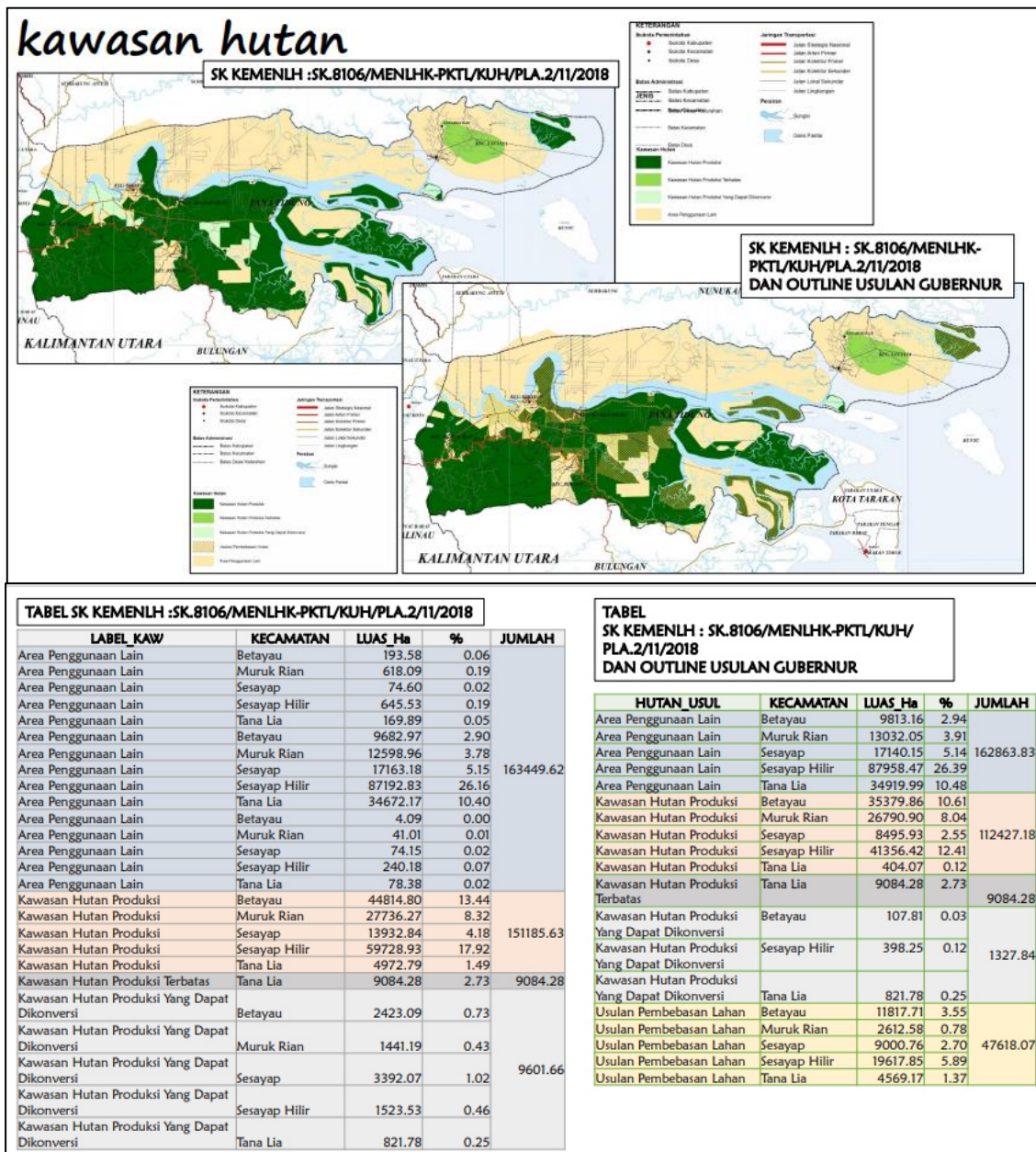
Tabel 6.5. Perbandingan Luas Lahan Pertanian Lahan Basah (Sawah Sebagai Lahan Penyediaan Pangan dengan Lahan lainnya di Kabupaten Tana Tidung

No	Tutupan Lahan	Kecamatan					Jumlah (ha)	%
		Sesayap (ha)	Sesayap Hilir (ha)	Muruk Rian (ha)	Betayau (ha)	Tana Lia (ha)		
1	Bangunan bukan pemukiman	5.275,65	17.457,85	1.258,30	7.418,20	234,67	31.644,67	8,27
2	Bangunan pemukiman/campuran	7.770,02	18.367,73	1.915,01	9.544,30	6.732,77	44.329,83	11,59
3	Hutan lahan tinggi (Hutan lindung)	189,18	0,00	1.598,11	709,64	1.687,79	4.184,72	1,09
4	Hutan rawa/gambut	257,79	2.352,68	28,28	32,87	983,16	3.654,78	0,96
5	Hutan mangrove	35,40	482,91	0,00	0,00	1.985,65	2.503,96	0,65
6	Hutan Tanaman (Hutan produksi)	3.484,19	24.826,39	8.483,86	23.256,91	9.421,21	69.472,56	18,16
7	Perkebunan	10.044,83	14.788,37	9.991,49	3.138,81	8.874,42	46.837,92	12,24
8	Pertanian lahan kering (Tegalan/ladang)	428,16	7.440,41	6.398,53	3.044,85	1.639,95	18.951,90	4,95
9	Pertanian lahan basah (Sawah)	8.335,69	25.546,64	4.592,16	179,93	1.063,57	39.716,00	10,38
10	Sempadan sungai dan pantai	291,77	2.095,29	708,86	0,00	22,25	3.118,17	0,82
11	Sungai	4.632,72	37.329,49	1.366,89	633,46	2.307,41	46.269,97	12,09
12	Tambak/empang	0,00	39.415,08	0,00	0,00	16.752,57	56.167,65	14,68
13	Pertambangan	0,00	9.106,23	0,00	0,00	0,00	9.106,23	2,38
14	Hutan wisata/tempat wisata lainnya	0,00	0,00	6.598,97	0,00	0,00	6.598,97	1,72
Jumlah		40.745,40	199.207,08	42.940,45	47.958,97	51.705,42	382.557,33	



Jika dilihat data seperti pada Tabel 6.5, menunjukkan bahwa potensi peningkatan ketersediaan pangan cukup besar karena didukung ketersediaan lahan pertanian pangan basah (sawah) yang cukup luas. Namun demikian, berdasarkan data BPS tahun 2020 dan 2021 dimana luas lahan dimaksud belum dicantumkan menunjukkan bahwa lahan tersedia tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan asal beras di daerah ini.

Berdasarkan peta tutupan lahan di atas menunjukkan bahwa hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah hutan, karena itu dari penggunaan lahan di Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh sektor kehutanan. Adapun luas kawasan hutan yang mencapai 170.340,64 ha atau sekitar 35,28 % dari total luas wilayah Kabupaten Tana Tidung yaitu sekitar 4.828,58 km² atau 482.858 ha. Keberadaan kawasan hutan yang cukup luas ini, sangat tidak mendukung untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Tana Tidung. Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berencana untuk memperluas pusat pemerintahan. Namun terhambat karena areal rencana pengembangan pusat pemerintahan berada di kawasan hutan. Disisi lain pengembangan permukiman baru dan pembangunan fasilitas umum serta fasilitas sosial dan infrastruktur baru juga terhambat karena terbatasnya lahan di KBNK. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengusulkan alih fungsi kawasan hutan menjadi APL kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas ± 65.000 ha.



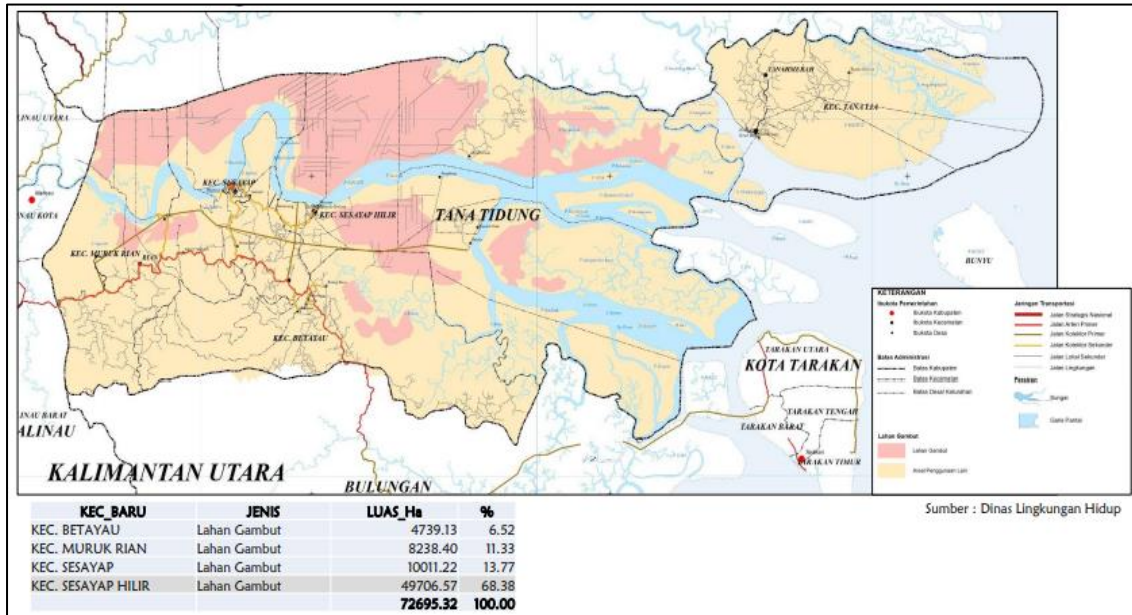
Sumber : DPUPRKP Kab. Tana Tidung, 2021

Gambar 6.2. Luas Sebaran Kawasan Hutan di Kabupaten Tana Tidung

Selain kawasan hutan yang tidak mendukung dalam rangka pengembangan wilayah di Kabupaten Tana Tidung, keberadaan lahan gambut juga tidak mendukung pengembangan wilayah tersebut. Berdasarkan data DPUPR-Perkim Kabupaten Tana Tidung (2021), luas kawasan gambut mencapai 72.695,32 ha atau sekitar 15,06 % dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung. Keberadaan



lahan gambut ini menjadi penghambat pula dalam pengembangan wilayah karena selain umumnya berstatus KBK juga rawan terjadi kebakaran lahan gambut.



Sumber : DPUPRPKP Kab. Tana Tidung, 2021

Gambar 6.3. Luas Sebaran Kawasan Gambut di Kabupaten Tana Tidung

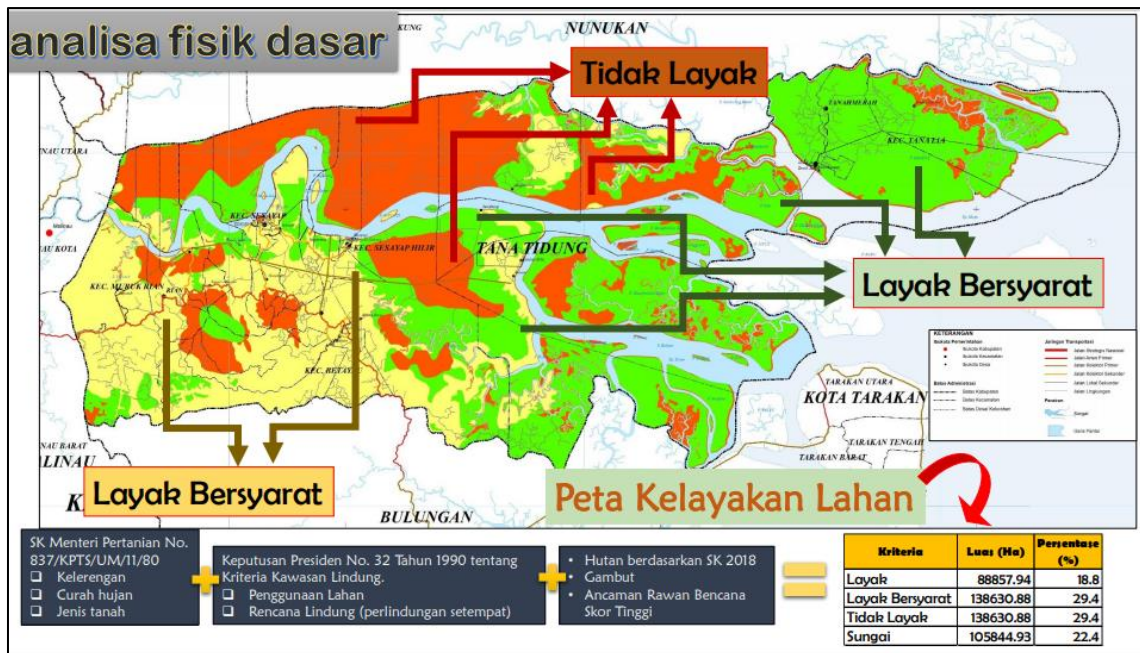
Berdasarkan hasil analisis fisik lahan, terdapat sekitar 18,8% lahan yang memenuhi syarat layak dimanfaatkan, 29,4% layak bersyarat, 29,4% tidak layak dan 22,4% masuk kriteria sungai.

Tabel 6.6. Luas Sebaran Tingkat Kelayakan Lahan di Kabupaten Tana Tidung

No	Kriteria	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Layak	88.857,94	18,8
2	Layak Bersyarat	138.630,88	29,4
3	Tidak Layak	138.630,88	29,4
4	Sungai	105.844,93	22,0

Sumber : DPUPRPKP Kab. Tana Tidung, 2021

Berdasarkan data Tabel 6.6, terlihat bahwa sekitar 51,4 % lahan masuk kriteria tidak layak secara fisik untuk mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Tana Tidung termasuk sungai dan sempadan sungai.



Sumber : DPUPRKP Kab. Tana Tidung, 2021

Gambar 6.4. Luas Sebaran Tingkat Kelayakan Lahan di Kabupaten Tana Tidung

c) Daya Dukung Air

Daya dukung air pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air. Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air dilakukan dengan formula sebagai berikut :

1) Penghitungan Ketersediaan (Supply) Air

Perhitungan dengan menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional.

Rumus:

$$SA = 10 \times C \times R \times A \text{ (Sumber, Muta'ali, 2014)}$$

$$C = \frac{\sum (c_i \times A_i)}{\sum A_i}$$

$$R = \frac{\sum R_i}{m}$$

Keterangan:

SA = ketersediaan air (m³/tahun)

C = koefisien limpasan tertimbang

C_i = Koefisien limpasan penggunaan lahan i

A_i = luas penggunaan lahan i (ha) dari data BPS atau Daerah Dalam Angka, atau dari data BPN



R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah mm/tahunan)
dari data BPS atau BMG atau dinas terkait setempat (di
Kabupaten Tana Tidung = 2.781 mm/thn pada tahun 2020)

Ri = curah hujan tahunan pada stasiun i

M = jumlah stasiun pengamatan curah hujan = 1 stasiun

A = $\sum A_i$

10 = faktor konversi dari mm/ha menjadi m³

Tabel 6.7 merupakan perhitungan limpasan tertimbang di Kabupaten Tana Tidung. Jumlah limpasan tertimbang ini sebagai dasar dalam menghitung ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 6.7. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang Di Kabupaten Tana Tidung

No	Tutupan Lahan	Luas (ha) (Ai)	Koefisien Limpasan (Ci)	(Ci x Ai)
1	Bangunan bukan pemukiman	31.644,67	0,4	12,657.87
3	Bangunan pemukiman/campuran	44.329,83	0,4	17,731.93
4	Hutan lahan tinggi (Hutan lindung)	4.184,72	0,18	753.25
5	Hutan rawa/gambut	3.654,78	0,18	657.86
6	Hutan mangrove	2.503,96	0,18	450.71
7	Hutan Tanaman (Hutan produksi)	69.472,56	0,18	12,505.06
8	Perkebunan	46.837,92	0,35	16,393.27
9	Pertanian lahan kering (Tegalan/ladang)	18.951,90	0,35	6,633.17
10	Pertanian lahan basah (Sawah)	39.716,00	0,30	11,914.80
11	Sempadan sungai & pantai	3.118,17	0,18	561.27
12	Sungai	46.269,97	0,18	8,328.59
13	Tambak/empang	56.167,65	0,18	10,110.23
14	Pertambangan	9.106,23	0,35	3,187.18
15	Hutan wisata/tempat wisata lainnya	6.598,97	0,18	1,187.81
	Total	382.557,33		103.073,02

Catatan : C (koefisien limpasan tertimbang) = 0,318



Berdasarkan perhitungan dengan rumus ketersediaan air di atas, diketahui ketersediaan air di Kabupaten Tana Tidung tahun 2020 sebesar :

$$\begin{aligned} SA &= 10 \times C \times R \times A \\ R &= \Sigma Ri / m = 2.781 \text{ (mm/thn)}/1 \\ &= 2.781 \text{ mm/thn} \\ SA &= 10 \times 0,318 \times 2.781 \text{ mm/thn} \times 382.557,33 \text{ Ha} \\ &= 3,383,176,352.44 \text{ m}^3/\text{tahun} \end{aligned}$$

2) Penghitungan Kebutuhan Air

Penghitungan kebutuhan (Demand) Air dapat dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rumus: } DA = N \times KHLA \text{ (Sumber, Muta'ali, 2014)}$$

Keterangan:

- DA = Total kebutuhan air (m³ /tahun)
N = Jumlah penduduk Tahun 2020 (25.584 jiwa)
KHLA = Kebutuhan air untuk hidup layak (1.600 m³ air/kapita/tahun) adalah Kebutuhan air untuk keperluan domestic dan untuk menghasilkan pangan

Berdasarkan rumus tersebut, maka total kebutuhan air di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2020 adalah :

$$\begin{aligned} DA &= N \times KHLA \\ &= 25.584 \text{ jiwa} \times 1.600 \text{ m}^3/\text{kapita}/\text{tahun} \\ &= 40.934.400,00 \text{ m}^3/\text{tahun} \end{aligned}$$

3) Penentuan Status Daya Dukung Air

Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA).

- ✓ Bila $SA > DA$, daya dukung air dinyatakan surplus.
- ✓ Bila $SA < DA$, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui

Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan bahwa SA (3,383,176,352.44 m³/tahun) > DA, (40.934.400,00 m³/tahun). Ini menunjukkan bahwa daya dukung air di Kabupaten Tana Tidung sampai tahun 2020 dinyatakan masih surplus atau belum

terlampau. Namun demikian infrastruktur penyediaan air kepada masyarakat baik air bersih untuk air minum maupun air domestik perlu dibangun agar dapat menjangkau ke wilayah-wilayah yang belum tersedia air bersih.

2. Dampak KRP terhadap Daya Tampung Lingkungan

Dampak Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan Daerah terhadap daya tampung lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan pembangunan terhadap parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun kriteria IKLH adalah seperti pada Tabel 6.8.

Tabel 6.8. Predikat dan Kisaran Nilai IKLH Nasional

No.	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat Baik	IKLH > 80
2	Baik	70 < IKLH ≤ 80
3	Cukup Baik	60 < IKLH ≤ 70
4	Kurang Baik	50 < IKLH ≤ 60
5	Sangat Kurang Baik	40 < IKLH ≤ 50
6	Waspada	30 < IKLH ≤ 40

Sumber : KepMen LHK, 2018.

Berdasarkan data yang ada, IKLH Kabupaten Tana Tidung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan data yang berfluktuasi. Pada tahun 2017, IKLH Kabupaten Tana Tidung sebesar 69,91 dan naik menjadi 75,91 pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019, IKLH turun menjadi 72,37. Berdasarkan kriteria penilaian IKLH oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, IKLH Kabupaten Tana Tidung tahun 2018 dan 2019 masih berada pada kriteria baik, walaupun pada tahun 2019 IKLH mengalami penurunan sebesar 3,54.

Adapun IKLH untuk kualitas udara sejak tiga tahun terakhir (2017-2019) menunjukkan nilai Indek Kualitas Udara (IKU) yang sangat baik pada tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar 89,72 dan 89,72, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 yang mencapai nilai IKU 50,00. Sedangkan nilai IKU air mengalami

peningkatan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 walaupun berada pada kriteria kurang baik sampai dengan cukup baik. Pada tahun 2017 nilai Indek Kualitas Air (IKA) sebesar 40,00, dan naik terus pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 50,00 dan 68,59. Adapun nilai IKLH termasuk IKU dan IKA Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 – 2019 disajikan pada Tabel 6.9.

Tabel 6.9. Nilai IKLH Kabupaten Tana Tidung, 2017-2019.

No	Indeks	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,91	75,91	72,37
2	Indek Kualitas Udara	89,72	89,72	50,00
3	Indek Kualitas Air	40,00	50,00	68,59

Penilaian dampak KRP terhadap daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Tana Tidung dapat juga dilihat dari daya tampung dan daya dukung Jasa Ekosistem sebagaimana dijelaskan pada sub bab berikut di bawah ini. Rangkuman Daya Tampung Lingkungan Hidup dari Jasa Ekosistem Kabupaten Tana Tidung disajikan seperti pada Tabel 6.10.

Tabel 6.10. Kriteria dan Luas Wilayah Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Jasa Ekosistem

No	Daya Tampung dan Daya Dukung Jasa Ekosistem	Kriteria luas wilayah (%)		
		SR-R	S	T-ST
1	JE Penyedia Pangan	1,84	31,16	67,00
2	JE Penyedia Air Bersih	22,48	29,55	47,97
3	JE Sumber Daya Genetik	17,32	42,14	40,54
4	JE Pengaturan Iklim	6,05	38,38	55,56
5	JE Tata Aliran Air dan Banjir	26,18	22,47	51,35
6	JE Bencana Alam	21,83	17,35	60,83
7	JE Pemurnian Air Bersih	51,04	29,57	19,38
8	JE Pengolahan Limbah	19,44	17,29	63,27
9	JE Pemeliharaan Kualitas Udara	4,74	25,44	69,81
10	JE Rekreasi dan Ecotourism	26,39	19,25	54,36
11	JE Estetika Alam	25,96	15,17	58,87



No	Daya Tampung dan Daya Dukung Jasa Ekosistem	Kriteria luas wilayah (%)		
		SR-R	S	T-ST
12	JE Produksi Primer	21,26	22,69	56,05

Sumber : DLHP Kab. Tana Tidung, 2017

b. Dampak KRP terhadap Jasa Ekosistem

Ekosistem diartikan sebagai tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap komponen lingkungan hidup yang saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Ekosistem bersifat dinamis dan perubahannya disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Ekosistem alami memegang peranan penting dalam mendukung keberlanjutan hidup manusia dan berperan penting, baik langsung maupun tidak langsung dalam menyokong kehidupan ekonomi manusia. Barier (1991) dalam Djajadiningrat, *dkk.*, (2011) mengelompokkan manfaat ekosistem alami secara umum ke dalam kategori nilai guna (*use value*) dan nilai bukan guna (*non use value*). Nilai guna adalah nilai yang timbul dari penggunaan barang dan jasa ekosistem (Contanza *dkk.*, 1998) sedangkan nilai bukan guna diartikan sebagai nilai yang diperoleh dari kesenangan terhadap suatu barang dan tidak berhubungan dengan manfaat lain yang diperoleh atas barang tersebut. Manfaat atau keuntungan yang manusia dapatkan dari suatu ekosistem dan mempunyai manfaat sangat penting bagi kesejahteraan manusia lebih dikenal dengan istilah jasa ekosistem (Woodruff dan Bendor, 2016).

Jasa ekosistem atau disebut juga lingkungan memiliki cakupan yang cukup beragam, namun berdasarkan jasa dan barang yang dihasilkan Groot (2002) mengelompokkan menjadi 4 kategori dasar, yaitu jasa pengaturan, jasa habitat, jasa produksi, dan jasa informasi. Jasa pengaturan sangat berhubungan dengan kemampuan ekosistem alami dan semi-alami dalam mengatur proses ekologi yang mendukung kehidupan, misalnya yang berhubungan dengan udara, air, dan tanah. Jasa habitat berhubungan dengan perlindungan terhadap tanaman dan hewan. Sedangkan jasa



produksi berhubungan dengan produk yang dihasilkan oleh lingkungan yang memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun jasa informasi berhubungan dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh lingkungan menyangkut kondisi dan proses-proses yang sedang berlangsung dalam lingkungan.

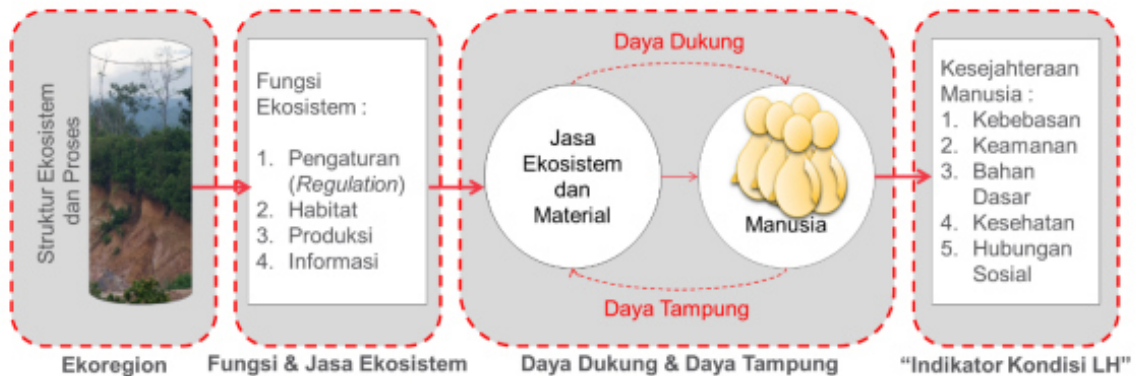
Selanjutnya beberapa peneliti yang kemudian diadopsi oleh Millenium Ecosystem Assessment (2005) mengklasifikasikan jasa ekosistem menjadi empat kategori dan 23 kelas jasa ekosistem sebagai berikut:

- 1) Penyediaan: (1) Bahan makanan, (2) Air bersih, (3) Serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya, (4) Materi genetic, (5) Bahan obat dan biokimia, dan (6) Spesies hias.
- 2) Pengaturan: (7) Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (9) Pencegahan gangguan, (10) Pengaturan air, (11) Pengolahan limbah, (12) Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan, (14) Pengaturan biologis, dan (15) Pembentukan tanah.
- 3) Budaya: (16) Estetika, (17) Rekreasi, (18) Inspirasi, (19) Warisan dan identitas budaya, (20) Spiritual dan keagamaan, serta (21) Pendidikan.
- 4) Pendukung: (22) Habitat dan berkembang biak dan (23) Perlindungan plasma nuftah.

Informasi mengenai fungsi ekosistem dapat mewakili kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dengan kata lain, daya dukung dan daya tampung merupakan kapasitas dari fungsi dan jasa ekosistem dalam mendukung prikehidupan manusia atau makhluk lainnya yang berada pada suatu lokasi atau ekoregion tertentu. Daya dukung dan daya tampung juga dapat mengindikasikan kualitas dari sebuah jasa ekosistem tertentu. Semakin baik atau tinggi daya dukung dan daya tampung suatu lokasi atau ekoregion, maka dapat dikatakan ekosistem di ekoregion



tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat berfungsi dengan baik untuk menyediakan jasa ekosistemnya. Biasanya, fungsi regulasi dari ekosistem terkait erat dengan daya tampung, sedangkan penyediaan, pengaturan dan budaya terkait erat dengan daya dukung lingkungan hidup



Gambar 6.5. Hubungan Struktur , Fungsi dan Jasa Ekosistem, serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Penilaian jasa ekosistem suatu wilayah dapat dilakukan menggunakan analisis spasial menggunakan perangkat lunak *ArcGIS Desktop* dan *Microsoft Excel*. Ada dua jenis analisis spasial yang biasa digunakan untuk menilai jasa ekosistem berdasarkan data tutupan lahan dan kombinasi antara data tutupan lahan dan ekoregion yaitu:

- 1) Analisis Spasial menggunakan hasil pembobotan jasa ekosistem dari tutupan lahan.
- 2) Analisis spasial menggunakan hasil pembobotan jasa ekosistem dari tutupan lahan dan ekoregion.

Adapun jasa ekosistem untuk wilayah Kabupaten Tana Tidung dijelaskan sebagai berikut :

1. Distribusi Jasa Ekosistem Penyediaan Air bersih Menurut Ekoregion

Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan utama selain bahan pangan. Ekosistem dapat memberikan manfaat dalam penyediaan air bersih. Secara alami air bersih dapat berasal dari air

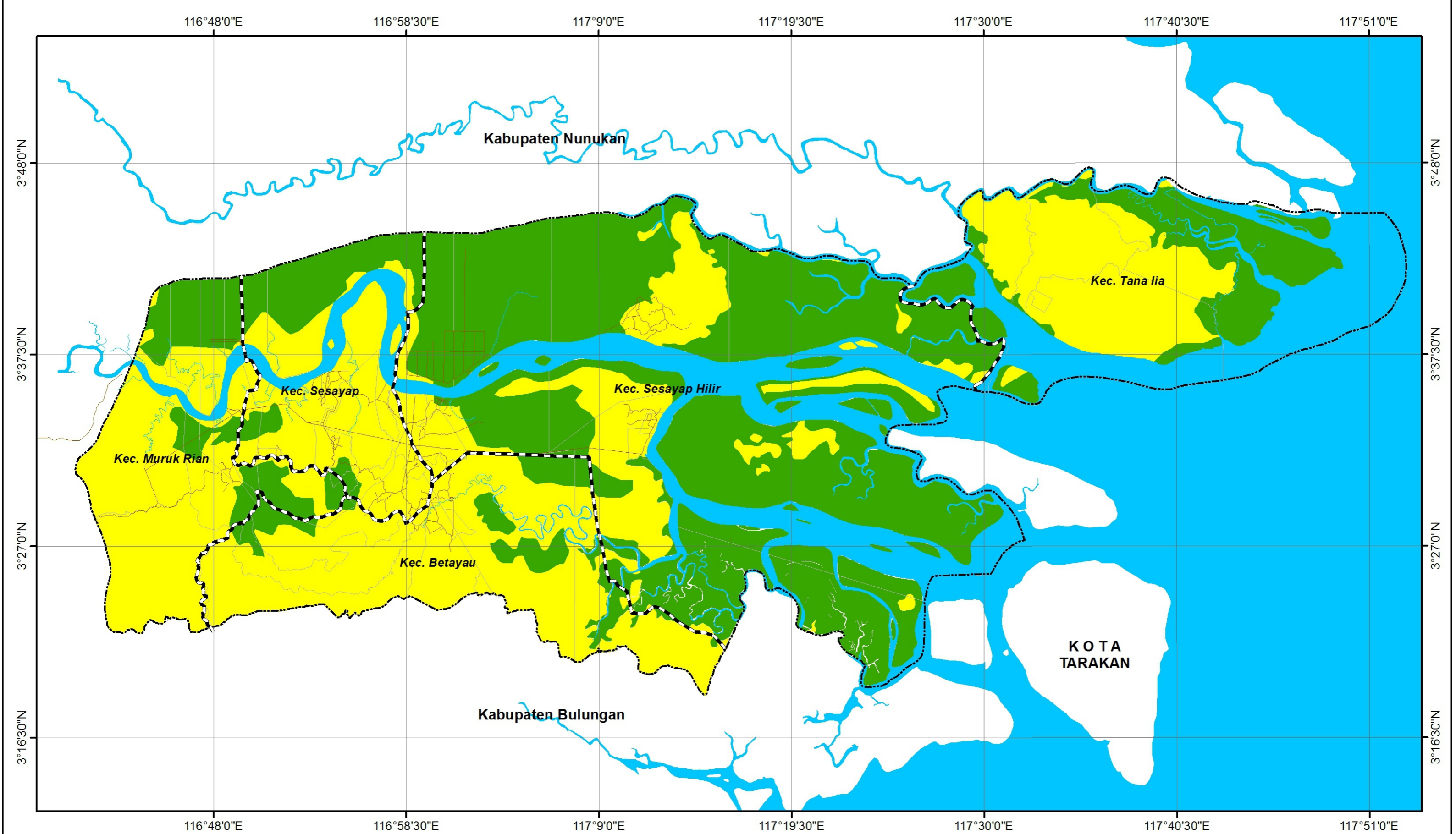
permukaan seperti sungai, danau dan air tanah. Semua ekoregion di Kabupaten Tana Tidung dapat menyediakan air bersih. Secara umum di Kabupaten Tana Tidung lahan yang mampu menyediakan air bersih dapat dikelompokkan dalam lahan berpotensi tinggi, sedang dan rendah.

Potensi lahan untuk menyediakan air bersih sebagai berikut : 1) Berpotensi tinggi – sangat tinggi seluas 145.718,44 ha (44,21%), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 71,740,00 ha, 2) Berpotensi sedang seluas 115.175,51 ha (36,52%), terluas di Kecamatan Sesayap yaitu 22.997,02 ha dan 3) Berpotensi sangat rendah – rendah seluas 54.475,43 ha (17,27%), terluas terdapat di Kecamatan Sesayap yaitu 16.886,78 ha. Distribusi jasa ekosistem penyediaan air bersih dapat dilihat pada Tabel 6.11. dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 6.6.

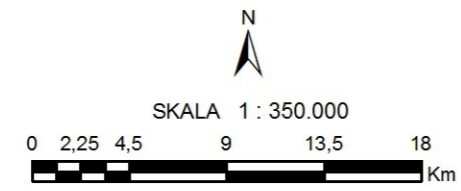
Tabel 6.11. Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Dirinci Menurut Kecamatan

Kecamatan	Sangat Rendah - Rendah		Sedang		Tinggi - Sangat Tinggi	
	Ha	%	ha	%	Ha	%
Sesayap	16.886,78	33,86	22.997,02	46,11	9.985,09	20,02
Sesayap Hilir	22.420,94	17,84	31.508,66	25,07	71.740,00	57,09
Muruk Rian	3.602,71	23,98	5.723,93	38,10	5.694,09	37,91
Betayau	8.097,91	17,39	14.911,92	32,03	23.543,60	50,57
Tana Lia	18.972,12	25,57	16.837,86	22,70	38.377,34	51,73
Jumlah	69.980,46	22,48	91.979,39	29,55	149.340,93	47,97

Sumber : DLHP Kab. Tana Tidung, 2017



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



KEGIATAN :
PETA TINGKAT DAYA DUKUNG DAN DAYA
TAMPUNG LINGKUNGAN JASA
EKOSISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH
EKOREGION KAB. TANA TIDUNG

Legenda

- Jalan
- Batas Kecamatan
- Sungai / Laut
- Batas Desa Tana Tidung
- Batas Kabupaten

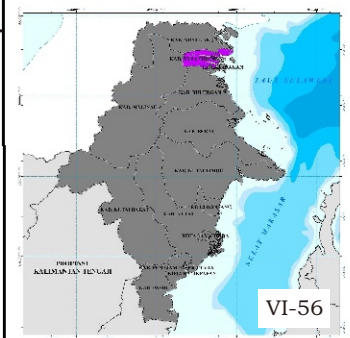
TINGKAT DAYA DUKUNG

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Gambar 6.6

Koordinat Sistem : WGS 1984 UTM Zone 50N
Projection : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Unit : Meter

Sumber Peta :
1. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 450.000
2. Peta Ekoregion Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000
3. Peta Adminitrasi Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000





2. Distribusi Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik Menurut Ekoregion

Sumberdaya genetik berhubungan dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. Semakin tinggi keanekaragaman hayati suatu wilayah maka sumberdaya genetiknya semakin melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem, yaitu ekoregion bentang alam dan tutupan lahan terutama areal yang bervegetasi.

Wilayah yang memiliki tutupan vegetasi pada umumnya memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Lahan yang memiliki potensi sedang dalam penyediaan sumberdaya genetik terdapat di ekoregion Fluvial Kalimantan, Dataran Pantai Kalimantan, Perbukitan Struktural Kompleks Meratus dan Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam. Sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah dalam penyediaan sumberdaya genetik di Kabupaten Tana Tidung terdapat di ekoregion Fluvial Kalimantan dan Perbukitan Struktural Kompleks Meratus dan Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam.

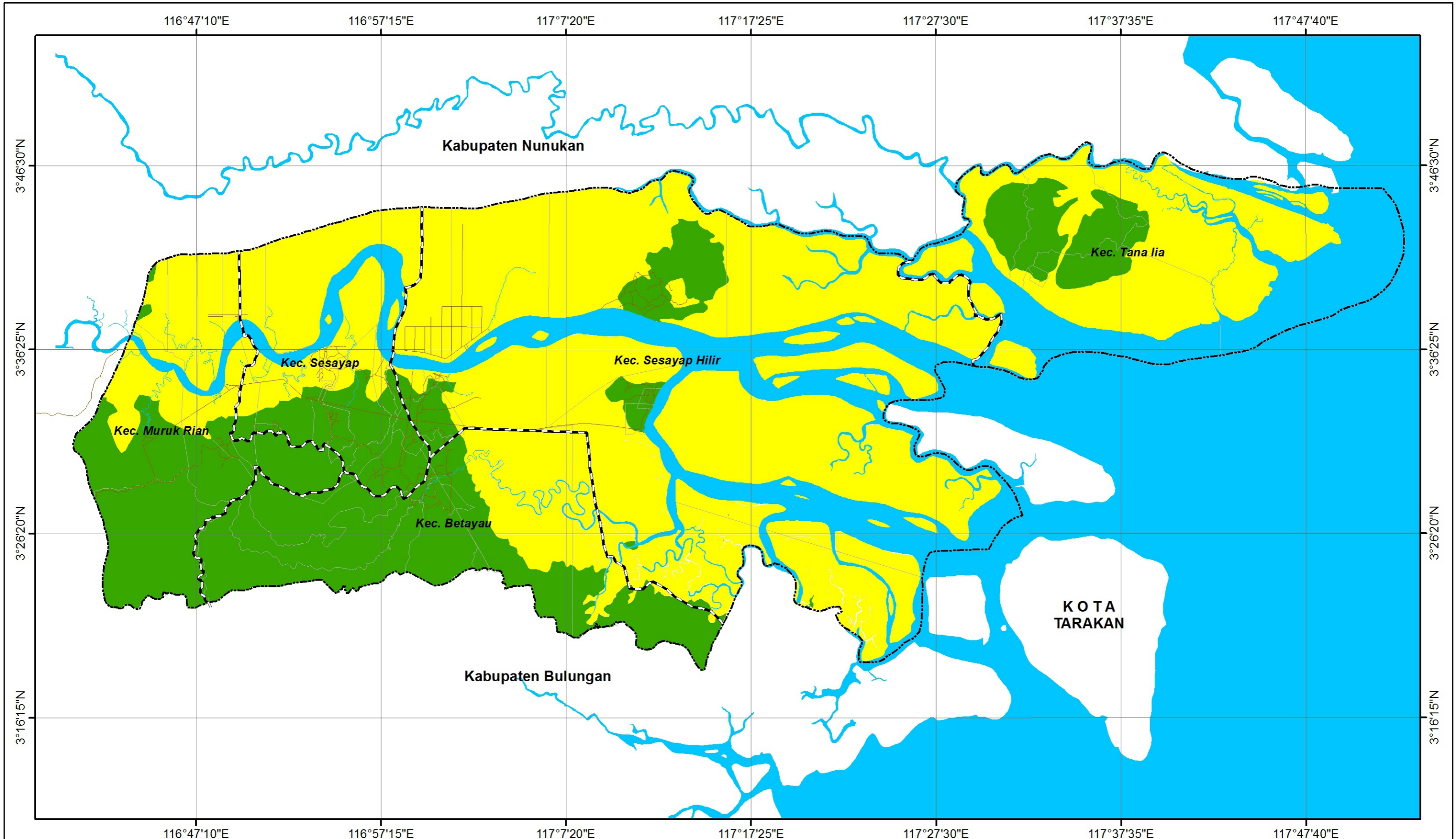
Potensi lahan untuk menyediakan sumberdaya genetik di Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut : 1) Berpotensi tinggi – sangat tinggi seluas 118.720,18 ha (40,54 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 53.647 ha, 2) Berpotensi sedang seluas 123.424,40 ha (42,14 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 50.666,67 ha dan 3) Berpotensi sangat rendah – rendah seluas 50.721,68 ha (17,32 %), terluas terdapat di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 17.948,07 ha. Distribusi jasa ekosistem penyediaan sumberdaya genetik dapat dilihat pada Tabel 6.12. dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 6.7.



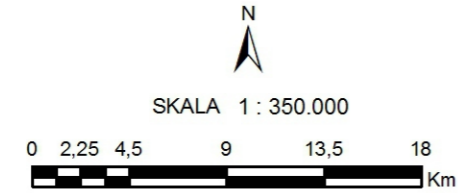
Tabel 6.12. Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik Menurut Kecamatan

Ekoregion	Sangat Rendah Rendah		Sedang		Tinggi - Sangat Tinggi	
	ha	%	ha	%	ha	%
Sesayap	7.123,96	18,10	22.990,22	58,40	9.254,89	23,51
Sesayap Hilir	17.948,07	14,68	50.666,67	41,44	53.647,30	43,88
Muruk Rian	1.505,11	10,79	9.321,42	66,84	3.119,31	22,37
Betayau	7.108,41	15,64	18.756,46	41,26	19.594,69	43,10
Tana Lia	17.036,13	23,72	21.689,58	30,20	33.103,99	46,09
Jumlah	50.721,68	17,32	123.424,40	42,14	118.720,18	40,54

Sumber : DLHP Kab. Tana Tidung, 2017



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



KEGIATAN :
PETA TINGKAT DAYA DUKUNG DAN DAYA
TAMPUK LINGKUNGAN JASA EKOSISTEM
PENYEDIAAN SUMBERDAYA GENETIK
EKOREGION KAB. TANA TIDUNG

Legenda

- Jalan
- Batas Kecamatan
- Sungai / Laut
- Batas Desa Tana Tidung
- Batas Kabupaten

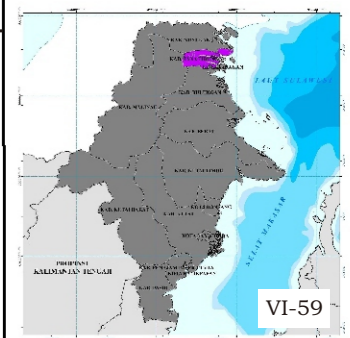
TINGKAT DAYA DUKUNG

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Gambar 6.7

Koordinat Sistem : WGS 1984 UTM Zone 50N
Projection : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Unit : Meter

Sumber Peta :
1. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 450.000
2. Peta Ekoregion Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000
3. Peta Adminitrasi Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000





3. Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Menurut Ekoregion

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Lahan yang memiliki potensi tinggi dalam pengaturan iklim di Kabupaten Tana Tidung berada pada semua ekoregion yaitu Fluvial Kalimantan, Dataran Pantai Kalimantan, Pegunungan struktural, Perbukitan Struktural Kompleks Meratus dan Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam. Lahan yang memiliki potensi sedang dalam pengaturan iklim berada pada ekoregion Fluvial Kalimantan, Pegunungan Struktural Kompleks Meratus dan Perbukitan Struktural Kompleks Meratus. Sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah dalam pengaturan iklim hanya terdapat di ekoregion Fluvial Kalimantan.

Fungsi hutan sebagai pengatur iklim diantaranya adalah menyerap karbondioksida dan partikel kotor yang ada di udara, sehingga kualitas udara dapat terjaga. Selain itu, hamparan tanaman kebun dan tanaman semusim yang luas mampu menetralsir iklim disekitarnya menjadi sejuk. Oksigen dihasilkan dari proses fotosintesis tanaman, semakin rapat dan banyak jumlah vegetasi maka semakin banyak oksigen yang dihasilkan.

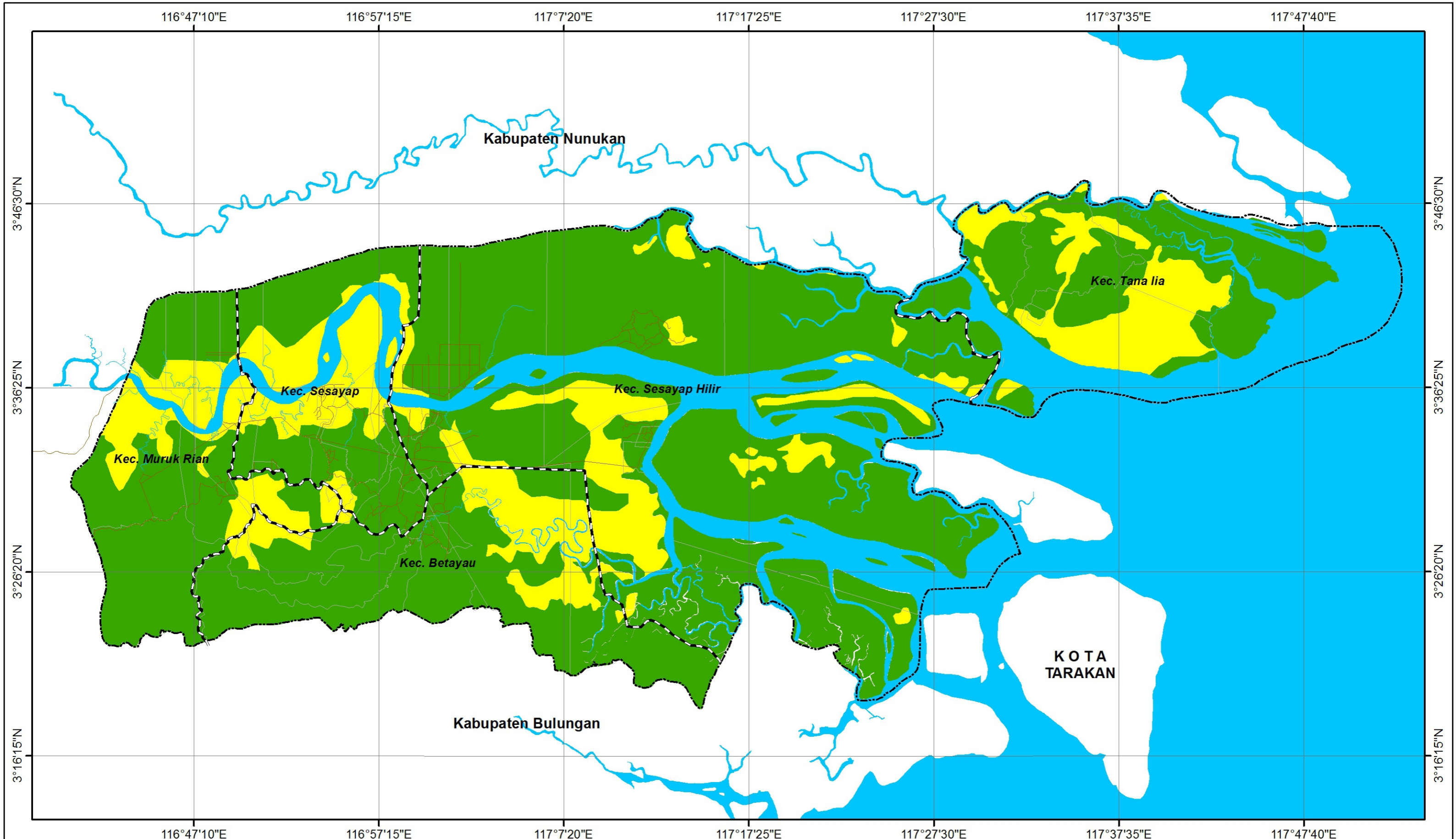


Potensi lahan untuk menyediakan jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :1) Berpotensi tinggi – sangat tinggi seluas 174.840,62 ha (55,56 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 81.511,92 ha, 2) Berpotensi sedang seluas 120.784,40 ha (38,38 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 43.414,10 ha dan 3) Berpotensi sangat rendah – rendah seluas 19.046,83 ha (6,05 %), terluas terdapat di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 8.202,14 ha. Distribusi jasa ekosistem pengaturan iklim dapat dilihat pada Tabel 6.13. dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 6.8.

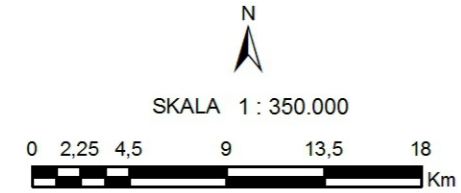
Tabel 6.13. Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Menurut Kecamatan

Ekoregion	Sangat Rendah – Rendah		Sedang		Tinggi - Sangat Tinggi	
	ha	%	ha	%	ha	%
Sesayap	8.202,14	15,86	29.630,28	57,28	13.900,22	26,87
Sesayap Hilir	4.074,99	3,16	43.414,10	33,65	81.511,92	63,19
Muruk Rian	663,49	4,12	8.698,39	53,98	6.751,60	41,90
Betayau	1.741,15	4,05	13.869,63	32,25	27.392,75	63,70
Tana Lia	4.365,06	5,83	25.172,01	33,64	45.284,13	60,52
Jumlah	19.046,83	6,05	120.784,40	38,38	174.840,62	55,56

Sumber : DLHP Kab. Tana Tidung, 2017



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



KEGIATAN :
PETA TINGKAT DAYA DUKUNG DAN DAYA
TAMPUNG LINGKUNGAN JASA
EKOSISTEM PENGATUR IKLIM
EKOREGION KAB. TANA TIDUNG

Legenda

- Jalan
- +— Batas Kecamatan
- Sungai / Laut
- Batas Desa Tana Tidung
- Batas Kabupaten

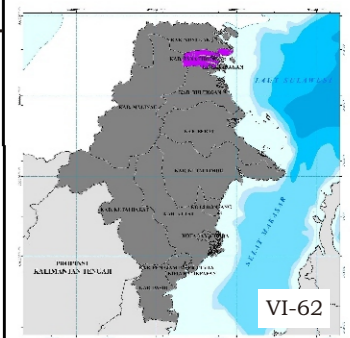
TINGKAT DAYA DUKUNG

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Gambar 6.8

Koordinat Sistem : WGS 1984 UTM Zone 50N
Projection : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Unit : Meter

Sumber Peta :
1. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 450.000
2. Peta Ekoregion Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000
3. Peta Adminitrasi Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000





4. Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Menurut Ekoregion

Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer, yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air.

Ekoregion Kabupaten Tana Tidung yang memberikan manfaat bagi pengaturan tata aliran air dan banjir, dibagi kedalam tiga kategori yaitu lahan berpotensi tinggi, sedang dan rendah. Lahan yang memiliki potensi tinggi dalam pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Tana Tidung berada pada semua ekoregion yaitu Fluvial Kalimantan, Dataran Pantai Kalimantan, Pegunungan structural, Perbukitan Struktural Kompleks Meratus dan Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam. Lahan yang memiliki potensi sedang dalam pengaturan tata aliran air dan banjir berada pada ekoregion Fluvial Kalimantan, Pegunungan Struktural Kompleks Meratus, Perbukitan Struktural Kompleks Meratus dan Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam. Sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah dalam pengaturan tata aliran air dan banjir hanya terdapat di ekoregion Fluvial Kalimantan dan Pegunungan Struktural Kompleks Meratus.

Vegetasi yang rapat dan tajuk yang luas membuat air hujan yang terserap semakin banyak. Air akan ditampung oleh tumbuhan dan dialirkan ke dalam tanah. Air hujan akan diserap langsung oleh tanah tanpa melalui tumbuhan langsung menuju akuifer. Aliran air tanah akan menuju ke wilayah yang lebih rendah



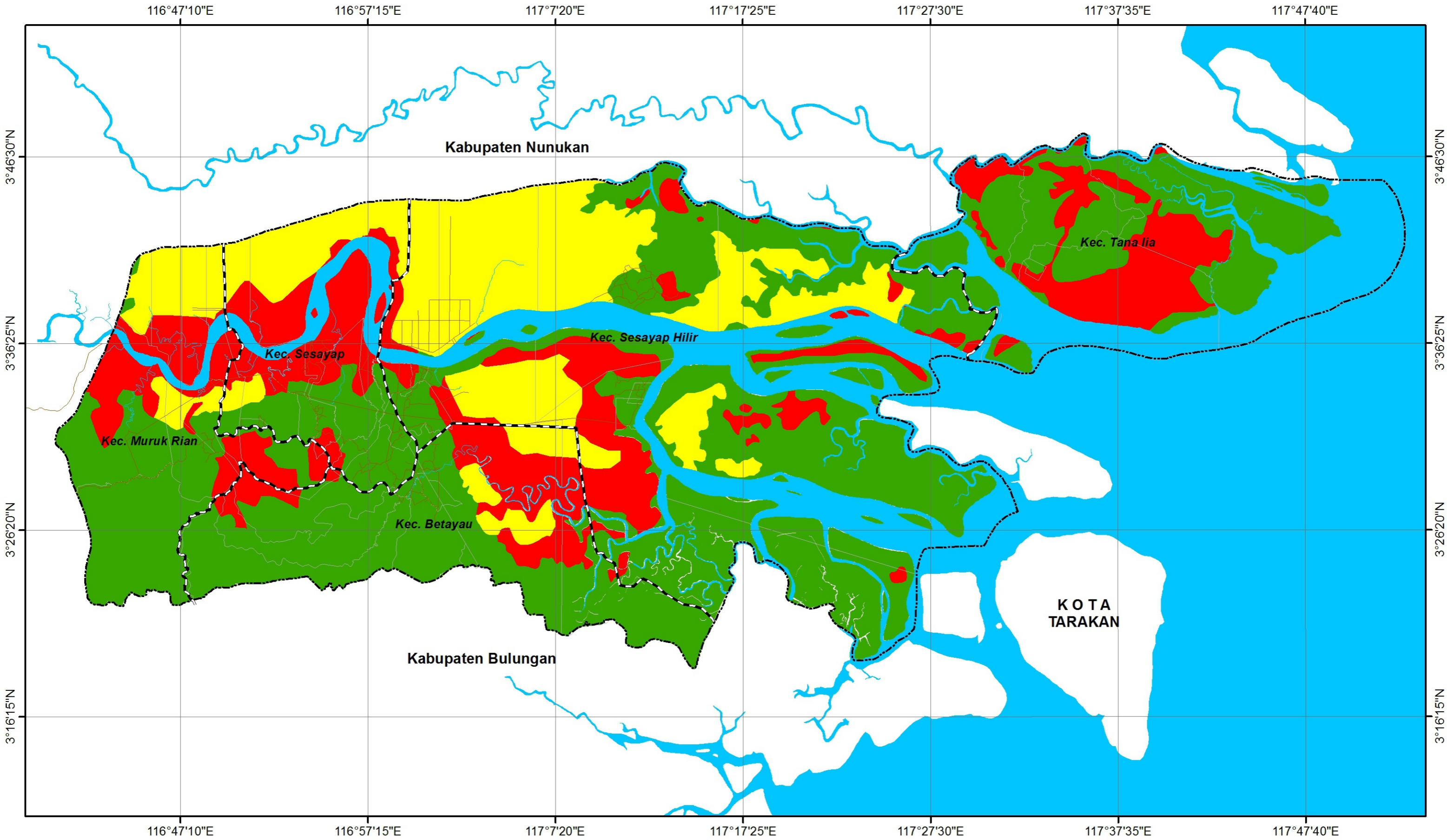
akibat gravitasi. Hal tersebut menyebabkan ketersediaan air di dataran rendah dapat terpenuhi.

Potensi lahan untuk menyediakan jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir di Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :1) Berpotensi tinggi – sangat tinggi seluas 159.959,99 ha (51,35 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 71.427,97 ha, 2) Berpotensi sedang seluas 70.004,05 ha (22,47 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 26.933,56 ha dan 3) Berpotensi sangat rendah – rendah seluas 81.545,16 ha (26,18 %), terluas terdapat di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 29.093,68 ha. Distribusi jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir dapat dilihat pada Tabel 6.14. dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 6.9.

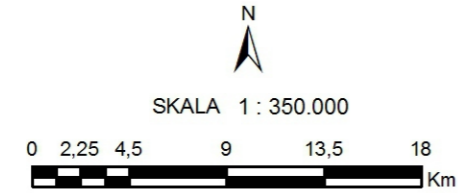
Tabel 6.14. Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Menurut Kecamatan.

Ekoregion	Sangat Rendah – Rendah		Sedang		Tinggi - Sangat Tinggi	
	ha	%	ha	%	Ha	%
Sesayap	21.290,91	47,02	10.664,17	23,55	13.321,17	29,42
Sesayap Hilir	29.093,68	22,83	26.933,56	21,13	71.427,97	56,04
Muruk Rian	5.075,14	37,50	3.519,23	26,01	4.938,05	36,49
Betayau	6.344,03	13,68	14.802,02	31,91	25.243,01	54,42
Tana Lia	19.741,40	25,03	14.085,07	17,86	45.029,79	57,10
Jumlah	81.545,16	26,18	70.004,05	22,47	159.959,99	51,35

Sumber : DLHP Kab. Tana Tidung, 2017



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



KEGIATAN :
PETA TINGKAT DAYA DUKUNG DAN DAYA
TAMPUK LINGKUNGAN JASA EKOSISTEM
PENGATURAN TATA ALIRAN AIR DAN BANJIR
EKOREGION KAB. TANA TIDUNG

Legenda

- Jalan
- Batas Kecamatan
- Sungai / Laut
- Batas Desa Tana Tidung
- Batas Kabupaten

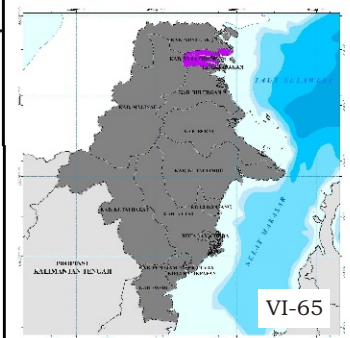
TINGKAT DAYA DUKUNG

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Gambar 6.9

Koordinat Sistem : WGS 1984 UTM Zone 50N
Projection : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Unit : Meter

Sumber Peta :
1. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 450.000
2. Peta Ekoregion Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000
3. Peta Adminitrasi Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000





5. Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam Menurut Ekoregion

Ekosistem mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Adanya berbagai ekosistem dalam setiap satuan administrasi juga memiliki peran dalam Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana. Secara umum di Kabupaten Tana Tidung yang memiliki kawasan hutan luas juga memiliki perannya tersendiri. Kawasan hutan memiliki kemampuan untuk mengurangi kerawanan terhadap bahaya banjir dan longsor. Vegetasi di hutan mampu mengikat tanah dengan kuat, sehingga tidak mudah tererosi oleh air hujan. Vegetasi juga mengurangi jumlah air hujan yang langsung jatuh ke dalam tanah. Dua fungsi tersebut akan mengurangi bahaya longsor di pegunungan dan perbukitan. Sedimentasi juga akan berkurang karena tanah tidak mudah tererosi. Hal ini akan mengurangi endapan sedimen di dataran rendah.

Potensi lahan untuk menyediakan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam di Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :1) Berpotensi tinggi – sangat tinggi seluas 191.254,60 ha (60,83 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 84.467,62 ha, 2) Berpotensi sedang seluas 54.540,92 ha (17,35 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 23.838,95 ha dan 3) Berpotensi sangat rendah – rendah seluas 68.623,42 ha (21.83 %), terluas terdapat di Kecamatan Sesayap yaitu 24.385,38 ha.

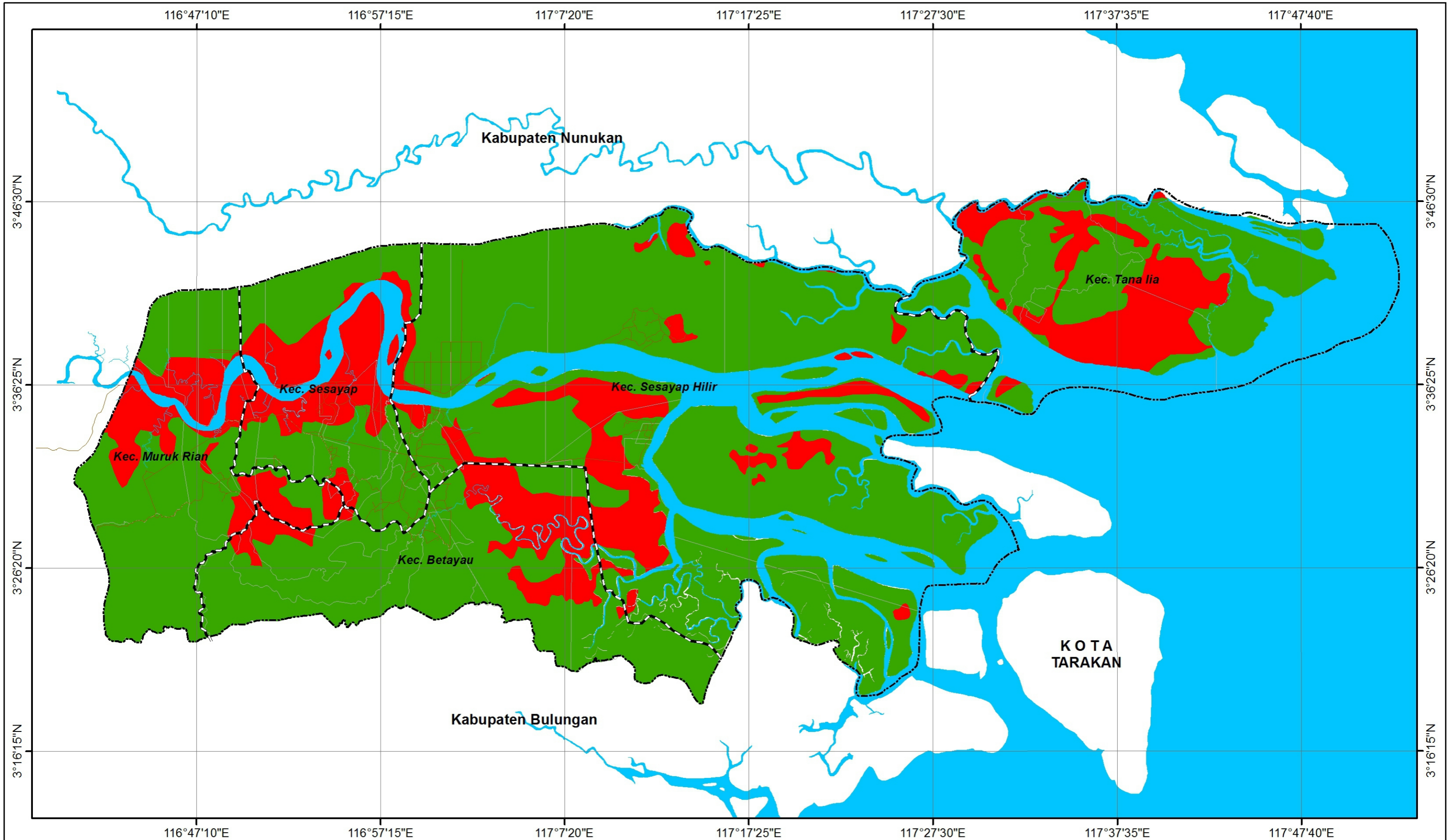


Distribusi jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dapat dilihat pada Tabel 6.15. dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 6.10.

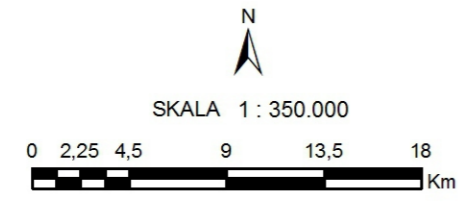
Tabel 6.15. Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam Menurut Kecamatan

Ekoregion	Sangat Rendah – Rendah		Sedang		Tinggi - Sangat Tinggi	
	ha	%	ha	%	ha	%
Sesayap	24.385,38	48,06	10.443,45	20,58	15.914,75	31,36
Sesayap Hilir	18.495,37	14,59	23.838,95	18,80	84.467,62	66,61
Muruk Rian	6.077,45	39,90	3.284,43	21,56	5.871,10	38,54
Betayau	9.069,40	19,28	2.833,36	6,02	35.131,47	74,69
Tana Lia	10.595,82	14,20	14.140,73	18,95	49.869,67	66,84
Jumlah	68.623,42	21,83	54.540,92	17,35	191.254,60	60,83

Sumber : DLHP Kab. Tana Tidung, 2017



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



KEGIATAN :
PETA TINGKAT DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
LINGKUNGAN JASA EKOSISTEM PENGATURAN
PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN DARI BENCANA
EKOREGION KAB. TANA TIDUNG

Legenda

- Jalan
- Batas Kecamatan
- Sungai / Laut
- Batas Desa Tana Tidung
- Batas Kabupaten

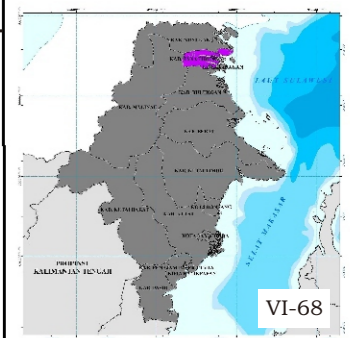
TINGKAT DAYA DUKUNG

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Gambar 6.10

Koordinat Sistem : WGS 1984 UTM Zone 50N
Projection : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Unit : Meter

Sumber Peta :
1. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 450.000
2. Peta Ekoregion Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000
3. Peta Adminitrasi Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000





6. Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Menurut Ekoregion

Suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berintegrasi, sehingga membentuk suatu kesatuan (Asdak, 1995). Apabila salah satu komponen terganggu, maka hal ini akan mempengaruhi komponen lain yang ada pada ekosistem tersebut. Pencemar yang masuk ke suatu ekosistem perairan dapat dibersihkan secara alami oleh ekosistem itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh organisme dan tanaman air yang hidup dan berkembang di ekosistem tersebut.

Namun, kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas ekosistem perairan atau badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

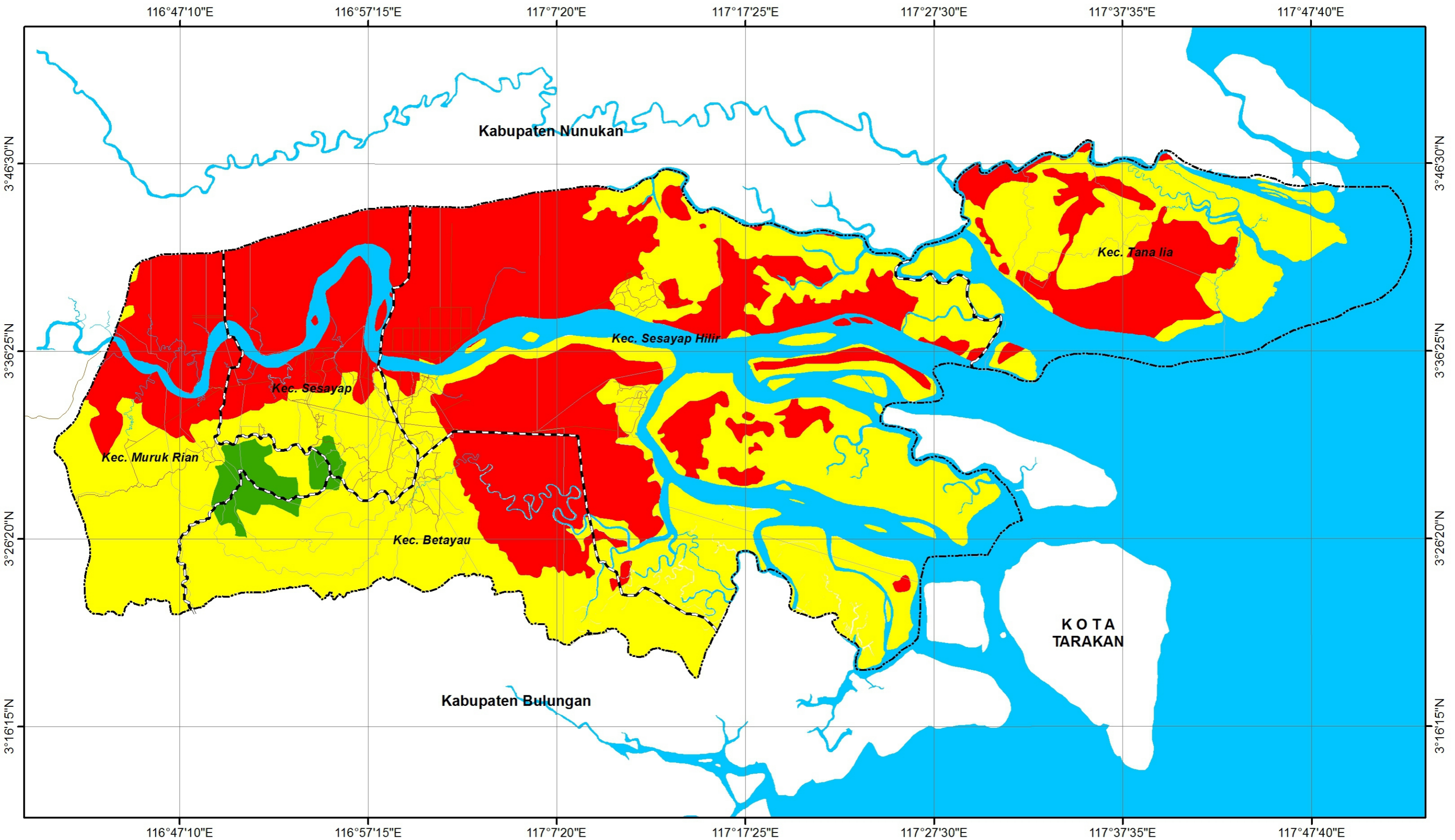
Potensi lahan untuk menyediakan jasa ekosistem pengaturan pemurnian air di Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :1) Berpotensi tinggi – sangat tinggi seluas 56.849,57 ha (19,38 %), terluas di Kecamatan Tana Lia yaitu 27.412,02 ha, 2) Berpotensi sedang seluas 86.740,27ha (29,57 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 48.785,42 ha dan 3) Berpotensi sangat rendah – rendah seluas 149.700,00 ha (51,04 %), terluas terdapat di Kecamatan Sesayap yaitu 63.082,26 ha. Distribusi jasa ekosistem pengaturan pemurnian air dapat dilihat pada Tabel 6.16. dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 6.11.



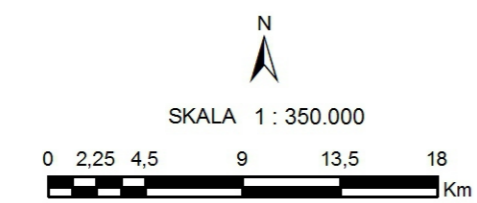
Tabel 6.16. Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Menurut Kecamatan.

Ekoregion	Sangat Rendah - Rendah		Sedang		Tinggi - Sangat Tinggi	
	ha	%	ha	%	ha	%
Sesayap	28.772,13	73,03	6.324,71	16,05	4.300,74	10,92
Sesayap Hilir	63.082,26	51,54	48.785,42	39,86	10.524,96	8,60
Muruk Rian	9.946,03	70,83	722,49	5,15	3.372,77	24,02
Betayau	17.624,09	38,63	16.765,46	36,74	11.239,08	24,63
Tana Lia	30.275,49	42,15	14.142,19	19,69	27.412,02	38,16
Jumlah	149.700,00	51,04	86.740,27	29,57	56.849,57	19,38

Sumber : DLHP Kab. Tana Tidung, 2017



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



KEGIATAN :
PETA TINGKAT DAYA DUKUNG DAN DAYA
TAMPUK LINGKUNGAN JASA
EKOSISTEM PENGATURAN PEMURNIAN AIR
EKOREGION KAB. TANA TIDUNG

Legenda

- Jalan
- +— Batas Kecamatan
- Sungai / Laut
- Batas Desa Tana Tidung
- Batas Kabupaten

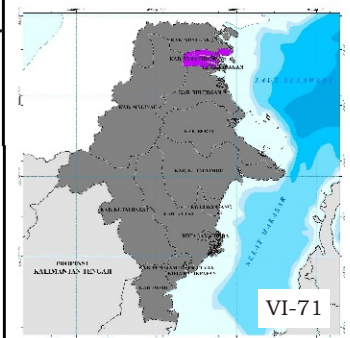
TINGKAT DAYA DUKUNG

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Gambar 6.11

Koordinat Sistem : WGS 1984 UTM Zone 50N
Projection : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Unit : Meter

Sumber Peta :
1. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 450.000
2. Peta Ekoregion Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000
3. Peta Adminitrasi Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000





7. Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Menurut Ekoregion

Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralkan, mengurai, dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, dan ganggang.

Ekosistem sendiri tidaklah bersifat statis, melainkan selalu mengalami perubahan. Keseimbangan lingkungan dapat berubah melalui proses alami maupun karena campur tangan manusia. Pencemaran lingkungan adalah salah satu faktor yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh bahan pencemar (limbah) yang berasal dari berbagai sumber. Limbah adalah sumber daya alam yang telah kehilangan fungsinya. Keberadaan limbah di lingkungan harus ditangani secara tepat karena selain berpotensi menjadi polutan, keberadaan limbah dapat mengganggu keindahan, kenyamanan dan kesehatan. Karena keberadaannya yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem itulah, limbah harus ditangani secara bijak seperti dengan cara mengurangi penggunaan barang tertentu (*reduce*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Alam sendiri mempunyai kemampuan untuk mengolah limbah agar tidak memberikan dampak. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh jenis limbah/sampah dan kondisi lingkungan.

Potensi lahan untuk menyediakan jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah di Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :1) Berpotensi tinggi – sangat tinggi seluas 208.345,50 ha (63,27 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 91.428,16 ha, 2) Berpotensi sedang seluas 56.924,02 (17,29 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 20.620,60 ha dan 3)

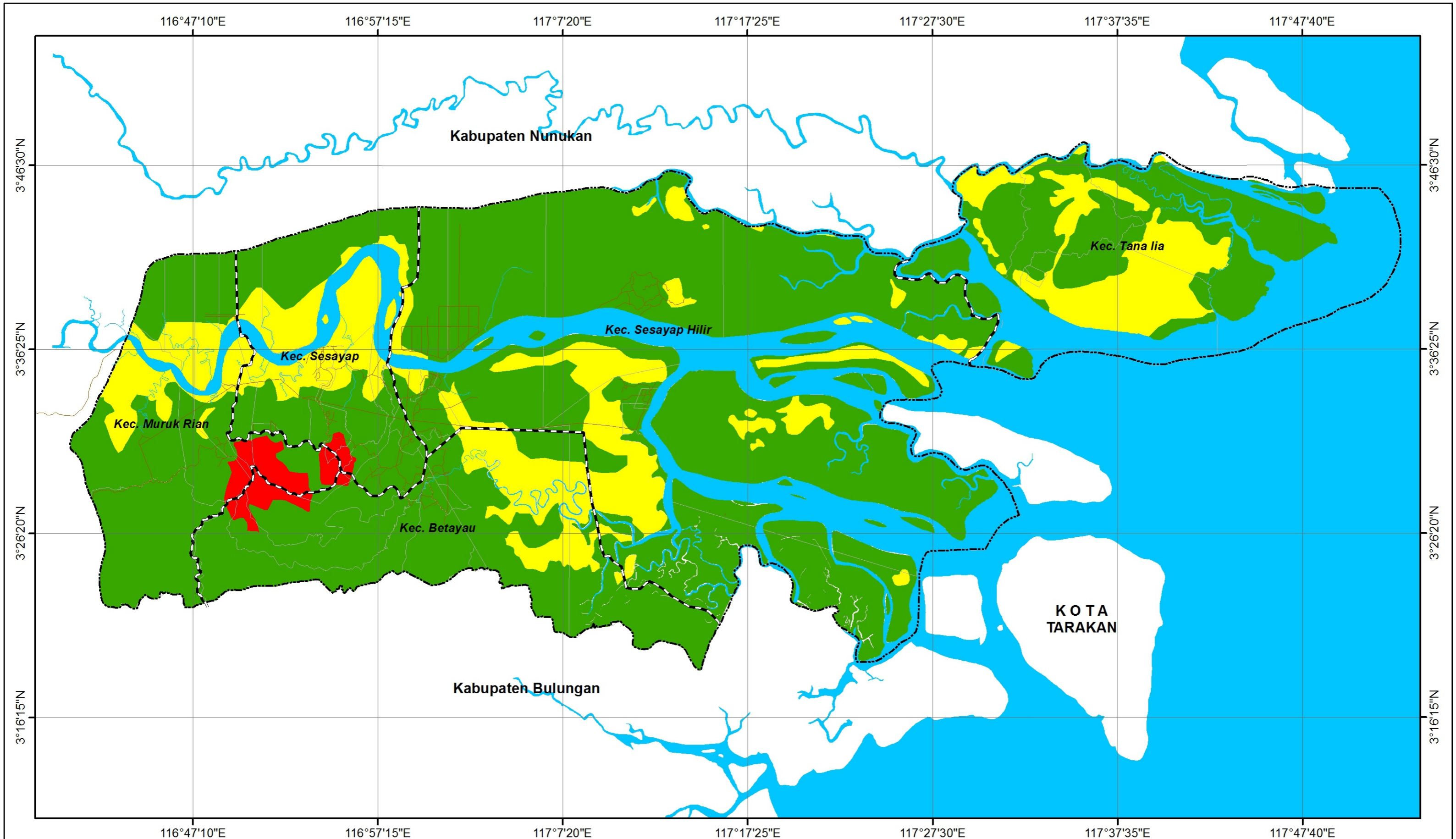


Berpotensi sangat rendah – rendah seluas 64.022,42 ha (19,44 %), terluas terdapat di Kecamatan Sesayap yaitu 23.064,30 ha. Distribusi jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah dapat dilihat pada Tabel 6.17. dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 6.12.

Tabel 6.17. Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Menurut Kecamatan

Ekoregion	Sangat Rendah - Rendah		Sedang		Tinggi - Sangat Tinggi	
	ha	%	ha	%	ha	%
Sesayap	23.064,30	44,10	11.158,60	21,34	18.071,40	34,56
Sesayap Hilir	20.219,90	15,29	20.620,60	15,59	91.428,16	69,12
Muruk Rian	4.379,64	27,18	6.080,71	37,74	5.653,13	35,08
Betayau	6.359,45	12,89	5.401,22	10,95	37.578,46	76,16
Tana Lia	9.999,13	12,61	13.662,87	17,23	55.614,36	70,15
Jumlah	64.022,42	19,44	56.924,02	17,29	208.345,50	63,27

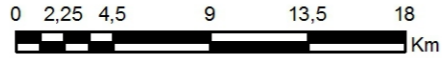
Sumber : DLHP Kab. Tana Tidung, 2017



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



SKALA 1 : 350.000



KEGIATAN :
PETA TINGKAT DAYA DUKUNG DAN DAYA
TAMPUNG LINGKUNGAN JASA EKOSISTEM
PENGATURAN PENGOLAHAN DAN PENGURAIAN
LIMBAH EKOREGION KAB. TANA TIDUNG

Legenda

- Jalan
- Batas Kecamatan
- Sungai / Laut
- Batas Desa Tana Tidung
- Batas Kabupaten

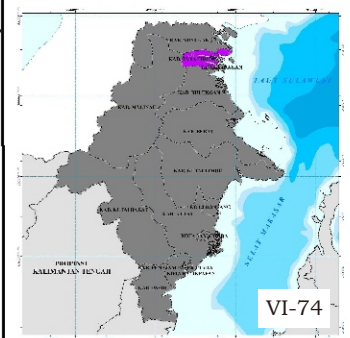
TINGKAT DAYA DUKUNG

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Gambar 6.12

Koordinat Sistem : WGS 1984 UTM Zone 50N
Projection : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Unit : Meter

Sumber Peta :
1. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 450.000
2. Peta Ekoregion Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000
3. Peta Administrasi Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000





8. Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Menurut Ekoregion

Adanya tutupan lahan berupa hutan yang ada di setiap ekoregion membuat kualitas udara di Kabupaten Tana Tidung baik (rendah polutan) dengan syarat keberadaan hutan harus dijaga dengan baik.

Udara bersih merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat bertahan hidup. Ketersediaan vegetasi menjadi penting untuk penyediaan udara bersih karena sebagai penyaring alami. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui potensi lahan dalam pengaturan kualitas udara pada masing-masing Kecamatan yang terletak di Kabupaten Tana Tidung. Oksigen yang dihasilkan oleh hutan menetralkan kualitas udara dan partikel kotor diserap oleh tumbuhan. Hal ini menyebabkan udara di kawasan hutan relatif sejuk dan bersih.

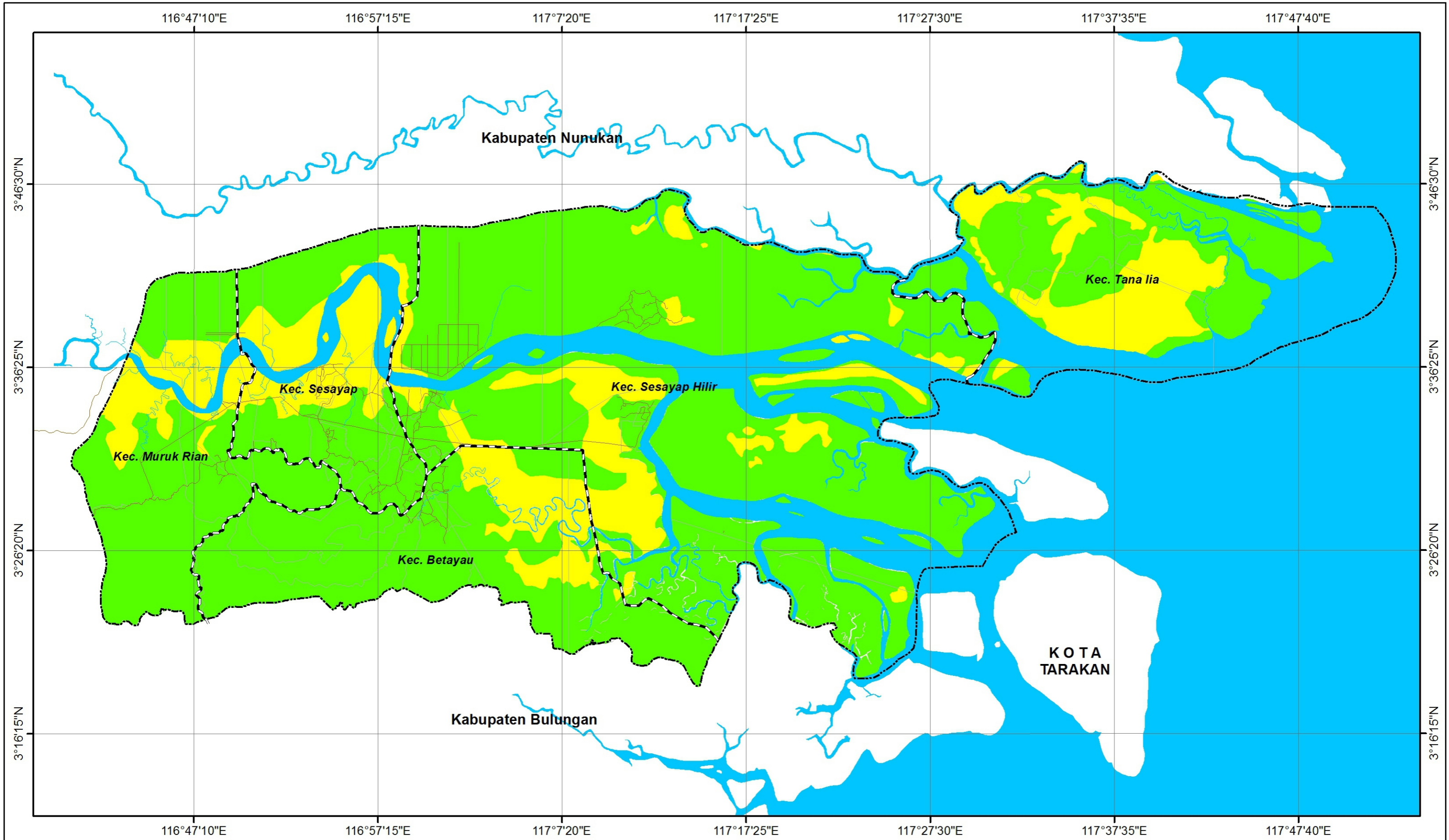
Potensi lahan untuk menyediakan jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara di Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :1) Berpotensi tinggi – sangat tinggi seluas 234.379,04 ha (69,81 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 102.374,16 ha, 2) Berpotensi sedang seluas 85.425,10 ha (25,44 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 26.951,85 ha dan 3) Berpotensi sangat rendah – rendah seluas 15.928 ha (4,74 %), terluas terdapat di Kecamatan Sesayap yaitu 7.327,45 ha. Distribusi jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara dapat dilihat pada Tabel 6.18. dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 6.13.



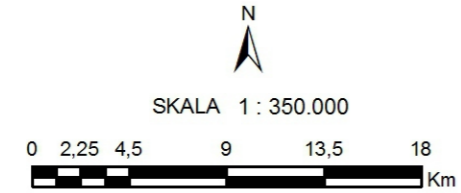
Tabel 6.18. Luas dan Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Menurut Kecamatan

Ekoregion	Sangat Rendah - Rendah		Sedang		Tinggi - Sangat Tinggi	
	ha	%	ha	%	Ha	%
Sesayap	7.327,45	14,01	24.692,89	47,22	20.273,96	38,77
Sesayap Hilir	2.942,70	2,22	26.951,85	20,38	102.374,16	77,40
Muruk Rian	452,05	2,00	14.231,49	63,10	7.870,83	34,90
Betayau	1.260,35	2,55	9.021,95	18,29	39.056,81	79,16
Tana Lia	3.946,16	4,98	10.526,92	13,28	64.803,28	81,74
Jumlah	15.928,71	4,74	85.425,10	25,44	234.379,04	69,81

Sumber : DLHP Kab. Tana Tidung, 2017



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



KEGIATAN :
PETA TINGKAT DAYA DUKUNG DAN DAYA
TAMPUNG LINGKUNGAN JASA EKOSISTEM
PENGATUR PEMELIHARAAN KUALITAS UDARA
EKOREGION KAB. TANA TIDUNG

Legenda

- Jalan
- +— Batas Kecamatan
- Sungai / Laut
- Batas Desa Tana Tidung
- Batas Kabupaten

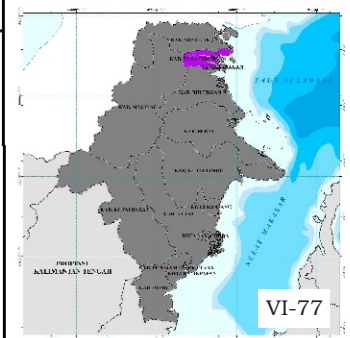
TINGKAT DAYA DUKUNG

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Gambar 6.13

Koordinat Sistem : WGS 1984 UTM Zone 50N
Projection : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Unit : Meter

Sumber Peta :
1. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 450.000
2. Peta Ekoregion Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000
3. Peta Adminitrasi Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000





9. Distribusi Jasa Ekosistem Budaya (Cultural) Rekreasi dan Ecotourism Menurut Ekoregion

Bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat pada suatu ekosistem menjadi daya tarik wisata dan dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Variasi bentang alam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan ekotourism.

Ekoregion yang memiliki potensi tinggi sebagai jasa budaya rekreasi dan ekotourism adalah Dataran Pantai Kalimantan, Pegunungan Struktural Kompleks Meratus dan Perbukitan Kompleks Meratus. Luas lahan ekoregion Dataran Pantai Kalimantan yang berpotensi tinggi untuk rekreasi dan ekotourism sebesar 65.612,29 ha. Tutupan lahan yang dominan pada ekoregion ini berupa Perikanan tambak dan Hutan Mangrove. Luas lahan ekoregion Pegunungan Struktural Kompleks Meratus sebesar 6.295,52 ha dengan tutupan lahan yang mendominasi adalah Hutan Lindung. Pada ekoregion Perbukitan Kompleks Meratus terdapat tutupan lahan berupa Hutan Tanaman Produksi, Hutan Wisata, Perkebunan, Pertanian Lahan Basah dan Pertanian Lahan Kering. Pada tutupan lahan yang berupa hutan, didalamnya terdapat keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga cocok untuk dimanfaatkan sebagai daerah wisata. Ekoregion yang memiliki potensi rendah sebagai tempat rekreasi dan ekotourism adalah Fluvial Kalimantan.

Potensi lahan untuk menyediakan jasa ekosistem budaya, rekreasi dan ecotourism di Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :1) Berpotensi tinggi – sangat tinggi seluas 178.990,89 ha (54,36 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 71.615,54 ha, 2) Berpotensi sedang seluas 63.389,42 ha (19,25 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 31.407,02 ha dan 3) Berpotensi sangat rendah – rendah seluas 86.911,84 ha (26,89 %), terluas terdapat di Kecamatan Sesayap yaitu 28.246,10 ha. Distribusi jasa

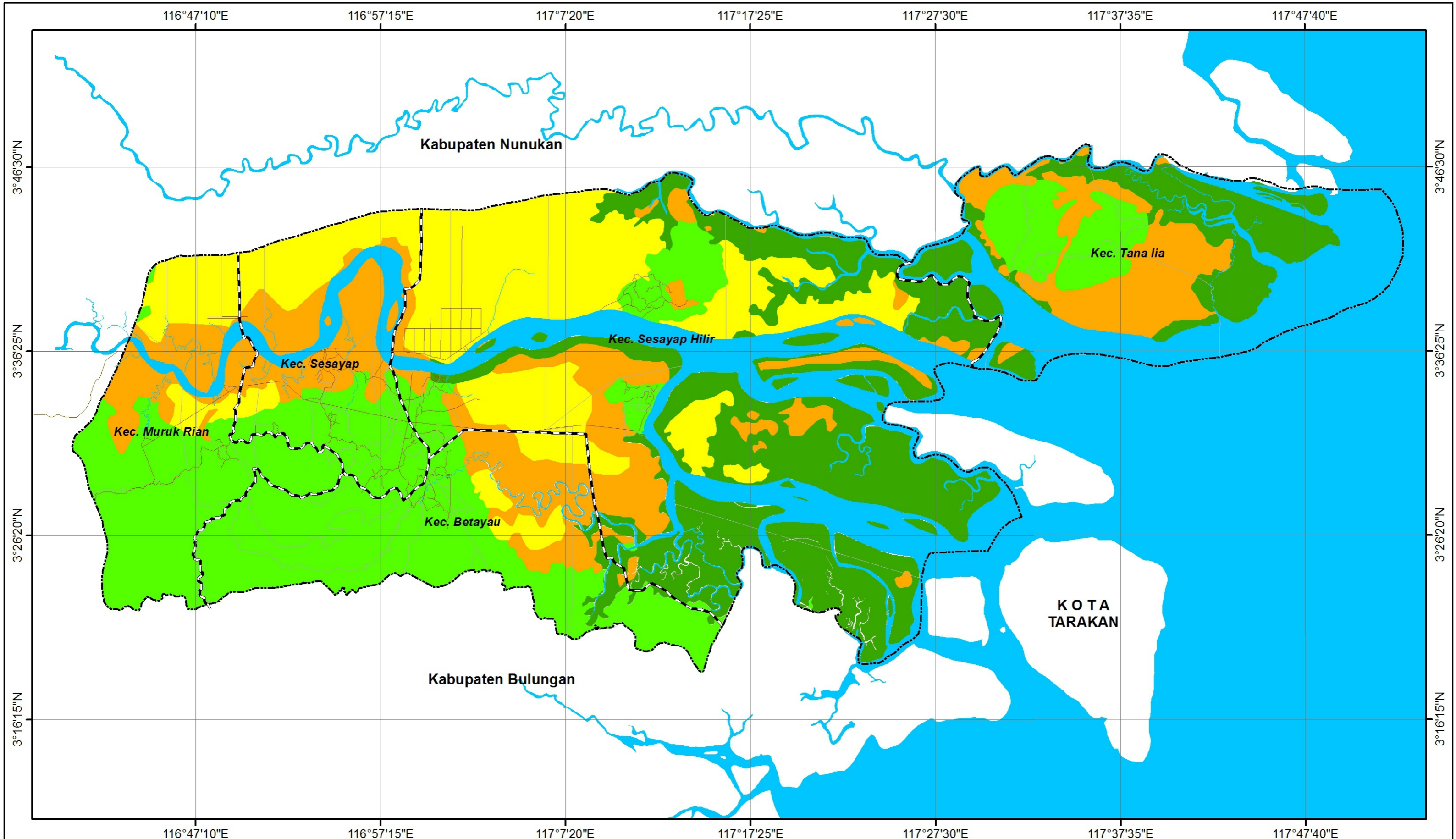


ekosistem budaya, rekreasi dan ecotourism dapat dilihat pada Tabel 6.19. dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 6.14.

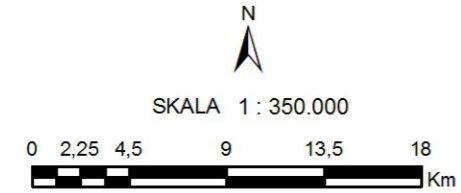
Tabel 6.19. Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ecotourism Menurut Kecamatan

Ekoregion	Sangat Rendah - Rendah		Sedang		Tinggi - Sangat Tinggi	
	ha	%	ha	%	ha	%
Sesayap	24.538,06	46,92	10.967,26	20,97	16.788,98	32,10
Sesayap Hilir	28.246,10	21,36	32.407,02	24,50	71.615,54	54,14
Muruk Rian	7.582,56	47,06	2.986,86	18,54	5.544,14	34,41
Betayau	8.515,99	17,26	6.388,37	12,95	34.434,77	69,79
Tana Lia	18.029,13	22,74	10.639,91	13,42	50.607,46	63,84
Jumlah	86.911,84	26,39	63.389,42	19,25	178.990,89	54,36

Sumber : DLHP Kab. Tana Tidung, 2017



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



KEGIATAN :
PETA TINGKAT DAYA DUKUNG DAN DAYA
TAMPUK LINGKUNGAN JASA EKOSISTEM
REKREASI DAN EKOTOURISM
EKOREGION KAB. TANA TIDUNG

Legenda

- Jalan
- +— Batas Kecamatan
- Sungai / Laut
- Batas Desa Tana Tidung
- Batas Kabupaten

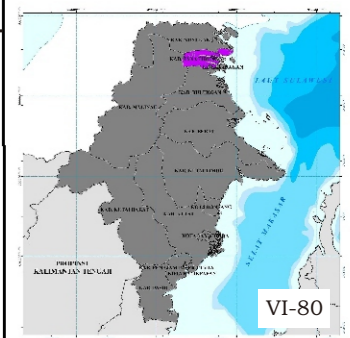
TINGKAT DAYA DUKUNG

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Gambar 6.14

Koordinat Sistem : WGS 1984 UTM Zone 50N
Projection : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Unit : Meter

Sumber Peta :
1. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 450.000
2. Peta Ekoregion Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000
3. Peta Adminitrasi Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000





10. Distribusi Jasa Ekosistem Pendukung (*Supporting*) Produksi primer Menurut Ekoregion

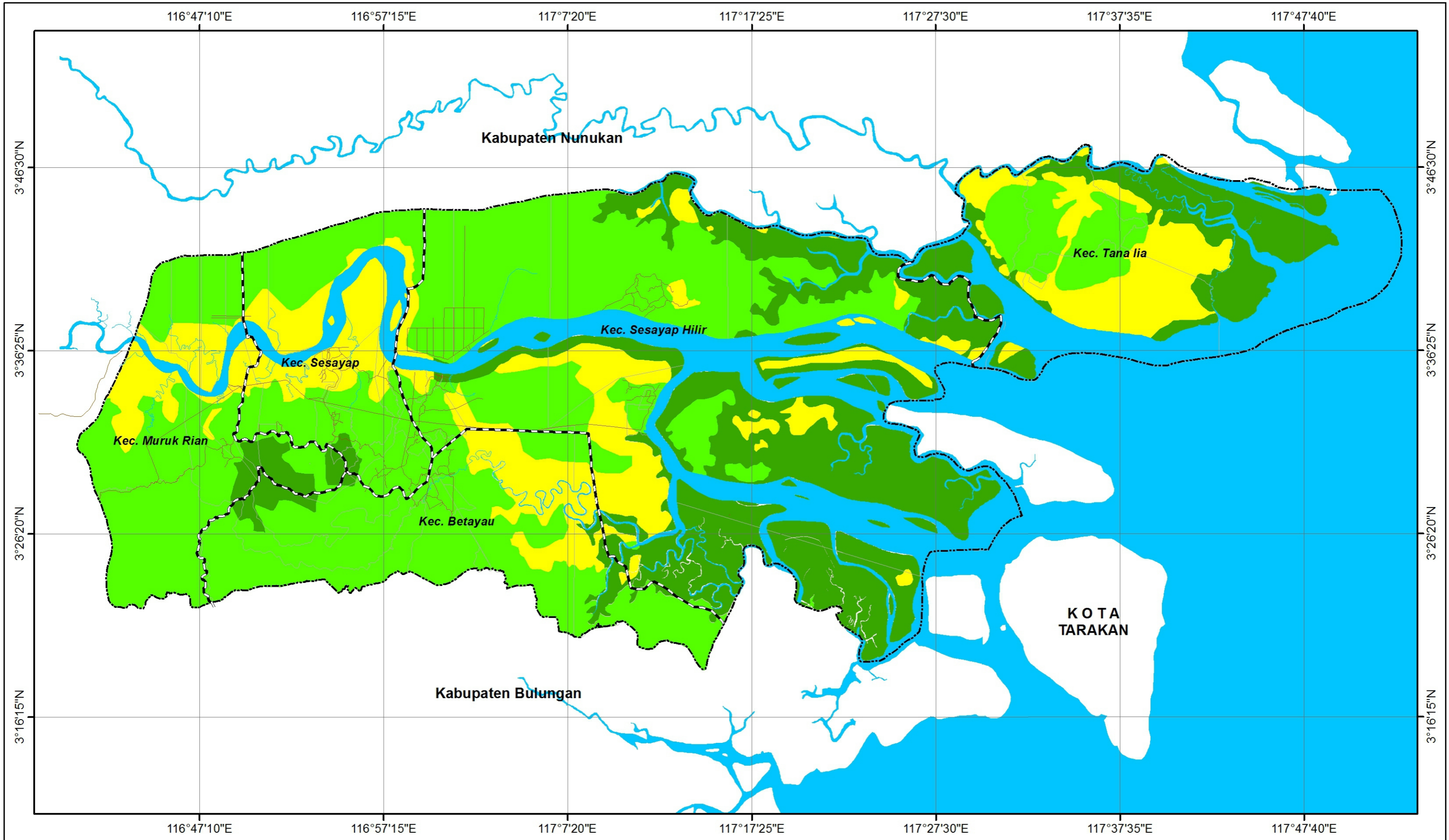
Produksi primer suatu ekosistem adalah produksi senyawa organik dari karbondioksida di udara dan air yang didominasi oleh proses fotosintesis. Hampir semua makhluk hidup di bumi secara langsung atau tidak langsung bergantung pada produksi primer. Organisme yang melakukan produksi primer disebut autotrof, dan sebagian besar berupa tumbuhan. Selama proses produksi senyawa organik juga dihasilkan oksigen, yang diperlukan makhluk hidup untuk beraktivitas. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan.

Potensi lahan untuk menyediakan jasa ekosistem pendukung produksi primer di Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :1) Berpotensi tinggi – sangat tinggi seluas 184.573,09 ha (56,05 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 80.154,16 ha, 2) Berpotensi sedang seluas 74.712,38 ha (22,69 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 28.681,87 ha dan 3) Berpotensi sangat rendah – rendah seluas 70.005,55 ha (21,26 %), terluas terdapat di Kecamatan Sesayap yaitu 23.432,65 ha. Distribusi jasa ekosistem pendukung produksi primer dapat dilihat pada Tabel 6.20. dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 6.15.

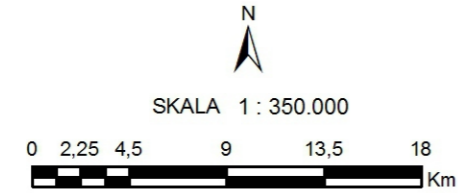
Tabel 6.20. Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer Menurut Kecamatan.

Ekoregion	Sangat Rendah - Rendah		Sedang		Tinggi - Sangat Tinggi	
	ha	%	ha	%	ha	%
Sesayap	17.816,44	34,07	17.461,60	33,39	17.016,27	32,54
Sesayap Hilir	23.432,65	17,72	28.681,87	21,68	80.154,16	60,60
Muruk Rian	5.127,40	31,82	5.029,04	31,21	5.957,04	36,97
Betayau	6.021,00	12,20	8.604,17	17,44	34.713,99	70,36
Tana Lia	17.609,06	22,21	14.935,70	18,84	46.731,63	58,95
Jumlah	70.006,55	21,26	74.712,38	22,69	184.573,09	56,05

Sumber : DLHP Kab. Tana Tidung, 2017



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



KEGIATAN :
PETA TINGKAT DAYA DUKUNG DAN DAYA
TAMPUK LINGKUNGAN JASA EKOSISTEM
PENDUKUNG PRODUKSI PRIMER
EKOREGION KAB. TANA TIDUNG

Legenda

- Jalan
- +— Batas Kecamatan
- Sungai / Laut
- Batas Desa Tana Tidung
- Batas Kabupaten

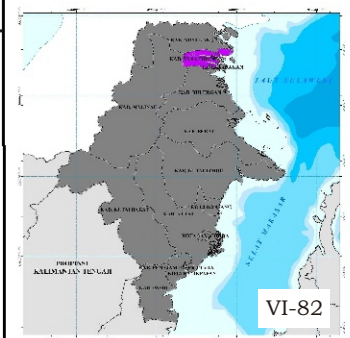
TINGKAT DAYA DUKUNG

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Gambar 6.15

Koordinat Sistem : WGS 1984 UTM Zone 50N
Projection : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Unit : Meter

Sumber Peta :
1. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 450.000
2. Peta Ekoregion Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000
3. Peta Adminitrasi Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000





11. Distribusi Jasa Ekosistem Pendukung (*Supporting*) Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Menurut Ekoregion.

Biodiversitas (keanekaragaman hayati) merupakan dasar munculnya beragam jasa ekosistem yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk serta pesatnya pembangunan dan kegiatan industri, menyebabkan terdegradasinya bahkan lenyapnya suatu ekosistem. Biodiversitas harus dikonservasi untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan biodiversitas tersebut untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Mengingat, kebutuhan akan sumberdaya alam hayati sangat tergantung pada kondisi suatu wilayah, maka dalam pelaksanaan pengelolaannya diperlukan pemahaman terhadap nilai keanekaragaman hayati sebagai sumberdaya alam hayati sesuai dengan wilayahnya. Nilai keanekaragaman hayati mencakup tingkat keragaman dan kelimpahan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati yang ada di dalam wilayah kelola suatu unit pengelolaan atau unit usaha. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

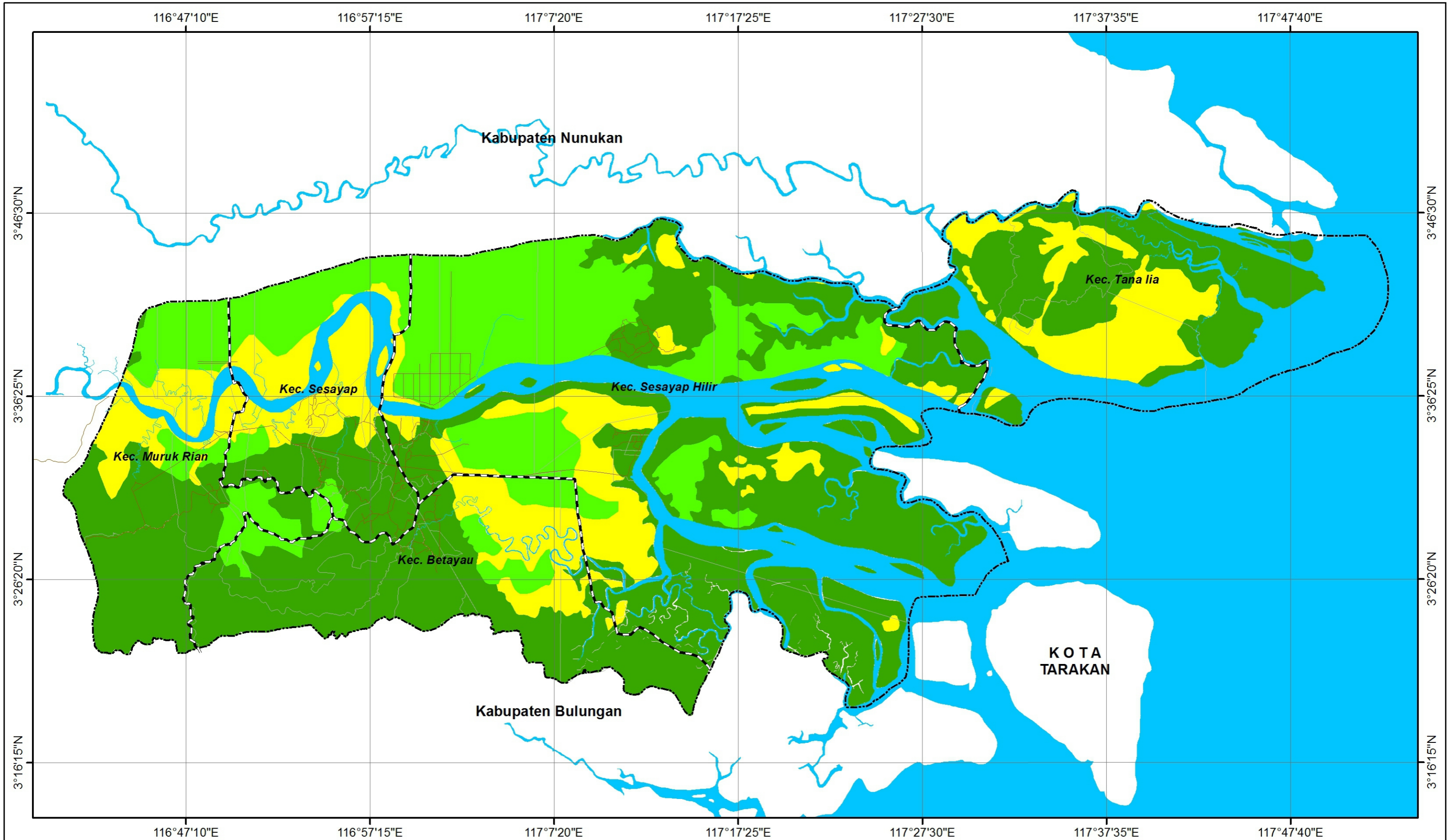
Potensi lahan untuk menyediakan jasa ekosistem pendukung biodiversitas di Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :1) Berpotensi tinggi – sangat tinggi seluas 182.011,95 ha (55,27 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 81.173,07 ha, 2) Berpotensi sedang seluas 70.224,54 ha (21,33 %), terluas di Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 28.328,87 ha dan 3) Berpotensi sangat rendah – rendah seluas 77.005,54 ha (23,40 %), terluas terdapat di Kecamatan Sesayap yaitu 23.300,20 ha. Distribusi jasa ekosistem pendukung biodiversitas dapat dilihat pada Tabel 6.21. dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 6.16.



Tabel 6.21. Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Menurut Kecamatan

Ekoregion	Sangat Rendah - Rendah		Sedang		Tinggi - Sangat Tinggi	
	Ha	%	ha	%	ha	%
Sesayap	24.300,20	46,47	12.029,95	23,00	15.964,16	30,53
Sesayap Hilir	22.766,85	17,21	28.328,87	21,42	81.173,07	61,37
Muruk Rian	6.957,95	43,18	3.363,09	20,87	5.792,44	35,95
Betayau	9.520,19	19,30	5.286,42	10,71	34.532,49	69,99
Tana Lia	13.510,35	17,04	21.216,21	26,76	44.549,79	56,20
Jumlah	77.055,54	23,40	70.224,54	21,33	182.011,95	55,27

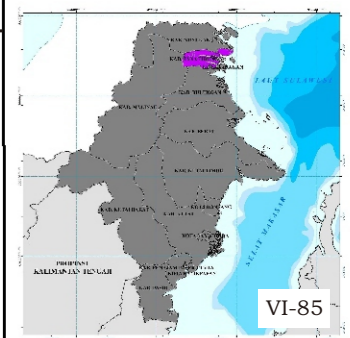
Sumber : DLHP Kab. Tana Tidung, 2017



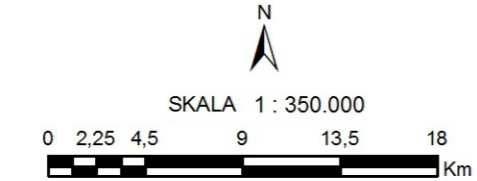
Gambar 6.16

Koordinat Sistem : WGS 1984 UTM Zone 50N
 Projection : Transverse Mercator
 Datum : WGS 1984
 Unit : Meter

Sumber Peta :
 1. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 450.000
 2. Peta Ekoregion Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000
 3. Peta Adminitrasi Kabupaten Tana Tidung Skala 1 : 350.000



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 DAN PERHUBUNGAN
 KABUPATEN TANA TIDUNG
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



KEGIATAN :
 PETA TINGKAT DAYA DUKUNG DAN DAYA
 TAMPUNG LINGKUNGAN JASA
 EKOSISTEM PENDUKUNG BIODIVERSITAS
 EKOREGION KAB. TANA TIDUNG

Legenda

- Jalan
- Batas Kecamatan
- Sungai / Laut
- Batas Desa Tana Tidung
- Batas Kabupaten

TINGKAT DAYA DUKUNG

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah



c. Dampak KRP terhadap Resiko Bencana Lingkungan Hidup

Bencana alam atau musibah yang menimpa di suatu daerah dapat saja datang secara tiba-tiba sehingga masyarakat yang berada di lokasi musibah bencana tidak sempat melakukan antisipasi pencegahan terhadap bencana tersebut. Secara geografis, wilayah Indonesia yang tentunya juga Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Bencana alam gempa bumi misalnya, wilayah Indonesia terletak didalam jalur lingkaran bencana gempa bumi dimana jalur sepanjang 1.200 km dari Sabang sampai Merauke merupakan batas-batas tiga lempengan besar dunia yaitu lempengan Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik yang tentunya jika terjadi bencana gempa bumi, maka akan dirasakan sampai ke Kabupaten Tana Tidung. Hal ini pernah terjadi di lempengan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 dengan besaran gempa mencapai 6,1 skala Richter.

Dengan demikian, berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, Kabupaten Tana Tidung termasuk daerah yang berpotensi rawan bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Tana Tidung antara lain bencana kebakaran permukiman, hutan dan lahan khususnya lahan gambut; bencana longsor; dan banjir disamping bencana lainnya.

Berdasarkan peta potensi bencana Kabupaten Tana Tidung terdapat kawasan potensi bencana tanah longsor dan banjir, diantaranya:

- 1) Kawasan potensi bencana longsor, meliputi kawasan yang berada di sekitar Kecamatan Sesayap dan Kawasan Gunung Rian dan sekitarnya.
- 2) Kawasan potensi banjir, meliputi Desa Sengkong, Bandan Bikis, Bebatu dan Menjelutung.

Adapun bencana kebakaran permukiman, hutan dan lahan terjadi hampir diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tana

Tidung. Pada tahun 2019, bencana kebakaran terjadi sebanyak enam kali kejadian pada areal seluas 53,5 ha ,masing-masing Kecamatan Sesayap seluar 12 ha, Kecamatan Sesayap Hilir seluas 21,5 ha, Kecamatan Betayau seluas 2 ha, Kecamatan Tana Lia seluas 5 ha dan kecamatan Muruk Rian seluas 13 ha. Adapun rincian kejadian bencana alam tahun 2019 di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 6.22.

Tabel 6.22. Bencana Alam di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019

No	Kecamatan/Desa	Jenis Bencana	Kerusakan	Jumlah Korban	Perkiraan Kerugian (Rp)
1	Sesayap a. Tideng Pale b. Tideng Pale Timur c. Sedulun d. Limbu Sedulun e. Sebidai f. Sebawang	Kebakaran Hutan dan Lahan; Longsor; Jembatan Amblas; Kebakaran Pemukiman; Tenggelam	12 ha; 1 Unit Rumah; - 8x16 m	- 1 Orang - -	-
2	Sesayap Hilir a. Sesayap Selor b. Sepala Dalung c. Bebatu d. Sengkong e. Seludau f. Bandan Bikis	Speedboat Bocor; Kebakaran Hutan dan Lahan; Tenggelam; Longsor	1 Unit Speedboat; 11,5 ha; - 10 ha	17 orang; -; 1 Orang -	-
3	Betayau a. Bebakung b. Mendupo c. Bebakung	Kebakaran Pemukiman; Kebakaran Lahan;	2 Unit Rumah; 2 ha	-	-
4	Tana Lia a. Tanah Merah	Kebakaran Hutan dan Lahan	5 ha	-	-
5	Muruk Rian a. Rian b. Seputuk c. Kapuak	Kebakaran Hutan dan Lahan	13 ha	-	-

Sumber : BPBD Kabupaten Tana Tidung, 2021

Bencana alam yang terjadi pada tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2019. Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Tana Tidung, hanya tiga jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung sepanjang tahun 2020 yaitu bencana kebakaran dipemukiman penduduk terjadi diempat lokasi dan kejadian kecelakaan speed boat. Kebakaran terjadi di Sesayap, Rian, Sedulung dan Tideng Pale. Sedangkan bencana kecelakaan speed boat terjadi di Desa Tideng Pale.



Tabel 6.23. Bencana Alam di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

No	Kecamatan/Desa	Jenis Bencana	Kerusakan	Jumlah Korban	Perkiraan Kerugian (Rp)
1	Sesayap	Kebakaran permukiman	3 unit (Berat)	-	-
2	Tideng Pale	Kecelakaan Speed Boat	-	13	-
3	Rian	Kebakaran permukiman	1 unit (Berat)	6	-
4	Sedulung	Kebakaran permukiman	1 unit (Berat)	2	-
5	Tideng Pale	Kebakaran permukiman	1 unit (ringan)	4	-

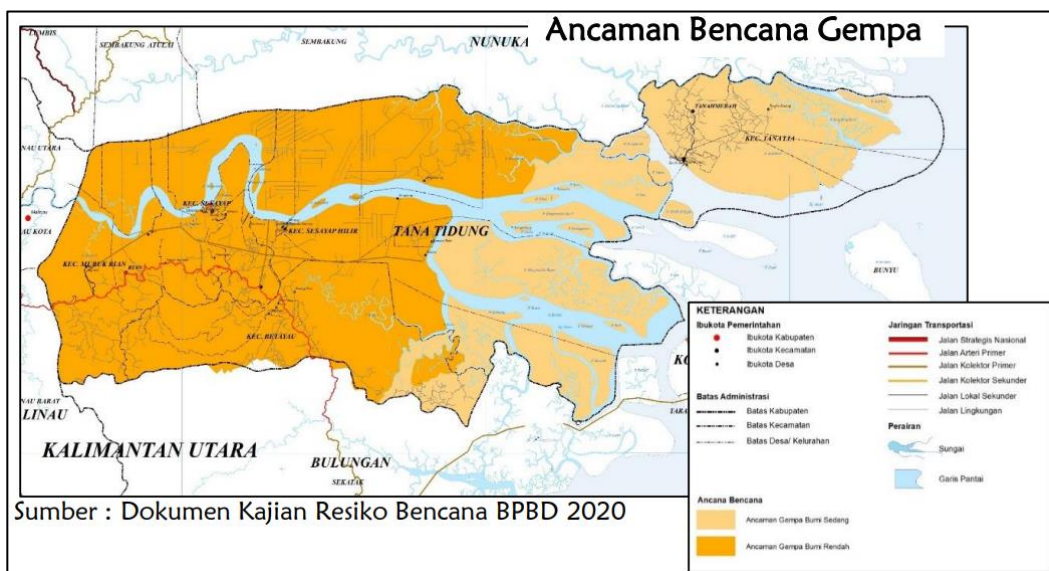
Sumber : BPBD Kabupaten Tana Tidung, 2021

Gempa bumi sempat melanda Kabupaten Tana Tidung pada akhir Tahun 2015. Sebelumnya wilayah ini tidak disebutkan termasuk daerah rawan gempa. Pada Senin dinihari, 21 Desember 2015. Gempa dengan kekuatan 6,1 Skala Richter terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara Jika lihat di peta sumber gempa terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Tana Lia dengan kedalaman 10 Kilometer, tepatnya di sekitar perairan dekat Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung. Gempa ini dirasakan juga oleh masyarakat Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Tarakan menyebutkan bahwa gempa bumi yang terjadi merupakan aktivitas gempa bumi kerak dangkal (*shallow crustal earthquake*) jenis intraplate dengan hiposenter dangkal. Itu terjadi karena sesar yang aktif, yang merupakan patahan mendatar (*strike-slip fault*). Kondisi tektonik di bagian timur Pulau Kalimantan yang cukup kompleks, sehingga zona ini merupakan kawasan paling rawan gempa bumi di Pulau Kalimantan. Selain disebabkan adanya beberapa struktur geologi sesar turun kerawanan, gempa bumi di zona ini juga terjadi karena adanya beberapa struktur sesar mendatar. Zona Nunukan-Tarakan dan sekitarnya secara tektonik diapit tiga sistem sesar mendatar. Di sebelah selatan terdapat dua sistem sesar yang berarah barat daya-tenggara, yaitu zona Sesar

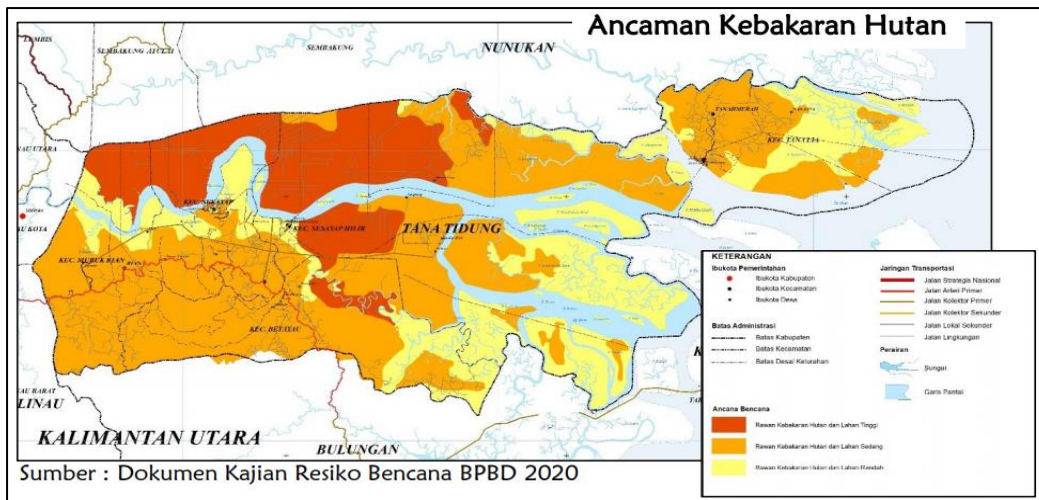
Mangkalihat (*Mangkalihat fault zone*) dan zona Sesar Maratua (*Maratua fault zone*). Zona Sesar Mangkalihat merupakan sesar kelanjutan dari Sesar Palu-Koro yang melintas dekat Kota Tanjung Redeb. Keberadaan zona Sesar Maratua juga tidak kalah penting untuk diperhatikan karena ujung sesar ini terletak di lautan yang lokasinya berdekatan dengan Kota Tanjung Selor. Adapun di sebelah utara Pulau Tarakan juga terdapat zona Sesar Sempurna (*Sempurna fault zone*) yang melintas dari Laut Sulawesi hingga Sabah Malaysia, dan melintasi kawasan yang berdekatan dengan Pulau Sebatik.

Akibat terjadinya gempa tersebut, menyebabkan kerusakan ringan pada beberapa bangunan permanen dan semi permanen. Meskipun akibat gempa bumi ini, tidak menimbulkan kerugian materiil yang relatif kecil dan tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi perlu mendapat perhatian dan cepat tanggap untuk penanganan pasca bencana. Adapun wilayah-wilayah yang masuk kawasan rawan gempa meliputi Kecamatan Muruk Rian, Sesayap, Sesayap Hilir, dan Betayau dengan kategori gempa rendah. Sedangkan wilayah kecamatan yang termasuk kategori gempa sedang adalah Kecamatan Tana Lia.



Gambar 6.17. Peta Ancaman Gempa di Kabupaten Tana Tidung

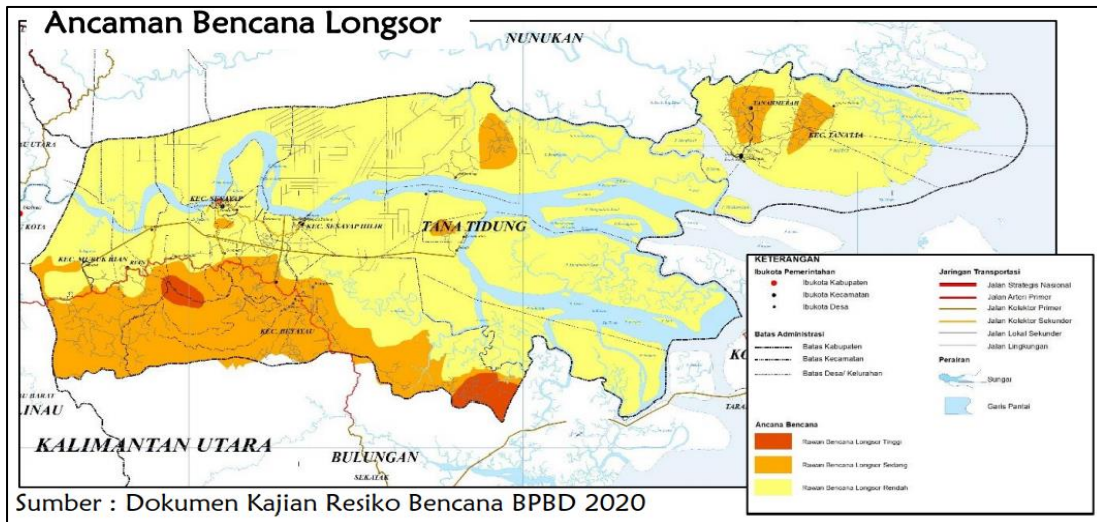
Untuk bencana kebakaran hutan dan lahan, wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan kebakaran hutan tinggi meliputi Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir. Wilayah kecamatan dengan tingkat rentanan bahaya kebakaran hutan dan lahan sedang meliputi Kecamatan Muruk Rian, Sesayap, Sesayap Hilir, Betayau, dan Kecamatan Tana Lia. Adapun wilayah kecamatan dengan tingkat kerentanan bahaya kebakaran rendah tersebut di seluruh wilayah kecamatan.



Gambar 6.18. Peta Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tana Tidung

Terkait bencana longsor, Kabupaten Tana Tidung termasuk wilayah dengan tingkat kerentanan bencana longsor kategori tinggi sampai rendah. Wilayah kecamatan dengan tingkat kerentanan bencana longsor tinggi meliputi kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Betayau walaupun dalam proporsi yang kecil. Sedangkan wilayah kecamatan dengan tingkat kerentanan sedang meliputi Kecamatan Muruk Rian, Sesayap Hilir, dan Kecamatan Tana Lia. Adapun wilayah kecamatan dengan tingkat kerentanan bahaya longsor rendah menyebar diseluruh wilayah kecamatan dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kerentanan bahaya longsor sedang dan tinggi. Adapun lokasi wilayah kecamatan

yang menjadi ancaman bencana longsor dapat dilihat pada Gambar 6.19.



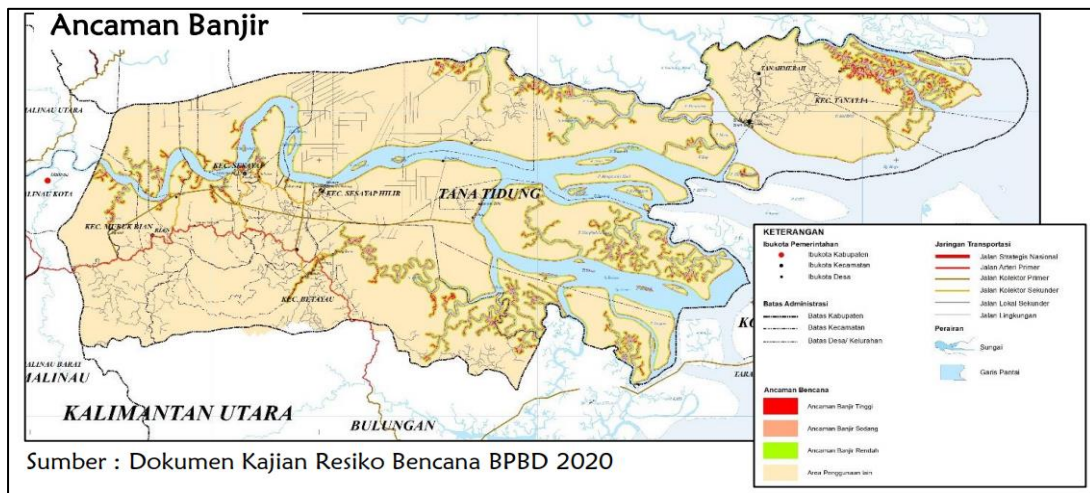
Gambar 6.19. Peta Ancaman Bencana Longsor di Kabupaten Tana

Banjir lebih dominan di landform group gambut dan sebagian group fluviomarin atau lebih spesifik di daerah delta dengan kejadian di musin hujan (curah hujan di atas normal). Melihat lokasi bencana banjir ini, maka dapat disimpulkan bahwa di wilayah-wilayah budidaya terutama permukiman penduduk, bencana banjir termasuk bencana dengan tingkat kerentanan sangat rendah bahkan tidak ada.

Walaupun potensi bencana banjir cukup kecil dan hanya terjadi di kawasan lahan bergambut, potensi bencana banjir ini dapat menjadi besar dan memasuki kawasan permukiman jika kegiatan pembukaan lahan untuk pembangunan tidak disertai dengan upaya konservasi lingkungan khususnya konservasi tanah dan air. Pembukaan lahan yang dimulai dari pembersihan vegetasi akan berakibat pada perubahan tutupan lahan dimana lahan sebelumnya tertutup oleh vegetasi menjadi lahan terbuka. Ketika terjadi hujan, maka pada lahan terbuka memiliki kemampuan yang minim dalam menghalangi laju aliran permukaan. Akibatnya aliran permukaan semakin cepat ke daerah paling rendah dan berpotensi menimbulkan

banjir. Disisi lain, curah hujan yang jatuh pada lahan-lahan yang miring dapat menimbulkan bencana longsor. Hal ini yang sering terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Tana Tidung.

Ancaman lagi yang dapat memicu potensi terjadinya banjir adalah kegiatan pengurugan lahan. Seperti diketahui bahwa wilayah Kabupaten Tana Tidung secara topografi adalah bergelombang. Sebagian wilayahnya merupakan areal perbukitan dan sebagian wilayahnya merupakan areal dataran rendah dominasi rawa. Untuk memanfaatkan areal dataran rendah dengan dominasi kawasan rawa tersebut untuk pembangunan perumahan dan prasarana lainnya, maka dilakukan pengurugan.



Gambar 6.20. Peta Ancaman Bencana Banjir di Kabupaten Tana Tidung

d. Dampak KRP terhadap Potensi Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Keanekaragaman hayati atau biasa disebut juga sumberdaya hayati memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Sumberdaya hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem.



Kabupaten Tana Tidung memiliki areal/lahan dengan status kawasan hutan mencapai sekitar 170.340,64 ha terdiri dari kawasan hutan dengan fungsi produksi 151.185,63 ha, hutan produksi terbatas 9.084,28 ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi sekitar 9.601,66 ha. Kawasan hutan tersebut memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang besar dengan tingkat keberagaman yang besar. Potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Tana Tidung berjumlah sekitar 174 spesies, dan dari 174 spesies tersebut terdapat sekitar 24 spesies yang terkategori dilindungi. Spesies yang dilindungi tersebut terdiri atas vegetasi terrestrial (daratan) sebanyak empat spesies, kelompok mamalia sebanyak delapan spesies, kelompok aves sebanyak 11 spesies, dan kelompok herpetofauna sebanyak satu spesies. Adapun spesies-spesies yang dilindungi tersebut disajikan pada Tabel 6.24.

Tabel 6.24. Keanekaragaman Hayati Kelompok Dilindungi di Kabupaten Tana Tidung

No	Jenis	Lokasi	Status
A	Vegetasi Terrestrial		
1	Meranti Kuning	Gunung Rian	Dilindungi
2	Meranti Merah	Gunung Rian	Dilindungi
3	Meranti Putih	Gunung Rian	Dilindungi
4	Tengkawang Majau	Gunung Rian	Dilindungi
B	Mamalia		
5	Kukang	Gunung Rian	Dilindungi
6	Owa	Gunung Rian	Dilindungi
7	Landak	Gunung Rian	Dilindungi
8	Macan Dahan	Gunung Rian	Dilindungi
9	Kijang	Gunung Rian	Dilindungi
10	Payau/Sembur	Gunung Rian	Dilindungi
11	Beruang Madu	Gunung Rian dan Tana Lia	Dilindungi
12	Uwa-Uwa		Dilindungi
C	Aves		
13	Raja Udang	Gunung Rian	Dilindungi
14	Raja Udang Besar	Gunung Rian	Dilindungi



No	Jenis	Lokasi	Status
15	Raja Udang Biru	Gunung Rian	Dilindungi
16	Bangau	Gunung Rian	Dilindungi
17	Cerucuk/Jogjong	Gunung Rian dan Tana Lia	Dilindungi
18	Bungau Kendi	Gunung Rian, Tana Lia dan Sengkong	Dilindungi
19	Camar Berjalur	Gunung Rian, Tana Lia dan Sengkong	Dilindungi
20	Kelicap Bakau	Gunung Rian, Tana Lia dan Sengkong	Dilindungi
21	Burung Madu	Gunung Rian, Tana Lia dan Sengkong	Dilindungi
22	Kelicap Nibung	Gunung Rian, Tana Lia dan Sengkong	Dilindungi
23	Bulbul	Gunung Rian, Tana Lia dan Sengkong	Dilindungi
D	Herpetofauna		
24	Buaya Muara	Gunung Rian, Tana Lia dan Sengkong	Dilindungi

Selain spesies-spesies yang dilindungi di atas, terdapat sejumlah spesies yang tidak dilindungi, yang fungsinya selain menambah keindahan ekosistem tetapi juga menjaga dan melindungi kelestarian ekosistem terutama spesies dari golongan flora. Namun demikian, keberadaan spesies dimaksud akan terancam kepunahannya jika lingkungan sebagai habitatnya tidak dijaga dan dipelihara dengan baik.

Rusaknya alam membuat keseimbangan lingkungan hidup mengalami ketimpangan yang bukan lagi dipandang sebelah mata. Pemanasan global yang disertai perubahan iklim yang tidak menentu merupakan salah satu bukti bahwasanya alam ini sedang mengalami degradasi. Rentetan bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan penggundulan hutan, pencemaran dan lain sebagainya semakin menambahkan jajaran daftar memperparah kondisi alam. Belum lagi ulah manusia dengan intensitas



pembukaan lahan yang cukup tinggi. Pesatnya pertumbuhan dan kebutuhan manusia dalam menguasai peradaban akhirnya mengesampingkan faktor alam. Sehingga alam dan lingkungan hidup mengalami mengalami pergeseran posisi dalam kehidupan.

Mengingat pentingnya alam sebagai habitat tempat hidupnya berbagai macam makhluk hidup dan untuk mendukung keradaan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya, maka dalam kajian KLHS RPJMD tahun 2021-2026 ini menjadi salah satu isu prioritas yang dikaji. Hal terpenting terkait kerusakan alam yang berpengaruh terhadap kelestarian habitat dan keanekaragaman hayati adalah usaha-usaha berupa inovasi daerah dalam rangka melindungi kelestarian habitat dan keanekaragaman hayati tersebut. Berikut adalah inovasi pemerintah daerah yang berhubungan dengan kelestarian habitat dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Tana Tidung.

e. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 29 ayat (3) disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 %dari luas wilayah kota.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) didefinisikan sebagai area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan status kepemilikannya, ruang terbuka hijau dibagi menjadi dua jenis yaitu RTH publik dan RTH privat. RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam hal ini yang termasuk RTH publik, antara lain, taman kota, taman pemakaman umum (TPU), dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk RTH privat,



antara lain, kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

1. Taman Kota

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai lapangan hijau, yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

2. Hutan Kota

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, mengharuskan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk mengalokasikan minimal 10% dari luas wilayah kota ditetapkan sebagai hutan kota.

Hutan kota merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Penyelenggaraan hutan kota sebagai peyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk :

- Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika.
- Meresapkan air.
- Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota.
- Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.



f. Penyediaan Kawasan Konservasi Perairan

Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan amanah dari Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, bahwa pencadangan kawasan konservasi perairan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Hal ini penting mengingat Kabupaten Tana Tidung memiliki kawasan perairan yang menjadi salah satu sumber daya alam terbesar di daerah ini. Penetapan Kawasan Konservasi Perairan ini bertujuan untuk:

- Perlindungan habitat melalui peningkatan kualitas habitat dengan menghindari polusi bahan kimia dan suara bawah air serta mengurangi risiko kematian yang disebabkan oleh rengge, racun dan tertabrak kapal.
- Perlindungan sumber daya ikan sebagai sumber mata pencaharian dan menopang mata pencaharian masyarakat/nelayan setempat.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat setempat, pemerintah serta berbagai pihak lain untuk pemanfaatan lingkungan dan sumber dayanya secara berkelanjutan dan membangun komitmen untuk pelestarian sumber daya perikanan

Kawasan Konservasi Perairan dibagi atas tiga (3) zona kawasan, yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona lainnya.

1. Zona Inti

Zona Inti berada di rawa-rawa yang merupakan tempat pemijahan ikan. Zona ini diperuntukan bagi :

- a) *Kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan di Zona Inti, antara lain meliputi: (1) Perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya, (2)*



- Penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan, (3) Keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan, dan/atau (4) Pemulihan dan rehabilitasi ekosistem, serta perlindungan alur migrasi biota laut
- b) *Kegiatan perlindungan ekosistem perairan yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan* di Zona Inti, antara lain meliputi: (1) Perlindungan proses ekologis yang menunjang keaslian, keutuhan dan keberlangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya, (2) Penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan, (3) Keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan, dan/atau (4) Pemulihan dan rehabilitasi ekosistem, serta perlindungan alur migrasi biota laut
- c) *Perlindungan situs budaya/adat tradisional*
- d) *Penelitian*. Kegiatan penelitian di Zona Inti diperuntukkan bagi: (1) Penelitian dasar menggunakan metode observasi untuk pengumpulan data dasar, (2) Penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi biologi dan ekologi, dan/atau (3) Pengembangan untuk tujuan rehabilitasi.
- e) *Pendidikan*. Kegiatan pendidikan di Zona Inti diperuntukkan bagi kegiatan tanpa melakukan pengambilan material langsung dari alam.

Di dalam zona inti ini tidak boleh ada kegiatan ekstraktif/perikanan tangkap dan aktivitas lainnya

2. Zona Perikanan Berkelanjutan

Zona perikanan berkelanjutan ini berada di sungai, danau dan rawa yang diperuntukkan bagi:

- a) *Perlindungan habitat dan populasi ikan*

Kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan di Zona



Perikanan berkelanjutan meliputi: (1) Perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya, (2) Pengamanan, pencegahan dan/atau pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan, (3) Pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya, (4) Alur migrasi biota perairan, dan (5) Pemulihan.

b) Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan

Kegiatan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan di Zona Perikanan berkelanjutan meliputi : (1) Alat penangkapan ikan yang sifatnya statis dan/atau pasif dan (b) Cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan/atau tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan

c) Budidaya ramah lingkungan;

Kegiatan budidaya ramah lingkungan di Zona Perikanan berkelanjutan meliputi kegiatan budidaya yang memperhatikan: (1) Jenis ikan yang dibudidayakan, (2) jenis pakan, (3) teknologi, (4) jumlah unit usaha budidaya, dan (5) daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

d) Pariwisata dan rekreasi;

Kegiatan pariwisata dan rekreasi di Zona Perikanan berkelanjutan meliputi: (1) pariwisata minat khusus, (2) perahu pariwisata, (3) pariwisata pancing, dan (4) pembuatan foto, video, dan film.

e) Penelitian dan pengembangan;

Kegiatan penelitian dan pengembangan di Zona Perikanan berkelanjutan meliputi: (1) penelitian dasar untuk



kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi, (2) penelitian terapan untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi, dan (3) pengembangan untuk kepentingan konservasi.

f) Pendidikan.

Kegiatan pendidikan di Zona Perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam merupakan pendidikan untuk memberikan wawasan dan motivasi yang meliputi aspek: (1) biologi, (2) ekologi, (3) sosial ekonomi dan budaya, dan (4) tata kelola dan pengelolaan.

Kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh dalam masing zona perikanan berkelanjutan ini adalah:

1) Untuk perikanan tangkap :

- Menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
- Menggunakan cara/metode penangkapan ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan/atau tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya.
- Tidak menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan termasuk namun tidak terbatas alat setrom, meracun dan trawl.
- Tidak memasang rawai bentang yang melintasi sungai.
- Rengge dipasang di pinggiran sungai dan tidak melintang atau ditengah sungai.

2) Untuk perikanan budidaya :

- Ikan yang dibudidayakan dianjurkan tidak memberi pakan ikan tapi berahli ke pemberian makanan pelet atau pakan lain atau jenis ikan yang tidak makan ikan.



- Jenis pakan yang digunakan adalah jenis pakan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan standar nasional Indonesia
- Menggunakan teknologi budidaya tradisional yaitu padat penebaran rendah, pemberian pakan rendah untuk menghindari penyakit dan tidak menggunakan obat-obatan
- Jumlah unit usaha budidaya yang beroperasi sesuai dengan daya dukung yang ada.

3) Untuk transportasi sungai :

- Untuk sungai utama, diperbolehkan lintasan ponton dan kapal hingga x GT dan wajib menggunakan jalur tengah sungai/ dilarang menggunakan jalur pinggir sungai.
- Untuk anak sungai tidak diperbolehkan lintasan ponton batubara

3. Zona Lainnya

Zona lainnya merupakan zona di luar Zona Inti, Zona Perikanan berkelanjutan, dan Zona Pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tentu. Zona tertentu tersebut dapat berupa antara lain *zona perlindungan dan zona rehabilitasi* serta zona-zona lainnya yang mendukung upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Zona lainnya berada pada hutan sempadan sungai/danau, hutan rawa, dan Jalur transportasi. Di sungai Sesayap zona ini diperuntukan antara lain:

- Hutan sempadan sungai/danau sebagai zona perlindungan hutan/ vegetasi asli untuk mencegah erosi. Hutan sempadan sungai/ danau dijadikan zona lainnya juga karena hutan menyediakan tempat buffer untuk kegiatan di darat dan tempat naungan dan pemijahan ikan di perairan pinggir sungai serta makanan ikan dari biji dan dedaunan pohon.



- Hutan Rawa sebagai zona rehabilitasi/ perlindungan hutan/ vegetasi asli. Dalam zona A & B kegiatan taman menaman oleh rakyat berskala kecil tanpa menebang hutan dan terkontrol (ramah lingkungan) agar tidak mempengaruhi terhadap kelestarian KKP.
- Jalur transportasi: khusus kapal berukuran besar maksiman 230 GT

Kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh pada zona lainnya ini adalah:

1) Sub-Zona A yaitu Hutan sempadan sungai/ danau dan Sub-Zona B yaitu Rawa :

- Tidak menebang pohon di sekitar sempadan sungai.
- Diperbolehkan kegiatan menaman pohon yang asli tumbuh di lokasi tersebut atau yang cocok untuk lokasi pinggir sungai yang sering terendam air.
- Kegiatan tanam menanam (perkebunan skala kecil) di dasar lantai daratan dalam zona hutan sempadan sungai diperbolehkan asal tidak merusak hutan dan tidak menggunakan herbisida, pestisida dan pupuk yang non-organik (kimia).

2) Sub-Zona C: Jalur transportasi :

- Untuk sungai utama seperti Sungai Sesayap diperbolehkan lintasan ponton dan kapal hingga 230 GT dan wajib menggunakan jalur tengah sungai/ dilarang menggunakan jalur pinggir sungai.
- Untuk anak Sungai Sesayap tidak diperbolehkan lintasan ponton batubara.

g. Dampak KRP terhadap Perubahan Iklim

Kondisi klimatologi di Kabupaten Tana Tidung tahun 2019 memiliki rata-rata curah hujan 199,35 mm/bulan, rata-rata suhu udara adalah 27,65°C dengan rata-rata kelembaban udara 82,58 %,

tekanan udara sebesar 1.010 mb, kecepatan angin 3,17 knot dan penyinaran matahari mencapai 56,58 % (BPS Kab. Tana Tidung, 2020). Sedang kondisi klimatologi di Kabupaten Tana Tidung tahun 2019 yaitu rata-rata curah hujan 231,75 mm/bulan, suhu udara 27,49°C kelembaban udara 84,42 %, tekanan udara 1.010,8 mb, kecepatan angin 2,56 knot dan penyinaran matahari mencapai 56,69 % (BPS Kab. Tana Tidung, 2021).

Dari data iklim tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi iklim di Kabupaten Tana Tidung masih dalam kondisi normal. Artinya penyelenggaraan pembangunan di daerah ini belum banyak memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan iklim secara signifikan. Rata-rata suhu misalnya tidak mengalami perubahan signifikan,. Demikian pula dengan rata-rata kelembaban udara masih diangka 80 % dan tekanan udara masih diangka 1.000 mb. Adapun rata-rata curah hujan mengalami peningkatan. Besaran data iklim di Kabupaten Tana Tidung secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.25 dan 6.26.



Tabel 6.25. Keadaan Iklim di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019

No	Bulan	Rata-rata Suhu (°C)	Rata-rata Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	26,6	86	3	1.010,9	266,2	45
2	Februari	27,2	82	4	1.012,3	109,8	58
3	Maret	27,3	82	3	1.010,9	222,1	53
4	April	27,7	83	3	1.009,7	183,0	57
5	Mei	27,9	84	3	1.009,7	287,2	56
6	Juni	27,6	85	3	1.009,3	198,0	56
7	Juli	27,5	81	3	1.009,9	140,4	63
8	Agustus	28,1	79	4	1.009,5	182,5	61
9	September	28,5	79	4	1.009,5	101,4	70
10	Oktober	27,7	82	3	1.009,5	235,7	60
11	November	28,0	82	3	1.009,2	177,7	62
12	Desember	27,7	86	2	1.009,8	288,2	38
Rata-Rata		27,65	82,58	3,17	1.010,00	199,35	56,58

Sumber: BPS Kab. Tana Tidung, 2020

Tabel 6.26. Keadaan Iklim di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

No	Bulan	Rata-rata Suhu (°C)	Rata-rata Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	26,6	86	3	1.010,9	259	45
2	Februari	27,2	82	4	1.012,3	224	58
3	Maret	27,3	82	3	1.010,9	253	53
4	April	27,7	83	3	1.009,7	160	57
5	Mei	27,9	84	3	1.009,7	162	56
6	Juni	27,6	85	3	1.009,3	123	56
7	Juli	27,5	81	3	1.009,9	233	63
8	Agustus	28,1	79	4	1.009,5	204	61
9	September	28,5	79	4	1.009,5	134	70
10	Oktober	27,7	82	3	1.009,5	377	60
11	November	28,0	82	3	1.009,2	163	62
12	Desember	27,7	86	2	1.009,8	489	38
Rata-Rata		27,49	84,42	2,56	1.010,8	231,75	56,69

Sumber: BPS Kab. Tana Tidung, 2021



Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Tana Tidung beriklim tropik dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan Nopember sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Keadaan ini seharusnya dipertahankan, namun demikian, seiring dengan perkembangan pembangunan terutama pembukaan lahan dan intensitas penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat dapat berpengaruh terhadap perubahan iklim di Kabupaten Tana Tidung. Disisi lain perubahan iklim global dapat saja berpengaruh di Indonesia termasuk Kabupaten Tana Tidung.

Seperti diketahui bahwa faktor pemicu terjadinya bencana alam di Kabupaten Tana Tidung adalah perubahan iklim global. Perubahan iklim (*climate change*) merupakan salah satu dampak dari pemanasan global yang mempengaruhi suhu lingkungan. Kenaikan suhu tersebut mungkin tidak terlihat terlalu tinggi, tetapi di negara tertentu seperti Indonesia, kenaikan itu dapat memberikan dampak yang signifikan. Manusia telah demikian rentan terhadap berbagai macam ancaman yang berkaitan dengan dampak dari perubahan iklim seperti banjir, kemarau panjang, angin kencang, longsor, dan kebakaran hutan.

Dua fenomena perubahan iklim yang sering terjadi di Kabupaten Tana Tidung adalah pergantian antara musim hujan dan musim kemarau. Seperti diketahui bahwa iklim di Kabupaten Tana Tidung termasuk iklim tropika basah. Artinya bahwa antara musim hujan dan musim kemarau di daerah ini tidak jelas. Dikatakan musim kemarau dan musim hujan tersebut tidak jelas/tegas karena pada musim kemarau sekalipun masih terjadi hujan walaupun intensitas dan frekuensinya tidak sebanyak saat musim hujan. Kondisi ini berbeda dengan kondisi iklim di Pulau Jawa misalnya



yaitu ketika musim kemarau maka tidak pernah terjadi hujan dalam jangka waktu berbulan-bulan.

Seiring dengan terjadinya peningkatan aktifitas manusia yang berdampak pada peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) yang berpengaruh pada perubahan iklim global maka Kabupaten Tana Tidung juga merasakan dampak perubahan iklim global tersebut. Sebagai gambaran, pada beberapa wilayah di Kabupaten Tana Tidung rentan terhadap banjir jika terjadi hujan deras dengan waktu yang agak lama terutama pada daerah bantaran sungai dan kawasan bergambut. Sebaliknya ketika tidak terjadi hujan atau memasuki musim kemarau yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama sangat potensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan cukup besar. Terjadinya perubahan iklim global ini disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan secara menyeluruh, meliputi perubahan iklim, perubahan kondisi atmosfer di udara, perubahan kondisi lahan dan sistem ekologi yang mempengaruhi kehidupan dan pemenuhan kebutuhan di bumi. Sesuai dengan *Holocoenotic Concept*, adanya perubahan lingkungan di suatu ekosistem akan mempengaruhi keadaan lingkungan yang lain. Salah satu isu *global change* yang saat ini sedang terjadi dan berdampak cukup besar bagi dunia adalah pemanasan global (Lailaty, 2019).

Pemanasan global yaitu fenomena peningkatan temperatur global secara gradual yang disebabkan oleh meningkatnya emisi GRK. Cahaya matahari dipancarkan ke bumi dalam bentuk radiasi gelombang pendek. Di permukaan bumi, cahaya diserap dan dipantulkan dalam wujud radiasi infra merah gelombang panjang. Cahaya yang dipantulkan kembali, sebagian panasnya terperangkap di atmosfer. Menumpuknya jumlah GRK di lapisan atmosfer mengakibatkan panas akan tersimpan di permukaan bumi yang menyebabkan suhu rata-rata tahunan bumi meningkat (UNFCCC, 2006).



Potensi dampak terjadinya perubahan iklim di Kabupaten Tana Tidung jika tidak diantisipasi sedini mungkin adalah terjadinya kekeringan. Seperti diketahui bahwa potensi terjadinya kekeringan di Kabupaten Tana Tidung pada beberapa tahun terakhir ini akibat perubahan iklim global semakin besar. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh kawasan hutan. Luas kawasan hutan (KBK) di Kabupaten Tana Tidung mencapai \pm 170.340,64 ha. Dengan luas kawasan hutan tersebut, memiliki peluang terjadinya kebakaran hutan khususnya disaat memasuki musim kemarau. Hal ini yang memicu banyaknya kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019. Namun demikian, berdasarkan data BPBD Kab. Tana Tidung (2021) menunjukkan bahwa selama tahun 2020, tidak ada kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Tana Tidung kecuali kebakaran permukiman.

Beberapa dampak yang ditimbulkan apabila terjadi kebakaran hutan, diantaranya adalah:

- Kebakaran hutan menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang mengancam kehidupan masyarakat antara lain sumber nafkah, kesehatan, ketahanan pangan, dan air terganggu.
- Banyak di antara masyarakat Kabupaten Tana Tidung mencari nafkah dibidang pertanian atau perikanan yang tergantung oleh iklim. Seperti diketahui bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Tana Tidung rentan terhadap kebakaran hutan yang dapat menimbulkan dampak yang parah dibidang pertanian.
- Suhu tinggi dan kelembaban tinggi yang berkepanjangan juga memungkinkan nyamuk menyebar ke wilayah-wilayah baru, menimbulkan ancaman malaria dan demam berdarah.
- Perubahan dan peningkatan suhu serta frekuensi curah hujan menyebabkan ledakan populasi dan migrasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), sehingga menurunkan



produktivitas tanaman pangan yang berarti dapat mengganggu stabilitas pangan.

h. Dampak KRP terhadap Status Mutu dan Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA)

Kondisi geografi Kabupaten Tana Tidung dapat memberikan gambaran tentang ketersediaan SDA, mulai dari luas lahan, mineral dan bahan tambang yang terkandung di dalamnya, hingga fisiografi lahan beserta flora dan fauna yang berada di atasnya.

Kabupaten Tana Tidung berada di tengah-tengah antara Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan yang merupakan jalur strategis perekonomian. Posisi Kabupaten Tana Tidung berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau, dan Nunukan. Gambaran karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung dapat dideskripsikan berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada. Wilayah Kabupaten Tana Tidung terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu: kawasan perbukitan dan kawasan non perbukitan. Kawasan perbukitan termasuk hutan, hutan lindung, dan kawasan-kawasan lain yang sejenis. Sedangkan kawasan Non perbukitan meliputi daerah pemukiman penduduk, zona pertanian, dan kawasan-kawasan lain yang sejenis.

Dilihat dari potensi SDA, Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah yang memiliki SDA berupa minyak bumi, gas, batubara, emas, hutan, ketersediaan lahan perkebunan, dan wilayah perairan yang luas. Kabupaten Tana Tidung juga berada diantara Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan yang merupakan jalur perekonomian yang strategis. Disamping itu, Kabupaten Tana Tidung berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau dan Nunukan (Serawak-Sabah).

Jika melihat dari struktur ekonomi wilayah, maka sangat terlihat dominasi perekonomian daerah berasal dari SDA pertanian,



kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian. Dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kontribusinya terhadap perekonomian daerah mencapai 30,71 %. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah yang mencapai 32,02 %. Adapun struktur ekonomi Kabupaten Tana Tidung pada 2016 s/d 2019 berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat seperti Tabel 6.27.

Tabel 6.27. Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2019

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,21	32,35	31,15	30,71
2	Pertambangan dan Penggalian	25,21	30,05	31,20	32,02
3	Industri Pengolahan	2,39	2,29	2,20	2,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01
6	Konstruksi	16,60	16,14	16,55	16,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,73	4,81	4,84	4,78
8	Transportasi & Pergudangan	0,76	0,75	0,75	0,74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,21	0,21	0,22	0,21
10	Informasi dan Komunikasi	0,04	0,03	0,03	0,03
11	Jasa Keuangan & Asuransi	0,10	0,10	0,10	0,10
12	Real Estate	0,66	0,63	0,63	0,62
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,01	10,66	10,39	10,18
15	Jasa Pendidikan	1,54	1,46	1,45	1,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,07	0,06	0,06	0,06
17	Jasa Lainnya	0,43	0,40	0,38	0,38
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Tana Tidung, 2020



Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor pertambangan dan Penggalian memberikan dampak yang signifikan dalam kegiatan perekonomian Tana Tidung. Namun yang perlu digarisbawahi adalah, makin menurunnya kontribusi sektor ini paling tidak jika dilihat dari data 2016 – 2019. Padahal sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori lapangan usaha yang berkelanjutan atau SDA yang dapat diperbaharui. Hal sebaliknya terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebagai komoditas tak terbarukan yang terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi kekhawatiran tersendiri mengingat SDA yang tidak terbarukan pada saatnya nanti pasti akan habis. Kondisi ini perlu dicermati dan dicari solusinya sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu upaya untuk mencapai *green economy* melalui TPB menjadi belum optimal dengan adanya potret struktur ekonomi yang masih didominasi sektor komoditas tak terbarukan.

Berdasarkan kondisi tutupan lahan di masing-masing fungsi Kawasan hutan diatas, menunjukkan inkonsistensi penggunaan lahan pada masing-masing fungsi Kawasan hutan yang apabila tidak dikendalikan dapat mengancam kualitas dan ketersediaan sumberdaya alam yang ada. Inkonsistensi tersebut diantaranya, terdapat pemukiman, pertambangan, dan lahan pertanian di di kawasan hutan (Hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta, kawasan hutan Taman Wisata Alam). Disisi lain potensi perambahan hutan oleh masyarakat semakin tinggi akibat keterbatasan lahan bukan kawasan hutan (KBNK).

Inkonsistensi pemanfaatan lahan tersebut selain mengakibatkan berkurangnya manfaat dan keberadaan kawasan hutan juga dapat meningkatkan kekritisian lahan baik dalam luasan



maupun tingkat kritisnya lahan. Berdasarkan data Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung (2020), terdapat sekitar 576,20 ha lahan kritis yang berhasil direhabilitasi. Ini menunjukkan bahwa luas lahan kritis di Kabupaten Tana Tidung cukup tinggi. Potensi peningkatan lahan kritis di Kabupaten Tana Tidung dapat terjadi selain diakibatkan dampak kejadian bencana alam juga disebabkan aktifitas manusia.

6.2. Alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan yaitu untuk indikator yang belum mencapai target RPJMN 2019 serta indikator yang belum memiliki data

6.2.1. Alternatif Indikator TPB Belum mencapai Target RPJMN 2019

a. Alternatif Program Dalam Pencapaian TPB Tanpa Upaya Tambahan

1. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

a) Tujuan

Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

b) Target

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, SDA, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

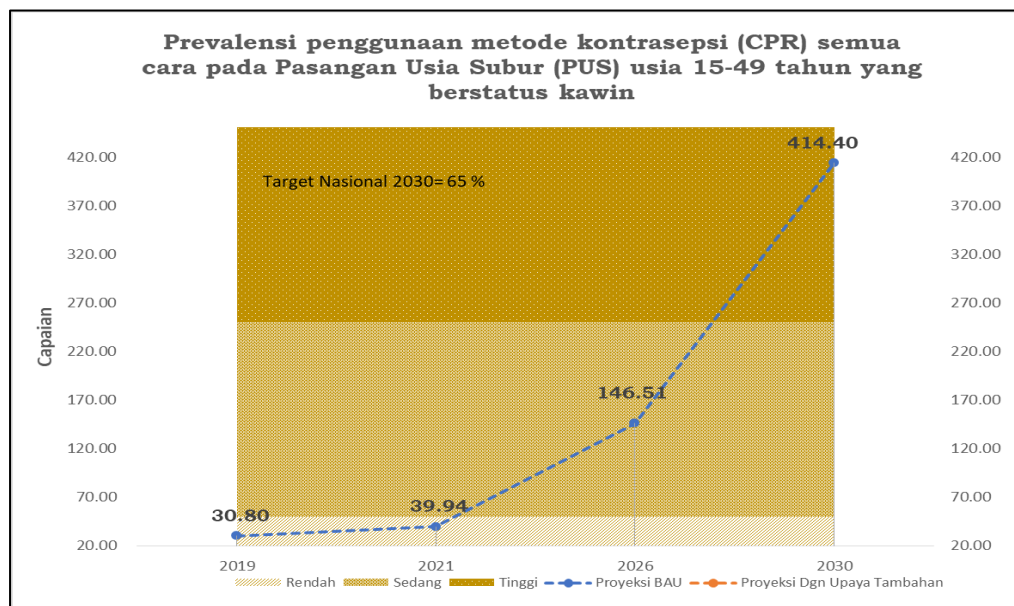
c) Nomor Indikator

Nomor : 1.4.1.(c)

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.28. Proyeksi Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin

Baseline Data		Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	
Tahun	Data	Tahun	Proyeksi
2017		2019	30,80
2018	23,75	2021	39,94
2019	30,80	2026	146,51
2020		2030	414,40



Gambar 6.21. Grafik Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin.

e) Isu Strategis

- (1) Masih kurang optimalnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi
- (2) Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- (3) Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

f) Rekomendasi

- (1) Sasaran



Masyarakat Kabupaten Tana Tidung, khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin

(2) Strategi atau Arah Kebijakan

- ☞ Meningkatkan kampanye Program Keluarga Berencana
- ☞ Meningkatkan akses pelayanan KB

(3) Program

- ☞ Program keluarga berencana
- ☞ Program pelayanan kontrasepsi
- ☞ Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB

(4) Kegiatan

- ☞ Penyediaan pelayanan KB dan kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
- ☞ Pengadaan alat kontrasepsi
- ☞ Pembinaan Keluarga Berencana
- ☞ Pelayanan konselin KB
- ☞ Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
- ☞ Pelayanan KB medis operasi

(5) Pelaksana

- ☞ Dinas Kesehatan

2. Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan

a) Tujuan

Tersedianya air minum yang layak dan bersih bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tana Tidung disertai dengan sanitasi yang berkelanjutan

b) Target

Pada tahun 2030, seluruh penduduk Kabupaten Tana Tidung mendapatkan akses sumber air minum yang bersih, layak, aman dan terjangkau secara merata.

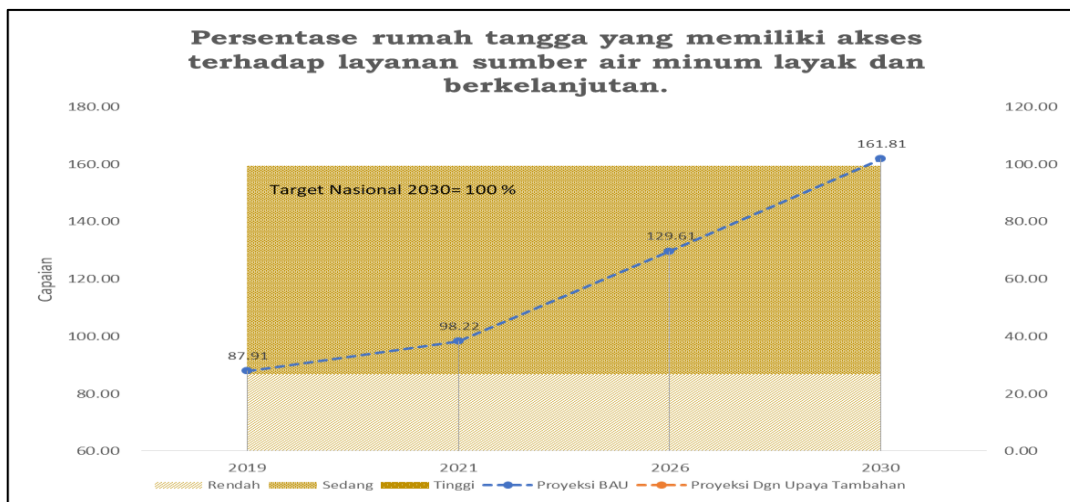
c) Nomor Indikator

Nomor : 1.4.1.(d)

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.29. Proyeksi Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layak Sumber Air Layak dan Berkelanjutan

Baseline Data		Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	
Tahun	Data	Tahun	Proyeksi
2017	78,68	2019	87.91
2018	80,41	2021	98.22
2019	87,91	2026	129.61
2020		2030	161,81



Gambar 6.22. Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layak Sumber Air Layak dan Berkelanjutan

e) Isu Strategis

- (1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya
- (2) Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
- (3) Meningkatnya kuantitas sampah
- (4) Menurunnya kuantitas sumber daya air
- (5) Meningkatnya pencemaran tanah



- (6) Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup

f) Rekomendasi

- (1) Sasaran

Masyarakat Kabupaten Tana Tidung, khususnya masyarakat miskin dengan keterbatasan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik

- (2) Strategi atau Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas standar baku mutu dan distribusi air minum

- (3) Program

- ☞ Program pengembangan dan pengelolaan jaringan air bersih dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada baik di sungai, rawa, waduk, dan sumber air lainnya
- ☞ Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- ☞ Peningkatan pelayanan penyediaan akses dan kualitas baku mutu air minum.

- (4) Kegiatan

- ☞ Perbaikan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih/air minum
- ☞ Peningkatan kualitas pengolahan mutu air minum.
- ☞ Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara sumber-sumber air minum.
- ☞ Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- ☞ Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum.
- ☞ Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana jaringan infrastruktur air bersih/minum skala perkotaan, perdesaan dan skala rumah tangga.



- ☞ Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah.
- ☞ Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum.
- ☞ Pengembangan distribusi air minum.

(5) Pelaksana

- ☞ Perusahaan Daerah Air Minum
- ☞ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- ☞ Dinas Kesehatan
- ☞ Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
- ☞ Kecamatan dan Kelurahan/Desa

3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

a) Tujuan

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

b) Target

Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

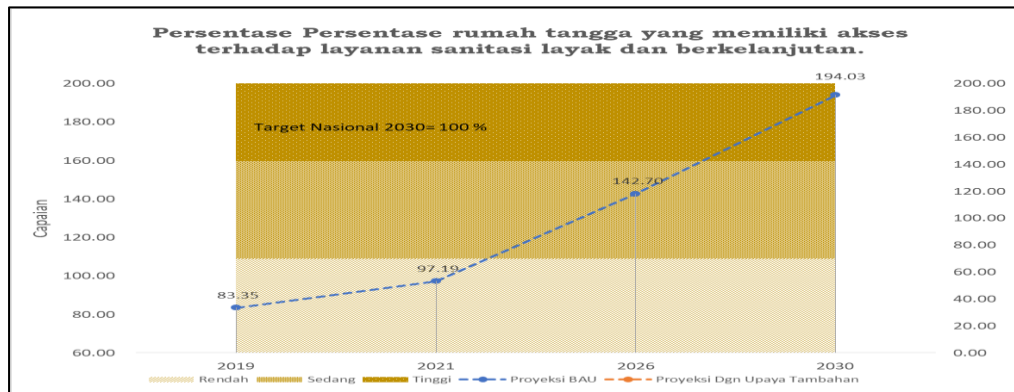
c) Nomor Indikator

Nomor : 6.2.1.(b)

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.30. Proyeksi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Baseline Data		Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	
Tahun	Data	Tahun	Proyeksi
2017	71,48	2019	83,35
2018	75,23	2021	97,19
2019	83,35	2026	142,70
2020		2030	194,03



Gambar 6.23. Grafik Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

e) Isu Strategis

- (1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya
- (2) Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
- (3) Meningkatnya kuantitas sampah
- (4) Menurunnya kuantitas sumber daya air
- (5) Meningkatnya pencemaran tanah
- (6) Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup

f) Rekomendasi

(1) Sasaran

Masyarakat Kabupaten Tana Tidung, khususnya masyarakat miskin dengan keterbatasan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

(2) Strategi atau Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas lingkungan dalam memberikan memberikan layanan sanitasi lingkungan yang lebih baik.

(3) Program

- ☞ Pembangunan dan pengembangan fasilitas pemukiman Perkotaan dan Perdesaan yang berkelanjutan seperti



jaringan drainase, TPS dan TPA, serta pengolahan limbah skala rumah tangga dan industri

- ☞ Peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
- ☞ Program Lingkungan Sehat
- ☞ Program Perencanaan Pengembangan Kota bersih dan sehat

(4) Kegiatan

- ☞ Perbaikan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan dan fasilitas pengolahannya limbah skala rumah tangga dan industri.
- ☞ Pembangunan dan pengembangan fasilitas TPS dan TPA di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
- ☞ Peningkatan layanan pengolahan limbah rumah tangga dan industry.
- ☞ Pembangunan dan pembangunan jaringan drainase jaringan drainase.
- ☞ Penyuluhan dan sosialisasi penyelenggaraan pemeliharaan drainase skala rumah tangga, komunitas, dan Kelurahan dan desa
- ☞ Penyuluhan dan sosialisasi penyelenggaraan pengolahan dan pengelolaan limbah skala rumah tangga, komunitas, dan Kelurahan
- ☞ Penyuluhan dan sosialisasi gaya hidup sehat

(5) Pelaksana

- ☞ Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- ☞ Dinas Kesehatan
- ☞ Dinas Pendidikan
- ☞ Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
- ☞ Kecamatan dan Kelurahan/Desa

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.

a) Tujuan

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun

b) Target

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

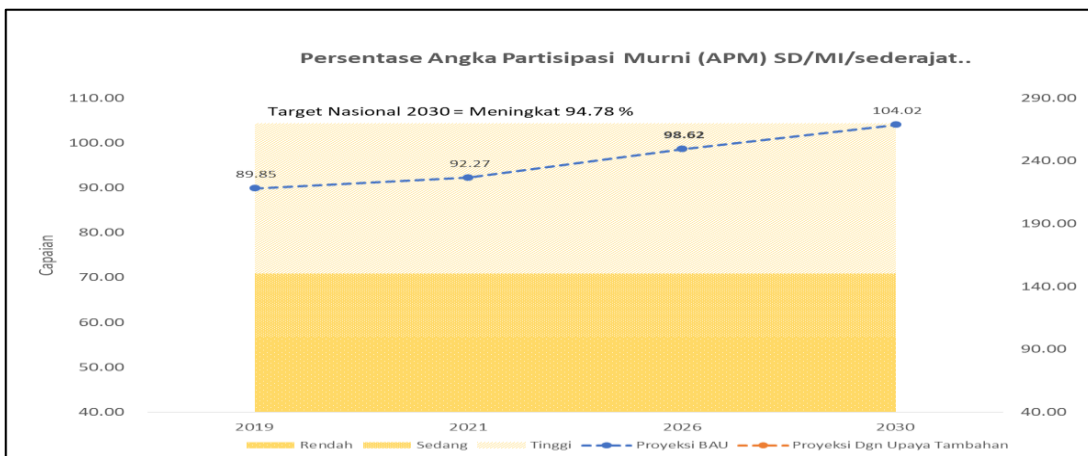
c) Nomor Indikator

Nomor : 1.4.1 (g)

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.31. Grafik Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat

Baseline Data		Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	
Tahun	Data	Tahun	Proyeksi
2017	87,49	2019	89,85
2018	86,36	2021	92,27
2019	89,85	2026	98,62
2020		2030	104,02



Gambar 6.24. Grafik Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat



e) Isu Strategis

- (1) Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana PAUD, TK, SD.
- (2) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD, pendidikan dasar

f) Rekomendasi

- (1) Sasaran
Terwujudnya mutu Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
- (2) Strategi/Arah Kebijakan
 - ☞ Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
 - ☞ Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan Karakter
- (3) Program
 - ☞ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - ☞ Program Pendidikan Non Formal
 - ☞ Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- (4) Kegiatan
 - ☞ Membangun dan Merehabilitasi bangunan sekolah
 - ☞ Penyiapan sarana instalasi listrik pada sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung
 - ☞ Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI
 - ☞ Dana Pendamping SD/MI
 - ☞ Sosialisasi Ujian SD/MI
 - ☞ Menyediakan dan mengelola dana Rutin Sekolah
 - ☞ Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pendidikan SD/MI
 - ☞ Pembinaan Ekstrakurikuler dan Pembangunan Karakter Peserta Didik



- ☞ Peningkatan kualitas SDM Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Kepala Sekolah, operator dan pengawas sekolah
 - ☞ Menyelenggarakan Ujian Paket A
 - ☞ Bimbingan Teknis Tata Kelola Lembaga Kursus Pelatihan dan PKBM
 - ☞ Pengelolaan Sertifikasi Guru di Kabupaten Tana Tidung
 - ☞ Peningkatan Kinerja Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Tidung
 - ☞ Diklat Calon/ Penguatan Kepala Sekolah
- (5) Pelaksana
- ☞ Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung

5. Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB

a) Tujuan

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

b) Target

Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

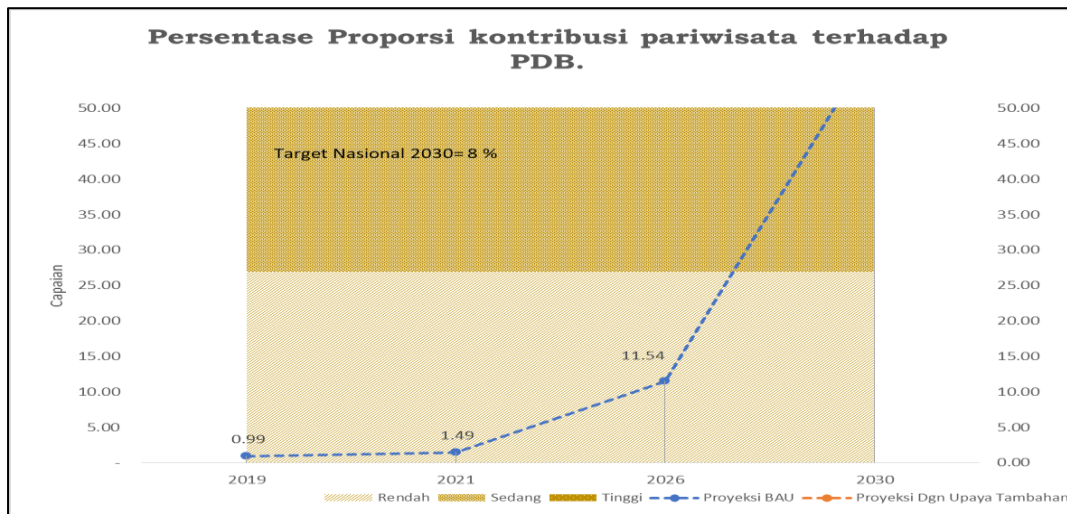
c) Nomor Indikator

Nomor : 8.9.1*

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.32. Proyeksi Persentase Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB

Baseline Data		Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	
Tahun	Data	Tahun	Proyeksi
2017	0,29	2019	0,99
2018	0,25	2021	1,49
2019	0,99	2026	11,54
2020		2030	59,31



Gambar 6.25. Grafik Persentase Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB

e) Isu Strategi

- (1) Masih rendahnya pelestarian adat istiadat dan nilai-nilai daerah yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata
- (2) Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
- (3) Lemahnya kapasitas masyarakat desa/kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya dalam pengembangan usaha ekonomi produktif
- (4) Masih rendahnya jumlah kunjungan wisata dan pendapatan daerah dari objek wisata
- (5) Masih rendahnya daya saing destinasi pariwisata
- (6) Belum kuatnya jalinan kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata

f) Rekomendasi

- (1) Sasaran
Penggalian potensi dan peningkatan destinasi wisata
- (2) Strategi/Arah Kebijakan



Pembangunan objek-objek wisata baru di Kabupaten Tana Tidung

(3) Program

- ☞ Program pembangunan destinasi pariwisata
- ☞ Program pembangunan industry pariwisata
- ☞ Program pembangunan kelembagaan pariwisata
- ☞ Program pemasaran pariwisata

(4) Kegiatan

- ☞ Identifikasi potensi wisata
- ☞ Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata
- ☞ Pembentukan dan penguatan kelembagaan pariwisata
- ☞ Pengembangan ekonomi kreatif local penunjang pariwisata
- ☞ Penyiapan sarana akomodasi dan transportasi pelancong wisata
- ☞ Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
- ☞ Penjaminan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kebersihan destinasi wisata
- ☞ Menggalakkan promosi wisata
- ☞ Membentuk masyarakat yang ramah lingkungan dan nyaman bagi pelancong

(5) Pelaksana

- ☞ Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga
- ☞ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
- ☞ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
- ☞ Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- ☞ Bappeda dan Litbang
- ☞ Kecamatan dan Desa/Kelurahan



6. Persentase Kabupaten 3T yang Terjangkau Layanan Akses Telekomunikasi Universal dan Internet

a) Tujuan

Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

b) Target

Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

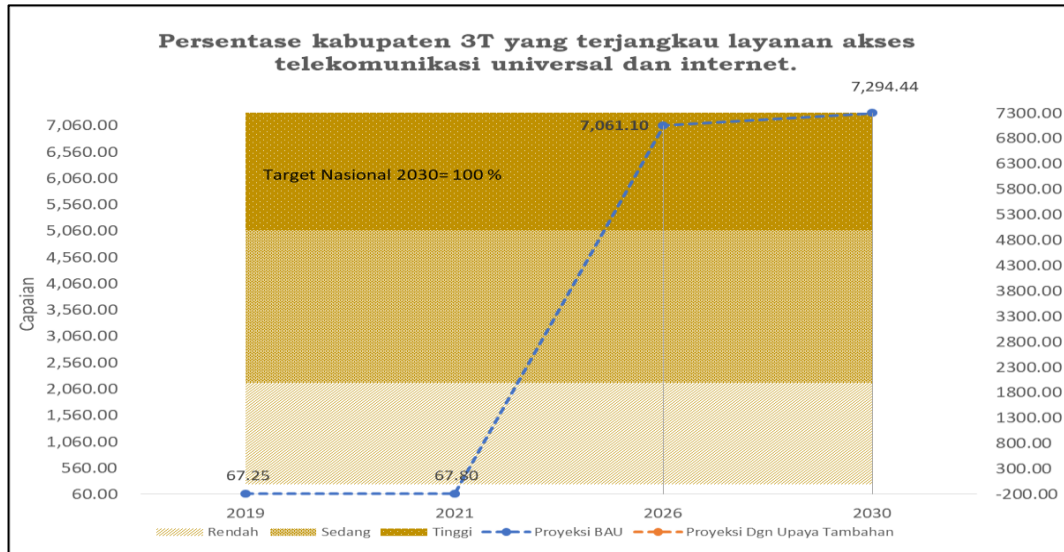
c) Nomor Indikator

Nomor : 17.8.1 (a)

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.33. Proyeksi Persentase Kabupaten 3T yang Terjangkau Layanan Akses Telekomunikasi Universal dan Internet

Baseline Data		Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	
Tahun	Data	Tahun	Proyeksi
2017	65,63	2019	67,25
2018	65,63	2021	67,80
2019	65,63	2026	7.061,10
2020	67,25	2030	7.294,44



Gambar 6.26. Grafik Persentase Kabupaten 3T yang Terjangkau Layanan Akses Telekomunikasi Universal dan Internet

e) Isu Strategi

- (1) Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi manajemen pemda untuk penyebaran informasi pembangunan daerah
- (2) Masih terdapat kesenjangan perkembangan dan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Tana Tidung dalam layanan telekomunikasi

f) Rekomendasi

- (1) Sasaran
 - ☞ Wilayah desa/kelurahan dan Kecamatan yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi khususnya internet.
- (2) Strategi/Arah Kebijakan
 - ☞ Pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi pada wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi
- (3) Program
 - ☞ Program Identifikasi wilayah (desa/kelurahan dan kecamatan) yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

- ☞ Program pembangunan jaringan telekomunikasi

(4) Kegiatan

- ☞ Pendataan/identifikasi wilayah belum terjangkau jaringan telekomunikasi
- ☞ Pemasangan jaringan telekomunikasi
- ☞ Fasilitasi sarana dan prasarana telekomunikasi instansi pemerintah di kecamatan dan desa/kelurahan serta masyarakat tidak mampu

(5) Pelaksana

- ☞ PT. Telkom Tbk.
- ☞ Dinas Komunikasi dan Informasi

7. Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani

a) Tujuan

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

b) Target

Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk memperhatikan kualitas udara diantaranya melakukan penanganan sampah kota.

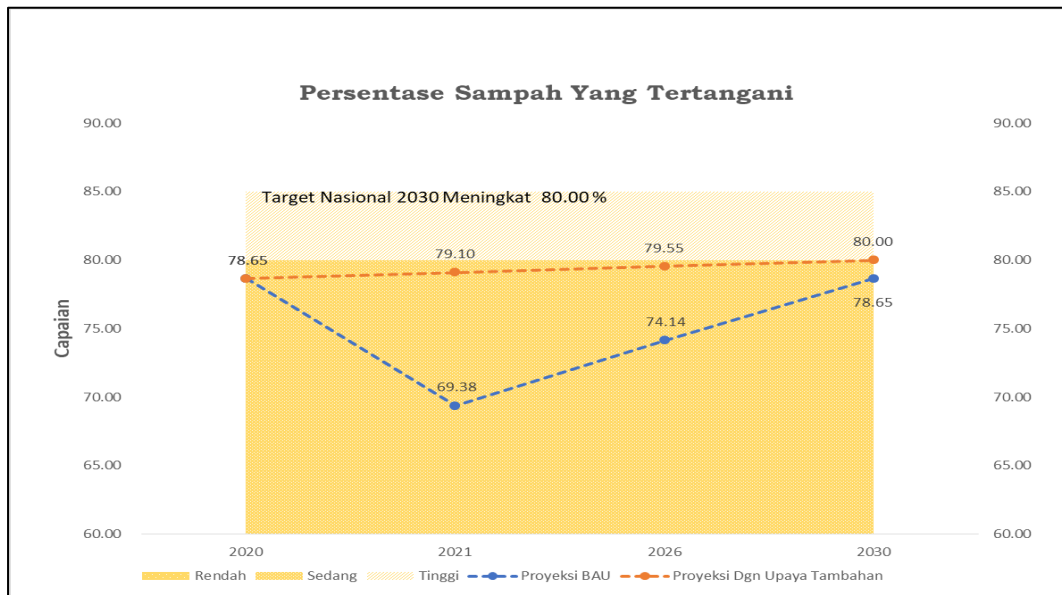
c) Nomor Indikator

Nomor : 11.6.1.(a)

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.34. Proyeksi Persentase Sampah Yang Tertangani

Baseline Data		Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	
Tahun	Data	Tahun	Proyeksi
2017	58,84	2020	78,65
2018	69,38	2021	105,13
2019	74,14	2026	269,05
2020	78,65	2030	1.688,58



Gambar 6.27. Grafik Persentase Sampah Yang Tertangani

e) Isu Strategis

- (1) Meningkatnya kuantitas sampah
- (2) Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup

f) Rekomendasi

(1) Sasaran

- ☞ Terwujudnya kawasan pemukiman yang berkualitas di Kabupaten Tana Tidung
- ☞ Penanganan sampah rumah tangga dan industri yang tertangani dengan baik

(2) Strategi/Arah Kebijakan

- ☞ Meningkatkan persentase sampah kota yang tertangani
- ☞ Meningkatkan sistem pengelolaan sampah kota yang ramah lingkungan
- ☞ Meningkatkan dan mengefektifkan bank sampah di lingkungan kawasan perumahan padat penduduk.

(3) Program

- ☞ Peningkatan persentase sampah kota yang ditangani.
- ☞ Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



- ☞ Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

(4) Kegiatan

- ☞ Penyuluhan pengelolaan sampah.
- ☞ Penyediaan TPS
- ☞ Pengelolaan Sampah di TPA
- ☞ Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah.
- ☞ Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- ☞ Bimbingan teknis persampahan.
- ☞ Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan.
- ☞ Kerjasama pengelolaan persampahan.
- ☞ Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan.
- ☞ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

(5) Pelaksana

- ☞ Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
- ☞ Kecamatan
- ☞ Pemerintah Desa

b. Alternatif Program Dalam Pencapaian TPB Yang Belum Tercapai Sehingga Perlu Upaya Tambahan

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat.

a) Tujuan

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun

b) Target

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam,



teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

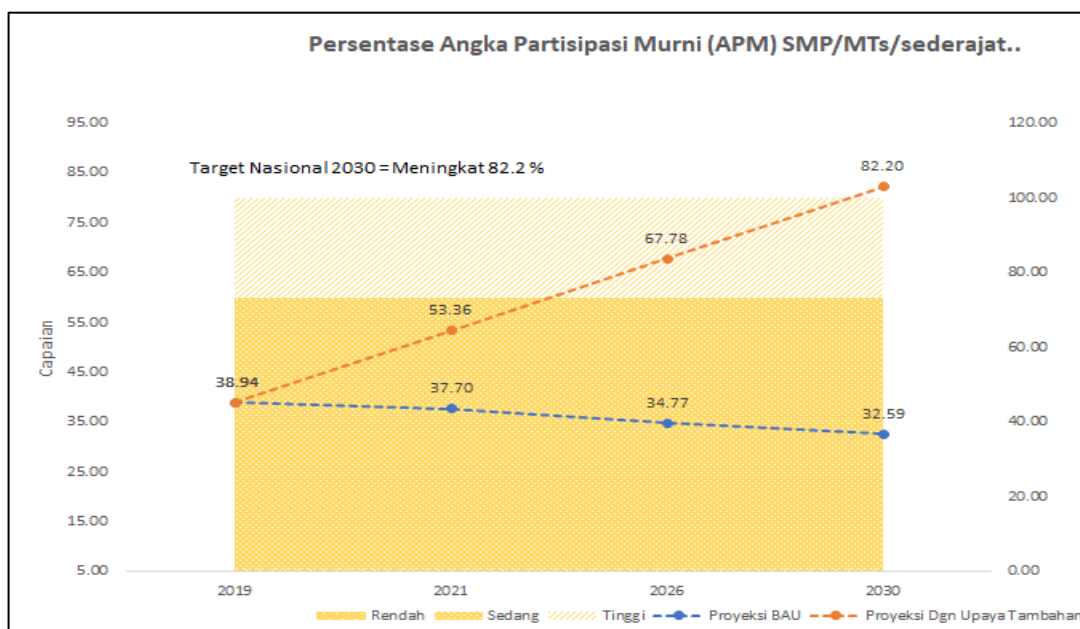
c) Nomor Indikator

Nomor : 1.4.1 (h)

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.35. Proyeksi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Sederajat

Tahun	Baseline Data	
2017	40,22	
2018	38,50	
2019	38,94	
2020		
	Proyeksi	
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
2019	38,94	38,94
2021	37,70	53,36
2026	34,77	67,78
2030	32,59	82,20



Gambar 6.28. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat



e) Isu Strategis

- (1) Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana SMP/MTs/ sederajat.
- (2) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan SMP/MTs/ sederajat.

f) Rekomendasi

- (1) Sasaran
Terwujudnya mutu Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
- (2) Strategi/Arah Kebijakan
 - ☞ Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidik
 - ☞ Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan Karakter
- (3) Program
 - ☞ Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah (SMP/MTs/ sederajat).
 - ☞ Program Pendidikan Non Formal pendidikan menengah (setara dengan SMP/MTs/ sederajat)
 - ☞ Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP/MTs/ sederajat
- (4) Kegiatan
 - ☞ Membangun dan Merehabilitasi bangunan sekolah SMP/MTs/ sederajat
 - ☞ Penyiapan sarana instalasi listrik pada sekolah SMP/MTs/ sederajat di seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung
 - ☞ Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SMP/MTs/ sederajat
 - ☞ Dana Pendamping SMP/MTs/ sederajat
 - ☞ Sosialisasi Ujian SMP/MTs/ sederajat



- ☞ Menyediakan dan mengelola dana Rutin SMP/MTs/ sederajat.
- ☞ Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pendidikan SMP/MTs/ sederajat.
- ☞ Pembinaan Ekstrakurikuler dan Pembangunan Karakter Peserta Didik
- ☞ Peningkatan kualitas SDM Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Kepala Sekolah, operator dan pengawas sekolah SMP/MTs/ sederajat
- ☞ Menyelenggarakan Ujian Paket B
- ☞ Bimbingan Teknis Tata Kelola Lembaga Kursus Pelatihan dan PKBM
- ☞ Pengelolaan Sertifikasi Guru di Kabupaten Tana Tidung
- ☞ Peningkatan Kinerja Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Tidung
- ☞ Diklat Calon/ Penguatan Kepala Sekolah SMP/MTs/ sederajat

(5) Pelaksana

- ☞ Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung
- ☞ Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Tana Tidung

2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak di Bawah Lima Tahun (Balita)

a) Tujuan

Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

b) Target

Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula.

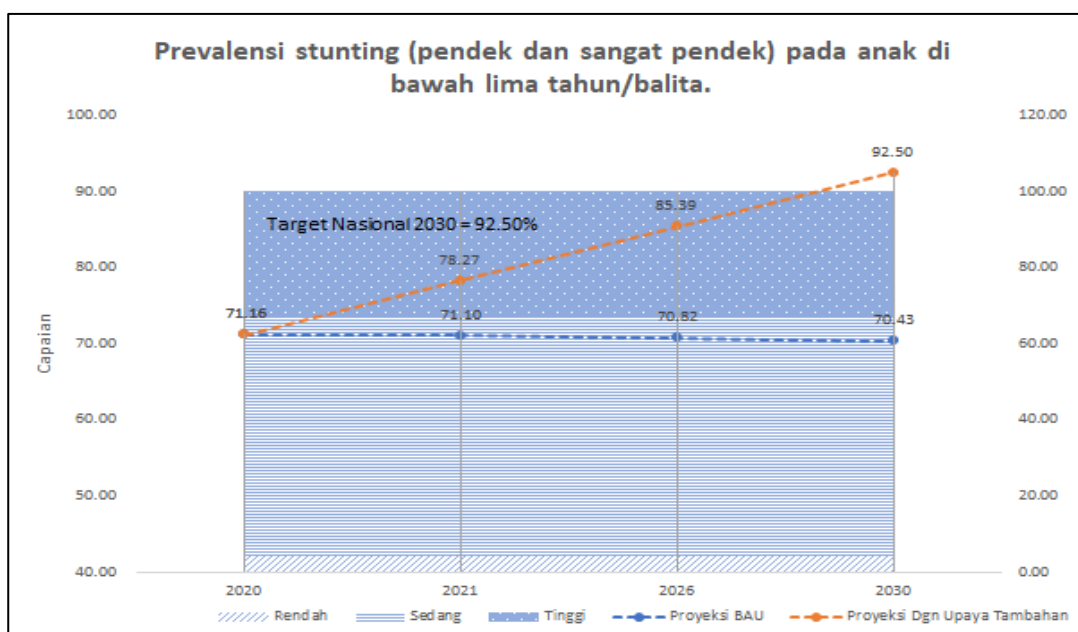
c) Nomor Indikator

Nomor : 2.2.1*

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.36. Proyeksi Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak di Bawah Lima Tahun (Balita)

Tahun	Baseline Data	
2017	71,33	
2018	71,35	
2019	71,38	
2020	71,16	
Proyeksi		
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
2020	71,16	71,16
2021	71,10	78,27
2026	70,82	85,39
2030	70,43	90,50



Gambar 6.29. Grafik Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak di Bawah Lima Tahun (Balita)

e) Isu Strategis

- (1) Masih kurang optimalnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi



- (2) Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- (3) Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

f) Rekomendasi

- (1) Sasaran
 - ☞ Ibu hamil dan anak dibawah umu lima tahun/balita
- (2) Strategi/Arah Kebijakan
 - ☞ Pengembangan kapasitas penyelenggara dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan terkait perubahan perilaku hidup sehat yang efektif dan efisien
 - ☞ Optimalisasi peran dan mobilisasi sumber daya swasta, donor, masyarakat madani, individu dan kelompok masyarakat dalam pengentasan stunting pada anak
 - ☞ Kampanye pentingnya pemberian gizi yang sehat bagi masyarakat umum secara berkelanjutan khususnya bagi ibu hamil dan balita.
- (3) Program
 - ☞ Peningkatan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan anak balita.
 - ☞ Peningkatan dan perbaikan gizi masyarakat
- (4) Kegiatan
 - ☞ Identifikasi wilayah yang rentan terhadap kekurangan pangan karena keterbatasan akses ekonomi.
 - ☞ Penyuluhan pertanian khususnya Rumah Pangan Lestari
 - ☞ Penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat khususnya khususnya ibu hamil dan anak balita menyangkut makanan sehat dan bergizi
 - ☞ Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
 - ☞ Pemberian makanan tambahan dan vitamin

- ☞ Suplementasi tabelt tambah darah

(5) Pelaksana

- ☞ Dinas Kesehatan
- ☞ Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

3. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan

a) Tujuan

Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

b) Target

Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

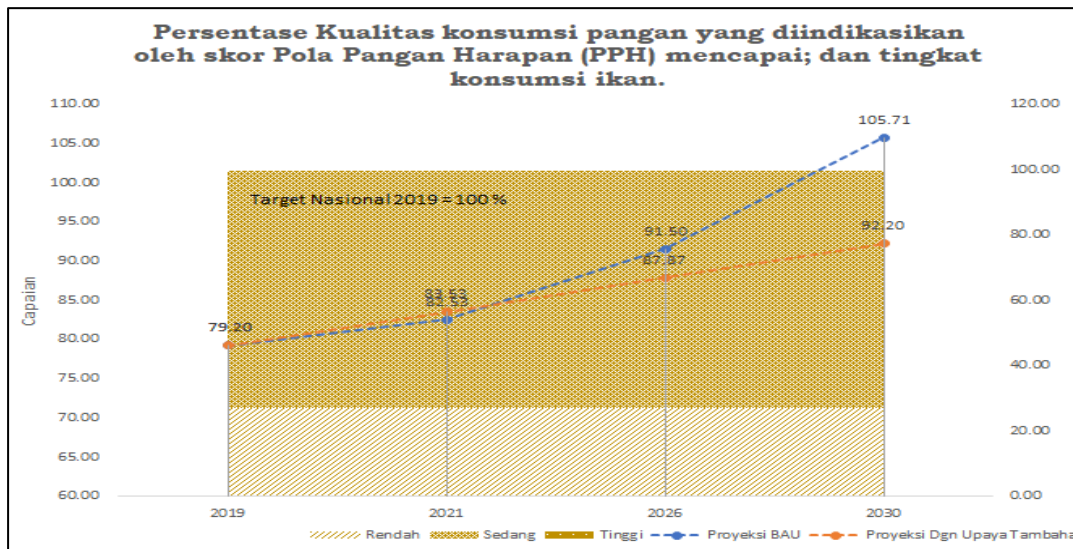
c) Nomor Indikator

Nomor : 3.3.3*

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.37. Proyeksi Persentase Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Tingkat Konsumsi Ikan

Tahun	Baseline Data	
2017	76,00	
2018	79,00	
2019	79,20	
2020		
	Proyeksi	
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
2019	79,20	72,90
2021	82,53	83,53
2026	91,50	87,87
2030	105,71	92,20



Gambar 6.30. Grafik Persentaser Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Tingkat Konsumsi Ikan

e) Isu Strategis

- (1) Belum adanya data base potensi produk pangan
- (2) Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga
- (3) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya
- (4) Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan gizi belum berkembang

f) Rekomendasi

- (1) Sasaran
 - ☞ Masyarakat Kabupaten Tana Tidung
- (2) Strategi/Arah Kebijakan
 - ☞ Perbaikan gizi pangan masyarakat
- (3) Program
 - ☞ Program perbaikan mutu pangan
 - ☞ Program pemenuhan kebutuhan pangan
- (4) Kegiatan
 - ☞ Pemantauan Status pangan dan Gizi



- ☞ Perbaikan gizi masyarakat
 - ☞ Penguatan kelembagaan pangan dan gizi
 - ☞ Peningkatan aksesibilitas pangan.
 - ☞ Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan
- (5) Pelaksana
- ☞ Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat

a) Tujuan

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

b) Target

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif

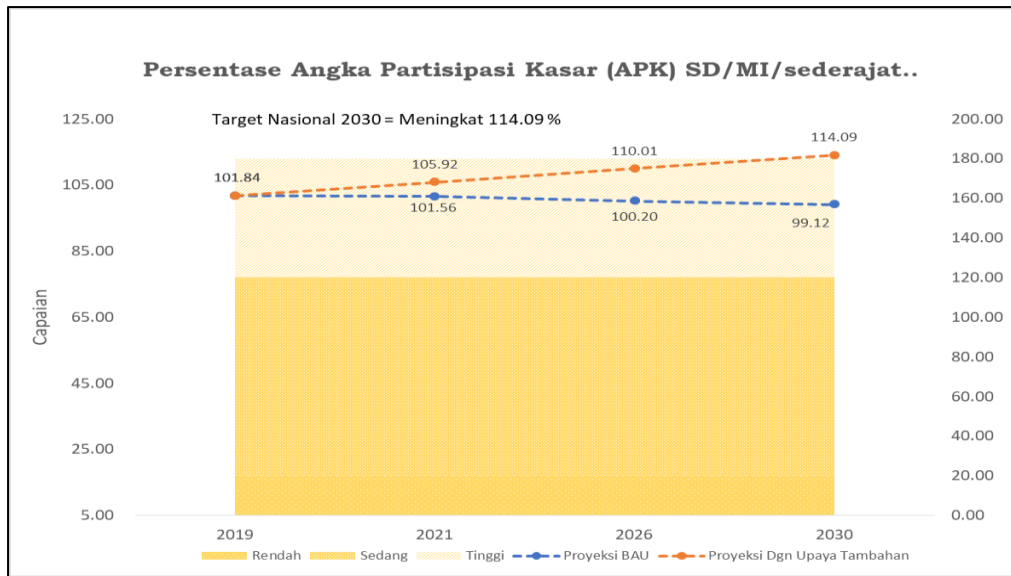
c) Nomor Indikator

Nomor : 4.1.1(d)

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.38. Proyeksi Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat

Tahun	Baseline Data	
2017	102,67	
2018	98,88	
2019	101,84	
2020		
	Proyeksi	
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
2019	101,84	101,84
2021	101,56	105,92
2026	100,20	110,01
2030	99,12	114,09



Gambar 6.31. Grafik Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat

e) Isu Strategis

- (1) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD dan pendidikan dasar.
- (2) Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana PAUD, TK, dan SD.

f) Rekomendasi

- (1) Sasaran
 - ☞ Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
- (2) Strategi/Arah Kebijakan
 - ☞ Peningkatan akses dan mutu layanan Sekolah Dasar
- (3) Program
 - ☞ Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun
- (4) Kegiatan
 - ☞ Membangun & merehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar
 - ☞ Menambah ketersediaan alat peraga/media pembelajaran dan buku Perpustakaan Sekolah Dasar



- ☞ Sosialisasi meningkatkan kesadaran pentingnya melaksanakan/menempuh pendidikan formal setingkat SD/sederajat.
- ☞ Mengoptimalkan Penggunaan TIK Sekolah Dasar
- ☞ Meningkatkan jumlah Sekolah Dasar berakreditasi minimal B
- ☞ Meningkatkan jumlah PTK Sekolah Dasar memenuhi standar kompetensi /bersertifikasi
- ☞ Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Sekolah Dasar
- ☞ Pemberian subsidi untuk siswa tidak mampu

(5) Pelaksana

- ☞ Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung
- ☞ Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Tana Tidung

5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat

a) Tujuan

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

b) Target

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif

c) Nomor Indikator

Nomor : 4.1.1.(e)

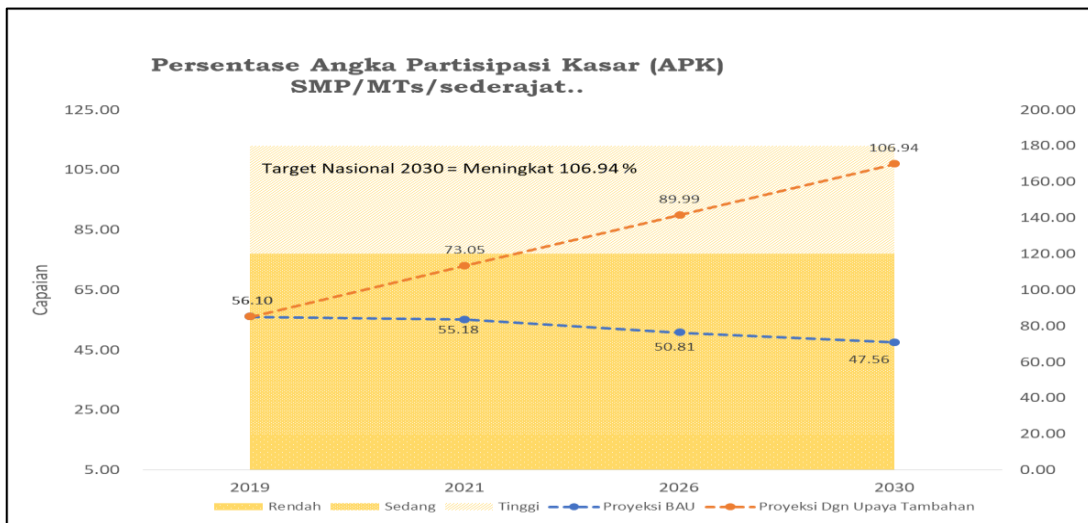
d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.39. Proyeksi Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat

Tahun	Baseline Data
2017	58,95
2018	55,38



2019	56,10	
2020		
Proyeksi		
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
2019	56,10	56,10
2021	55,18	73,05
2026	50,81	89,99
2030	47,56	106,94



Gambar 6.32. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat

e) Isu Strategis

- (1) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan SMP/MTs/ sederajat.
- (2) Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana SMP/MTs/ sederajat

f) Rekomendasi

(1) Sasaran

- ☞ Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.

(2) Strategi/Arah Kebijakan

- ☞ Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan SMP/MTs/ sederajat



(3) Program

- ☞ Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

(4) Kegiatan

- ☞ Membangun dan merehabilitasi ruang kelas SMP/MTs/ sederajat
- ☞ Menambah ketersediaan alat peraga/media pembelajaran dan buku Perpustakaan SMP/MTs/ sederajat
- ☞ Mengoptimalkan Penggunaan TIK SMP/MTs/ sederajat
- ☞ Meningkatkan jumlah SMP/MTs/ sederajat berakreditasi minimal B
- ☞ Meningkatkan jumlah PTK SMP/MTs/ sederajat memenuhi standar kompetensi /bersertifikasi
- ☞ Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan SMP/MTs/ sederajat
- ☞ Sosialisasi meningkatkan kesadaran pentingnya melaksanakan/menempuh pendidikan formal setingkat SMP/MTs/ sederajat
- ☞ Pemberian subsidi untuk siswa tidak mampu.

(5) Pelaksana

- ☞ Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung
- ☞ Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Tana Tidung

6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak

5) **Tujuan**

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan

6) **Target**

Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

7) **Nomor Indikator**

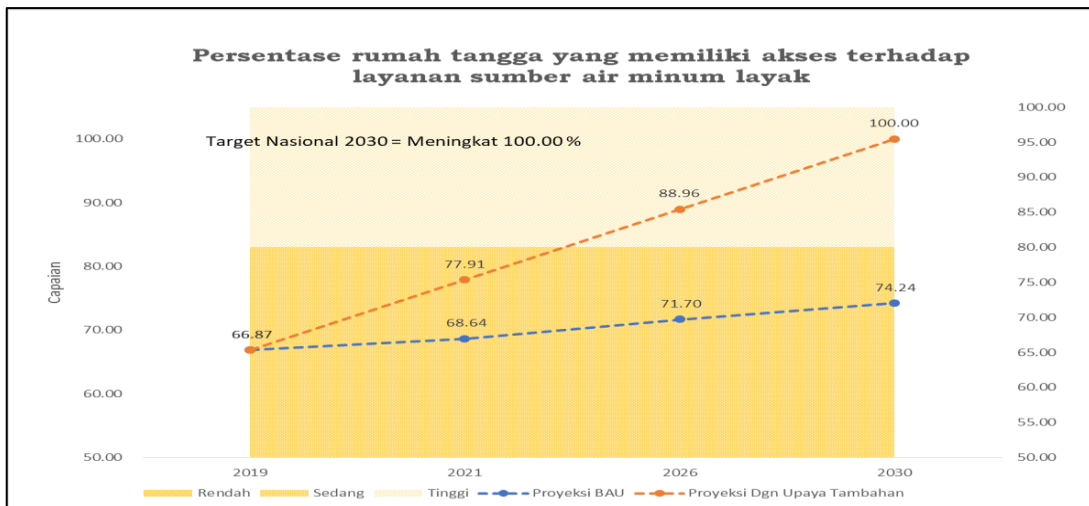
Nomor : 6.1.1.(a)



8) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.40. Proyeksi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak

Tahun	Baseline Data	
2017		
2018	66,29	
2019	66,87	
2020		
Proyeksi		
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
2019	66,87	66,87
2021	68,64	77,91
2026	71,70	88,96
2030	74,24	100,00



Gambar 6.33. Grafik Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak

9) Isu Strategis

- (1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya
- (2) Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
- (3) Meningkatnya kuantitas sampah
- (4) Menurunnya kuantitas sumber daya air



- (5) Meningkatnya pencemaran tanah
- (6) Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup

10) **Rekomendasi**

(1) Sasaran

Masyarakat Kabupaten Tana Tidung, khususnya masyarakat miskin dengan keterbatasan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan public

(2) Strategi atau Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas standar baku mutu dan distribusi air minum.

(3) Program

- ☞ Program pengembangan dan pengelolaan jaringan air bersih dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada baik di sungai, rawa, waduk, dan sumber air lainnya
- ☞ Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- ☞ Peningkatan pelayanan penyediaan akses dan kualitas baku mutu air minum.

(4) Kegiatan

- ☞ Perbaikan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih/air minum
- ☞ Peningkatan kualitas pengolahan mutu air minum.
- ☞ Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara sumber-sumber air minum.
- ☞ Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- ☞ Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum.
- ☞ Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana jaringan infrastruktur air bersih/minum skala perkotaan, perdesaan dan skala rumah tangga.



- ☞ Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah.
- ☞ Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum.
- ☞ Pengembangan distribusi air minum.

(5) Pelaksana

- ☞ Perusahaan Daerah Air Minum
- ☞ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- ☞ Dinas Kesehatan
- ☞ Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
- ☞ Kecamatan dan Kelurahan/Desa

7. Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan

a) Tujuan

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan

b) Target

Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua

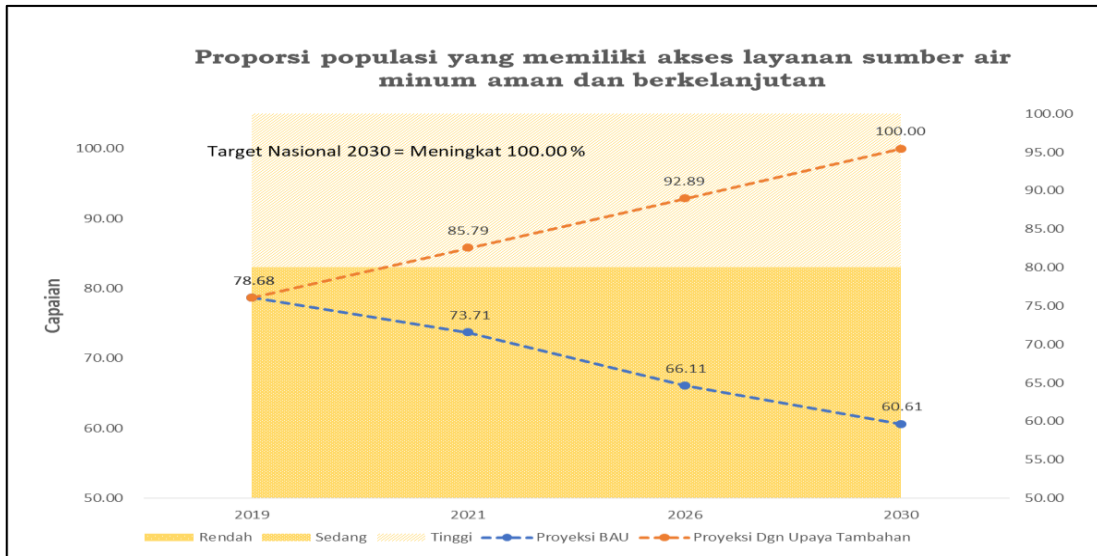
c) Nomor Indikator

Nomor : 6.1.1.(c)

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.41. Proyeksi Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan

Tahun	Baseline Data	
2017	67,91	
2018	80,41	
2019	78,68	
2020		
	Proyeksi	
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
2019	78,68	78,68
2021	73,71	85,79
2026	66,11	92,89
2030	60,61	100,00



Gambar 6.34. Grafik Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan

e) Isu Strategi

- (1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya
- (2) Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
- (3) Meningkatnya kuantitas sampah
- (4) Menurunnya kuantitas sumber daya air
- (5) Meningkatnya pencemaran tanah
- (6) Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup

f) Rekomendasi

- (1) Sasaran
Masyarakat Kabupaten Tana Tidung, khususnya masyarakat miskin dengan keterbatasan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan public
- (2) Strategi atau Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas standar baku mutu dan distribusi air minum.
- (3) Program



- ☞ Program pengembangan dan pengelolaan jaringan air bersih dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada baik di sungai, rawa, waduk, dan sumber air lainnya
- ☞ Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- ☞ Peningkatan pelayanan penyediaan akses dan kualitas baku mutu air minum.

(4) Kegiatan

- ☞ Perbaikan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih/air minum
- ☞ Peningkatan kualitas pengolahan mutu air minum.
- ☞ Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara sumber-sumber air minum.
- ☞ Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- ☞ Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum.
- ☞ Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana jaringan infrastruktur air bersih/minum skala perkotaan, perdesaan dan skala rumah tangga.
- ☞ Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah.
- ☞ Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum.
- ☞ Pengembangan distribusi air minum.

(5) Pelaksana

- ☞ Perusahaan Daerah Air Minum
- ☞ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- ☞ Dinas Kesehatan



8. Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja.

a) Tujuan

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan

b) Target

Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global

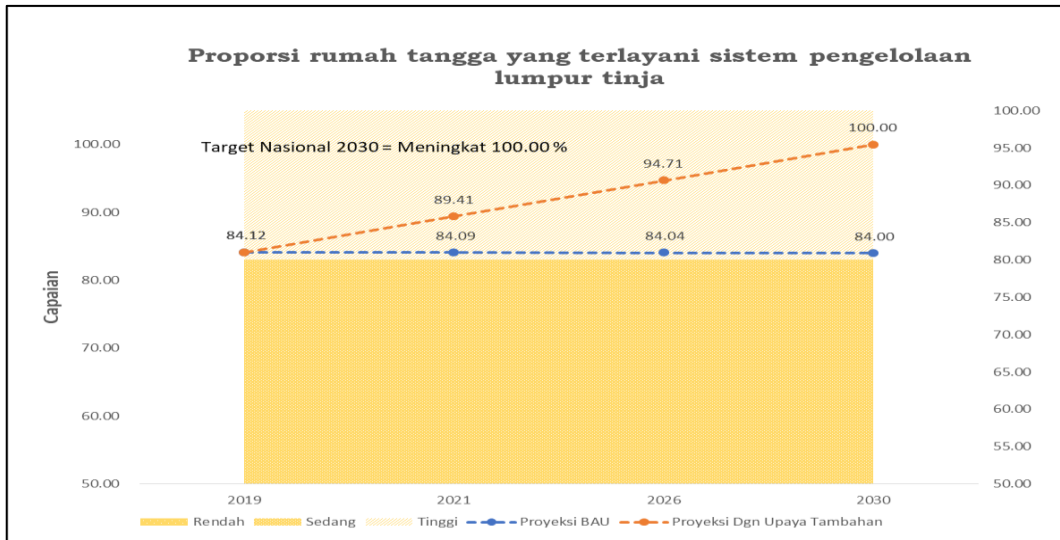
c) Nomor Indikator

Nomor : 6.3.1.(b)

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.42. Proyeksi Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja

Tahun	Baseline Data	
2017		
2018	84,13	
2019	84,12	
2020		
	Proyeksi	
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
2019	84,12	84,12
2021	84,09	89,41
2026	84,04	94,71
2030	84,00	100,00



Gambar 6.35. Grafik Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja

e) Isu Strategis

- (1) Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
- (2) Menurunnya kuantitas sumber daya air
- (3) Meningkatnya pencemaran tanah
- (4) Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup

f) Rekomendasi

- (1) Sasaran
 - Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman penduduk di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Strategi/Arah Kebijakan
 - Meningkatkan sarana dan infrastruktur untuk melayani pengelolaan lumpur tinja rumah tangga di Kabupaten Tana Tidung.
- (3) Program
 - Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan lumpur tinja
- (4) Kegiatan
 - Layanan pengambilan lumpur tinja;
- (6) Pelaksana



- Dinas Kesehatan.
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

9. Intensitas Energi Primer

a) Tujuan

Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua

b) Target

Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat

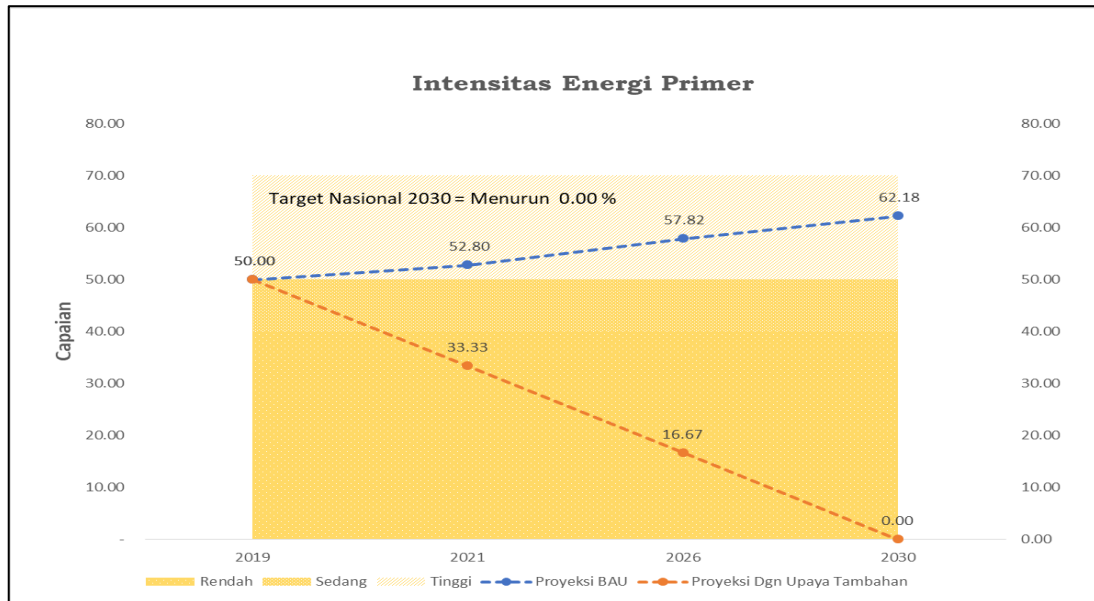
c) Nomor Indikator

Nomor : 7.3.1*

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.43. Proyeksi Proporsi Intensitas Energi Primer

Tahun	Baseline Data	
2017		
2018	49,10	
2019	50,00	
2020		
Proyeksi		
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
2019	50,00	50,00
2021	52,80	33,33
2026	57,82	16,67
2030	62,18	0,00



Gambar 6.36. Grafik Proporsi Intensitas Energi Primer

e) Isu Strategis

- (1) belum optimalnya pelayanan penyediaan energi non primer
- (2) Belum optimalnya kerjasama dalam dan antar daerah dalam rangka peningkatan modal, pelayanan publik, dan pengelolaan SDA
- (3) Ketergantungan energy primer masih sangat tinggi

f) Rekomendasi

- (1) Sasaran
 - ☞ Meningkatnya penggunaan Energ Terbarukan (ETB) dan modern di wilayah Kabupaten Tana Tidung
- (2) Strategi/Arah Kebijakan
 - ☞ Menurunkan ketergantungan masyarakat dalam menggunakan energi primer
 - ☞ Meningkatkan penggunaan energi modern dan ETB di Kabupaten Tana Tidung
- (3) Program
 - ☞ Peningkatan penggunaan energi modern dan EBT

(4) Kegiatan

- ☞ Penyuluhan penggunaan energi secara aman
- ☞ Pengadaan dan pengembangan EBT

(5) Pelaksana

- ☞ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

10. Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit

a) Tujuan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

b) Target

Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua

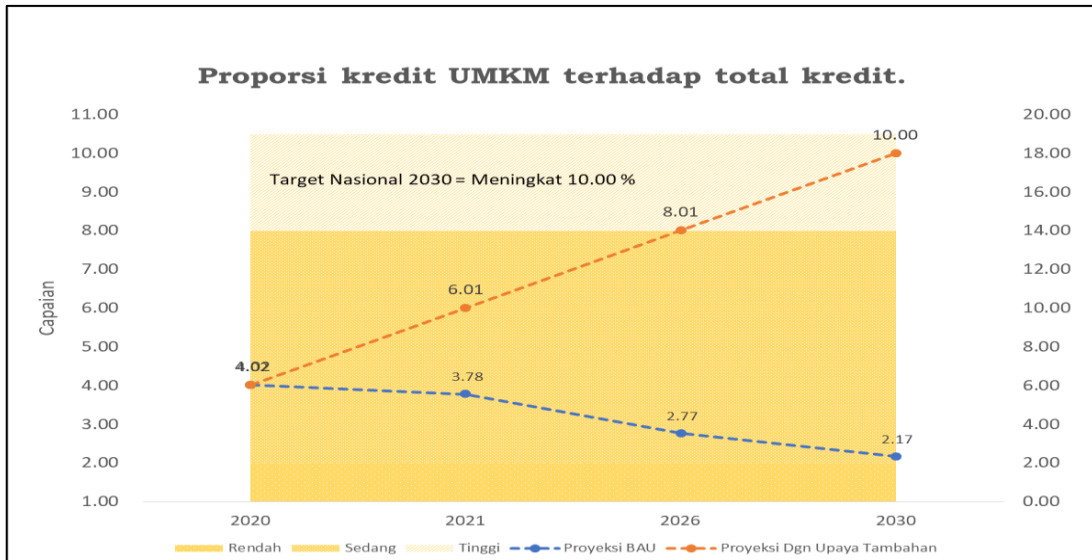
c) Nomor Indikator

Nomor : 8.10.1.(b)

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.44. Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit

Tahun	Baseline Data	
2017		
2018		
2019	4,84	
2020	4,02	
Proyeksi		
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
2019	4,02	4,02
2021	3,78	6,01
2026	2,77	8,01
2030	2,17	10,00



Gambar 6.37. Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit

e) Isu Strategis

- (1) Masih terdapat kesenjangan perkembangan dan pertumbuhan desa - desa di wilayah perbatasan.
- (2) Masih adanya usaha mikro belum berbadan hukum.
- (3) Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif.

f) Rekomendasi

(1) Sasaran

- ☞ Meningkatnya proporsi kredit UMKM terhadap total kredit

(2) Strategi/Arah Kebijakan

- ☞ Meningkatkan jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses pinjaman/kredit dari pemerintah atau bank

(3) Program

- ☞ Pembinaan Koperasi
- ☞ Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(4) Kegiatan

- ☞ Memfasilitasi UMKM dengan lembaga keuangan terkait pinjaman modal usaha/kredit



- ☞ Menciptakan iklim usaha kondusif bagi UMKM
 - ☞ Pelatihan dan pendampingan bagi koperasi/UMKM
 - ☞ Melakukan promosi produk UMKM
- (5) Pelaksana
- ☞ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

11. Jumlah Desa Tertinggal

a) Tujuan

Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

b) Target

Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

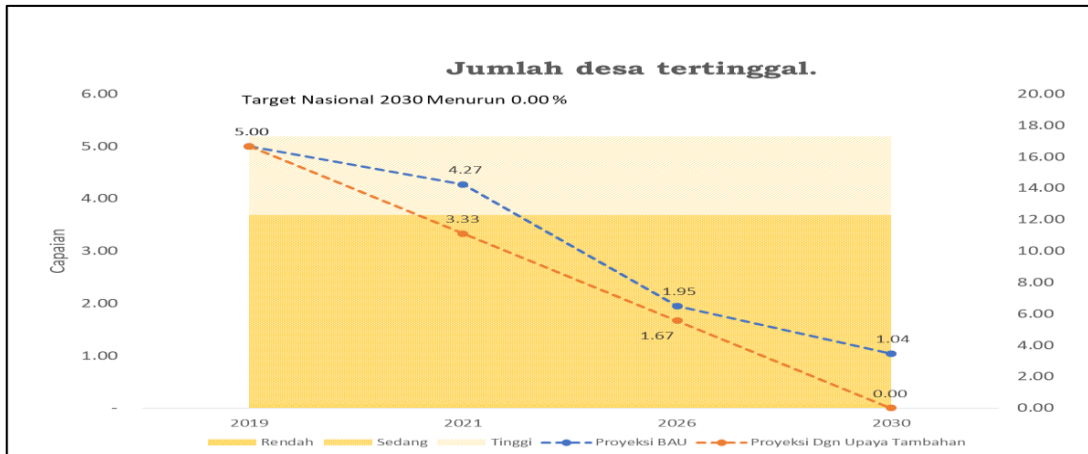
c) Nomor Indikator

Nomor : 10.1.1.(c)

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.45. Jumlah Desa Tertinggal

Tahun	Baseline Data	
2017	8	
2018	6	
2019	5	
2020		
	Proyeksi	
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
2019	5,00	5,00
2021	4,27	3,33
2026	1,95	1,67
2030	1,04	0,00



Gambar 6.38. Jumlah Desa Tertinggal

e) Isu Strategis

- (1) Masih terdapat kesenjangan perkembangan dan pertumbuhan desa desa di wilayah perbatasan
- (2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya

f) Rekomendasi

- (1) Sasaran
 - ☞ Menurunnya Desa tertinggal di Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Strategi/Arah Kebijakan
 - ☞ Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung
- (3) Program
 - ☞ Peningkatan Ekonomi Rakyat dalam rangka mengentaskan Kemiskinan.
 - ☞ Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pengetasan Kebodohan)
 - ☞ Pembangunan Infrastruktur
- (4) Kegiatan
 - ☞ Menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan desa tertinggal sesuai dengan kebutuhan, potensi dan nilai kearifan local



- ☞ Meningkatkan alokasi pendanaan bagi desa tertinggal
- ☞ Menggali dan membangun sumber-sumber perekonomian masyarakat desa tertinggal
- ☞ Melengkapi jaringan infrastruktur perdesaan pada desa tertinggal (jalan, listrik, irigasi, sarana air minum, telekomunikasi)
- ☞ Mendayagunakan lembaga kemasyarakata desa dan lembaga adat dalam membangun desa
- ☞ Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kasitas Sumber Daya Manusia desa
- ☞ Melakukan pendampingan desa yang berkelanjutan
- ☞ Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

(5) Pelaksana

- ☞ Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

12. Jumlah Desa Mandiri

a) Tujuan

Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

b) Target

Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional

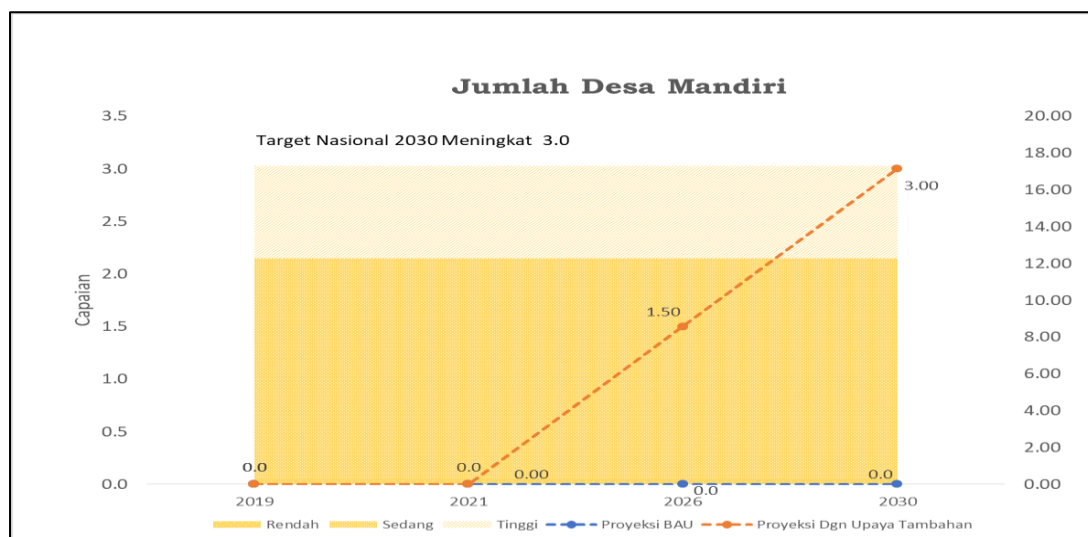
c) Nomor Indikator

Nomor : 10.1.1.(d)

d) Proyeksi Capaian Indikator TPB

Tabel 6.46. Jumlah Desa Mandiri

Tahun	Baseline Data	
2017	0	
2018	0	
2019	0	
2020	0	
Proyeksi		
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
2020	0,0	0,0
2021	0,0	0,0
2026	0,0	1,5
2030	0,0	3,0



Gambar 6.39. Grafik Jumlah Desa Mandiri

e) Isu Strategis

- (1) Masih terdapat kesenjangan perkembangan dan pertumbuhan desa desa di wilayah perbatasan
- (2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya

f) Rekomendasi

- (1) Sasaran
 - ☞ Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Tana Tidung



(2) Strategi/Arah Kebijakan

- ☞ Prioritas pembangunan desa yang masuk kategori lebih maju untuk menuju kemandirian

(3) Program

- ☞ Peningkatan Ekonomi Rakyat dalam rangka mengentaskan Kemiskinan.
- ☞ Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pengetasan Kebodohan)
- ☞ Pembangunan Infrastruktur

(4) Kegiatan

- ☞ Menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan desa yang lebih maju untuk menuju desa mandiri.
- ☞ Meningkatkan alokasi pendanaan desa menuju kemandirian
- ☞ Menggali dan membangun sumber-sumber perekonomian masyarakat desa.
- ☞ Melengkapi jaringan infrastruktur perdesaan (jalan, listrik, irigasi, sarana air minum, telekomunikasi)
- ☞ Mendayagunakan lembaga kemasyarakata desa dan lembaga adat dalam membangun desa
- ☞ Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kasitas Sumber Daya Manusia desa
- ☞ Melakukan pendampingan desa yang berkelanjutan
- ☞ Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintaha desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

(5) Pelaksana

- ☞ Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



- ☞ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

c. Rekomendasi untuk indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Tercapai

Terhadap indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum tercapai, dapat direkomendasikan upaya-upaya percepatan secara umum sebagai berikut:

- 1) Menginventarisasi semua indikator yang berstatus belum dilaksanakan dan belum tercapai (edisi 2)
- 2) Memahami definisi dan cara menghitung indikator yang berstatus belum dilaksanakan dan belum tercapai dari metadata indikator edisi 2.
- 3) Mengelompokkan indikator yang dapat ditangani bersama-sama dengan satu langkah dan strategi yang terintegrasi.
- 4) menetapkan prioritas kegiatan per tahun untuk mencapai target indikator TPB

d. Alternatif Skenario dan Rekomendasi untuk Indikator yang Belum Memiliki Data

Alternatif skenario dan rekomendasi untuk indicator yang belum memiliki data sebagai berikut :

- 1) Mengkaji lebih lanjut dokumen informasi kinerja pemerintah daerah dari seluruh organisasi perangkat daerah yang ada.
- 2) Menginventarisasi semua indikator yang berstatus belum ada datanya ataupun bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan karakteristik wilayah
- 3) Mengelompokkan indikator yang dapat ditangani bersama-sama dengan satu langkah dan strategi yang terintegrasi
- 4) Menetapkan prioritas kegiatan per tahun untuk mencapai target indikator TPB



6.3. Alternatif skenario untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target RPJMN 2019

Diperlukan komitmen dari pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk melanjutkan pencapaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

6.4. Pengintegrasian Indikator TPB/SDGs sebagai KRP ke Dalam RPJMD Kab. Tana Tidung Tahun 2021-2026

Hasil kajian KLHS RPJMD perlu diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, integrasi indikator TPB perlu dituangkan dalam dokumen RPJMD untuk memastikan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan sudah mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup.

Ketidakjelasan yang sering terjadi ketika menilai apakah kepentingan lingkungan hidup telah atau belum diintegrasikan dalam penyusunan suatu rencana pembangunan terutama dalam RPJMD khususnya ketidakjelasan apa makna “Kepentingan Lingkungan Hidup dan bagaimana kepentingan lingkungan hidup tersebut dipertimbangkan atau diintegrasikan”

Dengan demikian, kepentingan lingkungan hidup yang perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD dapat dimaknai dari tiga prinsip pembangunan berkelanjutan yang merupakan kaidah-kaidah dari aspek ekologi, ekonomi dan social, yaitu keterkaitan/ketergantungan (*independency*), keberlanjutan (*sustainable*), dan keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya (*environmental justice*). Masing-masing kaidah ini kemudian dijabarkan dalam beberapa indikator tujuan pembangunan berkelanjutan.

Prinsip 1. Pertimbangan keterkaitan/ ketergantungan (*independency*)

Menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam proses pengambilan



keputusan perencanaan pembangunan; kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan antar pemangku kepentingan; kejelasan mekanisme, prosedur, dan kewenangan dalam hubungan kerja antar sector, antar lembaga (formal dan non formal), dan antar wilayah; kejelasan digunakannya pendekatan ekosistem; dan keterkaitan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten/kota terutama antar kabupaten/kota dalam satu ekosistem.

Prinsip 2. Pertimbangan kaidah-kaidah keberlanjutan (*Sustainability*). Menunjukkan sejahumana factor-faktor penunjang keberlanjutan antara lain Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTL), keberadaan jasa ekosistem, potensi resiko lingkungan hidup yang dapat terjadi, mutu dan kemampuan SDA), potensi terjadinya perubahan iklim, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.

Prinsip 3. Pertimbangan kaidah keadilan social dan ekonomi dalam pemanfaatan SDA (*Environmental Justice*). Dengan demikian, pertimbangan social-ekonomi yaitu mencegah terjadinya pembangunan yang berakibat pada marginalisasi dan kemiskinan akibat ketidakadilan dalam akses, pemanfaatan, penguasaan, dan pengendalian terhadap sumber daya alam. Disisi lain mengedepankan pertimbangan keadilan dalam akses infrastruktur dasar dan informasi atas sumber daya

Untuk memudahkan integrasi prinsip-prinsip kepentingan lingkungan hidup tersebut di atas dalam perencanaan pembangunan, maka prinsip-prinsip tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk indikator TPB yang telah dianalisis dalam kajian KLHS RPJMD sebagai tolok ukur untuk diintegrasikan dalam

dokumen RPJMD terutama indikator TPB yang belum tercapai dalam pelaksanaan pembangunan sebelumnya.

6.4.1. Integrasi Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap KRP

Mengacu pada hasil KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 direkomendasikan agar disusun sesuai dengan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Berikut merupakan integrasi hasil KLHS terhadap KRP.

Tabel 6.47. Integrasi Hasil KLHS Terhadap KRP

No	KRP RPJMD	Rekomendasi	KRP draft	Integrasi
1	Visi	Untuk menjamin agar Visi RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026 dapat menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka dalam penjelasan masing-masing pokok visi perlu dapat dimaknai mendukung pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026 terdapat kata pokok bermartabat, sejahtera, indah, dan humanis	<ul style="list-style-type: none"> Bermartabat dapat dimaknai bahwa pelaku pembangunan memiliki moralitas yang baik dalam mengelola SDA dgn menjada kelestarian lingkungan Sejahtera dapat dimaknai terciptanya kesejahteraan generasi saat ini dan masa yang akan datang Indah dapat dimaknai bahwa pelaku pembangunan berorientasi pada berorientasi pada terciptanya lingkungan yang indah yaitu lingkungan yang tetap terjaga kelestariannya dari kerusakan dan pencemaran Humanis dapat dimaknai bahwa pelaku pembangunan menjamin kehidupan yang lebih baik terhadap



No	KRP RPJMD	Rekomendasi	KRP draft	Integrasi
				sesama manusia dan makhluk hidup lainnya
2	Misi	Untuk menjamin agar Misi RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026 dapat menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka dalam penjelasan misi mengandung makna 6 muatan KLHS	Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026 memuat hal-hal terkait peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi yang berkeadilan, pelestarian lingkungan hidup, penguatan kemandirian desa, tata kelola pemerintahan yang baik, dan jaminan keamanan dan ketertiban wilayah	Rumusan visi seyogyanya diarahkan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup dengan mengelola SDA secara efektif dan efisien mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang dan kondisi lingkungan tetap terjamin kelestariannya.
3	Tujuan	Untuk menjamin agar Tujuan RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026 dapat menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka dalam penjelasan tujuan diarahkan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Tujuan pada Misi ke-4 RPJMD telah focus pada pencapaian peningkatan kelestarian lingkungan disamping tujuan peningkatan kesejahteraan, peningkatan SDM, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan wilayah menuju desa mandiri pada misi lainnya	Tujuan pada setiap misi sudah mengacu pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan namun perlu lebih dirinci lagi dalam penyusunan program-program pembangunan



No	KRP RPJMD	Rekomendasi	KRP draft	Integrasi
4	Sasaran	Untuk menjamin agar Sasaran RPJMD Kabupaten Jepara 2017-2022 dapat menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka rumusan sasaran perlu ditambahkan peningkatn kualitas air dan tanah	Rumusan Sasaran pada Misi 4 RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026: hanya focus pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan indicator Emisi GRK	Sasaran pada Misi 4 RPJMD perlu lebih dikembangkan lagi selain pada penurunan emisi GRK, tetapi juga pada peningkatan kualitas air dan tanah
5	Strategi	Untuk menjamin agar Strategi RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026 dapat menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka pada strategi pada misi ke- 4 RPJMD diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Rumusan Sasaran pada Misi 4 RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026: sudah focus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup	Strategi pada misi 4 RPJMD Kabupaten Tana Tidup tahun 2021-2026 dapat ditambahkan kalimatnya menjadi Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
6	Arah Kebijakan	Untuk menjamin agar Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026 dapat menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup tidak hanya focus pada arah kebijakan keempat (tahun 2025), tetapi pada setiap arah kebijakan	Rumusan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026: terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu terwujudnya produktivitas dan Kualitas Lingkungan hidup bagi	Arah kebijakan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2026 perlu ditambahkan kalimat untuk menjadi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



No	KRP RPJMD	Rekomendasi	KRP draft	Integrasi
		sejak tahun 2022-2026, termasuk di dalamnya upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup	masyarakat Tana Tidung	
7	Indikasi Program	Untuk menjamin agar Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026 dapat menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka program pembangunan yang disusun dalam RPJMD tahun 2021-2026 menggunakan indicator TPB.	Rumusan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026: disusun berdasarkan bidang urusan atau jenis layanan	Program pembangunan yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 mengacu pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri atas 213 indikator untuk Kabupaten Tana Tidung dari total 220 indikator. Prioritas pelaksanaan program hendaknya lebih focus pada indicator TPB yang berdampak negative pada 6 muatan KLHS dan indicator yang telah dilaksanakan tetapi belum tercapai target dan yang tidak tercapai target karena memang belum dilaksanakan.

6.4.2. Integrasi Indikator TPB dalam dokumen RPJMD yang terkait langsung DDDT-LH

Indikator TPB dalam dokumen RPJMD yang terkait langsung dengan DDDTLH sebanyak 21 indikator yang berasal dari indikator yang termasuk dalam kategori (kelompok) B dan C yaitu indicator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target serta indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target. Dari 21 indikator TPB yang terkait langsung dengan DDDTLH tersebut tersebut pada 12 TPB yaitu TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 6, TPB 7, TPB, 8, TPB, 9, TPB 10, TPB 11, TPB 12, TPB 15, dan TPB 17. Adapun



indicator TPB yang terkait langsung dengan DDDTLH disajikan pada Tabel 6.48.

Tabel 6.48. Indikator TPK yang Terkait DDDTLH yang Akan Dintegrasikan dalam Dokumen RPJMD Kab. Tana Tidung Tahun 2021-2026

No.	No. Indikator	Indikator	Target PerPres 59/2017	Skenario
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Tidak Perlu Upaya Tambahan
2	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Perlu Upaya Tambahan
3	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	Perlu Upaya Tambahan
4	3.3.3*	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Meningkat menjadi 100%	Perlu Upaya Tambahan
5	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	Perlu Upaya Tambahan
6	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Perlu Upaya Tambahan
7	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	Tidak Perlu Upaya Tambahan
8	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	Perlu Upaya Tambahan



No.	No. Indikator	Indikator	Target PerPres 59/2017	Skenario
9	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	Perlu Upaya Tambahan
10	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat	Perlu Upaya Tambahan
11	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	Perlu Upaya Tambahan
12	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Meningkat	Perlu Upaya Tambahan
13	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Menurun	Perlu Upaya Tambahan
14	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	Tidak Perlu Upaya Tambahan
15	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	
16	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang 5000 (Nasional)	Perlu Upaya Tambahan
17	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Berkurang 2000 (Skala Nasional)	Perlu Upaya Tambahan
18	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	Perlu Upaya Tambahan
19	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	Perlu Upaya Tambahan
20	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5.5. juta Skala Nasional	Perlu Upaya Tambahan
21	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100%	Tidak Perlu Upaya Tambahan

6.4.3. Integrasi Indikator TPB dalam dokumen RPJMD yang tidak terkait langsung DDDT-LH

Indikator TPB dalam dokumen RPJMD yang terkait tidak langsung dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebanyak sembilan indikator yang berasal dari indikator yang termasuk dalam kategori (kelompok) B dan C yaitu indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target serta indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target. Dari Sembilan indikator TPB yang terkait langsung dengan DDDTLH tersebut tersebut pada 12 TPB yaitu TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4, TPB, 8, dan TPB 15. Adapun indikator TPB yang terkait langsung dengan DDDTLH disajikan pada Tabel 6.49.

Tabel 6.49. Indikator TPK yang Tidak Terkait DDDTL yang akan Dintegrasikan dalam Dokumen RPJMD Kab. Tana Tidung Tahun 2021-2026

No.	No. Indikator	Indikator	Target Perpres 59/2017	Skenario
1	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	Tidak Perlu Upaya Tambahan
2	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	Tidak Perlu Upaya Tambahan
3	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	Perlu Upaya Tambahan
4	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	Perlu Upaya Tambahan
5	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	Perlu Upaya Tambahan



No.	No. Indikator	Indikator	Target Perpres 59/2017	Skenario
6	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	Perlu Upaya Tambahan
7	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	Perlu Upaya Tambahan
8	8.10.1.(b)	Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	Meningkat menjadi 100%	Perlu Upaya Tambahan
9	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Belum tersedia	Perlu Upaya Tambahan



BAB VII

KESIMPULAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembuatan KLHS RPJMD Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
2. Seluruh proses dalam penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021 – 2026 dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti Tim Pokja KLHS RPJMD, Tim RPJMD, Unsur Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), LSM, dan tokoh masyarakat.
3. Berdasarkan hasil proses Diskusi Diskusi Terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*), diperoleh 190 daftar panjang (*longlist*) isu Pembangunan Berkelanjutan dari 34 Isu/Permasalahan utama. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis diperoleh 67 daftar pendek (*shortlist*) isu Pembangunan Berkelanjutan, dan hasil kompilasi isu diperoleh 7 isu prioritas/strategis.
4. Berdasarkan hasil identifikasi pencapaian indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, maka Kabupaten Tana Tidung hanya melaksanakan 16 tujuan yang terbagi dalam 213 indikator, yaitu :



- 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Tana Tidung dan sudah mencapai target nasional (Kategori A) sebanyak 74 indikator (34,74 %).
- 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Tana Tidung, akan tetapi belum mencapai target nasional (Kategori B) sebanyak 25 indikator (11,74%).
- 3) Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (Kategori C) sebanyak 5 indikator (2,35 %)
- 4) Indikator TPB yang belum ada data (Kategori D) sebanyak 109 indikator (51,17 %)
5. Terdapat 13 (Tiga Belas) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai OPD *Leading Sector* yang berperan dalam pencapaian target TPB. Dalam pencapaian TPB tersebut, diperlukan peran para pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Akademisi, dan Philantrophy) dan dukungan anggaran:
 - 1) OPD yang sudah melaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 12 OPD dengan total 74 indikator.
 - 2) OPD yang sudah melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 10 OPD dengan total 25 indikator.
 - 3) OPD yang belum melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 2 OPD dengan total 5 indikator.
 - 4) OPD yang datanya belum tersedia sebanyak 13 OPD dengan total 109 indikator.
6. Berdasarkan hasil proses penyusunan KLHS (Analisis Skenario dan Rekomendasi), maka RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021 – 2026 harus memperhatikan pengaruh KRP terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan:
 - 1) Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan yang telah disusun sudah mengarah pada pencapaian TPB, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan,



keseimbangan, dan keadilan.

- 2) Rencana program pembangunan yang akan disusun adalah merupakan hasil integrasi dari 213 indikator TPB agar target capaian TPB dapat terealisasi pada akhir masa pelaksanaan rencana pembangunan (tahun 2026) sebagaimana telah terprogram dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026.
- 3) Dalam pelaksanaan program pembangunan, agar lebih memprioritaskan indikator TPB kategori B dan Kategori C yaitu indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target dan indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target, baik dengan upaya tambahan maupun tanpa upaya tambahan.
- 4) Dalam pelaksanaan program pembangunan, agar memperhatikan kajian pengaruh KRP yang berdampak negatif terhadap 6 (enam) muatan KLHS yang berpotensi muncul di Kabupaten Tana Tidung.
- 5) Perlu komitmen dari pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk melanjutkan pencapaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan, serta mengkaji kembali indikator TPB yang belum ada datanya.
- 6) Dalam mengimplementasikan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021 - 2024 sebagai instrumen penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026, perlu memperhatikan karakteristik wilayah, kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tana Tidung sehingga berhasil guna dan berdaya guna.
- 7) Karakteristik wilayah yang harus mendapat perhatian adalah terkait dengan isu strategis antara lain : menurunnya daya tampung dan daya tampung lingkungan hidup khususnya ketersediaan pangan, dan kualitas air bersih di wilayah



pesisir pantai dan sungai; degradasi ekosistem rawa gambut, kebakaran lahan dan hutan, pengaturan tata ruang wilayah (tingginya konflik di bidang pertanahan dan terbatasnya lahan pengembangan pemerintahan karena status lahan dominasi Kawasan Budidaya Kehutanan/KBK)

7.2. Rekomendasi

Rekomendasi ini merupakan saran-saran yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026. Adapun hal-hal yang direkomendasikan untuk dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program rencana pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 harus memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rangka pencapaian TPB sebagaimana amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017.
2. Guna memastikan 213 indikator TPB yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tana Tidung, maka harus terintegrasi ke dalam KRP pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 yang sedang disusun. Integrasi indikator TPB sebagai KRP dalam RPJMD tahun 2021-2026 tersebut, antara lain:
 - a) Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung harus berkomitmen untuk tetap melaksanakan 74 indikator TPB yaitu indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 sebagai KRP dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026.
 - b) Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung harus berkomitmen



untuk lebih memprioritaskan melaksanakan 30 indikator TPB yaitu 25 indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target dan 5 indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 sebagai KRP prioritas dalam RPJMD tahun 2021-2026.

- c) Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung harus berkomitmen untuk menginventarisasi sekitar 109 indikator TPB yang berstatus belum ada datanya dan sekaligus untuk memastikan apakah indikator TPB tersebut sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan atau indikator TPB tersebut bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayahnya.
3. Dalam pelaksanaan 213 indikator TPB yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung sebagai KRP dalam RPJMD Kabupaten Tanah Tidung tahun 2021-2026, harus memperhatikan indikator TPB sebagai KRP yang memberikan dampak negatif terhadap 6 (enam) muatan KLHS:
- a) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
 - ☞ Daya dukung pangan khususnya dalam penyediaan beras berada pada kondisi tidak mendukung karena daerah ini masih minus dalam penyediaan pangan beras sehingga perlu ditingkatkan ke depan dalam pelaksanaan KRP RPJMD tahun 2021-2026
 - ☞ Daya dukung ketersediaan air sangat mendukung karena potensi ketersediaan air sangat besar, hanya ketersediaan air bersih yang masih kurang terutama pada wilayah-wilayah sekitar kepulauan, sempadan pantai dan sempadan sungai
 - ☞ Daya dukung ketersediaan lahan tidak mendukung dalam pengembangan wilayah karena dominasi Kawasan



Budidaya Kehutanan (KBK) dan berstatus kawasan bergambut. Dengan demikian perlu upaya perubahan status KBK menjadi KBNK (Kawasan Budidaya Non Kehutanan). Sedangkan daya dukung lahan untuk pangan sudah sangat mendukung karena lahan pangan cukup tersedia, hanya optimalisasi pemanfaatan lahan pangan tersebut perlu ditingkatkan

- ☞ Daya tampung lingkungan hidup dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sudah cukup bagus sehingga perlu dijaga ke depan dalam pelaksanaan KRP RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026
- b) Jasa ekosistem di Kabupaten Tana Tidung umumnya berada pada kisaran tinggi sampai sangat tinggi, sehingga perlu dipertahankan dalam pelaksanaan KRP RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026
- c) Tingkat resiko bencana dampak lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tana Tidung cukup tinggi sampai dengan tahun 2019. Namun tahun 2020 intensitas kebakaran hutan dan lahan menurun drastis sehingga perlu dipertahankan. Adapun resiko bencana lainnya adalah banjir dan longsor.
- d) Ketersediaan sumberdaya alam di Kabupaten Tana Tidung dalam mendukung perekonomian daerah masih didominasi dari sektor Pertanian dalam arti luas serta sektor pertambangan dan penggalian. Dengan demikian, sektor lainnya perlu juga dipacu pembangunannya dalam mendukung perekonomian daerah.
- e) Terdapat sekitar 174 spesies yang mendukung keanekaragaman hayati di Kabupaten Tana Tidung. Dari 174 spesies tersebut, terdapat sekitar 24 spesies tergolong dilindungi dan menempati sekitar wilayah Gunung Rian, Tana Lia, dan Sengkong. Berkaitan dengan itu dalam penyusunan



KRP RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021 – 2026 perlu mendapat perhatian sebagai bagian upaya untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati tersebut.

- f) Kondisi iklim di Kabupaten Tana Tidung masih dalam kondisi yang cukup bagus baik dilihat dari kisaran curah hujan, temperatur udara, penyinaran matahari, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Kondisi ini perlu dipertahankan ke depan terutama dalam pelaksanaan KRP RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026
4. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala dalam pelaksanaan TPB yang menjadi KRP RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 terutama dalam mengevaluasi ketercapaiannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung yang BERSIH (Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis) sebagaimana dalam Visi Bupati Terpilih periode 2021-2026.



DAFTAR PUSTAKA

- [Bappeda dan Litbang Kab. Tana Tidung] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tana Tidung. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.
- [Bappeda dan Litbang Kab. Tana Tidung] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tana Tidung. 2020. Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 – 2024
- [Bappeda dan Litbang Kab. Tana Tidung dan BPS Kab. Tana Tidung] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tana Tidung dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, 2020. Profil Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019.
- [Bappeda dan Litbang Kab. Tana Tidung] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tana Tidung. 2020. RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021.
- [BPBD Kab. Tana Tidung] Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung. 2021. Laporan Kejadian Bencana di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 – 2020.
- [BPS Kab. Tana Tidung] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung. 2017. Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2016.
- [BPS Kab. Tana Tidung] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung. 2018. Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2017.
- [BPS Kab. Tana Tidung] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung. 2019. Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2018.
- [BPS Kab. Tana Tidung] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung. 2020. Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2019.
- [BPS Kab. Tana Tidung] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung. 2021. Tana Tidung Dalam Angka Tahun 2020.
- Clarvis dan Allan. 2013. Adaptive Capacity in a Chilean Context: A questionable model for latin America. *Environmental Science*, Vol xxx page 13
- Contanza. R. 1998. Special Section:Forum On Valuation Of Ecosystem Services, The Value of Ecosystem Services:Putting the issues in prespective. *Ecological Economics*, 1998 (25) 67-72.



- Daze. 2009. Kerentanan terhadap Iklim dan Analisa Kapasitas. Indonesia : CARE International Indonesia.
- Djajadiningrat, S.T., Hendriani, Y., dan Famiola, M. 2011. Ekonomi Hijau/Green Economy. Rekayasa Sains. Bandung.
- [DLHP KTT] Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. 2017. Pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung.
- [DLH Kab. Tana Tidung] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung. 2021a. Laporan Timbulan Sampah tahun 2017-2020.
- [DLH Kab. Tana Tidung] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung. 2021b. Laporan Pemantauan Kualitas Udara Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020.
- [DLH Kab. Tana Tidung] Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. 2021c. Laporan Pemantauan Kualitas Air Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020.
- [DLH Kab. Tana Tidung] Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. 2021d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020.
- Dolan, A.H., dan Walker, I.J., 2004. "Understanding vulnerability of coastal communities to climate change related risks". Journal of Coastal Research. Vol 39.
- [DPUPRPKP] Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2021. Laporan Hasil Konsultasi Publik KLHS RTRW Labupaten Tana Tidung.
- Fisher, B., Tuner, R.K., Morling, Paul. Defining and Classifying Ecosystem Services for Decision Making. Ecological Economics, 2009 (68-3) 643-653.
- Groot, R.S., Wilson. M.A., Boumans, M.J. 2002. A Typology for the classification, description and valuation of ecosystem function, goods, and services. Ecological Economic, 2002 (41) 393- 408.
- [Kemen LHK RI] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 2018. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia Tahun 2017. Kemen LKH RI. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.



- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Woodruff, S.C., Bendor, T.K. 2016. Ecosystem Services in Urban Planning : Comparative Paradigms and Guidelines for High Quality Plans. *Landscape and Urban Planning*, 2016 (152) 90-100.